
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>



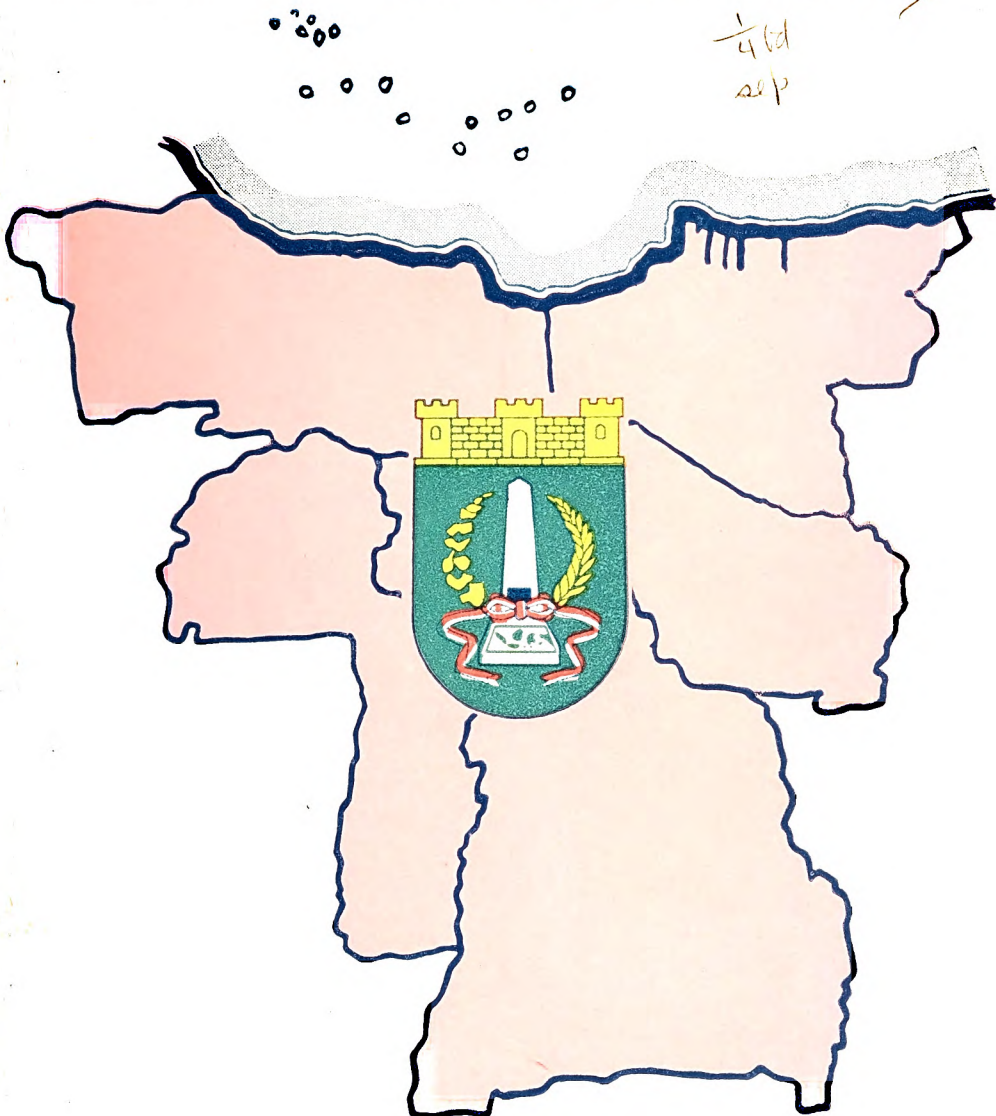
DOCUMENTS



[Djakarta]

SEDJARAH PEMERINTAHAN

KOTA DJAKARTA



DITERBITKAN OLEH :

KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

Digitized by Google

Dj 135470-

Sedjarah
Demerintahan Kota Djakarta



Diterbitkan oleh :
Kotapradja Djakarta Raja

- 1958 -

DOCUMENTS

KATA PENGANTAR
DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA

Karena kesibukan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah Kotapradja Djakarta Raja dengan beribu-ribu masalahnja besar ketjil jang dihadapkan kepada Pemerintah Daerah atjapkali dengan tidak dapat menunggu-nunggu pemetjahannja terlalu lama, sering-sering pemetjahan persoalan tidak dapat disandarkan kepada rangkaian peristiwa-peristiwa sedjarah.

Djika benar utjapan jang menjatakan bahwa keadaan masjarakat sekarang adalah hasil kedjadian masa jang lampau, dan keadaan sekarang ini menentukan keadaan untuk masa jang akan datang, maka tiap-tiap keputusan jang tidak bersandar kepada garis jang ditentukan oleh sedjarah, mengandung bahaya: tidak mendapat dukungan dari masjarakat.

Karena itulah timbul pikiran untuk menerbitkan buku sedjarah pemerintahan Kota Djakarta, jang terutama dimaksudkan memberi perasaan setia kawan kepada para petugas dalam pemerintahan Kotapradja Djakarta Raja, tidak peduli apakah petugas itu seorang anggota D.P.R.D., anggota D.P.D. atau pegawai jang langsung melaksanakan pemerintahan Kotapradja Djakarta Raja.

Pekerdjaan menjusun sedjarah selajang pandang pemerintahan Kotapradja Djakarta Raja, kami tugaskan kepada pegawai Bagian Perundang-undangan dan Urusan Hukum saudara Drs. The Liang Gie. Dan penerbitan ini kami maksudkan sebagai peringatan hari lahir Kotapradja Djakarta genap 431 tahun pada tanggal 22 Djuni 1958.

Pada kesempatan ini kami ingin menjatakan penghargaan atas hasil pekerdjaan pegawai muda tersebut, jang disamping tugasnja sehari-hari dalam waktu jang pendek dapat menjusun buku sedjarah singkat pemerintahan Kotapradja Djakarta Raja ini.

Harapan kami adalah agar buku ini jang menurut anggapan kami djuga ada manfaatnja bagi chalajak ramai, mendapat perhatian jang sewadjarnja.

Dewan Pemerintah Daerah
Kotapradja Djakarta Raja
Ketua.

S U D I R O.

Djakarta Mei 1958.

PENDAHULUAN DARI PENJUSUN

History is the witness of times, the torch of truth, the life of memory, the teacher of life, the messenger of antiquity.

(Sedjarah adalah saksi dari sang waktu, obor dari pada kebenaran, njawa dari pada ingatan, guru dari pada penghidupan dan pembawa warta dari masa jang lampau).

— Cicero (106 - 43 s.M.), *De Oratore* — *)

Walaupun bukan seorang historikus ataupun seorang jang semata-mata menaruh minat terhadap sedjarah, penjusun telah mentjoba memberanikan diri untuk menulis suatu uraian sedjarah mengenai kota Djakarta. Jang diuraikan itupun tidaklah segala hal jang berkenaan dengan kota tersebut, melainkan hanjalah tentang pemerintahannja, jaitu pemerintahan dalam arti penjelenggaraan pengaturan dan pengurusan atas wilajah kota tersebut oleh alat-alat perlengkapan dari kota itu djuga (istilah sekarang: „pemerintahan daerah”).

Dalam menjusun suatu uraian sedjarah, kiranja perlu sekali diperhatikan beberapa hal jang penting, jaitu uraian tersebut hendaknja disatu pihak tidaklah semata-mata merupakan inventarisasi dari pada hari, bulan dan tahun jang sangat kersang sungguhpun bagaimana tepatnja datum-datum jang dibariskan itu, dan pada pihak lain hendaknja tidak merupakan tjeritera dongengan jang tiada mengandung kebenaran sungguhpun bagaimana menariknja uraian jang dihitamkan diatas putih itu. Selandjutnja perlu pula mendapat pertimbangan adanja 2 kategori sidang pembatja: jang satu ialah golongan *man in the street* jang kurang dapat serta segan mengikuti uraian jang dalam-dalam dan mendetail, lengkap dengan kutipan-kutipannja dari sana-sini untuk membikin tebal uraian tersebut dan benar-benar bertjorak dokumenter, jang lain ialah mereka jang tergolong kaum *tjerdik-tjendekia* jang tidak akan puas dengan uraian jang dangkal tak lengkap dan tanpa menjebutkan sumber-sumber bahannja dari mana uraian tersebut disusun.

Demikianlah maka uraian mengenai sedjarah pemerintahan kota Djakarta ini disusun dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas. Penjusun selalu berusaha agar data dan fakta berdasarkan sumber-sumber jang otentik terangkakan dengan selanjartannja, serta segala sesuatu jang penting mengenai djalannja pemerintahan daerah itu tersuratkan dengan setjukupnja. Di bawah tiap-tiap halaman selalu dibubuhkan sumber-sumbernja atau uraian

*) Dikutip dari buku Osman Raliby: „Documenta Historica”, djilid I katja 9. Penerbit: Bulan-Bintang, Djakarta, 1953.

tambahan untuk memperlengkap. Bagi pembatja jang termasuk kategori pertama dapat kiranja berdjalan dari pagina kepagina tanpa menghiraukan angka-angka dan tjatatan-tjatatan itu dengan tidak akan kehilangan intisarinja apa jang diuraikan, sedang bagi pembatja kategori kedua sumber-sumber dan tjatatan-tjatatan itu dapat kiranja mendjadi referensi untuk membanding-bandingkannja atau untuk studi lebih landjut sehingga -mudah-mudahan- kelak dapat terlahir dari tangan seseorang lain suatu uraian tentang sedjarah pemerintahan kota Djakarta jang lebih lengkap dan memuat segala fakta dan analisa sampai soal jang seketjil-ketjilnja pun. Penjusun menginsafi sepenuhnya bahwa uraian jang disadjikan sekarang ini masih djauh untuk dapat dikatakan sebuah karja jang lengkap, karena apalah artinja penelaahan selama hanja beberapa bulan sadja (itupun tidak seantero hari penuh tenaga dan perhatian ditjurahan kesitu) untuk penjusunan suatu sedjarah jang mendjangkau waktu tidak hanja tahunan atau puluhan tahun, melainkan telah berbilang abad. Sekiranja ingin betul-betul disusun karja pena jang besar mengenai sedjarah ibukota kita, kiranja untuk meneliti dengan seksama semua bahan-bahan jang ada sadja sudah memakan waktu tahunan, ja bahkan mungkin puluhan tahun.

Walaupun dalam penjusunan sedjarah ini selalu diambilkan dari sumber-sumber jang dapat dipertjaja (mudah-mudahan), namun sukar kiranja mengatakan bahwa uraian ini benar-benar objektip, karena *like painting, historical writing is an art, and all art has in it something of the subjective* (sebagaimana halnja dengan melukis, penulisan sedjarah adalah suatu seni, dan segala kesenian mengandung sesuatu jang subjektip). **)

Memang didalam uraian penjusun ini tentu tak luput adanja unsur jang subjektip, misalnja untuk memilih dan menghimpun bahan-bahannja jang terserak dipelbagai perpustakaan dan arsip, ini bergantung kepada pendapat penjusun pribadi, kemudian setelah mulai menuliskannja, bagaimana sistematik uraiannja, pembagian fase-fase perdjalanan sedjarah jang diuraikan itu, peristiwa-peristiwa mana jang didahulukan menguraikannja, hal-hal jang dititikberatkan, jang diliwati sadja dan sebagainya, kesemua itu djuga bergantung kepada kesukaan dan pendirian penjusun. Oleh karena itu walaupun selalu disebutkan sumber-sumbernja, uraian ini adalah mendjadi tanggung-djawab penjusun sepenuhnya, segala kechilafan dan ketidaktepatan haruslah dibebankan kepada penjusun semata-mata.

Untuk menghindari subjektivitet jang berlebih-lebihan dan tidak pada tempatnja, penjusun selalu berpegangan kepada suatu pedoman, jaitu berhubung uraian ini mengenai perdjalanan suatu

**) Drs. F.J.E. Tan: „The early foreign maritime trade of China from the former Han to the Ming-Dynasty (206 B.C. - 1644 A.D.), sebuah karangan didalam Madjalah „Ekonomi dan Keuangan Indonesia”, tahun ke-9 no. 6 (Djuni 1956), katja 348.

daerah yang mempunyai hak otonomi jaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnja (istilah sekarang: „daerah swatantra”), maka uraian ini terutama dititikberatkan kepada pertumbuhan otonomi itu serta kekuasaan, tugas dan kewajiban dari pada aparatur-aparatur yang mengemudikan pemerintahan daerah tersebut, sehingga mudah-mudahan uraian ini dapat benar-benar menggambarkan pemerintahan daerah kota Djakarta dari masa yang lampau, dan dengan demikian dapat pula membuat kita lebih mengerti keadaan yang sekarang serta memberikan petunjuk bagi perjalanannya dalam masa yang akan datang.

Memang pemerintahan daerah kota Djakarta yang sekarang tidak akan dapat dimengerti kalau tidak ditengok sedjarahnja yang lampau. Orang tidak akan mengerti mengapa Kotapradja Djakarta Raja merupakan daerah swatantra tingkat ke-I, padahal kotapradja-kotapradja lainnja diseluruh Indonesia merupakan daerah tingkat II; mengapa daerah swatantra itu mempunyai aparatur pegawai petugas kepolisian kotapradja (onbezoldigde politie-ambtenaren) ; mengapa hingga tahun 1957 djabatannya ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketua Dewan Pemerintah Daerahnja tidak dipegang oleh 2 pedjabat yang berbeda sebagaimana halnja di daerah-daerah lain, melainkan keduanya dijabat oleh satu persoon yang sama ; dan masih banyak „mengapa” lainnja yang untuk dapat menerangkan kesemuanya itu, orang harus melihat sedjarahnja. Dengan memiliki pengetahuan dari pada masa yang lampau itu, kita dapat mempunyai pengertian yang lebih mendalam tentang keadaan yang sekarang; dan dengan pengetahuan dan pengertian tersebut kita akan dapat menempuh masa yang akan datang dengan jalan dan tjara yang setepat-tepatnja.

Demikianlah sekedar uraian pendahuluan sebagai pertanggung-jawaban dari penjunsun tentang bentuk dan isi karangan ini. Dan ach:rulkalam, apabila uraian sedjarah ini dapat menjalankan tugas-tugas sebagaimana pendirian Cicero seperti dikutip diatas, maka utjapan terima kasih harus disampaikan kepada para penganrang/penjunsun dari buku-buku/bahan-bahan yang merupakan sumber dari uraian ini, demikian pula kepada oknum-oknum yang tidak dikenal, yang dengan radjinnja menghimpun dan mendjilid warkat-warkat laporan, tjatatan atau peraturan dari masa puluhan tahun yang lampau, sehingga bahan-bahan tersebut barang satu cksemplaar masih djua kita dapati pada dewasa ini.

Djakarta, Mei 1958.

THE LIANG GIE

B A B I

PEMBUKAAN

Perkembangan ketatanegaraan yang terjdjadi di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan pemerintahan Kota Djakarta. Pada umumnja dapatlah dikatakan bahwa fase-fase pertumbuhan pemerintahan Kota Djakarta tersebut adalah sedjalan dengan perkembangan ketatanegaraan yang berlangsung itu.

Sedjauh bahan-bahan sedjarah hingga dewasa ini dapat memberikan keterangan-keterangan, pemerintahan Kota Djakarta dimulai dengan **Stad Batavia**.

Pada tahun-tahun permulaan abad ke-17, mulailah persekutuan dagang Belanda yang bernama *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* mendjalankan usahanja di Indonesia. Tetapi disampingnja berdagang, persekutuan tersebut djuga menduduki dan merampas wilajah-wilajah dikepulauan Indonesia.

Demikianlah dalam tahun 1619, *Compagnie Belanda* itu membangun **Stad Batavia** (Kota Djakarta yang sekarang) untuk mendjadi tempat pusat kedudukannja. Dalam tahun berikuntnja terbentuklah alat-alat perlengkapan kota yang mendjalankan pemerintahan **Stad Batavia** itu disampingnja alat-alat pemerintahan pusat *Compagnie* yang mengemudikan pemerintahan atas seluruh wilajah kekuasaannja dikepulauan Indonesia.

Pemerintahan **Stad Batavia** berlangsung terus selama Masa Pemerintahan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, kemudian masa-masa peralihan dan masa pendudukan Inggris hingga tahun 1816.

Sedjak tahun 1816 mulailah Djaman Pemerintahan *Nederlandsch-Indië* (Hindia Belanda) di Indonesia. Dalam djaman ini pemerintahan Kota Djakarta baru dimulai lagi sedjak didjalankannja peraturan perundangan desentralisasi dalam tahun 1903 yang membuka kemungkinan pembentukan daerah-daerah yang mempunyai keuangan sendiri terlepas dari keuangan Pemerintah Hindia Belanda, untuk membiajai keperluan-keperluan dan penje-lenggaraan urusan-urusan yang dilepaskan dari tanggungan Pemerintah Hindia Belanda itu.

Demikianlah pada tanggal 1 April 1905 Kota Djakarta dibentuk mendjadi **Gemeente Batavia** yang mempunyai alat perlengkapan kota untuk mendjalankan pemerintahan daerahnja menurut peraturan

perundangan desentralisasi jang mulai didjalankan di Indonesia itu.

Dalam tahun 1922 oleh Pemerintah Belanda dilakukan pembaharuan pemerintahan dan perubahan politik desentralisasi di Indonesia. Sesuai dengan itu maka pada tanggal 1 Oktober 1926 Gemeente Batavia diubah mendjadi **Stadsgemeente Batavia** jang mempunyai alat perlengkapan dan keuangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangga kotanja. Pemerintahan Kota Djakarta menurut peraturan perundangan desentralisasi jang baru ini berlangsung sampai djatuhnja Pemerintah Hindia Belanda dalam bulan Maret 1942 karena penjerbuan balatentera Djepang ke Indonesia.

Dengan menjerahnja Pemerintah Hindia Belanda, mulailah djaman pendudukan Djepang. Pemerintah Pendudukan Balatentera Djepang mengeluarkan djuga peraturan perundangan desentralisasi menurut sistimnja sendiri. Dan sedjak tanggal 8 Agustus 1942 Kota Djakarta ditundjuk sebagai sebuah **Tokubetu Si** (stadsgemeente luar biasa). Pemerintahan Kota Djakarta menurut sistim otonomi Djepang ini berachir pula dengan berachirnja pendudukan balatentera Djepang di Indonesia dalam bulan Agustus 1945.

Dengan berdirinja Negara Nasional Republik Indonesia, maka sedjarah pemerintahan Kota Djakarta menempuh lagi fase jang baru, jaitu kini merupakan **Pemerintahan Nasional Kota Djakarta**. Tetapi pemerintahan daerah jang bertjorak nasional ini berlangsung tidak sampai 2 tahun lamanja.

Dengan dilakukannja agresi militer jang pertama dalam bulan Djuli 1947 oleh pihak Belanda, jang mengakibatkan didudukinja beberapa bagian dari wilayah Republik Indonesia, termasuk pula Kota Djakarta, maka Pemerintahan Nasional Kota Djakarta tidak dapat berdjalan lagi.

Agresi militer itu diikuti dengan tindakan-tindakan dalam lapangan pemerintahan untuk memperkokoh kedudukan Belanda di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan jang telah berlangsung, maka kemudian pihak Belanda membentuk Pemerintah Pre-Federal (Voorloopige Federale Regering). Dalam masa pemerintahan Pre-Federal ini Stadsgemeente Batavia dari Djaman Pemerintah Hindia Belanda dihidupkan kembali, dengan demikian maka pemerintahan Kota Djakarta berlangsung lagi menurut peraturan perundangan desentralisasi dari sebelum Perang Dunia II ditambah dengan peraturan-peraturan baru lainnja dari pihak Belanda jang bersifat darurat.

Perkembangan dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia berdjalan terus. Mendjelang achir tahun 1949 terdjadilah pemulihan kedaulatan dari pihak Belanda kepada bangsa Indonesia. Dengan berdirinja Negara Republik Indonesia Serikat dalam bulan Desember 1949 jang beribukota dikota Djakarta, maka kedudukan Stadsgemeente Batavia mengalami penindjauan kembali. Pemerintahan Kota Djakarta akan diatur baru oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia Serikat sesuai dengan kedudukan dan pertumbuhan kota tersebut. Dan mulai tanggal 31 Maret 1950 pemerintahan Kota Djakarta itu dinamakan **Kotapradja Djakarta Raja**, dengan mempunyai lingkungan wilayah jang lebih luas dari pada semula serta pula mempunyai status jang tersendiri dalam hubungannya dengan struktur negara federal itu.

Hapusnja Negara Republik Indonesia Serikat jang berganti tjorak mendjadi Negara Republik Indonesia Kesatuan dalam bulan Agustus 1950 tidak membawa perubahan dalam kedudukan Kota-pradja Djakarta Raja. Pemerintahan Kota Djakarta tetap didjalkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat itu hingga achir tahun 1956.

Baru dengan mulai berlakunja Undang-undang tahun 1957 no. 1 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sedjak tanggal 18 Djanuari 1957, sedjarah perkembangan Kotapradja Djakarta Raja mengindjak suatu fase jang baru. Sedjak tanggal tersebut berlangsunglah pemerintahan Kota Djakarta menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan desentralisasi Indonesia jang baru dan berlaku seragam diseluruh Indonesia.

Demikianlah dengan singkat fase-fase pertumbuhan pemerintahan Kota Djakarta sedjak permulaannya sampai dengan tahun 1957.

B A B II

SEDJARAH PEMBENTUKAN KOTA DJAKARTA

Sedjarah meriwajatkan bahwa pada permulaan abad ke-14, di Djawa Barat berdirilah suatu keradjaan baru jang bernama PADJADJARAN. Ibukota keradjaan tersebut, jaitu PAKUAN, terletak dipedalaman, tidak djauh dari Kota Bogor jang sekarang.¹⁾

Menurut sebuah batu bersurat, diduga bertahun 1255 Sjaka (sama dengan 1333 tahun Masehi), jang diketemukan orang di Batutulis (beberapa km disebelah Selatan dari Kota Bogor), disebutkan bahwa Pakuan didirikan oleh **SJRI BADUGA MAHA-RADJA**, radja Padjadjaran.²⁾

Ditepi pantai Utara, Negara Padjadjaran mempunyai beberapa buah bandar; salah satu diantaranya bernama **SUNDA KALAPA** jang terletak pada 106°48' Budjur Timur dan 6°8' Lintang Selatan, dimuara Sungai Tjiliwung (sekarang merupakan Pelabuhan Pasar Ikan Djakarta).

Daerah Sunda Kalapa merupakan tempat jang banjak rawanja, dan disekelilingnja hutan belukar lengkap dengan binatang-binatang buasnja sebagaimana digambarkan setjara poetis sebagai berikut :

TJATATAN :

- 1) H.J. van den Berg & Dr. H. Kroeskamp : „Grote Figuren op het Wereld-toneel”, djilid I, katja 318 dan 335.
Penerbit : J.B. Wolters Groningen, Djakarta 1950.
Atau terdjemahannja dalam bahasa Indonesia oleh I.P. Simandjoentak dengan kepala „Dari Panggung Peristiwa Sedjarah Dunia”, djilid I, katja 367 dan 387.
Penerbit jang sama, tjetakan ke-2, 1952.
- 2) Sanusi Pané : „Indonesia sepanjang masa”, katja 87—88.
Penerbit : Balai Pustaka Djakarta, 1952.
Tjatan tambahan : hal ichwal dynasti Keradjaan Padjadjaran itu beserta dynasti jang mendahuluinja, diuraikan dengan lebih lengkap oleh penulis jang sama dalam bukunja :
„Sedjarah Indonesia”, djilid I, katja 107—108.
Penerbit : Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. & K. Djakarta.
Tjetakan ke-6, 1955.

Thick with wet woods, and many a beast therein,
And none or few to scare or chase the beast.³⁾

Binatang-binatang buas jang mendjadi penghuni hutan lebat didaerah Sunda Kalapa itu, antara lain ialah matjan, banteng, badak dan babi hutan.

Dalam tahun 1522 datanglah di Sunda Kalapa perutusan Gubernur Portugis dari Malaka jang bermaksud mengadakan perdjandjian persahabatan dengan Keradjaan Padjadjaran. Lalu dibuatlah perdjandjian tersebut, dengan mana orang Portugis diperkenankan membangun sebuah benteng di Sunda Kalapa, selain itu pihak Portugis setiap tahun akan menerima hadiah 1000 karung lada jang banjak dihasilkan oleh Negara Padjadjaran, serta pula diperkenankan membeli lada sebanjak-banjaknja di Padjadjaran dengan penukaran barang-barang jang perlu bagi Keradjaan tersebut. Negara Padjadjaran mau mengadakan perdjandjian persahabatan itu, karena mengharapkan bantuan dari orang Portugis untuk menghadapi antjaman bahaya dari keradjaan Islam disebelah Timur jang sedang berusaha meluaskan pengaruhnja, jaitu Keradjaan DEMAK.

Sebagai pertanda dan peringatan dari perdjandjian tersebut, pihak Portugis membuat *Padrao* jaitu sebuah tugu batu bersurat, jang lalu ditanam pada tempat jang telah dipilih untuk benteng jang akan didirikannja itu.⁴⁾

Menurut sebuah pernyataan tertulis sebagai suatu pertanggung-djawaban terhadap Gubernur Portugis di Malaka, jang dibuat oleh perutusan jang datang di Sunda Kalapa itu, disebutkan bahwa

3) Dr. F. de Haan : „Priangan“, de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Djilid I, katja 2.

Penerbit : Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia 1910.

Tjatakan tambahan : lukisan jang lengkap berupa komentar² mengenai keadaan rawa², hutan belukar dan binatang² buasnja didaerah bandar itu diuraikan dalam buku jang sama, djilid III (1912), katja 5—7.

4) Padrao itu dalam tahun 1918 telah diketemukan di Prinsenstraat Batavia, kini disimpan di Musium Lembaga Kebudajaan Indonesia di Djakarta. Gambar foto dari tugu batu itu pada umumnja terdapat dalam pelbagai buku peladjaran tentang Sedjarah Indonesia. Dalam buku Berg-Kroeskamp (tjatakan 1 diatas) pada katja 336 (buku Indonesianja katja 389).

perdjandjian persahabatan antara orang Portugis dengan Keradjaan Padjadjaran itu berlangsung pada tanggal 21 Agustus 1522.⁵⁾

Kekuatiran radja Padjadjaran akan antjaman bahaya dari keradjaan Islam disebelah Timur itu kemudian ternyata benar. Dari Demak datanglah seorang guru agama bernama **FALATEHAN**⁶⁾ jang mengembangkan agama Islam ke Djawa Barat. Falatehan adalah seorang kelahiran PASAI (sebuah keradjaan di Sumatera Utara). Setelah Pasai direbut oleh orang Portugis dalam tahun 1521, ia lalu meninggalkan daerahnja dan pergi ke Mekkah untuk memperdalam pengetahuannja tentang agama Islam disana selama 2 atau 3 tahun. Setelah kembali ke Indonesia, ia lalu menetap di Demak dan menikah dengan saudara perempuan dari radja Demak Pangeran **TRENGGANA**. Selandjutnja Falatehan lalu menjebarkan adjaran-adjaran Islam ke Djawa Barat. Dan kemudian dengan bantuan tentera dari Demak, ia merebut bandar Banten dan Sunda Kalapa dari tangan Padjadjaran.

Pada waktu orang-orang Portugis datang lagi ke Sunda Kalapa untuk membuat benteng jang telah diizinkan oleh Padjadjaran sesuai dengan perdjandjian jang telah dibuat, ternyata mereka telah terlambat, karena bandar itu sudah dikuasai oleh kaum Muslimin. Dan Falatehan dengan tenteranja menjerang pula orang-orang Portugis jang datang itu dan mengusirnja sehingga mereka kembali ke Malaka.⁷⁾

5) Surat pernyataan tersebut kini disimpan di Lissabon (Portugal). Foto copy dari sebagian surat itu dapat dilihat dalam buku „Oud Batavia” (disusun oleh Dr. F. de Haan) jang diterbitkan oleh Bat. Gen. van Kunsten en Wetenschappen berkenaan dengan peringatan 300 tahun berdirinja Kota Batavia pada 1919, djilid Platen Album (tjetakan ke-1, 1923), foto no. J1. Salinan selengkapnja dari surat pernyataan itu berikut terdjemahannja dalam bahasa Belanda terdapat pula dalam buku jang sama, jaitu Dokumen no. J1 a dan no. J1 b.

6) Nama ini adalah menurut edjaan orang Portugis. Dalam pelbagai buku Sedjarah Indonesia jang ditulis oleh pengarang² Indonesia diedja **Fatahillah/Fath-illah**.

7) Uraian jang djelas mengenai perdjandjian persahabatan Portugis dengan Padjadjaran sampai terusirnja orang Portugis dari Sunda Kalapa itu, terdapat lengkap berikut sumber²nja dalam buku Hoessein Djajadiningrat : „Critische Beschouwing van de Sadjarah Bantên”, bijdrage ter kenschetsing van de Javaansche geschiedschrijving (Academische proefschrift tanggal 3 Mei 1913 di Universiteit Leiden), katja 73 — 75. Penerbit : Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem 1913.

Oleh Falatehan nama bandar Sunda Kalapa lalu diganti dengan DJAJAKERTA, disingkatkan mendjadi DJAKATRA jang berarti *kemenangan achir*, nama lainnja ialah SURAKERTA jang berarti *keberanian* atau *pahlawan*. Nama baru jang diberikan itu njata ada hubungannja dengan peperangan melawan dan mengusir orang Portugis dari Sunda Kalapa.⁸⁾

Dengan direbutnja beberapa daerah di Djawa Barat oleh kaum Muslimin itu, kemudian berdirilah KERADJAAN BANTEN jang diradjai pertama oleh putera Falatehan jang bernama HASANUDIN. Djajakerta merupakan pula salah satu bandar dari negara tersebut.

Falatehan sendiri kemudian lalu menetap di Tjirebon dan meninggal dunia disana pada tahun 1570; djenasahnja dimakamkan disebuah bukit jang lebat dengan pohon djati, oleh karena itu ia kemudian lebih terkenal dengan sebutan **SUNAN GUNUNG DJATI**. Falatehan termasuk sebagai salah seorang dari *Wali Sembilan* jang terkenal dalam memasukkan agama Islam ke Djawa. Makamnja didekat Tjirebon hingga kini dianggap keramat dan banjak didatangi orang berziarah.

Bilakah nama Sunda Kalapa diganti dengan Djajakerta ?

Mengenai hari penggantian itu hingga kini terdapat 2 pendapat jang berbeda satu sama lain, jaitu pendapat dari Prof. Mr. Dr. Soekanto dan dari Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat.

Menurut Dr. Soekanto⁹⁾, Falatehan merebut Sunda Kalapa pada achir bulan Pebruari 1527. Beberapa hari kemudian datanglah armada Portugis dibawah pimpinan **FRANCISCO DE SA** jang bermaksud membangun benteng di Sunda Kalapa. Armada ini digempur oleh Falatehan kira-kira pada pertengahan bulan Maret tahun tersebut. Dengan tertjapainja kemenangan itu, maka setelah mempertimbangkannja dengan masak-masak dan berdasarkan penanggalan *Pranātāmāṅsā* (jaitu penanggalan jang hidup

⁸⁾ Buku Berg-Kroeskamp katja 337 (Indonesianja katja 389).

Tjataan tambahan : penggantian nama itu disinggung juga oleh Hoesein Djajadiningrat dalam buku disertasinja tersebut diatas, katja 76 note. Disebutkan bahwa oleh Falatehan tempat jang didudukinja itu diberi nama (baru) **Djakakarta** dan **Soerakarta** atau **Soelakarta** (Djakarta = volbrachte zege, Soerakarta = geslaagde durf of held).

⁹⁾ Diuraikan dalam bukunja „Dari Djakarta ke Djajakarta”, katja 55 dst. (Ditulis pada achir tahun 1954).
Penerbit : Soeroengan, Djakarta.

dikalangan rakjat dan ada hubungannja dengan pertanian), Falatehan mungkin sekali lalu memilih tanggal satu mangsa (bulan) kesatu dari penanggalan tersebut sebagai hari untuk mengganti nama Sunda Kalapa dengan nama Djajakarta; tanggal tersebut menurut penanggalan Masehi djatuh pada tanggal **22 Djumi 1527**. Djajakarta berarti kemenangan jang penghabisan, jang sempurna, jang sepenuhnya. Bagi Falatehan kemenangan jang penghabisan/jang sepenuhnya adalah kemenangan atas orang-orang Portugis, musuh jang sangat dibentji oleh kaum Muslimin pada waktu itu. Kemenangan terhadap pihak Padjadjaran pada waktu merebut Sunda Kalapa sadja belumlah berarti kemenangan jang penghabisan.

Pendapat Prof. Soekanto tersebut diatas, beberapa waktu kemudian mendapat sanggahan dari Prof. Hoesein Djajadiningrat.¹⁰⁾

Menurut Prof. Hoesein¹¹⁾, berdasarkan sumber-sumber dari pengarang-pengarang sedjarah bangsa Eropah, armada Portugis dibawah pimpinan Francisco de Sa jang pergi ke Sunda Kalapa berangkat dari Malaka pada tanggal 23 Oktober 1526. Dalam bulan Desember (1526) pada waktu perajaan hari Natal di Cochij (India), diperoleh kabar dari Malaka bahwa pemimpin armada itu telah kembali, dan pada penghabisan bulan Desember tersebut pembesar itu bertolak ke India. Berdasarkan hal itu maka djatuhnja Sunda Kalapa menurut pendapat Prof. Hoesein terdjadi dalam bulan Desember 1526. Djika djatuhnja Sunda Kalapa ketangan Falatehan terdjadi pada hari jang dekat *hari raja* atau *hari peringatan Islam*, maka dapat diduga bahwa pada hari raja Islam itu Falatehan merajakan kemenangannja dengan gembira dan perasaan bersjukur. Hari raja Islam jang paling dekat penghabisan bulan Desember 1526 ialah hari Maulud tanggal 12 Rabiulawal tahun 933 Hidjrah, ini djatuh pada hari Senin tanggal **17 Desember 1526**. Djadi mungkin sekali pada hari raja itu, dikala Falatehan merenungkan kemenangannja, ia teringat kepada kemenangan Nabi **Mohammad** jang terpenting jaitu merebut Mekkah,

¹⁰⁾ Pertukaran pikiran mengenai tanggal penggantian nama Djajakarta antara kedua sardjana itu termuat dalam Madjalah „Bahasa dan Budaja” jang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Budaja Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Djakarta, tahun V no. 1 (Oktober 1956) katja 3—11 dan tahun V no. 3 (Pebruari 1957) katja 3—11.

¹¹⁾ Diuraikan dalam karangannja „Hari Lahirnja Djajakarta”, termuat dalam Madjalah „Bahasa dan Budaja”, tahun V no. 1, katja 3—11.

dan teringat pula kepada ayat pertama dari *Sûrat al-Fatîh* jang berbunyi „Innâ fatahnâ laka fathân mubînân” (sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu kemenangan jang tegas). Oleh karena itu Falatehan lalu mendapat ilham untuk menamai dirinja **FATHAN** (nama ini kemudian karena salah dengar dan salah tulis didjadikan „Falatehan” oleh orang Portugis), sedang nama Sunda Kalapa lalu diganti dengan terdjemahannja perkataan „*Fathân Mubînân*” jaitu Djajakarta (nama Surakarta atau Sulakarta untuk Djajakarta, kemudian ternyata tidak terus dipergunakan).

Demikianlah dengan singkat 2 pendapat mengenai hari digantinja nama Sunda Kalapa dengan Djajakarta jang kemudian disingkat mendjadi Djakatra (Orang Belanda mengedjanja : **Jaccatra**).

Mana jang lebih benar diantara kedua pendapat itu, hingga kini belum ada ketentuannja, karena kedua-duanja pun hanja merupakan dugaan jang belum dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain jang pasti.

Pada tanggal 13 Nopember 1596 tibalah untuk pertama kalinja dibandar Djajakarta 4 buah kapal Belanda¹²⁾. Armada itu jang bermaksud langsung membeli rempah-rempah dari Indonesia, seperti meritja, tjengkeh, pala dan lain-lain untuk kemudian diperdagangkan di Eropah, dipimpin oleh **CORNELIS HOUTMAN** untuk urusan dagangnja dan **PIETER DE KEYZER** untuk navigasinja¹³⁾. Setelah singgah selama beberapa hari lamanja, mereka pun meneruskan perdjalanannja.

Pada waktu itu Djajakarta sebagai suatu bandar perdagangan belumlah banjak artinja, karena untuk keradjaan Banten itu perdagangannja berpusat dibandar Banten jang terletak lebih kesebelah Barat. Sebagai tempat tinggal, Djajakarta djuga tidak menarik karena rawa-rawanja, lebih-lebih dimusim hudjan. Djajakarta lebih merupakan suatu pelabuhan tempat singgah untuk mengambil air, membeli arak, memuat bahan-bahan makanan dan keperluan-keperluan lainnja selama dalam perdjalanannja.

¹²⁾ Dr. F. de Haan : „Oud Batavia”, katja 3.
Penerbit : A.C. Nix & Co, Bandung.
Tjetakan ke-2, 1935.

¹³⁾ Dr. H.J. de Graaf : „Geschiedenis van Indonesië”, katja 139.
Penerbit : N.V. Uitgeverij W.V. Hoeve, 's-Gravenhage/Bandung. 1949.

Dengan berhasilnja pelajaran jang pertama itu mentjari dan menempuh perdjalanana dari Negeri Belanda ke Indonesia, maka pada waktu-waktu berikutnya berlomba-lombalah perseroan-perseroan dagang Belanda berlajar ke Indonesia untuk mentjari keuntungan. Persaingan jang hebat terdjadi diantara pedagang-pedagang itu sehingga banjak jang menderita kerugian. Achirnja pada tahun 1602, atas usaha **JOHAN VAN OLDENBARNEVELDT**, pedagang-pedagang Belanda bersatu dibawah suatu persekutuan jang dinamakan **VEREENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE** (disingkat **V.O.C.**). Pada tanggal 20 Maret 1602 persekutuan dagang tersebut menerima oktroi (izin) dari Staten Generaal (Sidang Perwakilan Rakjat Belanda) dalam mana persekutuan itu diberi hak-hak sebagai saudagar dan sebagai badan pemerintah. Hak-hak terpenting jang diberikan itu ialah :

1. hak monopoli untuk berdagang didaerah Hindia Timur jaitu daerah antara sebelah Timur Tandjung Harapan di Afrika dan Selat Magalhaens di Amerika Selatan (djadi daerah-daerah di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia);
2. hak untuk memelihara angkatan perang, mendirikan benteng-benteng, melakukan pendudukan atas suatu wilayah dan mengadakan traktat atau persetudjuan dengan radja-radja dari daerah-daerah jang didatanginja;
3. hak untuk mengangkat pegawai-pegawai sipil maupun militer;
4. hak untuk memberi pengadilan;
5. hak untuk mentjetak dan mengedarkan uang.

Sebaliknja V.O.C. mempunjai pula kewadajiban terhadap Pemerintah Belanda, jaitu :

1. putjuk pimpinan persekutuan itu bertanggung-djawab kepada Staten Generaal;
2. pada waktu perang wadajib membantu Pemerintah Belanda dengan uang dan angkatan perangnja.¹⁴⁾

Putjuk pimpinan V.O.C. di Nederland dipegang oleh sebuah dewan jang karena terdiri dari 17 anggota dinamakan *De Heeren Zeventien*. Dan sebagai pemimpin umum pemerintahan dan perdagangan V.O.C. dikepulauan Indonesia, dibentuk djabatan

¹⁴⁾ Drs. Sutjipto Wirjosuparto : „Dari Lima Zaman Pendjadjahan menuju Zaman Kemerdekaan”, katja 24.
Penerbit : Indira Djakarta, 1956.

Gouverneur Generaal, jang didampingi oleh sebuah dewan jang disebut *Raad van Indië*.¹⁵⁾

Mulailah Persekutuan Dagang V.O.C. mendjalankan usahanja di Indonesia. Pada mulanja persekutuan tersebut belum mempunyai tempat kedudukan jang tetap di Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1603, dari penguasa di Banten V.O.C. menerima sebuah pekarangan dengan gedung batu untuk dijadikan kantornja (loge, oleh penduduk dibatja lodji). Sebelum itu di Atjeh V.O.C. telah mempunyai pula kantornja. Kemudian dibeberapa tempat lain didirikan djuga kantor-kantor V.O.C. Pada tanggal 23 Pebruari 1605 mulailah V.O.C. menantjapkan kakinja dengan lebih teguh di Indonesia jaitu dengan menduduki benteng Portugis di Ambon, jang kemudian lalu diberi nama VICTORIA. Ambon merupakan daerah kekuasaan V.O.C. jang pertama dikepulauan Indonesia.¹⁶⁾

Dalam tahun-tahun berikutnja timbullah persoalan bagi V.O.C. mengenai pemilihan tempat pusat kedudukannja jang tetap di Indonesia, suatu *rendez-vous* dimana barang-barang dagangnja dikumpulkan dan disebarkan selandjutnja.

Ambon tidak tepat untuk maksud itu, karena letaknja terlampau djauh dipodjok sebelah Timur. Harus ditjarikan suatu tempat disekitar Selat Malaka atau Selat Sunda jang terletak dicentrum lalulintas perdagangan. Bandar Banten walaupun memenuhi sjarat itu, tetapi ternjata keadaannja tidak aman. Lodji V.O.C. disana selalu mengalami antjaman bahaya kebakaran, ketjurian atau kena rampok, lebih-lebih setelah terdjadi pertentangan jang semakin hebat antara V.O.C. dengan pihak penguasa di Banten sedjak tahun 1611.

15) Uraian jang tjukup lengkap mengenai kedudukan dan susunan V.O.C. di Nederland maupun Indonesia terdapat dalam „Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië”, djilid I dibawah kepala „Oost-Indische Compagnie” (katja 363—374) dan djilid II dibawah kepala „Administratie der Oost-Indische Compagnie in Indië” (katja 71—78).
Penerbit : Martinus Nyhoff — E. J. Brill, 's-Gravenhage-Leiden (Tjetakan pertama).

16) Uraian jang pandjang lebar mengenai ekspansi V.O.C. dalam tahun-tahun permulaannja di Indonesia dapat dibatja dalam karja pokok „Geschiedenis van Nederlandsch Indië” jang disusun oleh pelbagai sardjana dibawah pimpinan Dr. F.W. Stapel, djilid III (dikarang oleh Stapel sendiri) bab pertama : „De oprichting der V.O.C.” (katja 5—44) dan bab kedua : „De eerste jaren der V.O.C. in Indië” (katja 45—78).
Penerbit : N.V. Uitgeversmaatschappij „Joost van den Vondel”, Amsterdam, 1939.

Dalam bulan Nopember 1610, presiden kantor V.O.C. di Banten **JACQUES L'HERMITE** membuat perdjandjian dengan Pangeran di Djajakarta, dengan mana V.O.C. diperkenankan membangun rumah batu diatas sebidang tanah jang terletak disebelah Timur sungai Tjiliwung dekat muara. Dalam tahun berikutnja berdirilah rumah tersebut jang diberi nama **NASSAU**.

Pada tanggal 9 Pebruari 1613 tibalah di Banten 2 kapal V.O.C. jang dipimpin oleh **JAN PIETERSZOOM COEN**, *seorang jang kelak akan membawa perubahan besar dalam sedjarah perkembangan bandar Djajakarta*.

Coen dilahirkan dikota **HOORN** pada tahun 1587. Dalam tahun 1607 masuk dinas V.O.C. Ditahun 1612 lalu mendapat kepertjajaan dari putjuk pimpinan V.O.C. untuk memimpin eskader ke Indonesia. Tidak lama kemudian ia lalu diangkat mendjadi presiden kantor V.O.C. di Banten, kekuasaannja meliputi kantor jang ada di Djajakarta. Seterusnja didjadikan Direktur Djendral untuk urusan perdagangan V.O.C. diseluruh Indonesia. Dan dalam bulan Djuni 1618 Coen diangkat sebagai Gouverneur Generaal. Dipulau Djawa Coen terkenal dengan sebutan **MURDJANGKUNG**.¹⁷⁾

Dalam tahun 1617 bangunan Nassau oleh Coen diperluas dengan sebuah bangunan lain jang dinamakan **MAURITIUS** dengan dinding jang tiga kaki tebalnja sebagai langkah permulaan kearah pembentukan suatu benteng.

Dalam perkembangan selandjutnja keadaan mendjadi semakin genting, karena dari pihak musuh-musuh Belanda ada usaha-usaha agar V.O.C. terusir pergi dari Indonesia. Dengan semakin buruknja keadaan di Banten, Coen memutuskan bahwa Djajakarta akan didjadikan tempat pusat kedudukannja. Bangunan Nassau-Mauritius lalu diperkuat dan diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan sehingga mendjadi suatu benteng jang kuat, ini merupakan suatu djalan kearah pembentukan suatu koloni jang akan datang.

Dari pihak Pangeran Djajakarta jang merasa terantjam dengan tindakan-tindakan Coen dilakukan pula usaha-usaha mendirikan benteng pertahanan disepandjang sungai Tjiliwung, demikian pula bangunan-bangunan didalam kotanja diperkuat.

Orang Inggeris sebagai salah satu musuh V. O. C. karena persaingan dagang, dalam tahun 1618 mendirikan djuga sebuah

¹⁷⁾ „Ensiklopedia Indonesia”, djilid I (A-E), katja 333.

Penerbit : N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, Bandung — 's-Gravenhage.

bangunan disebelah Barat sungai Tjiliwung tepat berhadapan dengan bangunan V.O.C. Kemudian ternyata bahwa pihak Inggeris mengadakan persekutuan dengan pihak Djajakarta. Dengan bantuan Pangeran Djajakarta orang-orang Inggeris sibuk memperlengkapi lodjinja dengan meriam. Ini merupakan suatu antjaman bahaya yang besar bagi kedudukan benteng V.O.C. Oleh karena itu pada tanggal 23 Desember 1618, oleh V.O.C. lodji Inggeris itu lalu digempur dan dibakar hingga musnah. Dan pada hari berikutnya mulailah tembak-menembak meriam antara benteng V.O.C. dengan pertahanan orang-orang Djajakarta.

Pada tanggal 30 Desember 1618 tibalah armada Inggeris yang terdiri dari 11 kapal untuk membalas penghantjuran lodjinja yang dilakukan oleh V.O.C. Maka Coen pun segera dengan semua kapal yang ada padanja menjambut kedatangan musuh itu. Pertahanan untuk bentengnja diserahkan dalam pimpinan **PIETER VAN DEN BROECKE** dengan dibantu oleh sebuah dewan yang terdiri dari beberapa orang.

Pada hari tahun baru 1619 terdjadilah pertempuran antara kedua armada itu dengan belum ada keputusannja. Persediaan persendjataan armada Coen sudah mendjadi tipis, sedang dipihak Inggeris dalam waktu singkat akan datang bantuan. Oleh karena itu Coen lalu memutuskan untuk pergi ke Maluku mengambil bala bantuan. Kepada komandan benteng di Djajakarta diberikan perintah agar mempertahankan benteng itu sedapat-dapatnja sampai kembalinja Coen.

Setelah Coen berangkat pergi, ternyata tidak terdjadi banjak pertempuran antara pihak Belanda dengan pihak Djajakarta maupun Inggeris. Bahkan pada tanggal 19 Djanuari 1619 komandan benteng Van den Broecke membuat persetudjuan dengan Pangeran Djajakarta, V.O.C. memberikan sedjumlah uang kepada pihak Djajakarta. Tetapi kemudian pada waktu Broecke pergi kedalam kota, ia ditawan oleh pihak Djajakarta. Pertempuran berkobar lagi, benteng V.O.C. diserang baik oleh pihak Djajakarta maupun pihak Inggeris dari 3 djurusan. Pimpinan benteng kini dipegang oleh **PIETER VAN RAAJ**.

Benteng itu tidak dapat dipertahankan. Achirnja pimpinan benteng memutuskan untuk menyerah sadja. Akan tetapi pada waktu akan dilangsungkan penyerahan itu pada tanggal 2 Pebruari 1619, datanglah tentera Sultan Banten yang mengakibatkan perubahan terhadap seluruh situasi. Antara pihak Banten dan Inggeris

terdjadi perselisihan mengenai pembagian hasil-hasil dari penjerahan itu. Dengan adanja pertentangan ini, maka oleh komandannja armada Inggeris lalu ditarik untuk pergi ke Banten guna melindungi kepentingan-kepentingan Inggeris disana kalau-kalau akan mendapat gangguan dari Sultan Banten.

Kini terdjadi tawar-menawar mengenai sjarat-sjarat penjerahan benteng V.O.C. itu antara pihak Belanda dengan pihak Banten. Pada tanggal 25 Pebruari 1619 datanglah utusan dari Banten jang membawa kabar bahwa Sultan Banten dapat menjetudjui sjarat-sjarat penjerahan jang dikemukakan oleh Van Raay. Tetapi kemudian pada tanggal 27 bulan itu pimpinan benteng berubah pikiran; diputuskan bahwa mereka tidak akan menjerah dan benteng itu akan dipertahankan mati-matian.

Pada tanggal 12 MARET 1619 Van Raay memanggil semua penghuni benteng untuk berkumpul diruang besar, dan kemudian lalu mengumumkan bahwa dewan pimpinan dari benteng itu telah memutuskan untuk memberikan suatu nama kepada benteng jang sedang dipertahankan itu. Nama itu ialah BATAVIA. Demikian pula kepada keempat katelum dari benteng itu masing-masing diberi nama, jaitu WESTVRIESLANDT, HOLLANDIA, ZEELANDIA dan GELDRIA.¹⁸⁾

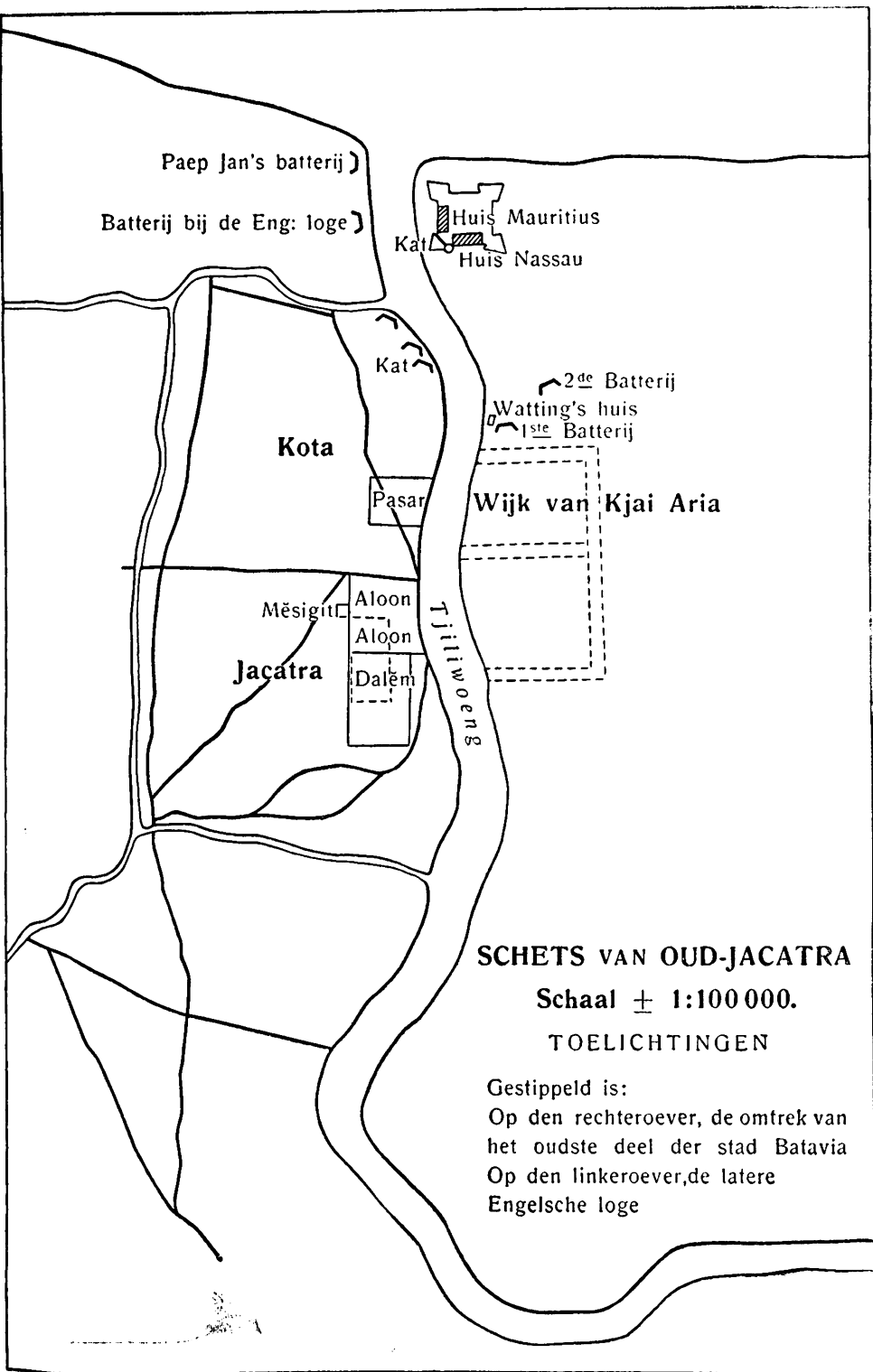
Nama „Batavia” itu dipakai untuk mengingatkan kepada *Batavieren (Bataven)*, jaitu orang-orang dari suku bangsa Germaan jang mula-mula menduduki dan menetap di Nederland (nenek mojang bangsa Belanda jang sekarang).

Pemakaian nama „Batavia” untuk tempat kedudukan V.O.C. memang dikehendaki oleh putjuk pimpinan V.O.C. sendiri di Nederland. Sudah pada tanggal 31 Oktober 1617 pimpinan V.O.C. memerintahkan kepada Gubernur Djenderal dan Raad-nja agar apabila kelak mendirikan rendez-vous V.O.C., tempat kedudukan itu harus dinamakan „Batavia” sebagai simbol dari bangsa Belanda seluruhnja. Di Timur harus pula dibangunkan suatu *Nieuw Nederland*.¹⁹⁾

Mengenai perkataan „Batavia” itu sendiri, Dr. F. de Haan mengatakan bahwa perkataan itu diambil dari titel sebuah buku jang dikarang oleh dokter **Hadrianus Junius** dalam tahun 1588. Buku tersebut jang ditulis dalam bahasa Latin menguraikan hal

¹⁸⁾ Buku „Geschiedenis van Nederlandsch Indië”, djilid III, katja 135.

¹⁹⁾ „Oud Batavia”, katja 8.



Gambar situasi pengepungan benteng Djakarta pada tahun 1619 menurut J.W. Yzerman.

(Reproduksi dari buku W. Fruin-Mees : „Geschiedenis van Java“. djilid II, dimuka katja 78.

Penerbit : Commissie voor de Volkslectuur, Weltevreden, 1920.

ichwal bangsa Belanda pada djaman kuno dan semasa kemegahan-
nja. Menurut Junius pahlawan suku bangsa itu bernama BATO,
dan perkataan „Batavia” berarti *Bato's have* (milik Bato).

Pada tanggal 28 Mei 1619 tibalah kembali Coen dengan bala
bantuan dari Maluku. Selama dalam perdjalan Coen telah
mengusulkan kepada para anggota Raad van Indië agar Kota
bandar Djajakarta diserbu dan diduduki untuk didjadikan rendez-
vous V.O.C. Setelah tiba di Djajakarta itu, dalam suatu rapat orang
menjetudjui usul Coen untuk merebut Kota Djajakarta dari tangan
Keradjaan Banten dengan kekuatan sendjata, untuk kemudian
didjadikan daerah kekuasaan Belanda.

Demikianlah pada tanggal 30 MEI 1619 benteng pertahanan
pihak Djajakarta-Banten diserbu setjara besar-besaran dan kotanja
dibakar habis-habisan. Dan diatas runtunan puing itu kemudian
berdirilah suatu kota jang baru, pusat kedudukan dari mana semua
kegiatan V.O.C. dikemudikan. Coen sendiri tidak menjetudjui kota
ini dinamakan Batavia, ia ingin menamakannja *Nieuw Hoorn*,
sebagai suatu peringatan terhadap kota kelahirannja sendiri. Tetapi
kemudian pada tanggal 4 Maret 1621 diterima perintah khusus dari
pimpinan V.O.C. di Nederland jang mengharuskan agar kota
tersebut dinamakan *Batavia*. Sedjak tanggal tersebut dengan
resmi nama Batavia dipakai untuk menjebut bandar jang direbut
dengan kekerasan itu.²⁰⁾

Dari kota inilah Belanda mengemudikan pendjadjahan dise-
luruh Indonesia selama tiga abad lebih. Pada waktu-waktu
kemudian, dalam dunia internasional nama Batavia lebih terkenal
dari pada nama Sunda Kalapa, Djajakarta atau Djakatra. Demikian
pula bagi penduduk sini nama *Betawi* lebih dikenal dari pada
Djakarta. Keadaan ini berlangsung terus sampai datangnya bala-
tentera Djepang menduduki kepulauan Indonesia dalam tahun 1942.

Sesuai dengan politik Djepang untuk melenjapkan segala
sesuatu jang bersifat Belanda, maka pada tanggal 10 Desember
1942 dikeluarkan *Osamu Seirei* (undang-undang jang dite-
tapkan oleh Panglima Besar Balatentera Djepang) no. 16,²¹⁾

²⁰⁾ „Geschiedenis van Ned. Indië”, djilid III katja 141.

²¹⁾ Undang-undang tersebut dimuat dalam „Kan Po” (Berita Pemerintah), sebuah
Madjalah diterbitkan oleh Gunseikanbu (Kantor Pembesar Pemerintah Bala-
tentera Djepang), no. 9 (tahun ke I, bulan 12 — Desember — tahun Djepang
2602 — Masehi 1942 —), katja 3.

dengan mana nama „Batavia” diganti dengan DJAKARTA (edjaan Djepangnja : *Djakaruta*).

Terhadap penggantian nama itu, oleh pihak Gunseikanbu dikeluarkan sebuah maklumat jang berbunji sebagai berikut : ²²⁾

„Beberapa ratoes tahoen jang laloe, daerah „Batavia” terkenal pada rakjat Nippon dengan nama „Djakarta”, tetapi nama itoe dioebah oleh pemerintah Belanda dahoeloe dengan „Batavia”. Sedjak Balatentera Dai Nippon mendarat di Djawa, soedah dioesahkan soepaja nama itoe diganti dan baroe-baroe ini dari Pemerintah Agoeng di Tokio soedah didapat izin oentoek mengoebah nama „Batavia” itoe. Berhoeboeng dengan itoe, moelai tanggal 8 Desember, jaitoe „Hari Pembangoenan Asia Raja”, ²³⁾ nama „Batavia” diganti dengan „Djakarta”.”

Dengan lahirnja kembali nama Djakarta itu, maka lambat laun nama Batavia terdesak. Dan pada dewasa ini dalam gelanggang internasional, dan djuga bagi generasi Indonesia jang baru, nama asli itu lebih dikenal dari pada nama Batavia.

Demikianlah selajang pandang pertumbuhan Kota Djakarta dalam lintasan sedjarah.

²²⁾ Kan Po jang sama, katja 5.

²³⁾ Sebetulnja hari pemboman Pelabuhan „Pearl Harbour” jang mengakibatkan meletusnja Perang Pasifik dalam tahun 1941 tanggal tersebut (Penjusun).

PEMERINTAHAN STAD BATAVIA ²⁴⁾

Kota bandar Djakarta merupakan daerah kekuasaan V.O.C. yang pertama dipulau Djawa, dari kota inilah kemudian V.O.C. meluaskan kekuasaannya diseluruh pulau Djawa.

Pada tanggal 29 Maret 1620 oleh Coen dibentuk suatu pedjabat yang disebut *baljuw* ²⁵⁾, yaitu pegawai penuntut umum (djaksa) merangkap sebagai kepala kepolisian: batas-batas daerah djabatan-nja ialah :

- a. disebelah Barat : Banten;
- b. disebelah Timur : Tjeribon;
- c. disebelah Utara : pulau-pulau dilaut Djawa;
- d. disebelah Selatan : lautan (Samudera Hindia).

Baljuw diangkat dan digadji oleh Pemerintah V.O.C. Orang yang pertama diangkat oleh Coen sebagai baljuw bernama **JAN STEIJNS**. Baljuw-baljuw lainnya kemudian antara lain ialah **ANTHONY CAEN** (De Caen) dan **MARTEN JANSZ VISSER** alias Majoor Vogel. Dalam upatjara-upatjara tertentu baljuw merupakan wakil dari penduduk kota. Dan dalam kedudukannya sebagai wakil penduduk itu, ia bertugas pula menjimpan kuntji pintu gerbang kota.

Kemudian pada tanggal 24 Djuni 1620 oleh Coen dibentuk suatu *Collegie van Schepenen der stadt Jacatra* (disingkat Schepenen/Schepenbank), yaitu sebuah badan kehakiman untuk mengadili segala perkara perdata antara penduduk kota Batavia (baik penduduk asli maupun orang asing), dengan diketjualikan golongan pegawai V.O.C. Perkara-perkara antara para pegawai V.O.C. atau antara pegawai itu dengan penduduk termasuk dalam kekuasaan hukum suatu badan kehakiman lain, yaitu *d' ordinaris luyden van den Gerichte in 't Casteel* yang dalam pertjakapan sehari-hari

²⁴⁾ Banjak bahan² untuk uraian dalam bab ini diambil dari buku „Oud Batavia“. ketjuali apabila dalam tjatatan disebutkan sumber² lainnya.

²⁵⁾ Ini menurut edjaan dalam buku-buku De Haan, Stapel dll. Menurut peraturan pembentukannya yang asli sebagaimana terdapat dalam buku Mr. J.A. Van der Chijs „Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602 — 1811“, djilid I. katja 56 — 57, diedja *Bailluw*.

terkenal dengan nama *de regtsluyden van 't fort*, dan sedjak tahun 1626 dinamakan djuga *Ordinarius Raet van Justitie binne het Casteel Batavia* (Raad van Justitie). Pengadilan jang achir ini memutuskan pula perkara dalam tingkat banding dari Schepenbank. Pada waktu kemudian Schepenbank resmi berkuasa djuga mengadili perkara pidana jang dilakukan oleh penduduk seluruh daerah Priangan; baljuw menjadi penuntut umum pada badan pengadilan ini.²⁶⁾

Dalam mendjalankan tugasnja dalam lapangan kehakiman itu Schepenbank berpegangan kepada *de Ordonnantie der Staten van Holland* dari tanggal 1 April 1580, jaitu hukum Belanda kuno.²⁷⁾ Selain itu oleh pimpinan V.O.C. baik di Nederland maupun jang di Batavia dibuat pula peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi untuk menjesuaikan pengadilan itu dengan keadaan disini. Peraturan-peraturan V.O.C. itu dimuat dalam *plakaat* (maklumat). Sedjak semula plakat-plakat itu oleh pegawai V.O.C. tidak pernah disusun dan dikumpulkan dengan setjara teratur, sehingga pada kira-kira tahun 1635 terdjadilah kekatajauan karena tidak dapat diketahui plakat mana jang masih berlaku dan mana jang telah diubah atau ditjabut.

Atas perintah Gubernur Djenderal **ANTONIO VAN DIEMEN** peraturan-peraturan itu lalu dikumpulkan dan disusun oleh **MR. JOAN MAETSUYCKER**, seorang Pensionnaris pada Raad van Justitie Batavia (kemudian menjadi gubernur djenderal selama 25 tahun, dari tahun 1653 — 1678).²⁸⁾

Pada tanggal 5 Djuli 1642 himpunan plakat-plakat jang disusun baru itu ditetapkan dan diundangkan dengan nama *Ordonnantien en Statuten van Batavia*, atau disebut djuga *De Oude Statuten van Batavia*, himpunan ini berisi peraturan perdata dan pidana.²⁹⁾

²⁶⁾ Mr. Drs. E. Utrecht : „Pengantar dalam Hukum Indonesia”, katja 123 — 124. Penerbit : N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Djakarta. Tjetakan ke-3, 1956.

²⁷⁾ „Geschiedenis van Ned. Indië”, djilid III, katja 145.

²⁸⁾ Buku Utrecht (tjatatatan 26 diatas), katja 122.

²⁹⁾ Prof. Dr. R. Supomo & Prof. Mr. R. Djokusutono : „Sedjarah Politik Hukum Adat”, djilid I (Dari Zaman Kompeni sehingga tahun 1848), katja 12. Penerbit : Djambatan, Djakarta. Tjetakan ke-2, 1951.

Oleh karena untuk kedua kalinya ada kelalaian, maka pada kira-kira tahun 1700 timbul kekatjauan lagi mengenai peraturan-peraturan yang masih berlaku. Dalam tahun 1715 oleh Pemerintah V.O.C. diusahakan lagi pembuatan suatu himpunan plakat-plakat baru dengan memperbaiki dan menambah himpunan yang dari tahun 1642 itu. Penjusunan tersebut lama sekali terhalang, baru kemudian dalam tahun 1766 seorang saudagar tinggi (opperkoopman) bernama **CRAAN** berhasil menyelesaikannya, dan perbitan baru itu dikeluarkan dengan nama *Nieuwe Bataviasche Statuten*. Walaupun putjuk pimpinan V.O.C. dinegeri Belanda tidak mau mengesahkan himpunan peraturan-peraturan yang baru itu, namun himpunan tersebut dijalankan dalam praktek sebagai peraturan-peraturan yang resmi.³⁰⁾

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dalam abad yang lalu, oleh seorang sarjana hukum keluaran Leiden **MR. JACOBUS ANNE VAN DER CHIJNS**, yang sedjak tanggal 28 Djanuari 1892 menjadi Kepala Arsip Negara dari Pemerintah Hindia Belanda dilakukan pengumpulan terhadap semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah V.O.C. dalam buku dengan kepala „*Nederlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602 — 1811*”.³¹⁾ Buku ini terdiri atas 17 jilid dalam mana dimuat menurut urutan waktu (chronologis) semua peraturan serta instruksi V.O.C. dalam segala lapangan seperti tatanegara, administrasi, pengadilan dan lain-lain dari tahun 1602 sampai tahun 1811; dalam jilid IX dimuat *Nieuwe Statuten van Batavia*, sedang jilid XVII berisi systematis register. Dokumentasi yang penting ini diterbitkan oleh *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* dengan bantuan Pemerintah Hindia Belanda dalam tahun 1885 (jilid pertama) hingga 1900 (jilid penghabisan).

Pada permulaan terbentuknya, susunan Schepenbank terdiri dari 2 pegawai V.O.C. dan 3 orang penduduk kota. Dalam mengadili perkara yang menjangkut seseorang Tionghoa, maka kepala dari golongan penduduk Tionghoa yang bernama **BENCON** (nama sebenarnya **SOUW BING KONG**, seorang sahabat baik dari Coen) ikut duduk dalam Schepenbank itu, walaupun hanya mempunyai

³⁰⁾ Idem Utrecht, katja 124 — 125.

³¹⁾ „Encyclopaedie van Ned. Indië”, jilid I, katja 356 — 357.

suara sebagai penasihat.³²⁾ Pada waktu kemudian seorang Tionghoa lainnja didudukkan pula dalam badan pengadilan itu. Dalam tahun 1625 djumlah anggota Schepenen ditetapkan 7 orang, jaitu 3 pegawai V.O.C. dan 4 penduduk. Kemudian dalam tahun 1673 ditambah dengan seorang, dan sedjak tahun 1690 tetap terdiri dari 9 orang (4 pegawai V.O.C. dan 5 penduduk kota).

Pada mulanja College van Schepenen hanja dibentuk sebagai suatu badan pengadilan, akan tetapi kemudian sedjak tanggal **18 Agustus 1620** ditetapkan bahwa badan tersebut bersama-sama dengan baljuw merupakan *Pemerintah Stad Batavia* jang berwenang membuat peraturan-peraturan untuk kepentingan dan kesedjahteraan kota.

Berhubung dengan fungsinja sebagai badan legislatip (badan pembuat peraturan) dan badan perlengkapan kota jang mendjalankan pemerintahan kota itu, maka College van Schepenen menamakan dirinja „*wethouders en magistraten d'eer stad*” (jaitu stad Batavia).

Pada permulaannja wewenangnja terbatas kepada mengatur urusan garis sempadan dan kebersihan djalan-djalan dalam kota. Kemudian dalam tahun 1625 wewenang itu diperluas dan sedjak tahun 1642, menurut ketentuan-ketentuan dalam Statuten van Batavia, ditegaskan kekuasaannja dalam bidang legislatip jaitu bahwa College van Schepenen bersama-sama dengan baljuw berwenang membuat peraturan-peraturan dan ordonansi-ordonansi mengenai djalan-djalan, djembatan-djembatan, hal mendirikan bangunan-bangunan dan urusan-urusan lainnja jang bersangkutan dengan kota dan penduduknja. Peraturan-peraturan jang dibuatnja itu baru dapat diundangkan apabila telah disetudjui oleh gubernur djenderal. Pengundangan peraturan tersebut dilakukan dalam bahasa Belanda dan bahasa Melaju oleh seorang pegawai jang berkeliling kota dengan memukul tjang.

Bentuk susunan pemerintahan Stad Batavia itu meniru keadaan di Nederland, terutama Kota Amsterdam, dimana tiap-tiap kota mempunyai kemerdekaan dan sedikit banjak berdiri sendiri-sendiri.

Djadi didalam Stad Batavia dahulu kita dapati pemerintahan kota, pengadilan kota, kepolisian kota, pertahanan kota dan balai kota (stadhuis) disampingnja pemerintah pusat (V.O.C.), penga-

³²⁾ „Nederlandsch-Indisch Plakaatboek”, djilid I, katja 60.

dilan pusat dan sebagainya. Djuga rumah pendjara ada 2 buah, jaitu jang disebut stadsboeien (pendjara kota) dan Compagniesboeien (pendjara V.O.C.), masing-masing dibawah Schepenbank dan Raad van Justitie.

College van Schepenen dapatlah dianggap sebagai suatu badan perwakilan penduduk kota. Dan memang pada waktu pembentukannja dalam tahun 1620 itu telah ditetapkan bahwa 3 orang penduduk jang duduk dalam College tersebut akan ditjalonkan oleh para penduduk sendiri dan kemudian diangkat oleh pemerintah pusat, sedang 2 pegawai V.O.C. jang mendjadi anggota lainnja diangkat oleh pusat djuga. Schepenen merupakan abdi-abdi setia jang diangkat dan digadji oleh Pemerintah V.O.C. Pentjalonan anggota-anggota penduduk tiap tahun dilakukan oleh College jang meletakkan djabatannya, akan tetapi ternyata pemerintah tidak terikat kepada pentjalonan itu: pengangkatannja dilangsungkan pada hari peringatan direbutnja Kota Djakarta (tanggal 30 Mei). Anggota jang baru berhenti itu dapat diangkat kembali.

College van Schepenen diketuai oleh seorang *presiden*. Presiden tersebut adalah seorang pedjabat V.O.C., jang kadang-kadang mendjadi pula anggota pimpinan pemerintahan V.O.C. Presiden bertugas memimpin sidang-sidang Schepenen jang dilakukan 3 kali seminggu dibalai kota. Dalam sidang-sidang sekaligus dibitjarakan dan diputuskan perkara-perkara perdata dan pidana jang diajukan serta urusan-urusan kota jang perlu diselesaikan. Presiden Schepenen didampingi oleh seorang *sekretaris kota* (stadssecretaris/secretaris van Schepenen) jang bertugas untuk mengurus risalah-risalah sidang dengan segala lampirannja dan warkat-warkat lainnja jang harus dibedakannja dalam 3 register, jaitu resolutieboek, rol perkara perdata dan rol perkara pidana.

Walaupun pemerintahan kota didjalankan oleh College van Schepenen, tetapi ternyata *tidak ada batas-batas jang tegas antara wewenang badan pemerintahan kota itu dengan wewenang pemerintah V.O.C.* Pemerintah pusat itu jang djuga berkedudukan di Stad Batavia (dalam benteng) sering-sering tjampur tangan dalam urusan kekotaan kalau dianggapnja perlu. Urusan-urusan jang telah diatur dan diurus oleh Schepenen kadang-kadang diatur dan diurus pula oleh gubernur djenderal dan Raad van Indië.

Bahkan sedjak tahun 1650 pemerintah pusat itu menganggap dirinya sebagai *Opperstadsbestuur* (Pemerintah kota tingkat atasan). Djuga karena presiden College van Schepenen kadang-kadang adalah salah seorang anggota pemerintah pusat, sedangkan dialah jang memanggil sidang Schepenen dan mengadakan usul-usul, maka batas-batas wewenang pemerintah kota itu menjadi lebih tidak tegas lagi dan bahkan pada suatu waktu kekuasaan Schepenen nampak menjadi surut; selama 6 tahun dari tahun 1647 hingga 1652, oleh College van Schepenen hanya dilangsungkan 31 rapat untuk menjelenggarakan urusan-urusan kota, dimana lebih dari separohnya hanya untuk mengemukakan tjalon-tjalon tahunan bagi pengangkatan-pengangkatan sesuatu djabatan tertentu serta untuk membuat pentjataan dari pengangkatan-pengangkatan tersebut.

Dalam lapangan pengangkatan-pengangkatan, tidak hanya keanggotaan pemerintah kota dilakukan oleh pusat, bahkan djuga sampai pegawai-pegawai kota diangkat oleh pemerintah pusat, seperti umpamanya pesuruh-pesuruh dan pendjaga balai kota, demikian pula sipir pendjara kota, djuru lelang, pengawas sempadan, dokter, bidan dan abdi-abdi kota lainnya.

Baru kemudian dalam abad ke-18 lebih banyak urusan-urusan kota jang diselenggarakan sendiri oleh College van Schepenen. Selain wewengannya dalam bidang perundang-undangan, urusan-urusan bersifat kekotaan jang diselenggarakan oleh Schepenen ialah pengangkatan pegawai-pegawai kota; mengadakan tjalon-tjalon untuk badan-badan dan pedjabat-pedjabat tertentu jang akan diangkat oleh pemerintah pusat (schepenen, weesmeesteren, boedelmeesteren, commissarissen van Huwelyksche en Kleine Zaken, regenten van het vrouwentuchthuis en van de godshuizen, schut-terofficieren sampai tingkat sersan) serta menjelenggarakan pentjataan dari pengangkatan-pengangkatan tersebut; mengurus penjelenggaraan ukuran dan timbangan jang tepat, garis sempadan, ketentuan-ketentuan mengenai bangunan, harga dan kesempurnaan dari pada bahan-bahan bangunan; pemeliharaan dan pembersihan djalan-djalan, parit-parit, tanggul-tanggul, pintuair-pintuair, taman-taman, selokan-selokan dan saluran-saluran air; pengawasan terhadap balai kota, tempat pendjualan daging, ikan dan pasar-pasar lainnya, rumah-rumah perahu, terhadap penjelenggaraan perniagaan dan perusahaan penduduk, harga bahan-bahan makanan dan bahan-

bahan keperluan lainnja serta pengawasan terhadap pemeriksaan emas dan perak.

Untuk melakukan pengawasan terhadap penduduk, terutama golongan Indonesia, dalam tahun 1655 dibentuk djabatn *Wijkmeesters* jang bertugas mengadakan pentjataan daftar penduduk dari wijknja masing-masing. Pedjabat tersebut dibebani pula dengan tugas pengawasan terhadap kebersihan kota, selokan-selokan air dan alat-alat pemadam kebakaran serta pula memungut padjak-padjak kota. Wijkmeesters diangkat oleh pemerintah pusat tetapi tidak menerima gaji.

Untuk masing-masing golongan rakjat diangkat pula seorang kepala jang disebut *Kapitein*. Kita dapati Kapitein der Chineezen (Kapitein Chinees), Kapitein Europeaan, Kapitein der Javanen, Balische Kapitein dan lain-lain. Kapitein itu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketjil jang timbul diantara golongan rakjatnja masing-masing. Bahkan untuk golongan penduduk orang Banda, oleh pemerintah dalam tahun 1635 diberikan suatu dewan tersendiri dengan tempat bermusjawaratnja jang disebut *Baileo* (balai), ini untuk memberikan pemerintahan jang demokratis sebagaimana didjalankan oleh golongan penduduk itu ditempat asalnja (Banda, dikepulauan Maluku).

Dalam lapangan ketertiban umum dan keamanan dalam kota, Stad Batavia mempunyai aparatur *polisi kota* dan *pertahanan kota* (schutterij). Kepolisian kota seperti diketahui berada dibawah pimpinan baljuw. Korps schutterij dapatlah dianggap sebagai angkatan perang kota, tetapi aparatur jang mulai diorganisir sedjak tahun 1622 ini tidaklah diperuntukkan guna berperang atau mempertahankan kota, melainkan untuk mempertahankan keamanan dalam kota, djadi lebih merupakan polisi jang bersendjata. Semua penduduk wadajib turut dalam dinas pertahanan kota itu, tetapi sebagai gantinja mereka boleh mengajukan wakil (orang sewaan) atau membajar suatu padjak tertentu.

Bagaimanakah dengan keadaan keuangan Pemerintah Stad Batavia ?

Walaupun College van Schepenen mempunyai kas kota sendiri, tetapi djuga dalam lapangan penghasilan dan pengeluaran uang untuk keperluan-keperluan kota College tersebut bergantung kepada pemerintah pusat. Tjampur tangan Pemerintah V.O.C. dalam bidang

keuangan ini djuga terdjadi setjara mendalam. Untuk mengadakan pengawasan terhadap segenap pengeluaran dan mentjegah pemborosan uang, maka pemerintah masih segan membiarkan College van Schepenen mempunyai keuangan jang betul-betul berdiri sendiri. Penghasilan-penghasilan kota seperti bea keluar-masuknja barang dagangan, tjukai minuman keras, padjak penduduk Tionghoa dan lain-lain semuanya masuk kedalam kas V.O.C. ketjuali apabila dengan tegas-tegas oleh Pemerintah V.O.C. itu diserahkan kepada College van Schepenen agar dimasukkan kedalam kas kota. Ini mengenai djuga pendapatan-pendapatan jang diperoleh Schepenbank sendiri sebagai badan pengadilan seperti misalnja uang administrasi (biaja perkara), uang denda dan sebagainya, sehingga dalam tahun 1660 Schepenen mengeluh bahwa badan tersebut sama sekali tidak menikmati penghasilan-penghasilan kota.

Penghasilan jang diizinkan kepada College van Schepenen untuk dimasukkan kedalam kasnja antara lain ialah *moddergeld*, jaitu suatu padjak untuk pembiajaan menggali lumpur dalam parit-parit, besarnya padjak ini ialah seperempat atau setengahnja uang sewa rumah bulanan; padjak ini dipungut melalui para wijkmeesters. Kepada kas Schepenen kadang-kadang djuga diserahkan sematjam padjak pendjualan barang-barang jang besarnya 5%.

Dalam segi pengeluaran, banjak biaja keperluan kota ditanggung oleh pemerintah pusat; seperti diketahui gadji para pedjabat baljuw, anggota Schepenen dan pegawai-pegawai kota lainnja dibayar dari kas V.O.C., demikian pula kadang-kadang pembiajaan sesuatu urusan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengeluaran Schepenen sendiri tidak pernah melampaui f. 30.000 setahunnja, dalam mana f. 15.000 untuk biaja membersihkan lumpur dalam parit-parit, dan f. 10.000 untuk biaja pemeliharaan dan pembersihan djalan-djalan dan djembatan-djembatan; selandjutnja dikeluarkan biaja untuk keperluan pesta, biaja minuman dan lain-lain dalam sidang-sidang, pemeliharaan dan perbaikan gedung balai kota, untuk amunisi dari schutterij dan lain-lainnja lagi. Tetapi banjak urusan-urusan kota baru dapat diselenggarakan setelah ada bantuan keuangan dari pusat.

Keadaan seperti tersebut diatas berlangsung terus sampai tahun 1795, barulah dalam tahun tersebut ditetapkan bahwa Schepenen akan memikul semua beban kota, dan sedjalan dengan itu Schepenen diberi penambahan penghasilan jang seimbang.



Selainnja alat pemerintahan kota, pengadilan kota dan lain-lain seperti telah diuraikan dimuka, Stad Batavia mempunyai pula *lambang* dan *tjap* kota sendiri. Bentuk lambang itu ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 15 Agustus 1620 berupa lukisan sebilah pedang pada sebuah perisai, dan pedang tersebut dikalungi dengan seikat karangan bunga dengan warna tjoklat dan hidjau.³³⁾ Pada waktu kemudian dibelakang perisai itu dilukiskan seekor singa (sebagai lambang negara berdaulat) jang sedang duduk sambil kakinja menjangga perisai tersebut. Mengenai tjap jang dipergunakan oleh College van Schepenen, selain berlukiskan gambaran lambang seperti tersebut diatas, djuga pada tepinja terdapat tulisan dalam bahasa Latin berbunyi *Sigillum Urbis Bataviae* jang berarti Tjap kota Batavia (*stadszegel van Batavia*).³⁴⁾

Demikianlah dengan singkat pemerintahan Stad Batavia dalam zaman pemerintahan V.O.C.

Pada tahun 1795 Negara Belanda dari suatu negara konfederasi (Republiek der Vereenigde Nederlanden) berganti tjorak mendjadi suatu negara republik kesatuan jang disebut *Bataafsche Republiek*. Pada tanggal 17 Maret 1798 selesailah penjusunan peraturan ketatanegaraan (konstitusi) dari pada negara baru itu. Menurut pasal 247 dari peraturan ketatanegaraan itu, oktroi V.O.C. dibatalkan dan semua milik dan hutangnja diambil-alih oleh negara. Selandjutnja maka pemerintahan atas djadjahan-djadjahan dikepulauan Indonesia akan didjalankan oleh suatu dewan terdiri dari 9 anggota jang dinamakan *Raad der Aziatische Bezittingen* menurut ketentuan-ketentuan dalam suatu Charter jang akan ditetapkan.³⁵⁾

Demikianlah pada tanggal 31 Desember 1799 tamatlah riwayatnja V.O.C. Mulai tanggal 1 Djanuari dari abad ke-19 bekas-bekas daerah kekuasaan V.O.C. mendjadi daerah djadjahan Bataafsche Republiek. Dan pada tanggal 27 September 1804 oleh putjuk

³³⁾ „Een swaert van azur in een orange schilt, steeckende met de pointe deur een lourieren crans van couleur bruijn groen” (N.I. Plakaatboek, djilid I, katja 65).

³⁴⁾ Lukisan lambang dan tjap itu dapat dilihat dalam buku „Oud Batavia” Platenalbum, a.l. foto no. D1 dan G3.

³⁵⁾ Karja pokok „Geschiedenis van Nederlandsch Indië”, djilid V (djuga disusun oleh Stapel sendiri), bagian A, De Bataafsche Republiek en de Fransche Tijd, bab I katja 9, Amsterdam 1940.

pimpinan negara republik itu ditetapkanlah Charter jang mengatur segala sesuatu mengenai pemerintahan atas djadjahan-djadjahan Bataafsche Republiek di Asia.

Sampai saat itu susunan pemerintahan kota Batavia masih berlangsung seperti sediakala. College van Schepenen masih tetap merupakan badan pengadilan jang merangkap sebagai badan legislatip dan badan jang mendjalankan pemerintahan kota.

Menurut ketentuan dalam Charter tersebut diatas, maka diperintahkan pembentukan suatu badan lain jang akan mengambil alih semua wewenang Schepenen jang bukan merupakan wewenang dalam bidang pengadilan. Djadi dikehendaki adanya pemisahan wewenang-wewenang jang berlainan itu dalam tangan badan-badan jang berbeda. Pemisahan tersebut sebetulnja sudah dalam tahun 1741 dikehendaki oleh Gubernur Djenderal **GUSTAAF WILLEM BARON VAN IMHOFF**.

Sebelum Charter dari Pemerintah Bataafsche Republiek itu dapat didjalankan, dalam bulan Agustus 1805 Charter itu ditarik kembali untuk diganti dengan suatu Regeeringsreglement. Akan tetapi dalam tahun 1806 Bataafsche Republiek berganti tjorak pula menjadi *Het Koninkrijk Holland*, jaitu suatu negara monarki jang diradjai oleh **Lodewijk Napoleon**, saudara dari Kaisar Perantjis **Napoleon Bonaparte**.

Dengan berdirinja Koninkrijk Holland itu, maka Raad van Aziatische Bezittingen dari Bataafsche Republiek dahulu dihapuskan, dan daerah-daerah djadjahan itu diserahkan dibawah pengawasan *Minister van Koophandel en Coloniën*. Dalam bulan Djanuari 1807 diangkatlah **MR. HERMAN WILLEM DAENDELS** menjadi gubernur djenderal untuk Aziatische coloniën en bezittingen. Kepada Daendels diberikan pula instruksi khusus tertanggal 9 Pebruari 1807 jang memuat ketentuan-ketentuan bagi dirinja dalam mendjalankan pemerintahan didaerah-daerah djadjahan itu. Pengangkatan Daendels itu lebih bersifat untuk tudjuan militer, jaitu untuk mempertahankan daerah-daerah djadjahan di Asia dari serangan musuh, karena pada waktu itu Imperium Perantjis sedang berperang dengan Inggeris. Pada permulaan tahun 1808 tibalah Daendels di Batavia untuk memegang pimpinan pemerintahan di Indonesia. Menurut pasal 33 dari Instruksi tanggal 9 Pebruari itu, kepada Daendels ditugaskan untuk memperbaiki keadaan kesehatan dikota Batavia, karena Batavia jang tadinja didjuluki *Koningin van het Oosten* (Ratu

didunia Timur) dalam abad ke-18 mulai terkenal dengan sebutan *Graf der Hollanders* (tempat pekuburan orang-orang Belanda), berhubung banjak orang Belanda jang meninggal dunia akibat buruknja kesehatan dikota Batavia. Apabila perbaikan itu tidak mungkin, ia supaja mengusulkan bagian mana dari pulau Djawa jang lebih sehat dan tepat untuk didjadikan pusat kedudukan daerah-daerah djadjahan di Asia itu.³⁶⁾

College van Schepenen dalam masa pemerintahan Daendels ini, meskipun oleh Daendels lingkungan wilayah kekuasaannja diperketijl dan urusan-urusan pemerintahan dan administrasinja pada sebagian dipersempit dan pada sebagian lain diperluas, namun sifatnja College tersebut sebagai badan jang mempunyai fungsi berganda itu tetap berlangsung. Didalam lingkungan kota, kedudukan Schepenbank sebagai badan kehakiman tetap seperti dalam zaman pemerintahan V.O.C. Dan kedudukannja sebagai badan pemerintahan kota djuga tetap tidak berubah.

Perkembangan ketatanegaraan dibenua Eropah berdjalan terus. Pada tanggal 9 Djuli 1810 oleh Kaisar Napoleon Koninkrijk Holland dihapuskan dan dimasukkan sebagai bagian dari Imperium Perantjis. Dengan demikian maka Aziatische coloniën en bezittingen itu berubah pula mendjadi daerah-daerah djadjahan Perantjis. Pada tanggal 16 Mei 1811 Daendels sebagai gubernur djenderal diganti dengan JAN WILLEM JANSSENS. Tetapi beberapa bulan kemudian menjeranglah pihak Inggeris kepulauan Djawa, dan pada tanggal 18 September 1811 Janssens terpaksa menjerah kepada pihak Inggeris. Sebagai penguasa jang memegang pimpinan pemerintahan Inggeris dipulau Djawa diangkatlah **THOMAS STAMFORD RAFFLES**.

Dalam masa pendudukan Inggeris inilah terdjadi perubahan terhadap status College van Schepenen. Pada pokoknja Raffles mendasarkan organisasi pengadilannja kepada prinsip pemisahan antara tugas-tugas kehakiman dan pemerintahan (*on the principle of separating as much as possible the judicial from the police duties*).³⁷⁾ Schepenbank diubah namanja mendjadi *Bench of Magistrates*; tidak hanya namanja sadja jang diubah, tetapi sesuai

³⁶⁾ „Geschiedenis van Ned. Indië”, djilid V, bagian A, bab II (Herman Willem Daendels), katja 32 dan 58.

³⁷⁾ Buku Supomo/Djokosutono (tjataan 29 diatas), katja 76—77.

dengan pendirian Raffles diatas, djuga fungsinja kini ditetapkan sebagai badan pemerintahan sadja.³⁸⁾

Kekuasaan pengadilan (*judicieele jurisdictie*) dari Schepensbank kini dijalankan oleh suatu badan pengadilan jang tersendiri. Tetapi kepada Bench of Magistrates itu masih djuga diberikan kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran ketjil (politiezaken). Ini adalah sesuai dengan paham Inggris bahwa kekuasaan/pengadilan kepolisian (*politieele jurisdictie*) termasuk didalam kekuasaan pemerintahan, dan karenanja dijalankan oleh magistraat.³⁹⁾

Peralihan tersebut diatas terdjadi dalam tahun 1812. College van Schepenen dari zaman V.O.C. melangsungkan sidangnja jang terachir pada tanggal 1 Pebruari 1812; presiden jang terachir dari College tersebut ialah **CRANSSEN**, jang kemudian djuga diangkat mendjadi presiden dari Bench of Magistrates, sehingga banjak kebiasaan-kebiasaan lainnja dari College van Schepenen dahulu masih dilandjutkan dalam masa pendudukan Inggris itu.

Masa pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama. Dalam tahun 1814 berachirlah peperangan antara Perantjis melawan Inggris dan sekutunja dengan kemenangan pada pihak Inggris. Nederland sendiri djuga bangun kembali sebagai negara jang merdeka dengan nama *Koninkrijk der Nederlanden*. Antara pihak Inggris dengan pihak Belanda terdapat kata sepakat untuk mengembalikan semua bekas djadjahan Belanda jang diduduki Inggris kedalam tangan Belanda lagi. Demikianlah maka dalam tahun **1816** Indonesia kembali mendjadi daerah kekuasaan Belanda jaitu kini sebagai djadjahan dari Koninkrijk der Nederlanden. Dengan ini dimulailah masa pemerintahan **Hindia Belanda**.

³⁸⁾ „Geschiedenis van Ned. Indië”, djilid V, bagian B, Het Engelsetusschenbestuur, bab II (Inrichting van bestuur en administratie. Het landrentestelsel), katja 112 dan 115.

³⁹⁾ Idem Supomo/Djokosutono katja 78 — 79.

GEMEENTE BATAVIA

§ 1. PENDAHULUAN

Dengan berachirnja peperangan di Eropah antara Inggeris melawan Perantjis dan tertjapainja persetudjuan antara Inggeris dengan Belanda dengan mana djadjahan-djadjahan Belanda di Indonesia jang diduduki Inggeris akan dikembalikan kepada Belanda, maka pada tanggal 22 September 1814 oleh radja Belanda dibentuklah sebuah komisi terdiri dari **MR. C. TH. ELOUT, G.A.G. PH. BARON VAN DER CAPELLEN** dan **MR. H.W. MUNTINGHE** (beberapa waktu kemudian Muntinghe diganti dengan **A.A. BUYSKES**) untuk menerima kembali penjerahan daerah djadjahan itu dan kemudian mendjalankan pemerintahan atas daerah tersebut.

Pada tanggal 19 Agustus 1816 dipermaklumkanlah dengan resmi timbang terima kekuasaan atas daerah-daerah di Indonesia itu dari tangan Inggeris kepada pihak Belanda. Sudah didalam tahun 1815 oleh Pemerintah Belanda telah ditetapkan suatu peraturan dengan nama *Reglement op het Beleid van de Regeering, het Justitie-wezen, de Cultuur en den Handel in 's Lands Aziatische Bezittingen* jang akan didjadikan pedoman oleh Komisi 3 orang itu dalam mendjalankan pemerintahan di Indonesia. Tetapi ternjata ketentuan-ketentuan dalam Reglement 1815 itu tidak lagi sesuai dengan keadaan di Indonesia jang telah berubah banjak. Perkembangan jang terdjadi semasa pendudukan Inggeris sukar disesuaikan dengan isi Reglement jang dibawa dari Negeri Belanda itu. Oleh karena itu pada tanggal 22 Desember 1818 oleh Komisi tersebut ditetapkan atas nama radja Belanda suatu Reglement jang baru.

Dalam tahun-tahun berikutnya terdjadilah usaha-usaha penjunusan suatu peraturan jang tepat untuk didjadikan pedoman dalam mendjalankan pemerintahan atas daerah-daerah djadjahan di Indonesia itu. Pada tahun 1827 ditetapkan suatu regeeringsreglement; kemudian dalam tahun 1829 oleh Pemerintah Belanda ditetapkan lagi suatu peraturan bernama Reglement op het Beleid der Regeering in Nederlandsch Indië. Reglement dari tahun 1829 itu kemudian diganti lagi dalam tahun 1836. Dan achirnja pada

tanggal 2 September 1854 Pemerintah Belanda di Nederland menetapkan lagi suatu peraturan dengan nama *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch-Indië* yang diundangkan di Indonesia dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië tahun 1855 no. 2. Reglement yang mulai berlaku sedjak 1 Mei 1855 itu merupakan peraturan ketaatanegaraan yang mengatur hal ichwal pemerintahan Hindia Belanda selama 70 tahun lebih.⁴⁰⁾

Menurut Reglement 1854 itu, Pemerintah Hindia Belanda merupakan suatu pemerintahan yang bertjorak sentralistis, jaitu semua kekuasaan negara dipusatkan didalam tangan aparaturnya pusat, ketjuali mengenai desa-desa Indonesia asli yang menurut pasal 71 Reglement tersebut diperkenankan mempunyai alat-alat pemerintahan desa sendiri dan berwenang mengatur kepentingan-kepentingan rumah tangga desanya.⁴¹⁾

Djadi Hindia Belanda adalah suatu *gecentraliseerd geregeerd land*, tetapi disini dijalankan pula suatu *dekonsentrasi*, jaitu pekerdjaan pemerintahan dilimpahkan djuga dari alat-alat pemerintahan pusat yang lebih tinggi kepada pedjabat-pedjabat pusat yang lebih rendah tingkatnja.⁴²⁾

Menurut pasal 68 Regeringsreglement dari tahun 1854 itu, wilajah Hindia Belanda dibagi dalam daerah-daerah administratif *gewesten* (sebagian disebut djuga *residentie*), jaitu lingkungan-lingkungan wilajah djabatan tanpa alat-alat pemerintahan dan keuangan sendiri. Pemerintahan atas *gewesten* itu dijalankan oleh pedjabat-pedjabat Pemerintah Hindia Belanda atas nama gubernur djenderal yang menetapkan instruksi-instruksi dan batas-batas wewenang para pedjabat pusat itu. Kedudukan suatu daerah administratif dapat dibandingkan dengan lingkungan-lingkungan wilajah diatas peta yang dibuat untuk keperluan administrasi atau

⁴⁰⁾ Sedjarah penjurusan reglementen itu diuraikan dengan lengkap dalam buku Mr. Ph. Kleintjes : „Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië”, djilid I, bab Inleiding § 3 (Geschiedkundig overzicht der Regeeringsreglementen), katja 6—19.

Penerbit : J.H. De Bussy, Amsterdam.
Tjetakan ke-3, 1917.

⁴¹⁾ Idem Mr. Ph. Kleintjes : „Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië”, djilid II, katja I.
Tjetakan ke-3, 1918.

⁴²⁾ Prof. Dr. J.H.A. Logemann : „College-aantekeningen over het Staatsrecht van Nederlandsch-Indië”, katja 7 dan katja 114 note.

Penerbit : Uitgeverij W. Van Hoeve, 's-Gravenhage/N.V. Maatschappij Vorkink, Bandung, 1947.

kehakiman seperti distrik-distrik pemilihan atau wilajah hukum suatu badan pengadilan.⁴³⁾

Demikianlah sesuai dengan apa jang tersebut diatas, Stad Batavia dengan daerah-daerah disekelilingnja pada masa pemerintahan Hindia Belanda dalam abad 19 itu merupakan suatu residentie (keresidenan) jang dipimpin oleh seorang residen. Daerah administratif Residentie Batavia dibagi pula setjara administratif dalam lingkungan-lingkungan jang lebih ketjil jang disebut *afdeeling*. Sampai permulaan abad ke-20 kita dapat afdeeling-afdeeling jang berikut :

1. Afdeeling Stad en Voorsteden van *Batavia* ;
2. Afdeeling *Meester Cornelis* ;
3. Afdeeling *Tangerang* ;
4. Afdeeling *Buitenzorg* ;
5. Afdeeling *Krawang*.

Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia (Kota Batavia dan sekitarnja) dikepalai oleh seorang assistent-resident. Afdeeling ini dibagi lagi dalam 4 *districten*, jaitu Pendjaringan, Pasar Senen, Mangga Besar dan Tanah Abang; termasuk pula dalam afdeeling ini ialah pulau-pulau diteluk Batavia dan sebelah utaranja.⁴⁴⁾ Kota Batavia merupakan pula ibunegeri Residentie Batavia serta tempat pusat kedudukan Pemerintah Hindia Belanda.

Tjorak pemerintahan jang sentralistis itu berlangsung hingga tahun 1903. Dalam tahun tersebut oleh Pemerintah Belanda ditetapkanlah suatu *Wet houdende Decentralisatie van het bestuur in Nederlandsch-Indië* (disingkat Decentralisatiewet)⁴⁵⁾ jang menambah Regeringsreglement 1854 dengan 3 pasal baru jaitu pasal 68a, 68b dan 68c sehingga Reglement tersebut memuat ketentuan-ketentuan jang memungkinkan pembentukan gewesten atau bagian dari gewesten jang mempunyai keuangan sendiri untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dari pada daerah tersebut; pengurusan atas keuangan

⁴³⁾ Buku Kleintjes (tjataan 40 diatas) katja 62.

⁴⁴⁾ Staatsblad 1901 no. 63 jo S. 1904 no. 426.

⁴⁵⁾ Wet tanggal 23 Djuli 1903, termuat dalam Nederlandsch Staatsblad 1903 no. 219; diundangkan di Indonesia dalam Staatsblad van N.I. 1903 no. 329. Tjataan tambahan : sedjarah pembentukan U.U. Desentralisasi itu setjara singkat dapat dibatja dalam buku Kleintjes diatas, jilid II, katja 2—4.

tersendiri itu dilakukan oleh sebuah dewan jang dibentuk bagi daerah itu.

Pengaturan lebih lanjut dari prinsip-prinsip jang ditetapkan dalam Undang-undang Desentralisasi 1903 itu dilakukan dengan *Decentralisatie-Besluit* ⁴⁶⁾ dan *Locale Raden-ordonnantie*. ⁴⁷⁾

Menurut kedua peraturan pelaksanaan itu, dewan jang dibentuk untuk gewesten dinamakan *Gewestelijke raad*, dan jang untuk bagian dari gewest dinamakan *Plaatselijke raad*. Dan untuk membedakannya dengan plaatselijke raad lainnya, maka dewan jang dibentuk bagi suatu kota (kota djuga merupakan bagian dari suatu gewest) dinamakan djuga *Gemeenteraad*. Selanjutnya maka baik gewestelijke maupun plaatselijke raden itu setjara umum disebut *locale raden*. Sedang gewest atau bagian dari gewest itu sendiri disebut *ressort* dari pada raad jang bersangkutan (*Locaal ressort*).

Demikianlah setelah segala persiapan selesai dilakukan, mulai tahun 1905 berangsur-angsur tjorak pemerintahan jang sentralistis ditinggalkan dengan dibentuknja daerah-daerah jang mempunyai keuangan dan alat pemerintahan daerah sendiri. Kota Batavia memperoleh kehormatan sebagai daerah jang mula-mula dibentuk itu.

§ 2. PEMBENTUKAN ⁴⁸⁾

Mulai tanggal 1 April 1905 Kota Batavia ditetapkan sebagai sebuah *locaal ressort* jang mempunyai keuangan sendiri lengkap berikut dewannya dengan nama **Gemeente Batavia**.

⁴⁶⁾ Keputusan Radja tanggal 20-12-1904 no. 39, Staatsblad van N.I. 1905 no. 137; dan sedjak itu berulang-ulang diubah.

⁴⁷⁾ S. 1905 no. 181; kemudian djuga berulang-ulang diubah.

⁴⁸⁾ Selain berdasarkan staatsblad² dan sumber² lainnya jang disebutkan dalam tjatatan², maka uraian selanjutnya mengenai hal ichwal Gemeente Batavia dibawah ini pada umumnya disusun dari buku² jang berikut :

- a. Verslag van den toestand der Gemeente Batavia over 1912 (memuat djuga bahan² keterangan dari tahun 1905 — 1911);
- b. Idem Verslag over 1917 (memuat pula bahan² keterangan dari tahun 1913 — 1916);
- c. Idem Verslag over 1918;
- d. Idem Verslag over 1919 — 1920;
- e. Verzameling van op 1 Januari 1925 geldende verordeningen van Gemeente Batavia (Verzameld en gerangschikt ter Gemeentesecretarie);

(bersambung dipagina berikutnya)

Pembentukan itu dilakukan dengan ordonansi tanggal 18 Maret 1905 jang dimuat dalam Staatsblad tahun 1905 no. 204.⁴⁹⁾ Batas-batas wilayah Gemeente Batavia adalah sama seperti batas-batas ibunegeri Batavia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Djenderal tanggal 27 Oktober 1904 no. 19 (Staatsblad 1904 no. 426), wilayah itu meliputi Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia dengan diketjualikan pulau-pulau jang ada diteluk Batavia; luasnja ialah lebih kurang 125 km persegi.

§ 3. PEMBAGIAN-PEMBAGIAN DALAM WILAJAHNJA

Untuk pelbagai maksud dan tudjuan, maka wilayah Gemeente Batavia dibagi dalam satuan-satuan lingkungan jang tertentu.

Untuk keperluan menjalankan pemerintahan pamongpradja, pada tahun 1908 pembagian administratif dari Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia diatur baru sehingga sedjak tahun tersebut terbagi dalam 2 *district* dan 6 *onderdistrict* jang dikepalai oleh para wedana dan assistent-wedana.⁵⁰⁾ Sepandjang berkenaan dengan penduduk bangsa Indonesia, tiap-tiap *onderdistrict* itu dibagi dalam *wijk-wijk* jang semuanya berdjumlah 27 buah, dan masing-masing *wijk* itu dibagi lagi dalam *kampong-kampong*. Ichtsar pembagian daerah administratif itu adalah sebagai berikut :

Djilid (Afdeeling) A : Belastingen en andere heffingen.
Batavia, Januari 1925.

f. Idem Verzameling;

Djilid B : Verordeningen op den verkoop van eet- en drinkwaren enz.
Batavia, Februari 1925.

g. Idem Verzameling;

Djilid C : Gemeentebedrijven e.d.
Batavia, April 1925.

h. Idem Verzameling;

Djilid D : Bouwen en wonen, Rooilijnen, Orde en Verkeer enz.
Batavia, Mei 1925.

i. Verzameling van op 1 Januari 1926 geldende verordeningen van Gemeente Batavia;

Djilid E : Personeelsbepalingen.
Batavia, Januari 1926.

⁴⁹⁾ Kemudian diubah dengan S. 1916 no. 508, 1917 no. 537 dan 1925 no. 674.

Tjataan tambahan : Ordonansi pembentukan Gemeente Batavia itu jang disusun lengkap dengan perubahan²nja terdapat dalam buku „Wetten en Verordeningen betreffende het Staatsrecht van Nederlandsch-Indië“ (Diterbitkan dibawah penilikan R. Van Dijk), katja 259 — 262.
Penerbit: Uitgeverij W. van Hoeve, 's-Gravenhage, 1947.

⁵⁰⁾ S. 1908 no. 79 jo S. 1912 no. 417.

District	Onderdistrict	Wijk	Kampung
I. Batavia.	1. Manggabesar.	1. Manggadua.	1. Jaagpad.
			2. Manggadua.
		2. Kebondjeruk.	3. Manggabesar.
			4. Kebondjeruk.
			5. Sawahbesar.
	2. Pendjaringan.	3. Pasarbaru.	6. Pintubesi.
			7. Gg. Stroentji.
		4. Gunungsahari.	8. Gunungsahari.
		5. Kebonklapa.	9. Kebonklapa.
			10. Noordwijk.
			11. Petjenongan.
		6. Pendjaringan	12. Luarbatang.
			13. Fluit.
			14. Pendjaringan.
			15. Pedjagalan (Petjebokan).
		7. Djembatanlima.	16. Djembatanlima wetan.
			17. Djembatanlima kulon.
			18. Blandongan.
II. Weltevreden.	3. Tandjung Priok.		19. Klenteng.
		8. Krukut.	20. Petjebokan.
			21. Tanahsereal.
			22. Krukut.
			23. Petodjo Ilir.
			24. Gang Chassé.
		9. Angkéduri.	25. Angké.
			26. Duri.
			27. Tandjung kramat.
			28. Petodjo sawah.
	4. Gambir.	10. Tandjung Priok.	29. Bangliauw.
		11. Antjol.	30. Tandjung Priok.
			31. Antjol.
	12. Gambir.		32. Sunter.
			33. Pedjambon.
			34. Parapatan Ke- bonsirih.
			35. Parapatan G. Timbul.
		13. Kondangdia.	36. Pengarengan.
			37. Kondangdia.
		14. Menteng.	38. Tjikini.
			39. Menteng.
			40. Pegangsaan.

District	Onderdistrict	Wijk	Kampung
		15. Tanahabang.	41. Bali Tanahabang. 42. Pasarbaru Tanah Abang. 43. Pasarbaru Karet. 44. Karet Pasarbaru
		16. Karet.	45. Karet Bendungan. 46. Karet Pedurenan.
	5. Senen.	17. Senen.	47. Ketapang. 48. Djagal. 49. Gang Kadiman.
		18. Kemajoran.	50. Kemajoran Kulon. 51. Utanpandjang.
		19. Tjempakaputih.	52. Tjempakaputih. 53. Sumurbatu.
		20. Tanahtinggi atau Kwitang Oost.	54. Tanahtinggi. 55. Kramat tanah-tinggi.
		21. Kramat.	56. Kramat lontar 1. 57. Kramat lontar 9. 58. Kramat pulo.
		22. Kwitang.	59. Kwitang.
		23. Salemba.	60. Salembabesar.
	6. Tanahabang.	24. Petodjo.	61. Petodjo sawah. 62. Petodjo udik. 63. Kebondjahe. 64. Gelangbaru.
		25. Selipi.	65. Selipi. 66. Pékembangan.
		26. Djati.	67. Kotabambu. 68. Petamburan (Djati).
		27. Djepang.	69. Djepang. 70. Bendungan. 71. Petunduan.

Untuk keperluan tugas pekerdjaan kepolisian, wilajah Gemeente Batavia mula-mula dibagi dalam 5 *afdeeling*, jaitu Tandjung Priok, Glodok, Pasarbaru, Tanahabang dan Kramat. Tetapi kemudian diubah menjadi 2 *afdeeling* jang besar (Batavia dan Weltevreden) dan masing-masing *afdeeling* dibagi lagi dalam 3 *seksi* sebagai berikut :

- I. Afdeeling Batavia : Seksi ke-1 Tandjung Priok;
Seksi ke-2 Pasarbaru;
Seksi ke-3 Pendjaringan;
- II. Afdeeling Weltevreden : Seksi ke-4 Tanahabang;
Seksi ke-5 Gondangdia (Gambir);
Seksi ke-6 Senen.

Tiap-tiap seksi kepolisian itu meliputi *wijk-wijk Eropah* dan dikepalai oleh seorang Komisaris polisi kelas 2 jang djuga dibebani tugas sebagai Europeesch Wijkmeester. Tiap-tiap afdeeling dikepalai oleh seorang Komisaris polisi kelas 1, dan kedua-duanja berada dibawah pimpinan seorang Komisaris Polisi Kepala.

Untuk keperluan pemilihan anggota-anggota Gemeenteraad, wilajah Gemeente Batavia dengan peraturan Gemeenteraad dari tanggal 17 Djuni 1908 (Verordening tot verdeeling der Gemeente Batavia in stembedistricten, diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 19 Djuni 1908 no. 49) dibagi dalam 4 *distrik pemungutan suara*. Kemudian dalam tahun 1920 dengan peraturan tanggal 9 Pebruari 1920 (Javasche Courant 27 Pebruari 1920 no. 17) stembedistrict itu diubah mendjadi 5 buah.

Untuk keperluan pengawasan jang baik dan kontrolle jang lebih keras terhadap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan umum, maka Gemeente Batavia dibagi pula dalam 4 *opzichters-afdeelingen van Gemeentewerken*.

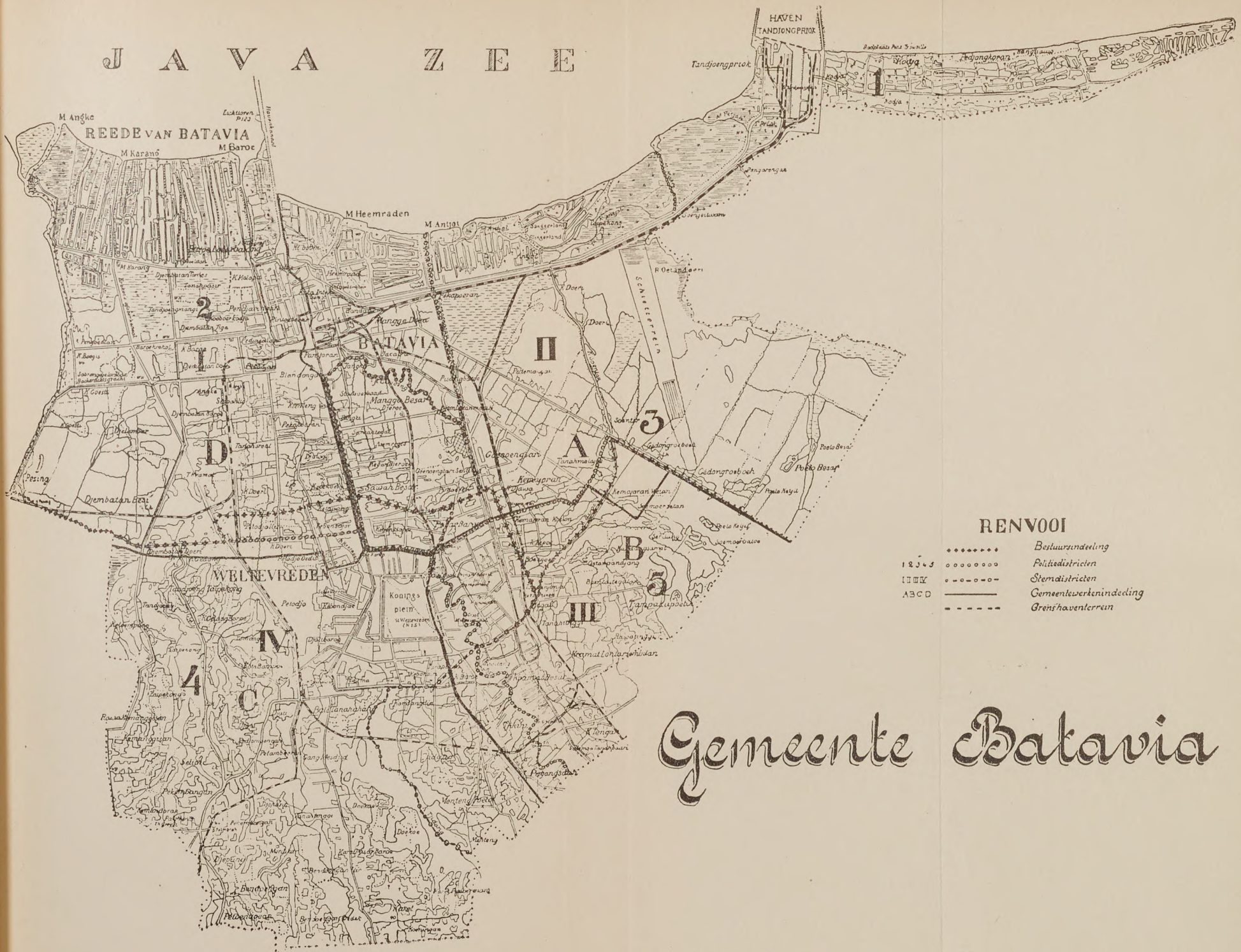
Dalam tahun 1919 berkenaan dengan penjelenggaraan pentjataan penduduk golongan Eropah dan mereka jang dipersamakan dengan golongan tersebut, maka untuk keperluan pelbagai dinas Gemeente, dengan Keputusan Burgemeester tanggal 1 Nopember 1919 no. 5031 wilajah Gemeente Batavia dibagi dalam 10 afdeeling.

Selandjutnja ada pula pembagian lainnja terhadap wilajah Gemeente jaitu dalam *brandweer-rayons* untuk kepentingan barisan pemadam kebakaran.

§ 4. APARATUR PEMERINTAHAN

Menurut ketentuan pasal 7 dari ordonansi pembentukan Gemeente Batavia ditetapkan bahwa untuk Gemeente tersebut dibentuk sebuah dewan jang disebut *de Gemeenteraad van Batavia*. Susunannja terdiri dari 25 orang anggota, jaitu 15 orang Eropah (atau jang dipersamakan dengan orang Eropah), 7 orang Indonesia dan 3 orang Timur Asing. Dalam tahun 1917

J A V A Z E E



PETA WILAJAH GEMEENTE BATAVIA
dengan pembagian-pembagian didalam lingkungannya
(keadaan pada tahun 1912).

djumlah anggota itu diubah mendjadi 27 orang dengan susunan sebagai berikut : ⁵¹⁾

15 onderdanen-Nederlanders (kaulanegara orang Belanda);

8 inheemsche onderdanen niet Nederlanders (kaulanegara penduduk asli jang bukan orang Belanda);

4 uitheemsche onderdanen niet Nederlanders (kaulanegara penduduk tak-asli jang bukan orang Belanda).

Keanggotaan itu mula-mula sebagian diangkat dan ditundjuk serta sebagian lagi dipilih. Tetapi sedjak tahun 1917 dengan adanya penambahan tersebut diatas ditetapkan pula bahwa semuanya harus dipilih, jaitu untuk masa 6 tahun lamanja; dalam tahun 1925 masa duduk diubah mendjadi 4 tahun. ⁵²⁾

Oknum-oknum jang pertama-tama mendjadi anggota Gemeenteraad van Batavia ialah :

a. Anggota-anggota golongan Eropah :

1. **MR. A. MACLAINE PONT;**
2. **MR. DR. H. ZAALBERG;**
3. **P.A.J. MOOJEN;**
4. **MR. H. JELGERHUIS SWILDENS;**
5. **P.A. DE NIJS BIK;**
6. **W.C. LONDON;**
7. **MR. DR. W.M.G. SCHUMANN;**
8. **J. GRAAFF;**
9. **E. LANKHOUT;**
10. **S.R.J. ONNEN;**
11. **D. RENS;**
12. **J. STIGTER;**
13. **J. SIJPKENS BROUWERS;**
14. **MR. P.R. HGORWEG;**
15. **L.J. GINJOOLEN;**

b. Anggota-anggota golongan Indonesia :

16. **R.R. ADJIT;**
17. **R.B. DJAJANEGARA;**
18. **R. SABAROEDIN;**

⁵¹⁾ S. 1917 no. 587 jo S. 1925 no. 674.

⁵²⁾ S. 1925 no. 675; mengubah pasal 10 Locale Raden-ordonnantie.

19. **R.M.A. DHIPOKOESOEMO;**
 20. **R. DJAJA;**
 21. **R. PRAWIROASASRO;**
 22. **MAS DJAJADIREDA;**
- c. Anggota-anggota golongan Tionghoa :
23. **KHOUW KIM AN;**
 24. **THUNG BOUW KIAT;**
- d. Anggota golongan Arab :
25. **S. OE. BAHASJOEAN.**

Sebagai ketua dari pada Gemeenteraad van Batavia, dalam ordonansi pembentukan itu pula telah ditundjuk Hoofd van Plaatselijk Bestuur, jaitu assistent-resident Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia. Assistent-resident jang pertama mendjadi ketua dewan dalam tahun 1905 itu ialah **KREISCHER**. Kemudian dalam tahun 1907 diganti oleh **W.J. KETJEN** jang mendjabat sampai tahun 1910. Selanjutnja berturut-turut assistent-resident jang merangkap mendjadi ketua Gemeenteraad van Batavia ialah **C. CANNE** sampai 1 April 1915, **H. ALTMANN** sampai 1 Desember 1915 dan terakhir **R. PH. M. VAN DER MEER** hingga tanggal 21 Agustus 1916.

Sampai tahun 1916 itu belum ada djabatan *burgemeester* (walikota) atau ketua dewan jang tersendiri. Demikian pula djabatan *wethouder* (anggota Dewan Pemerintah Daerah) belum ada, karena dalam peraturan-peraturan perundangan desentralisasi jang dikeluarkan sedjak tahun 1903 belum diatur adanja kemungkinan itu. Baru kemudian dalam tahun 1916 Decentralisatie-Besluit dari tahun 1904 *diubah* ⁵³⁾ sehingga memuat ketentuan bahwa untuk suatu gemeente tertentu dapat diangkat seorang ketua gemeenteraad tersendiri oleh gubernur djenderal, ketua dewan jang diangkat itu memakai sebutan *burgemeester*. Sedang adanja djabatan wethouder baru dimungkinkan dalam tahun 1922 dengan keluarnya ordonansi ⁵⁴⁾ jang mengubah Locale Raden-ordonnantie dengan mana dalam ordonansi tersebut disisipkan bab IIIA jang memuat ketentuan mengenai hal ichwal pedjabat wethouders.

⁵³⁾ Dengan keputusan radja tanggal 17-3-1916 no. 55, S. 1916 no. 506; mengubah Decentralisatie-Besluit pasal 3 ayat (3) dan (4).

⁵⁴⁾ Lihat S. 1922 no. 327.

Dengan terbukanya kemungkinan tersebut diatas, maka dengan ordonansi tanggal 20 Djuli 1916 (Staatsblad 1916 no. 508) pasal 7 ayat (3) dari ordonansi pembentukan Gemeente Batavia diubah sehingga ketentuan bahwa jang mendjadi ketua dewan adalah Hoofd van Plaatselijk Bestuur tidak lagi tertjantum, dan sebagai gantinya ditetapkan bahwa ketua dewan akan diangkat oleh gubernur djenderal.

Demikianlah dengan Gouvernementbesluit tanggal 5 Agustus 1916 no. 5 diangkatlah **MR. GERARDUS JOHANNES BISSCHOP** sebagai walikota Gemeente Batavia jang pertama. Djabatan itu dipangkunja hingga tahun 1920. Kemudian sebagai gantinya dengan keputusan gubernur djenderal tanggal 6 Agustus 1920 no. 2 diangkatlah sebagai burgemeester **MR. ARNOLD MEYROOS**.

Disampingnja djabatan burgemeester itu ada pula djabatan *plaatsvervangend burgemeester / loco burge-meester* (pengganti walikota) jang bertugas mewakili walikota apabila pedjabat tersebut berhalangan mendjalankan tugas peker-djaannja. Sebagai pengganti walikota itu dalam tahun 1917 diangkatlah anggota gemeenteraad Mr. Dr. W.M.G. Schumann. Kemudian dalam tahun 1920 ditundjuklah **H. VAN BREEN** untuk memegang djabatan itu. Jang achir ini diganti pula oleh **H.C. KERKKAMP** dalam tahun 1920. Seterusnja jang mendjadi plaats-vervangend burgemeester itu ialah **R. A. SCHOTMAN, H. F. STREIFF** dan **A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH**.

Dalam mendjalankan tugas wewenangnja itu Gemeenteraad van Batavia membentuk pelbagai *commissie* jang terdiri dari pada anggota-anggotanja. Komisi-komisi itu pada pokoknja dapat dibedakan dalam 2 djenis jaitu komisi tetap (*vaste commissiën*) dan komisi ad hoc. Hingga achir tahun 1912 kita dapati komisi-komisi tetap jang berikut :

- I. Commissie voor de Financiën (Komisi Keuangan);
- II. Beheerscommissiën, ini terdiri atas bermacam-macam komisi sebagai berikut :
 1. Pasarcommissie;
 2. Commissie voor het Slachtbedrijf (Komisi untuk Perusahaan Pemetongan Hewan);
 3. Commissie van toezicht op het beheer van het Land Menteng (Komisi pengawas atas pengurusan tanah didaerah Menteng);

4. Commissie voor het aangaan en beheer der geldleening (Komisi untuk mengadakan dan mengurus pindjaman uang);
5. Commissie voor het Legaat Rijkschroeff (Komisi mengenai hibah Rijkschroeff);
6. Schouwburg-commissie (Komisi gedung kesenian);

III. Commissiën van advies, ini meliputi :

1. Technische Commissie;
2. Commissie voor de opneming van voltooide werken (Komisi pemeriksa pakerdjaan-pakerdjaan jang telah diselesaikan);
3. Commissie voor de wetgeving (Komisi perundang-undangan);
4. Commissie voor de spoorwegtoestanden (Komisi untuk keadaan djalan kereta api);
5. Commissie tot onderzoek van pondok en kampoengtoestanden (Komisi penjelidik keadaan perumahan dan kampung rakjat);
6. Concessiën-commissie.

Matjam-matjam komisi ad hoc jang telah dibentuk ialah :

1. Commissie tot vaststelling van de kiezerlijst voor 1912 (Komisi penetapan daftar pemilih tahun 1912);
2. Commissie voor de wegen;
3. Commissie voor den waterafvoer en de watervoorziening;
4. Kondangdia-commissie;
5. Commissie tot onderzoek der begrooting van onvangsten en uitgaven voor 1913 (Komisi penjelidik anggaran keuangan tahun 1913);
6. Raadhuiscommissie.

Dalam tahun-tahun berikutnja dibentuklah pelbagai komisi jang berikut :

1. Commissie voor openbare werken;
2. Commissie voor het Decapark;
3. Onderwijscommissie;
4. Bibliotheek-commissie;
5. Hygiënische-commissie;
6. Schoonheids-commissie;

7. Commissie tot voorbereiding eener algemeene regeling van de toekenning en het bedrag van transportkostenvergoeding (Komisi persiapan untuk menetapkan peraturan tentang pemberian dan djumlah penggantian ongkos pengangkutan);
8. Bestuur van het Kramat-Kwitangfonds (Komisi pengurus Dana Kramat-Kwitang);
9. Bestuur der Rijksschroeff-stichting (Pengurus Jajasan Rijksschroeff);
10. Commissie van toezicht op het marktwezen (dahulu Pasar-commissie), kemudian berhubung dengan diadakannya reorganisasi dalam dinas pasar, dalam tahun 1918 diganti dengan Commissie van advies voor het marktwezen (Komisi penasihat untuk urusan pasar);
11. Commissie voor de Rijstdistributie (Komisi pembagian beras);
12. Commissie tot het uitbrengen van advies inzake het voorstel tot invoering van zelfbestuur der Havenraden;
13. Bezwaarschriften-commissie (Komisi surat-surat keberatan);
14. Commissie als bedoeld in artikel 15a der Bataviasche Ambtenarenverordening (Beroep conducte-staten);
15. Commissie als bedoeld in artikel 29 lid 4 der Bataviasche Ambtenarenverordening (Pensioenfonds);
16. Commissie als bedoeld in artikel 50 der Bataviasche Ambtenarenverordening (Beroep opgelegde straf);
17. Commissie van toezicht op de Begraafplaatsen voor lijken van Inlanders (Komisi pengawas pekuburan untuk golongan Indonesia);
18. Commissie van beheer van de Begraafplaats voor Inlandsche Christenen (Komisi pengelola pekuburan untuk golongan Indonesia jang beragama kristen);
19. Commissie van toezicht op het beheer van de Begraafplaatsen voor lijken van Europeanen en daarmede gelijkgestelden;
20. Commissie van Bijstand voor Grond- en Woningzaken;
21. Hypotheekbankcommissie;
22. Commissie voor den Bureau-cursus;
23. Jaarmarktcommissie;
24. Commissie voor de f. 700.000 geldleening 1911;
25. Commissie voor de f. 4.500.000 geldleening 1917;
26. Commissie voor de f. 2.000.000 geldleening 1920;
27. Commissie voor de f. 5.000.000 geldleening 1921;

28. Commissie van voorlichting inzake het eventueel treffen van een plaatselijke regeling van de Armenverzorging;
29. Europeesche Schoolcommissie;
30. Salariscommissie;
31. Commissie voor samenstellen van de Kiezerslijst (pada tiap-tiap tahun diadakan pemilihan anggota dewan).

Selandjutnja ada beberapa anggota gemeenteraad yang ditundjuk untuk duduk dalam beberapa komisi yang bukan merupakan komisi dari gemeenteraad tersebut seperti Commissie van Bijstand in het belang van het beheer van de Haven Tandjong Priok, Gezondheidscommissie voor de Hoofdplaats Batavia dan Huurcommissie.

Selama pemerintahan Gemeente Batavia kita dapati beberapa oknum Indonesia yang duduk sebagai anggota gemeenteraad yang hingga kini masih terkenal, antara lain ialah **DR. HOESEN DJAJADININGRAT**, ahli sedjarah dan bahasa yang kemudian diangkat mendjadi mahaguru; **DR. MAS SARDJITO**, kini djuga mendjadi mahaguru merangkap presiden **Universitas Gadjah Mada**; **SUTAN MOHAMMAD ZAIN**, ahli bahasa yang banjak djuga mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia dengan bukunya „*Djalan Bahasa Indonesia*” dan „*Kamus Modern Bahasa Indonesia*”; ⁵⁵⁾ **ABDOEL MOEIS**, selain seorang politikus dan wartawan, djuga pada dewasa ini lebih terkenal sebagai sasterawan yang tergolong dalam angkatan tua dan sangat produktif, antara lain hasil karjanja yang termasjhur ialah „*Salah Asuhan*”. ⁵⁶⁾ Buku *Salah Asuhan* merupakan salah satu buku roman yang terindah dalam bahasa Indonesia, ⁵⁷⁾ dan hingga kini telah ditjetak-ulang untuk ketudjuh kalinya.

⁵⁵⁾ Buku „Pekan Buku Indonesia”, katja 84-85. Buku ini diterbitkan oleh N.V. Gunung Agung Djakarta berkenaan dengan diselenggarakannya Pekan Buku Indonesia di Djakarta pada tanggal 8-14 September 1954.

⁵⁶⁾ Dr. A. Teeuw: „*Voltooid Voorspel*”, Indonesische literatuur tussen twee werelddoorlogen, Katja 97.

Penerbit: Jajasan Pembangunan (Stichting de Opbouw) Djakarta, 1950.

Tjataan tambahan : Buku ini telah diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Angku Raihul Amar gelar Datuk Besar dengan kepala „Pokok dan Tokoh dalam kesusasteraan Indonesia baru”, diterbitkan oleh penerbit yang sama.

⁵⁷⁾ Amal Hamzah: „Buku dan Penulis”, kumpulan uraian beberapa buku roman Indonesia, Katja 35.

Penerbit: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan ke-3, 1957.

Dan seorang oknum lain jang kini hari wafatnja masih selalu diperingati dan namanja diabadikan untuk menjebut suatu djalan raja di Djakarta ialah **MOHAMMAD HOESNI THAMRIN**, seorang *tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda* jang paling terkemuka dan sangat terpandang dalam segala golongan; kebidjaksanaan dan ketadjaman otaknja dalam berdebat atjapkali mendesak Pemerintah ketempat jang sulit sehingga Pemerintah itu kehabisan djawab. ⁵⁸⁾ Thamrin dari seorang anggota biasa jang dalam dewan gemeente selalu memperdjuangkan kepentingan penduduk Djakarta, kemudian berhasil menandjak hingga achirnja maendjadi Loco Burgemeester I, selain itu merangkap pula mendjadi anggota Volksraad (Badan Perwakilan Rakjat Hindia Belanda); pemitjaraannja diatas mimbar Volksraad selalu mendapat perhatian, dan ketika meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1941 gedung Volksraad dan Gemeenteraad mengibarkan bendera setengah tiang, pemakamannja mendapat pula perhatian jang sangat besar dari masjarakat. ⁵⁹⁾

§ 5. APARATUR KEPEGAWAIAN

Selain mempunjai aparatur pemerintahan jang mengemukakan haluan politik dan kebidjaksanaannja, Gemeente Batavia mempunjai pula alat-alat perlengkapan kepegawaian jang ikut memutarkan roda pemerintahan daerah tersebut.

Dalam tahun-tahun permulaannja aparatur kepegawaian itu masih sederhana susunannja. Aparatur jang terutama ikut membantu gemeenteraad dalam mendjalankan pemerintahan ialah *Gemeente-secretarie* (Sekretariat). Aparatur ini mengurus semua administrasi dewan, dikepalai oleh seorang sekretaris jang membantu dewan, ketua dewan dan komisi-komisi dewan dalam segala pekerdjaannja.

⁵⁸⁾ D.M.G. Koch: „Menudju Kemerdekaan“, sedjarah pergerakan kebangsaan Indonesia sampai 1942. Katja 166 dan 178.
Penerbit: Jajasan Pembangunan Djakarta, 1951.

Tjatatatan tambahan : buku ini aslinja dalam bahasa Belanda dengan titel „Om de Vrijheid, de nationalistische beweging in Indonesië“. Terdjemahanja kedalam bahasa Indonesia dilakukan oleh Abdoel Moeis.

⁵⁹⁾ Matu Mona : „Riwayat Penghidupan dan Perdjuangan M. Husni Thamrin“, katja 14-15, 74, 79 dst.
Penerbit: Pustaka Timur. Medan. 1950.

Nama-nama jang pernah mendjadi sekretaris gemeente ialah **MR. I. HEN**, kemudian **MR. J. RIPHAGEN** sampai tahun 1918. Seterusnya berturut-turut ialah **MR. W. SNELEN** hingga tahun 1920 dan lalu **D. VAN DER ZEE**.

Kantor Sekretariat itu hingga tahun 1912 terletak di Binnen-Nieuwpoortstraat (Gedung Balai Kota dari masa pemerintahan V.O.C.). Kemudian dalam tahun 1913 pindah ke Tanah Abang Barat no. 35 dan sedjak tahun 1919 di Koningsplein Zuid no. 9 (gedung lama Balai Kota Djakarta jang sekarang).

Selain gemeente-secretarie kita dapati aparatur-aparatur jang berikut :

- a. Kantor der belasting op de openbare vermakelijkheden;
- b. Kantoor der Gemeentewerken, ini meliputi dinas-dinas:
 - 1. Dienst der gemeentewerken;
 - 2. Reinigings- en besproeiingsdienst;
 - 3. Drinkwatervoorziening;
- c. Kantoor van het Rooiwezen;
- d. Dienst van het Marktwezen.

Kemudian sedjak tahun 1911 barulah dibentuk *Djawatan Kesehatan Kehewan* (Veterinair Hygiënische Dienst) jang bertugas dalam lapangan urusan kesehatan persediaan daging (vleeshygiëne) jaitu menjelenggarakan pemeriksaan pemotongan hewan dan pemeriksaan daging. Tugas djawatan itu kemudian meluas pula hingga meliputi urusan kesehatan persediaan susu (melkhygiëne) dan urusan kesehatan kandang dan perusahaan kehewan (stal- en bedrijfshygiëne). ⁶⁰⁾

Selanjutnja baru lebih dari 10 tahun kemudian sedjak adanya dinas kesehatan dalam lapangan kehewan itu diadakan *Djawatan Kesehatan Kota* (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Djuga beberapa djabatan tertentu barulah lama kemudian sedjak terbentuknja Gemeente Batavia diadakannja seperti djabatan *ben-dahari* (gemeente-ontvanger) dan *inspektur keuangan* (Inspecteur der gemeentefinanciën), kedua-duanja baru diadakan

⁶⁰⁾ Artikel Th. E.W. Umbek (Kepala Djawatan Kehewan Kota Djakarta) berkepala „Soal Urusan Kehewan dalam Kotapradja”, termuat dalam „Suara Daerah Kota-kota Swatantra, Djanuari 1958”, katja 9-10 (Rangkaian Publikasi Swatantra no. 4, dikeluarkan oleh Sekretariat Permanen Konperensi Walikota I, Djakarta).

sedjak tahun 1918. Sebelum itu penerimaan dan pembayaran uang bagi gemeente dilakukan oleh pegawai kas negara jang disampingnja mengurus kas pusat djuga disertai tugas pekerdjaan dari gemeente itu.

§ 6. TUGAS DAN WEWENANG

Menurut ordonansi pembentukannja pasal 3 dan 5, kepada Gemeente Batavia diserahkan tugas pengurusan atas hal-hal jang berikut :

- a. pemeliharaan, perbaikan, pembaharuan dan pembuatan djalan-djalan umum, lapangan-lapangan dan taman-taman berikut tanamannja, tepi-tepi djalan, tanggul-tanggul, parit-parit, sumur-sumur, papan-papan nama djalan dan penundjuk djarak, djembatan-djembatan, turap-turap, pangkalan-pangkalan, got-got, selokan-selokan dan pekerdjaan-pekerdjaan umum lainnja, selandjutnja djuga tempat-tempat mandi dan kakus umum, kubangan untuk kuda, rumah pemotongan hewan, ruangan-ruangan pasar, gedung kesenian dan perumahan para pegawai gemeente;
- b. penjiraman djalan, lapangan dan taman serta pengambilan sampah dari tempat-tempat tersebut;
- c. pembuatan tempat-tempat pekuburan, kesemuannja atas biaja jang diambilkan dari keuangan gemeente sendiri dan tidak lagi mendjadi tanggungan pemerintah pusat.

Penjelenggaraan urusan-urusan tersebut diatas meliputi seluruh wilajah gemeente dengan diketjualikan *wilajah-wilajah* (terreinen) *jang berada dibawah penguasaan militer* dan *djawatan kereta api* serta *wilajah pelabuhan* (eigenlijke haven terrein) *Tandjung Priok*.

Batas-batas wilajah Pelabuhan Tandjung Priok ditetapkan dengan keputusan gubernur djenderal dalam Staatsblad 1905 no. 234, kemudian beberapa kali diubah, terachir dengan Staatsblad 1929 no. 16. Bagi wilajah Pelabuhan Tandjung Priok itu, penyelenggaraan urusan-urusan seperti disebutkan diatas (pemeliharaan djalan, selokan dan lain-lain) dilakukan oleh aparatur pemerintah pusat dan atas biaja pusat pula.

Selandjutnja jang termasuk djuga dalam lingkungan tugas wewenang Gemeente Batavia ialah memadjukan kesehatan

umum dan lalulintas didalam wilajahnja. Demikian pula mendjalan-kan peraturan-peraturan jang telah ditetapkanja sendiri maupun peraturan-peraturan jang ditugaskan dari pusat, menetapkan anggaran keuangan daerahnja serta mengangkat dan menggadji aparatur pegawai gemeente. Sesuai pula dengan sifatnja sebagai suatu kota dimana banjak kemungkinan terdjadinja bentjana dari api, maka gemeente mengurus pula tugas pekerdjaan pemadaman kebakaran lengkap dengan barisan pemadam kebakarannja.

Dalam perkembangan selandjutnja, Gemeente Batavia menje-lenggarakan pula urusan dalam lapangan pendidikan dan pengadja-ran jaitu mengurus Volkscholen, Europeesche lagere scholen, Hol-landsch Chineesche scholen, Hollandsch Inlandsche scholen dan gemeentelijke bureaucursus.

Demikianlah dalam garis besarnja tugas pekerdjaan Gemeente Batavia jang pada umumnja mengenai kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan setempat, dari pemeliharaan kotanja sampai kepada urusan kebersihan dan kesehatan penduduk, pen-didikan rakjat, kelantjaran lalulintas dan sebagainya.

§ 7. PERUNDANG-UNDANGAN

Suatu tjiri jang terutama dari Gemeente Batavia sebagai satuan pemerintahan jang mengatur daerahnja sendiri ialah wewenang gemeenteraad dalam lapangan perundang-undangan, jaitu menetapkan *peraturan-peraturan daerah* (locale verordening-en) mengenai pokok-pokok jang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan dari daerahnja. Sebagai pembatasan dari wewenang tersebut ditentukan bahwa dalam peraturan-peraturan daerah itu tidak boleh dimuat ketentuan-ketentuan jang mengenai hal-hal jang telah diatur dalam peraturan perundangan pusat atau peraturan dari local ressort jang wilajahnja meliputi gemeente (ressort van gewes-telijke raad). Selandjutnja suatu peraturan gemeente tidak berlaku lagi apabila hal-hal jang diaturnja itu diatur lagi oleh peraturan perundangan pusat atau peraturan local ressort lainnja jang berlaku untuk wilajah gemeente. ⁶¹⁾

Lain dari pada itu menurut Locale Raden-ordonnantie pasal 48 kepada gemeenteraad diserahkan pula wewenang untuk menetapkan *reglementen en keuren van politie* (peraturan-

⁶¹⁾ Decentralisatie-besluit pasal 12 juncto Locale Raden-ordonnantie pasal 51.

peraturan untuk mendjalankan pemerintahan dan ketertiban dengan memuat sanksi hukuman) jang berada didalam tangan hoofd van gewestelijk bestuur (resident).

Dewan gemeente berwenang pula mengubah, menambah, mentjabut atau mengganti reglementen dan keuren dari resident itu jang berlaku didalam lingkungan wilajahnja.

Selandjutnja menurut pasal 54 Locale Raden-ordonnantie, dalam peraturan-peraturan daerahnja gemeenteraad berwenang mentjantumkan antjaman pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran atas peraturan jang ditetapkanja itu jaitu berupa pidana kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja 100 rupiah, baik dengan atau tanpa penjitaan benda-benda tertentu. ⁶²⁾

Pengawasan terhadap Gemeente Batavia pada umumnja dilakukan oleh gubernur djenderal. Dalam hubungannja dengan peraturan-peraturan gemeente, pengawasan itu dapat dibedakan dalam pengawasan preventip jaitu berupa kewadjiban gemeente untuk meminta pengesahan terlebih dahulu dari gubernur djenderal sebelum peraturan-peraturan daerah jang tertentu dapat mulai berlaku (ini misalnja peraturan tentang suatu padjak tertentu), dan pengawasan represip jaitu berupa hak pedjabat pusat itu untuk menunda atau membatalkan suatu peraturan gemeente apabila peraturan tersebut dianggapnja bertentangan dengan suatu peraturan perundangan pusat atau bertentangan dengan kepentingan umum. Apabila suatu peraturan gemeente ditunda oleh gubernur djenderal, maka harus pula disebutkan lamanja penundaan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari pada 1 tahun. Apabila setelah djangka waktu penundaan itu lampau dengan tidak ada pembatalan terhadap peraturan jang bersangkutan, maka peraturan tersebut berlaku lagi dan untuk selandjutnja tidak boleh ditunda lagi. ⁶³⁾

Peraturan-peraturan gemeente diundangkan dalam *J a v a s c h e Courant*, jaitu suatu penerbitan berita resmi dari Pemerintah Hindia Belanda (Locale Raden-ordonnantie pasal 53).

Sampai berapa djauh luasnja pekerdjaan perundang-undangan dari pada gemeenteraad selama berdirinja Gemeente Batavia dapatlah dilihat dari peraturan-peraturan daerah jang telah ditetapkanja dalam pelbagai lapangan seperti kebersihan, kesehatan, ketertiban, perumahan, lalu lintas dan lain-lainnja, jaitu sebagai berikut:

⁶²⁾ menurut perubahan dengan S. 1917 no. 497.

⁶³⁾ Decentralisatie-besluit pasal 14 dan 15.

I. Dalam lapangan *ketertiban, keamanan dan ketenteraman* bagi penduduk telah ditetapkan peraturan-peraturan jang berikut :

1. Reglement op het begraven van lijken van Inlanders en met dezen gelijkgestelden, Arabieren en Chineezzen uitgezonderd, in de Gemeente Batavia; diundangkan dalam Javasche Courant tanggal 8-10-1907 no. 80 (Peraturan tentang penguburan golongan penduduk Indonesia). Peraturan ini kemudian diganti dengan Reglement op het begraven van Inlanders met uitzondering van Inlandsche Christenen (disingkat Reglement voor de Inlandsche begraafplaatsen); J.C. tanggal 1-7-1921 no. 52.
2. Verordening op het nummeren van woonhuizen in de Gemeente Batavia; J.C. tanggal 18-4-1908 no. 31 (Peraturan tentang pemberian nomor-nomor pada rumah-rumah tinggal). Peraturan ini kemudian diganti dengan Verordening regelende de nummering van gebouwen en de aanduiding der gebruikers van woonhuizen (disingkat Nummer- en naambordenverordening = Peraturan tentang papan-papan nomor rumah dan nama penghuni rumah); J.C. tanggal 31-1-1919 no. 9.
3. Verordening houdende verbodsbepalingen tegen het verstören der orde van afdeelingen der gewapende macht; J.C. tanggal 2-3-1917 no. 18 (Peraturan tentang larangan mengganggu ketertiban dari lingkungan-lingkungan wilayah tertentu).
4. Verordening op het bevolkingsregister, betreffende de Europeanen en met dezen gelijkgestelden, woonachtig in de Gemeente Batavia (disingkat Bataviasche bevolkingsverordening); J.C. tanggal 24-10-1919 no. 85 (Peraturan tentang pendaftaran penduduk golongan Eropah).
5. Verordening houdende eenige bepalingen in verband met de openbare zedelijkheid; J.C. tanggal 5-12-1919 no. 97 (Peraturan mengenai ketentuan-ketentuan jang berkenaan dengan kesusilaan umum).
6. Reglement op het beheer der begraafplaatsen voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden personen in de Gemeente Batavia (Reglement begraafplaatsen voor

Europeanen); J.C. 26-3-1920 no 25. Peraturan ini ditetapkan dengan mentjabut peraturan sedjenis jang termuat dalam J.C. tanggal 8-10-1907 no. 80.

7. Verordening tot het tegengaan van kinderbezoek aan openbare vermakelijkheden in het late avonduur (Bataviasche vermakelijkheidsverordening); J.C. tanggal 11-3-1921 no. 20 (Peraturan mengenai larangan bagi kanak-kanak untuk mengundjungi tontonan umum pada djauh malam hari).
8. Reglement op het begraven van lijken van Christenen, niet behoorende tot hen, die ingevolge artikel 109 van het Regeeringsreglement aan de bepalingen voor Europeanen zijn onderworpen (Reglement voor den begraafplaats voor Inlandsche Christenen); J.C. tanggal 1-7-1921 no. 52 (Peraturan tentang penguburan golongan penduduk Indonesia jang beragama kristen).
9. Verordening tot regeling van het oplaten van vliegers in de Gemeente Batavia; J.C. tanggal 23-1-1925 no. 7 (Peraturan tentang main lajangan).

II. Mengenai penjelenggaraan usaha-usaha dalam lapangan *kebersihan* dan *kesehatan*, telah ditetapkan peraturan-peraturan jang berikut :

1. Verordening op het slachten van varkens, en den verkoop van varkenvleesch in de Gemeente Batavia (Peraturan tentang pemotongan babi dan pendjualan daging babi); J.C. tanggal 30-8-1910 no. 69.
Peraturan ini kemudian diganti dengan Verordening op het slachten van varkens, het vervoer en den verkoop van varkenvleesch in de Gemeente Batavia (Varkens-slachtverordening); J.C. tanggal 10-11-1916 no. 90.
2. Verordening op het slachten van vee, met uitzondering van varkens, en den verkoop van vleesch, met uitzondering van varkenvleesch in de Gemeente Batavia (Peraturan tentang pemotongan hewan ketjuali babi, dan pendjualan daging hewan ketjuali daging babi); J.C. tanggal 5-5-1911 no. 36.
Peraturan ini kemudian djuga diperbaharui dengan Bataviasche veeslachtverordening; J.C. tanggal 20-4-1923 no. 32.

3. Verordening op den verkoop van voor de gezondheid schadelijke eetwaren en dranken; J.C. tanggal 22-9-1911 no. 76 (Peraturan tentang pendjualan makanan dan minuman jang dapat merusak kesehatan).
4. Bataviasche limonadeverordening 1921; J.C. tanggal 21-10-1921 no. 84.
Kedua peraturan no. 3 dan 4 diatas kemudian diganti dengan Verordening regelende den verkoop van koolzuurhoudend water in de Gemeente Batavia (Bataviasche koolzuurhoudend water verordening 1923); J.C. tanggal 14-12-1923 no. 100 (Peraturan tentang pendjualan minuman jang mengandung zat asam arang).
5. Verordening op de logementen en koffiehuisen; J.C. tanggal 1-7-1913 no. 58 (Peraturan tentang rumah penginapan dan rumah makan).
6. Verordening tot regeling van den verkoop van sterken drank; J.C. tanggal 17-6-1919 no. 48 (Peraturan tentang pendjualan minuman keras).
7. Verordening op de broodbakkerijen in de Gemeente Batavia (Bataviasche broodverordening); J.C. tanggal 1-8-1919 no. 61 (Peraturan tentang perusahaan-perusahaan pembakaran roti).
8. Verordening op den verkoop van melk in de Gemeente Batavia (Bataviasche melkverordening); J.C. tanggal 16-12-1921 no. 100 (Peraturan tentang pendjualan susu).

III. Dalam lapangan *bangunan-bangunan, perumahan dan pekerdjaan-pekerdjaan umum* lainnja kita dapati peraturan-peraturan jang berikut :

1. Reglement op het bouwen en sloopen in de Gemeente Batavia; J.C. tanggal 21-9-1909 no. 75 (Peraturan tentang mendirikan dan membongkar bangunan).
2. Verordening op de rooi-inspecties; J.C. tanggal 12-8-1910 no. 64 (Peraturan tentang pemeriksaan garis sempadan).
3. Verordening op den bouw van inrichtingen tot het houden van openbare vermakelijkheden; J.C. tanggal 1-11-1912 no. 88 (Peraturan mengenai hal mendirikan tempat-tempat untuk menjelenggarakan tontonan umum).
4. Verordening op de dakbedekking; J.C. tanggal 18-4-1913 no. 31 (Peraturan tentang atap).

Keempat peraturan tersebut diatas kemudian diganti dengan Bouw- en woningverordening van Batavia (Peraturan tentang bangunan dan perumahan); J.C. tanggal 13-8-1920 no. 65.

5. Verordening op het kruisen van waterloopen; J.C. tanggal 14-9-1917 no. 74 (Peraturan tentang bangunan-bangunan jang melintangi djalan-djalan air).
6. Verordening op het verstrekken van inlichtingen betreffende het woningwezen in de Gemeente Batavia; J.C. tanggal 25-10-1918 no. 86 (Peraturan tentang pemberian penerangan-penerangan jang bersangkutan dengan urusan perumahan).
7. Verordening houdende maatregelen ten aanzien van gevaarlijk geachte bouwwerken; J.C. tanggal 2-7-1920 no. 53 (Peraturan tentang tindakan-tindakan terhadap bangun-bangunan jang dianggap berbahaya).
8. Verordening tot het tegengaan van de verandering van bestemming van geheel of gedeeltelijk tot bewoning bestemde gebouwen; J.C. tanggal 13-8-1920 no. 65 (Peraturan tentang larangan untuk mengubah peruntukan dari gedung-gedung jang seluruhnja atau sebagian diperuntukkan guna didiami).

IV. Dalam lapangan *lalulintas* telah ditetapkan peraturan-peraturan jang berikut :

1. Verordening op het gebruik van de wegen in de Gemeente Batavia; J.C. tanggal 28-9-1917 no. 78 (Peraturan tentang pemakaian djalan-djalan).
Kemudian diganti dengan Verordening tot regeling van het verkeer op de wegen in de Gemeente Batavia (Bataviasche verkeersverordening); J.C. tanggal 16-6-1922 no. 48 (Peraturan tentang lalulintas didjalan).
2. Verordening tot regeling van de maximum snelheid van motorrijtuigen ten aanzien van sommige wegen binnen de bebouwde kom der Gemeente Batavia (Bataviasche motorsnelheidsverordening); J.C. tanggal 16-1-1920 no. 5 (Peraturan tentang ketjepatan maksimum dari pada kendaraan-kendaraan bermotor dibeberapa djalan dalam lingkungan perumahan kota).

3. Verordening houdende verbod tot het berijden van sommige wegen in de Gemeentee Batavia in een bepaalde richting; J.C. tanggal 1-12-1922 no. 96 (Peraturan tentang larangan untuk mendjalani beberapa djalan pada suatu djurusan jang tertentu).

V. Berkenaan dengan *perusahaan-perusahaan, usaha-usaha* atau *pekerdjaan-pekerdjaan* lainnja jang ada sangkutpautnja dengan segi *perekonomian* dan *keuangan*, baik jang dilakukan oleh gemeente sendiri maupun jang diselenggarakan oleh pihak partikelir, maka oleh Gemeente Batavia telah didjalkan pengaturan sebagai berikut :

1. Waterverordening voor de Gemeente Batavia; J.C. tanggal 15-7-1910 no. 56 (Peraturan tentang saluran air).
2. Verordening tot vaststelling van tarieven, bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b en artikel 8 leden 2, 3 en 4 van de Waterverordening voor de Gemeente Batavia; J.C. tanggal 15-7-1910 no. 56 (Peraturan tentang tarip-tarip dari pada pemakaian air).
3. Verordening op het gebruik en het beheer van de pasarterreinen en de pasarloodsen, genaamd Pasar Senen, Pasar Baroe en Pasar Ikan (Pasarverordening voor de Gemeente Batavia); J.C. tanggal 3-8-1910 no. 61 (Peraturan tentang penjelenggaraan dan pemakaian pasar-pasar gemeente).
4. Veepasarverordening; J.C. tanggal 13-11-1914 no. 91 (Peraturan tentang pasar hewan).
5. Reglement voor het slachthuis voor varkens in de Gemeente Batavia; J.C. tanggal 8-12-1916 no. 98 (Peraturan tentang rumah pemotongan babi).
6. Verordening regelende het houden van pasars door bijzondere personen; J.C. tanggal 2-3-1917 no. 18 (Peraturan tentang penjelenggaraan pasar-pasar oleh orang-orang partikelir).
7. Verordening regelende de uitgifte in erfpacht van gronden door de Gemeente Batavia (Bataviasche erfpachtverordening); J.C. tanggal 11-10-1918 no. 82 (Peraturan tentang penjewaan tanah-tanah gemeente dengan hak erpah).

8. Verordening tot instelling en regeling van het beheer van een gemeentelijke hypotheekbank; J.C. tanggal 7-11-1919 no. 89 (Peraturan tentang bank hipotik dari gemeente).
9. Verordening op het verhuren van huizen, welke aan de Gemeente Batavia in eigendom toebehooren (Bataviasche huurreglement); J.C. tanggal 17-12-1920 no. 101 (Peraturan tentang penjewaan rumah-rumah milik gemeente).
10. Verordening houdende tarieven voor het gebruik van openbare voertuigen voortbewegen door animale trekkracht (Bataviasche voertuigtarievenverordening); J.C. tanggal 14-1-1921 no. 4 (Peraturan tentang tarip-tarip dari pemakaian alat pengangkutan jang ditarik dengan tenaga hewan).
11. Verordening tot vaststelling van de voorwaarde voor de verhuring van den gemeentelijke schouwburg (Bataviaasch Schouwburgreglement 1921); J.C. tanggal 1-7-1921 no. 52 (Peraturan tentang sjarat-sjarat dari penjewaan gedung kesenian gemeente).
12. Verordening op het in gebruik nemen en het verhuren van vaartuigen tot het vervoer van personen in enkele gedeelten van de Gemeente Batavia (Bataviaasch tambanganreglement 1925); J.C. tanggal 16-10-1925 no. 83 (Peraturan tentang pemakaian dan penjewaan perahu-perahu tambangan).
13. Verordening op het verhuren van automobielen in de Gemeente Batavia (Bataviasche huurautoverordening); Peraturan tentang penjewaan mobil-mobil penumpang.
14. Bataviasche vischafslagverordening 1926 (Peraturan tentang pelelangan ikan).

VI. Didalam lapangan usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber keuangan guna membiayai keperluan-keperluannya, oleh Gemeente telah ditetapkan dan dipungut pelbagai *padjak* dan *opsen* (tambahan pokok pajak pusat dengan suatu persentasi tertentu), jaitu dengan peraturan-peraturan daerah jang berikut :

1. Verordening op de heffing en invordering eener belasting op de openbare vermoekelikheden (Peraturan tentang pajak tontonan); J.C. tanggal 13-2-1912 no. 13.

2. Verordening op de reclames (memungut pajak reklame); J.C. tanggal 30-5-1913 no. 43.
3. Verordening op de hondenbelasting (pajak andjing); J.C. tanggal 14-1-1916 no. 4.
4. Kostenomslag-verordening voor sommige van gemeentewege uitgevoerde werken (sumbangan dalam bentuk pajak atas pekerdjaan-pekerdjaan tertentu jang diselenggarakan oleh gemeente, seperti pembuatan djalan dan lain-lain, hanja dipungut setjara insidentil); J.C. tanggal 12-11-1918 no. 91.
5. Verordening tot heffing en invordering van eene belasting onder den naam van vergunningsrecht (pajak atas pendjualan minuman keras); J.C. tanggal 17-6-1919 no. 48.
6. Verordening op de heffing van eene gemeentelijke inkomstenbelasting (Bataviasche inkomstenbelastingverordening 1921); J.C. tanggal 8-4-1921 no. 28 (Peraturan tentang pajak penghasilan).
7. Verordening tot heffing en invordering eener belasting onder den naam van vrachtautobelasting (pajak mobilgerobak); J.C. tanggal 9-5-1922 no. 37.
8. Verordening tot heffing en invordering eener belasting onder den naam van rij- en voertuigenbelasting (pajak kendaraan dan alat pengangkutan); J.C. tanggal 2-2-1923 no. 10.
Kedua peraturan no. 7 dan 8 diatas kemudian diganti dengan Bataviasche rij- en voertuigenbelastingverordening 1924; J.C. tanggal 29-2-1924 no. 18.
9. Verordening tot heffing en invordering eener belasting onder den naam van straatbelasting (Bataviasche straatbelastingverordening); J.C. tanggal 28-7-1922 no. 60 (Peraturan tentang pajak djalan).
10. Verordening op de heffing en invordering van een belasting onder den naam van reinigingsbelasting (Bataviasche reinigingsbelastingverordening); J.C. tanggal 5-3-1924 no. 19 (Peraturan tentang pajak atas pembersihan sampah).
11. Verordening tot het heffen van een tijdelijken toeslag op de aanslagen in de gemeentelijke inkomstenbelasting en tot intrekking van de Bataviasche reinigingsbelasting-

verordening (memungut tambahan atas pajak penghasilan dengan menghapuskan pajak atas pembersihan sampah); J.C. tanggal 5-3-1924 no. 19.

12. Verordening tot het heffen van opcenten op de hoofdsom van Landbelastingen (Peraturan tentang pemungutan opsen atas pajak-pajak negara, jaitu pajak rumah tangga dan verponding); J.C. tanggal 27-1-1911 no. 8.
13. Verordening tot het heffen van opcenten op de landinkomstenbelasting (memungut opsen atas pajak penghasilan dari pusat); J.C. tanggal 26-1-1917 no. 8.
14. Verordening tot heffing van opcenten op de aanslagen in de belasting op de bedrijfs- en andere inkomsten op **Java en Madoera** (opsen atas pajak perusahaan dan penghasilan-penghasilan lainnja dipulau Djawa dan Madura); J.C. tanggal 26-1-1917 no. 8.
15. Verordening tot verhooging der opcenten op de verponding (Peraturan untuk menaikkan besarnja opsen atas pajak verponding); J.C. tanggal 17-12-1918 no. 101.

VII. Masih pula dalam hubungannja dengan sumber-sumber keuangan gemeente, oleh Gemeente Batavia dilakukan pemungutan *retribusi* dan *bea-bea* lainnja atas djasa-djasa, usaha-usaha atau pekerdjaan-pekerdjaan jang diberikan oleh gemeente bagi publik ataupun karena publik mempergunakan milik gemeente, jaitu dengan peraturan-peraturan jang berikut :

1. Verordening op de gemeentehellingen (Peraturan tentang pemungutan biaja-biaja oleh gemeente); J.C. tanggal 2-10-1914 no. 79.
Peraturan ini kemudian diganti dengan Verordening regelende de heffing van leges en van rechten wegens door de gemeente verleende vergunningen, bewezen of gedane leveranties (Bataviasche legesverordening); J.C. tanggal 9-3-1923 no. 20.
2. Veepassertarief (memungut retribusi atas pemakaian pasar hewan kepunjaan gemeente); J.C. tanggal 2-10-1914 no. 79.
3. Verordening op de heffingen voor het gebruik van de gemeentelijke slachthuizen voor varkens en het keuren van varkenvleesch (memungut bea-bea atas pemakaian

rumah-rumah potong gemeente untuk babi dan pemeriksaan daging babi); J.C. tanggal 13-10-1916 no. 82.

4. Verordening regelende de heffing van het begrafenisrecht voor het begraven van lijken van Inlanders en met dezen gelijkgestellten, Inlandsche Christenen, Arabieren en Chineezen uitgezonderd (bea penguburan untuk golongan penduduk Indonesia); J.C. tanggal 24-5-1918 no. 42.
5. Verordening regelende de heffing van het begrafenisrecht van lijken van Christenen, behoorende tot de Inlandsche bevolking (bea penguburan untuk golongan penduduk Indonesia jang beragama kristen); J.C. tanggal 24-5-1918 no. 42.
6. Verordening op de heffing van een retributie ten behoeve van den gemeentelijken Reinigingsdienst (Bataviasche reinigingsretributieverordening); J.C. tanggal 6-4-1923 no. 23 (Peraturan tentang pemungutan retribusi berkenaan dengan djasa/pekerdjaan jang dilakukan oleh dinas pembersihan kota).

VIII. Mengenai *susunan* dan *organisasi gemeente* sendiri telah ditetapkan peraturan-peraturan jang berikut :

1. Reglement van orde voor de vergaderingen van den Gemeenteraad van Batavia; J.C. tanggal 16-3-1909 no. 21 (Peraturan tentang tata tertib untuk rapat-rapat dewan gemeente).
2. Verordening tot vaststelling van het gemeentelijk wapen; J.C. tanggal 24-2-1911 no. 16 (Peraturan tentang lambang gemeente).
3. Verordening op de eedsaflegging; J.C. tanggal 21-2-1913 no. 15 (Peraturan tentang pengangkatan sumpah).
4. Reglement op de brandweer (Peraturan tentang barisan pemadam kebakaran); J.C. tanggal 19-3-1915 no. 23. Kemudian diganti dengan Verordening tot regeling van den dienst der brandweer en tot het treffen van maatregelen ter afwending van brandgevaar (Bataviaasch brandweerreglement); J.C. tanggal 20-10-1922 no. 84.
5. Verordening nopens de taak, de werkwijze en de vaststelling van de Schoonheidscommissie (Peraturan tentang tugas, tjara kerdja dan susunan Komisi kebersihan); J.C. tanggal 30-3-1917 no. 26.

6. Verordening tot regeling van de begrooting en de boekhouding van de gemeentebedrijven (Bedrijvenverordening); J.C. tanggal 27-12-1919 no. 103 (Peraturan tentang anggaran keuangan dan tatabuku dari pada perusahaan-perusahaan gemeente).
7. Instructie voor den controleur-boekhouder bij het marktwezen en voor de marktmeesters (Instruksi bagi penilik pembukuan pada dinas urusan pasar dan bagi para mantri pasar); J.C. tanggal 13-2-1920 no. 13.
8. Verordening tot verdeeling der Gemeente Batavia in stemdistricten; J.C. tanggal 27-2-1920 no. 17 (dengan mentjabut peraturan jang sama jang termuat dalam J.C. tanggal 19-7-1908 no. 49).
9. Verordening tot regeling van de taak en de bevoegdheden van den gemeentelijken gezondheidsdienst (Peraturan tentang tugas dan wewenang Djawatan Kesehatan Kota); J.C. tanggal 4-5-1926 no. 35.

IX. Selandjutnja masih ada sangkutpautnja pula dengan organisasi gemeente ialah hal ichwal mengenai aparaturn jang ikut memutarkan roda pemerintahan, jaitu soal *kepegawaian* dan *penggadjiannja*, ini diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Verordening regelende de verhouding der gemeente tot hare ambtenaren (Bataviasche ambtenarenverordening); J.C. tanggal 23-11-1917 no. 94 (Peraturan tentang hubungan antara gemeente dengan para pegawainja).
2. Verordening tot regeling van de salarissen van ambtenaren in dienst der Gemeente (Bataviasche salarisverordening 1920); J.C. tanggal 22-10-1920 no. 85.
3. Verordening tot bepaling van de eischen, welke voor de vervulling van verschillende betrekkingen in dienst der Gemeente Batavia zullen worden gesteld (Bataviasche eischenverordening); J.C. tanggal 22-10-1920 no. 85 (Peraturan tentang sjarat-sjarat untuk sesuatu pangkat dalam dinas gemeente).
4. Bataviasche diensttransportverordening 1921 (Peraturan tentang pengangkutan dinas); J.C. tanggal 30-12-1921 no. 104. Kemudian diganti dengan Verordening tot regeling van het transport van gemeenteambtenaren in de

uitoefening van hun dienst (Bataviasche diensttransport-verordening 1925); J.C. tanggal 9-1-1925 no. 3.

5. Verordening betreffende het toekennen van wachtgeld en bezoldiging aan ambtenaren der Gemeente Batavia, wier werkzaamheden overbodig zijn verklaard (Bataviasche wachtgeld en verlofsbezoldigingsregeling); J.C. tanggal 12-12-1924 no. 100 (Peraturan tentang uang-tunggu).
6. Verordening tot regeling van de bezoldiging van ambtenaren, beambten en werklieden in dienst der Gemeente Batavia (Bataviasche bezoldigingsverordening 1926).

X. Dalam lapangan urusan *sosial* dan *amal*, Gemeente Batavia djuga mengambil tindakan-tindakan tertentu jaitu dengan membentuk jajasan dan dana, ini dilaksanakan dalam peraturan-peraturan jang berikut :

1. Verordening op de stichting Rijkschroef (Peraturan tentang pendirian Jajasan Rijkschroeff jang bertudjuan memberi tondjangan kepada badan-badan amal); J.C. tanggal 30-10-1910 no. 87.
2. Verordening tot stichting van een Kramat-Kwitang fonds; J.C. tanggal 9-1-1914 no. 3.
3. Verordening tot stichting van een Jubileumfonds (bertudjuan menjelenggarakan pembangunan dan perbaikan perumahan ketjil); J.C. tanggal 17-10-1924 no. 84.

Selain peraturan-peraturan tersebut diatas, untuk lingkungan wilajah Gemeente Batavia masih berlaku pula pelbagai reglementen en keuren van politie jang ditetapkan oleh resident Batavia sebelum lahirnja Gemeente Batavia. Tetapi peraturan-peraturan dari resident itu kemudian berangsur-angsur lenjap karena seperti telah dikatakan kepada gemeenteraad diserahkan pula wewenang membuat peraturan dari resident itu, dan dalam hal ini gemeenteraad membuat peraturan-peraturan dengan menghapuskan, mengubah atau memperbaharui seluruhnja reglementen dan keuren tersebut.

Selandjutnja masih pula berhubungan dengan lapangan perundang-undangan ialah pemberian bantuan oleh gemeente untuk melaksanakan peraturan-peraturan perundangan pusat (tugas medebewind), ini dapat berudjud tindakan mengurus/mengawasi seperti umpamanja memberikan izin dan sebagainya atau tindakan membuat peraturan pelaksanaan lebih landjut. Untuk jang achir ini Gemeente Batavia telah membantu penjelenggaraan peraturan-peraturan pusat

„Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren”, Staatsblad 1922 no 678, dan „Hinderordonnantie”, Staatsblad 1926 no. 226, jaitu dengan menetapkan peraturan-peraturan daerah jang berikut :

1. Bataviasche koolzuurhoudend water verordening 1923 seperti dimuka telah disebutkan (peraturan ini memuat ketentuan bahwa untuk dapat mendjual minuman jang mengandung zat asam arang harus ada izin dari gemeente), dan
2. Verordening als bedoeld bij artikel 2 (1) van de Hinderordonnantie (J.C. tanggal 17-9-1926 no. 74), peraturan ini menetapkan usaha-usaha tertentu jang boleh diselenggarakan dengan tanpa izin gemeente pada djalan-djalan/lingkungan-lingkungan jang tertentu pula.

Demikianlah tugas wewenang Gemeente Batavia dalam bidang perundang-perundangan.

§ 8. KEUANGAN

Menurut pasal 2 ordonansi pembentukan Gemeente Batavia ditetapkan bahwa dari keuangan Pemerintah Hindia Belanda dipisahkan sedjumlah uang sebanjak f 290.000 untuk mendjadi keuangan dari Gemeente Batavia.

Kemudian dengan Staatsblad 1905 no. 205 oleh pemerintah pusat ditetapkanlah anggaran keuangan jang pertama dari Gemeente Batavia. Menurut anggaran keuangan itu maka djumlah pendapatan untuk tahun dinas 1905 ialah f 290.000 bantuan dari pusat dan f 9400,— jang direntjanakan akan diperoleh dari penghasilan air saluran dari sumur-sumur bor jang mendjadi milik gemeente. Djumlah pendapatan tersebut diatas akan diperuntukkan guna pembiajaan administrasi, gadji para pegawai gemeente, pemeliharaan gedung-gedung gemeente, perbaikan dan pembaharuan pckerdjaan-pekerdjaan umum seperti djalan, djembatan dan sebagainya.

Untuk tahun-tahun selandjutnja anggaran keuangan ditetapkan oleh gemeenteraad sendiri, akan tetapi untuk dapat didjalankannja anggaran itu harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari penguasa atasan (Hoofd van gewestelijk bestuur, kemudian oleh gewestelijke raad setelah dibentuk dewan ini untuk lingkungan Keresidenan Batavia, dan setelah ada gubernur oleh pedjabat jang achir ini). ⁶⁴⁾

⁶⁴⁾ Decentralisatie-besluit pasal 18.

Dalam tahun-tahun berikuttja walaupun telah mempunjai beberapa sumber penghasilan sendiri, Gemeente Batavia masih djuga membutuhkan sumbangan keuangan dari pusat. Untuk tahun dinas 1906 djumlah uang jang dipisahkan dari kas pusat untuk membantu gemeente ialah sebesar f 363.200,—, dan mulai tahun berikuttja sumbangan itu mendjadi f 383.620,—. Dalam tahun 1914 dengan Staatsblad 1914 no. 181 Gemeente Batavia menerima bantuan keuangan sebesar f 384.220,— dan kemudian sedjak tahun 1923 dengan Staatsblad 1923 no. 189 djumlah itu dinaikkan lagi mendjadi f. 386.469,—.

Sumber-sumber penghasilan lainnja dari Gemeente Batavia ialah pelbagai pajak, opsen dan retribusi sebagaimana ternjata dari peraturan-peraturan daerah jang telah ditetapkanja (lihat § 7 dimuka).

Selandjutnja sebagai sumber keuangannja pula Gemeente Batavia menjelenggarakan pelbagai dinas dalam bentuk perusahaan, jaitu :

- a. perusahaan pasar (ini memungut pembayaran dari para pedagang jang mempergunakan ruangan dalam pasar-pasar gemeente);
- b. perusahaan saluran air minum;
- c. perusahaan tanah;
- d. perusahaan hypotheekbank;
- e. perusahaan rumah;
- f. perusahaan rumah pemotongan hewan;
- g. perusahaan pekuburan;
- h. perusahaan gedung kesenian.

Semua dinas tersebut diatas ditundjuk sebagai perusahaan dengan peraturan daerah.

Penghasilan-penghasilan tersebut diatas masih djuga belum mentjukupi, terutama untuk modal bagi perusahaan-perusahaan itu, oleh karena itu Gemeente Batavia mengadakan pula pindjam-pindjaman uang.

Mengenai segi pengeluarannja, djumlah pembiajaan jang ditanggung oleh Gemeente Batavia djuga selalu bertambah, jaitu untuk keperluan aparaturn pemerintahan dan kepegawaian, untuk pemeliharaan dan pembuatan djalan-djalan dan pekerdjaan umum lainnja, pembersihan sampah, untuk keperluan usaha-usaha dalam lapangan kesehatan, untuk penerangan didjalan-djalan, penjelenggaraan dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran (sekolah-

sekolah), pemadaman kebakaran dan masih banyak urusan-urusan lainnja lagi. Kalau dalam tahun pertama djumlah pengeluaran itu tidak sampai f 300.000, maka dalam tahun 1911 djumlah pengeluaran itu telah mentjapai f 1.078.592, dan lagi 6 tahun kemudian (1917) djumlah itu meningkat mendjadi $\pm$ 2,2 djuta. Pada tahun 1922 djumlah pengeluarannja sudah mendjadi 2 kali dari jang tahun 1917, jaitu f 4.752.000 dan kemudian anggaran keuangan jang terachir dari Gemeente Batavia (tahun 1926) menundjukkan angka sebesar f 4.864.056,—⁶⁵).

§ 9. L A M B A N G

Oleh gemeenteraad dengan peraturannja dari tanggal 8 Februari 1911 telah pula ditetapkan lambang Gemeente Batavia. Bentuk lambang itu adalah ditiru dari lambang Stad Batavia pada zaman V.O.C. dahulu dengan diadakan perubahan seperlunja, jaitu pokoknja tetap lukisan sebilah pedang pada suatu perisai dan pedang tersebut dihiasi dengan 2 dahan berdaun jang diikat dengan pita berwarna perak tepat diatas gagang pedang. Diatas perisai diberi mahkota berbentuk benteng kota, sedang dikanan dan kiri perisai terdapat 2 ekor singa berdiri sambil masing-masing kedua kaki depannja memegang perisai tersebut, kemudian dibawah perisai melintang sedjalur pita biru dengan tulisan emas berbunji „*Dispereert niet*” (djangan putus asa).⁶⁶)

Demikianlah hal ichwal pemerintahan Kota Djakarta dibawah Gemeente Batavia jang berlangsung hingga tanggal 1 Oktober 1926. Pada tanggal tersebut Gemeente Batavia diubah mendjadi suatu daerah jang berdiri sendiri (*zelfstandige gemeenschap*) jang menurut peraturan perundangan desentralisasi jang baru disebut „*stads gemeente*”.

⁶⁵) Lihat buku „Begrooting der uitgaven en ontvangsten van de Gemeente Batavia voor het dienstjaar 1926”.

⁶⁶) Perkataan „Dispereert niet” itu diambil dari perkataan Jan Pieterszoon Coen dalam suratnja jang d’tudjukan kepada putjuk pimpinan V.O.C. di Nederland pada tanggal 29 September 1618, jaitu sewaktu ketegangan antara pihak V.O.C. dengan Keradjaan Banten maupun pihak Inggeris semakin memuntjak. Bagian surat jang memuat sembo’an itu berbunji sebagai berikut : „Dispereert niet, ontsiet uwe vyanden niet, daer en is ter werelt n’et dat ons can hinderen noch deeren, want Godt met ons is; en trect de voorgaende misslagen in geen consequentie, want daer can in Indiën wat groot’s verricht ende daer connen tegelijck jaerlicx groote rycke retoeren gesonden worden”. (Stapel : „Geschiedenis van Ned. Indië”, djilid III katja 126 dan 139).

STADSGEMEENTE BATAVIA ⁶⁷⁾

§ 1. RIWAJAT PEMBENTUKAN

Penjelenggaraan pemerintahan daerah menurut peraturan perundangan desentralisasi dari tahun 1903 pada umumnya kurang memuaskan, oleh karena itu oleh Pemerintah Belanda lalu diadakan perubahan dalam tahun 1922 jaitu dengan mengeluarkan „*Wet op de Bestuurs hervorming*” (Undang-undang pembaharuan pemerintahan, Staatsblad 1922 no. 216) jang mengubah Regeeringsreglement 1854 sehingga terbukalah kemungkinan untuk dekonsentrasi dan desentralisasi kekuasaan setjara besar-besaran. ⁶⁸⁾

Menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut diatas, maka wilajah Hindia Belanda akan dibagi dalam satuan-satuan besar jang dinamakan „*provincie*” (propinsi) lengkap dengan dewan propinsinja jang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnja. Dan sepanjang keadaan setempat memungkinkan

⁶⁷⁾ Ketjuali sumber² lainnja jang disebutkan dalam tjatatan², uraian mengenai pemerintahan Stadsgemeente Batavia ini diambilkan dari sumber² jang berikut :

- a. Publicaties der Stadsgemeente Batavia (memuat maandverslagen en rapporten) :
 1. No. 1 — 17 (tahun 1927);
 2. No. 18 — 32 (tahun 1928);
 3. No. 33 — 45 (tahun 1929);
 4. No. 46 — 59 (tahun 1930);
 5. No. 60 — 72 (tahun 1931);
 6. No. 73 — 83 (tahun 1932).
- b. Stadsgemeente Batavia Periodieke Gegevens, tahun 1933 no. 1 — 136.
- c. Algemeen Verslag der Stadsgemeente Batavia betreffende de verschillende gemeente-diensten :
 1. over het jaar 1934;
 2. over het jaar 1935;
 3. over het jaar 1936;
 4. over het jaar 1937;
 5. over het jaar 1938.
- d. Pelbagai „Gemeentebld” van Batavia (warta resmi dari Gemeente/Stadsgemeente Batavia jang memuat pelbagai pemberitahuan dan usul dari burgemeester/College van Burgemeester en wethouders kepada dewan) dan „Notulen” van de openbare vergadering van den Raad der Stadsgemeente Batavia (risalah rapat dewan Stadsgemeente Batavia).

⁶⁸⁾ Drs. G.J. Wolhoff : „Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia”, katja 54 dan 231.
Penerbit : Timun Mas N.V., 1955.

kannja maka bagian-bagian wilajah dari suatu propinsi dapat pula ditundjuk sebagai daerah jang berdiri sendiri.

Pengaturan lebih landjut mengenai tata pemerintahannja, tugas dan wewenang serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannja dari propinsi atau bagian-bagiannja itu ditetapkan dalam ordonansi.

Demikianlah oleh Pemerintah Hindia Belanda lalu ditetapkan ordonansi-ordonansi jang mengatur lebih landjut asas-asas desentralisasi dari tahun 1922 itu, jaitu :

- a. *Provincie-ordonnantie*, Staatsblad 1924 no. 78 dan kemudian sedjak itu berulang-ulang diubah. Ordonansi ini mengatur hal ichwal pemerintahan daerah propinsi;
- b. *Regentschap-ordonnantie*, Staatsblad 1924 no. 79, mengatur tata pemerintahan daerah kabupaten, jaitu bagian dari propinsi jang tidak merupakan suatu kota;
- c. *Stadsgemeente-ordonnantie* (disingkat S. G. O.), Staatsblad 1926 no. 365, kemudian djuga berulang-ulang diubah, terachir dengan Staatsblad 1940 no. 226. Peraturan ini mengatur hal ichwal pemerintahan daerah dari bagian propinsi jang merupakan kota (dipulau Djawa dan Madura).

Menurut pasal 3 dari S.G.O., suatu kota jang ditundjuk sebagai daerah jang berdiri sendiri berdasarkan peraturan perundangan desentralisasi jang baru itu dinamakan „*stadsgemeente*” (kotapradja).

Demikianlah berdasarkan sistim desentralisasi jang baru itu, maka dengan ordonansi pembentukan termuat dalam Staatsblad 1926 no. 366 jang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1926, Gemeente Batavia ditundjuk mendjadi Stadsgemeente Batavia jang selandjutnja menjelenggarakan pemerintahan daerahnja menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O. dan tidak lagi berpegang kepada Undang-undang Desentralisasi 1903, Decentralisatie-besluit 1904 dan Locale Raden-ordonnantie 1905.⁶⁹⁾

§ 2. S T A T U S

Pada hakekatnja perubahan dari Gemeente Batavia mendjadi Stadsgemeente Batavia tidaklah membawa perubahan terhadap

⁶⁹⁾ Ordonansi pembentukan Stadsgemeente Batavia, lengkap dengan perubahan-perubahannja jang diadakan kemudian (jaitu dengan S. 1934 no. 687 serta S. 1938 no. 170 dan no. 420) terdapat dalam buku „Wetten en Verordeningen betreffende het staatsrecht van Nederlandsch-Indië”, katja 263.

struktur dan organisasi daerah otonom itu. Aparatur pemerintahan dari Gemeente Batavia tetap menjalankan fungsinya seperti semula, yaitu Mr. Meyroos (walikota Gemeente Batavia) tetap menjadi burgemeester dari stadsgemeente yang dibentuk baru itu; anggota-anggota gemeenteraad yang ada pada permulaan Oktober 1926 itu juga tetap menjalankan fungsinya seperti sediakala, kini sebagai anggota dewan dari Stadsgemeente Batavia; verordeningen dari Gemeente Batavia yang ada tetap berlaku pula sebagai peraturan-peraturan daerah dari Stadsgemeente Batavia. Demikian pula dinas-dinas dan aparaturnya kepegawaian gemeente tetap berjalan dengan tiada perubahan apa-apa.

Perubahan yang terjadi adalah mengenai dasar hukumnya. Kalau dahulu Gemeente Batavia menjalankan pemerintahan daerahnya menurut peraturan perundangan desentralisasi dari tahun 1903, maka sekarang Stadsgemeente Batavia menjelenggarakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya menurut peraturan perundangan desentralisasi yang baru dari tahun 1922. Ini membawa perubahan terhadap statusnya sebagai suatu daerah otonom sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan daerah itu.

Sebagaimana telah diterangkan di muka, politik desentralisasi yang baru membedakan untuk pulau Djawa dan Madura 3 macam daerah otonom, yaitu propinsi, kabupaten dan kotapradja yang masing-masing diatur dalam satu ordonansi tersendiri. Propinsi adalah daerah otonom yang tingkatnya teratas, sedang kabupaten dan kotapradja derajatnya adalah sama, dan kedua-duanya berada didalam lingkungan suatu propinsi.

Demikianlah dengan Staatsblad 1925 no. 378 dibentuklah *Provincie West Java* yang wilayahnya meliputi seluruh Djawa Barat. Kemudian dengan ordonansi pembentukan dalam Staatsblad 1925 no. 382 dibentuk *Regentschap Batavia* sebagai daerah otonom yang wilayahnya meliputi districten Tangerang, Blaradja dan Maoek (daerah-daerah dipinggir kota Batavia). Selanjutnya dalam tahun berikutnya lahirlah Stadsgemeente Batavia, wilayahnya adalah sama seperti wilayah Gemeente Batavia (meliputi district Batavia dan district Weltevreden). Dan kini Stadsgemeente Batavia merupakan daerah otonom yang setingkat dibawah Provincie West Java, dan karenanya dalam taraf pertama berada dibawah pengawasan propinsi tersebut.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O., Provincie West Java menjalankan pengawasai preventif terhadap Stadsgemeente

Batavia, jaitu beberapa keputusan tertentu dari Stadsgemeente Batavia sebelum mulai dapat berlaku harus terlebih dahulu disahkan oleh propinsi tersebut, misalnja keputusan tentang anggaran keuangan stadsgemeente, peraturan jang memuat ketentuan pidana, peraturan jang bermaksud memungut padjak andjing, padjak reklame, padjak minuman keras, padjak tontonan dan padjak petasan/kembangapi, peraturan tatatertib rapat dan lain-lain. Pengawasan preventip dilakukan djuga oleh gubernur djenderal, tetapi hanja mengenai peraturan-peraturan stadsgemeente jang memungut padjak selain dari pada jang telah mendjadi kompetensi propinsi seperti tersebut diatas, ini misalnja padjak djalan, padjak sepeda dan lain-lain.

Mengenai pengawasan represip (hak untuk mempertanggihkan/membatalkan keputusan stadsgemeente), ini tetap berada didalam tangan gubernur djenderal. Tetapi Provincie West Java berwenang mengusulkan kepada pedjabat tersebut agar suatu keputusan stadsgemeente ditunda berlakunja untuk sementara waktu atau dibatalkan apabila keputusan tersebut menurut pendapat propinsi bertentangan dengan suatu peraturan pusat, peraturan propinsi atau bertentangan dengan kepentingan umum (S.G.O. pasal 144). Tjara-tjara penundaan dan pembatalan terhadap sesuatu keputusan stadsgemeente itu umumnja adalah sama seperti terhadap peraturan-peraturan/keputusan-keputusan gemeente dahulu (jaitu menjebutkan alasan-alasannja, mengenai penundaan tidak boleh lebih dari pada 1 tahun lamanja, dan sebagainya).

§ 3. SUSUNAN DAN ORGANISASI APARATUR

Menurut pasal 4 S.G.O. pemerintah daerah sesuatu stadsgemeente terdiri dari :

- a.
 1. *raad* (Dewan Perwakilan Rakjat Daerah);
 2. *College van Burgemeester en Wethouders* (Dewan Pemerintah Daerah);
 3. *burgemeester* (walikota),
atau
- b.
 1. *raad*; dan
 2. *burgemeester*.

Susunan pemerintah daerah seperti tersebut pada sub a adalah sama seperti dalam Locale Raden-ordonnantie setelah diubah dalam tahun 1922 (jang membuka kemungkinan adanja djabatan wet-

houder), dan susunan jang sub b adalah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan desentralisasi sedjak tahun 1916 (dimungkinkannja pengangkatan ketua gemeenteraad tersendiri dengan sebutan burgemeester).

Walaupun djabatan wethouder telah dimungkinkan sedjak tahun 1922, tetapi sampai tahun 1926 Gemeente Batavia memilih susunan pemerintah daerah jang terdiri dari 2 aparat sadja jaitu dewan dan walikota. Baru kemudian dalam tahun 1926 mendjelang terbentuknja Stadsgemeente Batavia, oleh beberapa anggota dewan diusulkan agar diadakan djabatan wethouder guna melantjarkan pemerintahan daerah.⁷⁰⁾

Setelah Gemeente Batavia diubah mendjadi suatu stadsgemeente, dibahaslah oleh dewan usul pembentukan djabatan wethouder itu. Menurut S.G.O. pasal 17 ayat (2) wethouders diangkat oleh dewan baik dari antara anggota-anggotanja sendiri atau dari orang luar, sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknja 4 orang.

Demikianlah setelah melalui pembijtaraan jang pandjang lebar dalam rapatnja pada tanggal 4 dan 18 Oktober 1926, maka oleh stadsgemeenteraad ditetapkanlah adanya 3 orang wethouders, dan sebagai ketiga wethouders jang pertama-tama itu terpilihlah anggota dewan :

1. **MOHAMMAD HOESNIE THAMRIN;**
2. **A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH;**
3. **N. HOEKSTRA.**⁷¹⁾

Selain itu dipilih pula 3 orang plaatsvervangende wethouders jang akan mewakili masing-masing wethouder itu apabila berhalangan mendjalankan tugas pekerdjaannja, jaitu :

1. **TAN IN HOK;**
2. **IR. J.G. STUYFZAND;**
3. **N. VAN ZALINGE.**

Masing-masing wethouder menerima tundjangan sebesar f 300,— setiapi bulannja.

Ketiga orang wethouders itu bersama-sama dengan walikota merupakan het College van Burgemeester en Wethouders dari Stadsgemeente Batavia (S.G.O. pasal 18).

⁷⁰⁾ Lihat Gemeenteblad 1926 no. 283.

⁷¹⁾ Notulen² rapat dewan tahun 1926 no. XVIII atjara 2 (katja 1—13) dan tahun 1926 no. XIX atjara 2 katja 1—5).

Dalam perkembangan selandjutnja, sewaktu beberapa bulan kemudian anggota Dewan Pemerintah Daerah N. Hoekstra akan diganti, maka oleh fraksi golongan Tionghoa dalam stadsgemeenteraad diusulkan agar djumlah wethouder diubah mendjadi 4 orang dan agar kepada golongan Tionghoa diberi kesempatan untuk mempunjai wakil jang duduk didalam College van Burgemeester en Wethouders itu. Usul tersebut mendjadi pemitjaraan jang ramai djuga sehingga kemudian lalu dilakukan rapat tertutup untuk membahasnja. Achirnja dewan dapat menjetudjui penambahan djumlah wethouders itu dan diangkatlah 2 orang wethouders baru diantaranya seorang dari golongan Tionghoa, sehingga kini susunan wethouders adalah 2 orang Belanda, seorang Indonesia dan seorang Tionghoa, jaitu : ⁷²⁾

1. Hoesnie Thamrin;
2. Nieuwenhoven Helbach;
3. A.L. van Waardenburg; dan
4. Tan In Hok.

Dengan adanja susunan College van Burgemeester en Wethouders jang baru itu, kemudian diadakan pula pembagian tugas pekerdjaan diantara para anggotanja itu jaitu sebagai berikut : ⁷³⁾

- I. **Burgemeester** (Mr. Meyroos), tugas pekerdjaannja meliputi urusan-urusan jang berikut :
 - a. brandweer (barisan pemadam kebakaran);
 - b. Faecaalreinigingsdienst (urusan kebersihan kota);
 - c. financiën (keuangan);
 - d. gemeentewerken (pekerdjaan-pekerdjaan umum);
 - e. inspectie;
 - f. kas;
 - g. onderwijs (urusan pengadjaran);
 - h. plantsoenen (petamanan);
 - i. reinigingsdienst;
 - j. schouwburg (gedung kesenian);
 - k. secretarie;
 - l. tramvraagstuk (masalah trem kota).

⁷²⁾ Notulen rapat dewan tanggal 23 Mei 1927 (tahun 1927 no. VI) atjara 3. katja 5—10 dan katja 13.

⁷³⁾ Gemeentebled tahun 1927 no. 174.

II. Nieuwenhoven Helbach, bertugas dalam lapangan :

- a. grondbedrijf (perusahaan tanah);
- b. grondoccupaties (pendudukan tanah);
- c. huizenbedrijf (perusahaan rumah);
- d. Jubileumfonds;
- e. rooiwezen en bouwpolitie (urusan garis sempadan dan pengawasan atas bangunan);
- f. waterleiding (saluran air minum).

III. Hoesnie Thamrin, mengurus :

- a. begraafplaatsen (pekuburan);
- b. Inlandsche zaken (urusan-urusan jang menjangkut golongan Indonesia);
- c. kampongverbetering (perbaikan perkampungan rakjat);
- d. Keuringsdienst (dinas pemeriksaan pemotongan hewan dan sebagainya);
- e. pasarbedrijf (perusahaan pasar);
- f. slachtbedrijf (perusahaan pemotongan hewan);
- g. vischveiling (pelelangan ikan);
- h. volkshuisvesting (perumahan rakjat).

IV. Waardenburg, disertai tugas pekerdjaan jang berikut :

- a. arbeidsbemiddeling (urusan kerdjantara);
- b. armenzorg (urusan pemeliharaan fakir miskin);
- c. belastingdienst (pemungutan padjak);
- d. bevolkingsbureau (kantor pendaftaran penduduk);
- e. Gezondheidsdienst (dinas kesehatan);
- f. Rijkschroeffstichting.

V. Tan In Hok, bertugas dalam hal-hal jang berikut :

- a. alle zaken uit het oogpunt van de eventueel daarbij betrokken Chineesche belangen (semua urusan jang menjangkut golongan Tionghoa);
- b. autostandplaatsen (tempat perhentian mobil);
- c. Decapark;
- d. Huurcommissie;
- e. hypotheekbank;
- f. pensioenfonds;
- g. subsidies;
- h. straatverlichting (penerangan djalan-djalan);
- i. Gemeentelijke Omnibus Maatschappij.

Mengenai susunan stadsgemeenteraad sendiri, ordonansi pembentukan Stadsgemeente Batavia menetapkan bahwa djumlah anggotanja ialah 27 orang (sama seperti gemeenteraad dahulu), jaitu terdiri dari 15 orang Belanda, 8 orang Indonesia (inheemsche onderdanen niet Nederlanders) dan 4 uitheemsche onderdanen niet Nederlanders. Kemudian dalam tahun 1938 djumlah anggota dewan itu diubah mendjadi 33 orang.

Pada permulaan itu ditetapkan pula bahwa anggota Gemeenteraad van Batavia jang ada terus mendjadi anggota dari stadsgemeenteraad tersebut sampai bulan Agustus 1930 (Ordonansi pembentukan pasal 3 dan 4).

Menurut S.G.O. pasal 6, sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota stadsgemeenteraad ialah :

- a. kaulanegara Belanda dan mendjadi penduduk Hindia Belanda;
- b. benar-benar bertempat tinggal dalam wilajah stadsgemeente;
- c. telah berusia 25 tahun;
- d. menurut pertimbangan walikota tjukup memiliki pengetahuan bahasa Belanda;
- e. tidak kehilangan haknja untuk menguasai atau mengurus harta bendanja, atau ditjabut hak/wewenangnja atas sesuatu berdasarkan keputusan hakim jang tidak dapat diganggugugat lagi;
- f. tidak dalam keadaan pailit.

Anggota dewan dipilih untuk 4 tahun lamanja oleh penduduk stadsgemeente menurut ketentuan-ketentuan dalam „*Kiesordonnantie-Gemeenteraden*” (Staatsblad 1925 no. 673), kemudian dalam tahun 1937 peraturan ini diperbaharui mendjadi 2 peraturan jaitu „*Kiesordonnantie Gemeenteraden Nederlanders en Uitheemsche Onderdanen*” dan „*Kiesordonnantie Gemeenteraden Inheemsche Onderdanen*” (berturut-turut Staatsblad tahun 1937 no. 538 dan no. 539). Dekat achirnja masa pemerintahan Hindia Belanda, kedua peraturan itu diperbaharui lagi mendjadi satu dengan Staatsblad 1941 no. 451.

Pada pokoknja penduduk jang diperkenankan memilih anggota-anggota stadsgemeenteraad ialah kaulanegara Belanda (semula hanja orang laki-laki sadja, baru kemudian mulai tahun 1941 golongan wanita djuga boleh ikut memilih) jang memiliki sjarat-sjarat jang berikut :

- a. mempunyai ketjakapan jang tjukup untuk membatja dan menulis dalam bahasa Belanda, Indonesia atau bahasa daerah jang dipakai setempat;
- b. telah mentjapai umur 21 tahun;
- c. tidak ditjabut hak pilihnja;
- d. bertempat tinggal dalam lingkungan wilayah stadsgemeente;
- e. dikenakan padjak penghasilan atas dasar penghasilan tahunan sekurang-kurangnja sebesar f 300,—.

Demikianlah dengan singkat susunan stadsgemeenteraad.

Mengenai walikota, pedjabat ini disampingnja merupakan organ stadsgemeente tetap merupakan pula pedjabat pemerintah pusat jang diangkat dan diperhentikan oleh gubernur djenderal. Jang dapat diangkat mendjadi walikota hanjalah seorang prija (wanita tidak boleh) jang telah mentjapai usia 30 tahun, selandjutnja tidak kehilangan haknja menguasai/mengurus harta bendanja atau ditjabut hak/wewenangnja atas sesuatu serta pula tidak dalam keadaan pailit. Walikota harus bertempat tinggal dalam wilayah stadsgemeente, gadjinja dibajar oleh pusat akan tetapi stadsgemeente harus menggantinya kekas negeri (S.G.O. pasal 24 — 27).

Djabatan burgemeester dari Stadsgemeente Batavia mulai pembentukannja itu tetap dipegang oleh Mr. Meyroos hingga tahun 1933. Dalam tahun tersebut berhubung masa kerdjanja telah tjukup untuk berhenti dari dinas pemerintah dengan hak pensiun, maka Meyroos lalu diremadjakan dan diganti oleh **IR. E.A. VOORNE-MAN**. Upatjara timbang terima dilangsungkan dalam rapat dewan tanggal 20 April 1933.⁷⁴⁾ Voorneman tetap memangku djabatan burgemeester itu hingga berachirnja Stadsgemeente Batavia dalam tahun 1942.

Dapat pula dianggap sebagai aparaturnja jang ikut melantjarkan djalannja pemerintahan daerah ialah pelbagai komisi jang terdiri dari para anggota dewan. Dengan adanja College van Burgemeester en Wethouders jang masing-masing anggotanja dibebani dengan urusan-urusan tertentu, maka djumlah komisi itu tidak lagi sebanjak seperti dalam masa Gemeente Batavia. Hingga pertengahan tahun 1932 Stadsgemeente Batavia mempunyai komisi-komisi jang berikut:

⁷⁴⁾ Lihat Notulen tahun 1933 no. 6.

1. Technische Commissie;
2. Economische Commissie;
3. Inlandsche Commissie;
4. Wetgevende Commissie;
5. Onderwijscommissie;
6. Personeelscommissie;
7. Bezwaarschriftencommissie;
8. Commissie voor de Pensioenfondsen;
9. Commissie van toezicht op den gemeentelijke Bureau cursus.

Selain itu setjara berkala diadakan pula komisi-komisi tertentu seperti Commissie van het vaststelling kiezerslijst dan Commissie van het onderzoek begrootingsrekening. Pada waktu kemudian dibentuk pula beberapa komisi lainnja, misalnja Commissie voor de Armenzorg (Komisi untuk pemeliharaan fakir miskin).

Selandjutnja aparatur lainnja jang ikut membantu pemerintah daerah tersebut diatas ialah sekretaris. Pegawai ini mendjadi sekretaris dewan merangkap pula sebagai sekretaris College van Burgemeester en Wethouders dan sekretaris walikota (S.G.O. pasal 43 ayat 1).

Sekretaris stadsgemeente memimpin sekretariat jang dibagi dalam 3 afdeeling (bagian), masing-masing afdeeling meliputi beberapa onderafdeeling (suku-bagian). Susunan sekretariat tersebut adalah sebagai berikut :

Afdeeling I, meliputi onderafdeelingen jang berikut :

1. Suku-bagian urusan hukum (juridische zaken);
2. Suku-bagian pendaftaran penduduk (bevolkingskantoor);
3. Suku-bagian urusan pajak (belastingzaken);
4. Suku-bagian izin perusahaan (bedrijfsvergunningen);

Afdeeling II, meliputi :

1. Suku-bagian urusan kepegawaian (personele zaken);
2. Suku-bagian pengadjaran (onderwijs);
3. Suku-bagian arsip dan ekspedisi;
4. Suku-bagian urusan tanah (agrarische zaken);

Afdeeling III, meliputi :

1. Suku-bagian perbendaharaan (comptabiliteit);
2. Suku-bagian pembukuan pusat (centrale boekhouding);
3. Suku-bagian daftar pembayaran (betalingsstaten).

Sampai berachirnja pemerintahan Stadsgemeente Batavia djabatan sekretaris itu dipegang oleh **MR. R.A.A.C. ROOVERS**.

Aparatur-aparatur dan dinas-dinas lainnja pada pokoknja adalah hampir sama seperti pada masa Gemeente Batavia dengan beberapa tambahan sesuai dengan meluasnja tugas pekerjaan stadsgemeente, jaitu :

- a. Dienst van Gemeentewerken;
- b. Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting;
- c. Gemeentelijke Veterinair-hygiënische Dienst;
- d. Gemeentelijke Gezondheidsdienst;
- e. Gemeentelijke Bureau voor Arbeidsbemiddeling;
- f. Kantoor voor de gemeentelijke Armenzorg;
- g. Gemeentekas;
- h. Gemeentelijke Marktwezen;
- i. Inspectie Financiën;
- j. Brandweer.

Pada tahun terachir dari Stadsgemeente Batavia djumlah pegawainja menundjukkan angka $\pm$ 1200 orang.

§ 4. TUGAS DAN WEWENANG

Berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan desentralisasi dari tahun 1903 jang menyatakan bahwa kepada suatu daerah akan dipisahkan sedjumlah uang untuk membiajai kebutuhan/urusan dari pada daerah tersebut (kebutuhan/urusan itu disebutkan dalam ordonansi pembentukannja), maka S.G.O. pasal 70 menetapkan bahwa stadsgemeenteraad *mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnja* sepanjang wewenang itu tidak diberikan kepada College van Burgemeester en Wethouders atau walikota. Djadi penjelenggaraan pemerintahan daerah stadsgemeente merupakan satu kebulatan didalam tangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja.

Dalam bidang mengatur daerahnja itu, maka dewan berwenang membuat peraturan-peraturan baik jang mengenai urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnja ataupun jang merupakan

pelaksanaan lebih landjut dari suatu peraturan pusat atau peraturan propinsi jang membutuhkan bantuannja. Luasnja kekuasaan legislatip itu adalah sama seperti pada Gemeente Batavia dahulu, jaitu bahwa dalam peraturan daerah tidak boleh dimuat hal-hal jang telah diatur dalam peraturan pusat atau peraturan propinsi (West Java) ketjuali apabila diberikan kebebasan dan bahwa peraturan stadsgemeente tidak berlaku lagi apabila pokok-pokok peraturan tersebut diatur oleh peraturan pusat atau propinsi (lihat S.G.O. pasal 74-75).

Dalam peraturan daerahnja itu dewan berwenang mentjantumkan antjaman pidana kurungan selama-lamanja 1 bulan atau denda sebanjak-banjaknja f 100,— dengan atau tanpa pensitaan barang-barang tertentu, dan untuk pelanggaran ulangan maksimum pidana itu dapat dilipatgandakan hingga 2 kali. Peraturan-peraturan stadsgemeente itu tidak mempunjai kekuatan mengikat apabila tidak diundangkan menurut tata pengundangan jang telah ditentukan, jaitu dengan menempatkanja dalam warta resmi dari Propinsi Djawa Barat jang disebut „*Provinciaal Blad* (dimuat dalam *bijvoegsel*nja). Dengan sendirinja peraturan-peraturan jang membutuhkan pengesahan dari instansi atasan tidak boleh diundangkan sebelumnja memperoleh pengesahan itu. Tetapi pengesahan dianggap telah diberikan apabila telah lampau djangka waktu 6 bulan sesudah peraturan jang bersangkutan dikirimkan dan ternyata tiada kabar dari instansi jang harus mengesahkan itu.

Dimuka telah diterangkan bahwa peraturan-peraturan dari Gemeente Batavia dahulu tetap berlaku, oleh karena itu dalam masa pemerintahan Stadsgemeente Batavia banjaklah peraturan-peraturanja jang berasal dari Gemeente Batavia dahulu. Hanya berhubungan dengan perkembangan keadaan stadsgemeenteraad membuat pula pelbagai peraturan jang baru sama sekali untuk mengatur hal-hal jang tadinja belum diatur oleh Gemeente Batavia; demikian pula berhubungan dengan berubahnja keadaan maka dewan tersebut mengadakan pula perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan warisan dari Gemeente Batavia itu baik untuk sebagian maupun dengan djalan memperbaharui seluruhnja ataupun hanya menghapuskanja sadja sesuai dengan kebutuhan pada sesuatu waktu.

Dalam usaha memperbaharui peraturan-peraturan jang lama itu agar sesuai dengan keadaan jang telah berkembang, stadsgemeenteraad berusaha menudju kearah penjederhanaan, jaitu pokok-pokok persoalan serupa jang pada masa Gemeente Batavia diatur dalam

beberapa peraturan, oleh dewan tersebut disederhanakan mendjadi 1 peraturan sadja, ini misalnja :

- a. Bataviaasch Begraafplaatsenreglement 1937 (dimuat dalam Bijvoegsel Provinciaal Blad van West Java tanggal 31-12-1937 no. 26). Peraturan ini mengatur hal ichwal penguburan baik untuk golongan Eropah, Indonesia maupun Tionghoa jang dalam pemerintahan Gemeente Batavia diatur dalam beberapa peraturan sendiri-sendiri.
- b. Bataviaasche Grafrechtenverordening 1937 (Bijvoegsel P.B. tanggal 31-12-1937 no. 26). Peraturan ini memungut biaja-biaja penguburan jang dahulu djuga diatur dalam pelbagai peraturan sesuai dengan pembedaan golongan-golongan rakjat.
- c. Bataviasche Algemeene Heffingsverordening 1937 (Bijvoegsel P.B. tanggal 31-5-1937 no. 9). Peraturan ini djuga menjederhanakan pelbagai peraturan jang memungut retribusi/biaja atas djasa jang diberikan oleh gemeente kepada publik.
- d. Bataviasche Veelslachtverordening 1935 (Bijvoegsel P.B. tanggal 31-7-1936 no. 8). Dengan peraturan jang tunggal ini diatur pemotongan terhadap segala matjam hewan baik sapi, babi, kambing dan sebagainya (Dalam masa Gemeente Batavia pemotongan terhadap babi dan hewan-hewan lainnja diatur dalam peraturan jang terpisah).
- e. Verordening op den verkoop van sterken drank en tot heffing en invordering van een belasting op den verkoop van sterken drank in de Stadsgemeente Batavia (Bijvoegsel P.B. tanggal 31-10-1935 no. 15). Peraturan ini mempersatukan peraturan tentang pendjualan minuman keras dan peraturan tentang pemungutan „vergunningsrecht” dari Gemeente Batavia dahulu.
- f. Bataviasche Pasarverordening (Bijvoegsel P.B. tanggal 30-11-1932 no. 23). Peraturan ini djuga memperbaharui sambil menjederhanakan pelbagai peraturan Gemeente Batavia dahulu tentang penjelenggaraan pasar-pasar gemeente.
- g. Verordening op de waterverstrekking uit de waterleiding der Stadsgemeente Batavia (Bijvoegsel P.B. tanggal 31-12-1938 no. 28). Dalam peraturan ini sekaligus diatur tarip-tarip pemakaian air jang dahulu diatur terpisah dari peraturan induknja.
- h. Algemeene Politieverordening (Bijvoegsel P.B. tanggal 12-1-1934 no. 1). Dalam peraturan ini sekaligus diatur ketentuan-ketentuan mengenai tatatertib dalam kehidupan masjarakat (ketertiban

umum, kesusilaan dan sebagainya). Kemudian diperbaharui lagi dengan Bataviasche Algemeene Politieverordening 1942 (Bijvoegsel P.B. tanggal 31-1-1942 no. 1).

Selain peraturan-peraturan jang tersebut diatas, peraturan-peraturan Gemeente Batavia dalam lapangan kepegawaian semuanya telah diperbaharui. Pada achirnja pemerintahan Stadsgemeente Batavia kita dapati peraturan-peraturan jang mengatur kedudukan keuangan dan kedudukan hukum para pegawai sebagai berikut :

- a. Bataviasche Diensttransportverordening 1935 (Peraturan tentang perdjalananan dinas), Bijvoegsel P.B. tanggal 31-12-1935 no. 19.
- b. Bataviasche Ambtenarenverordening 1938 (Peraturan tentang kedudukan hukum pegawai kotapradja), Bijvoegsel P.B. tanggal 21-2-1938 no. 4.
- c. Bataviasche Wachtgeld- en Onderstandverordening 1938 (Peraturan tentang uang-tunggu dan tundjangan), Bijvoegsel P.B. tanggal 21-2-1938 no. 4.
- d. Bataviasche Verlofsverordening 1938 (Peraturan tentang tjuti), Bijvoegsel P.B. tanggal 21-2-1938 no. 4.
- e. Verordening tot toekenning van duurtetoelag aan verschillende groepen van het Stadsgemeentepersoneel (Peraturan tentang pemberian tundjangan kemahalan), Bijvoegsel P.B. tanggal 23-3-1938 no. 7.
- f. Bataviasche Pensioen- en Onderstandverordening (Peraturan tentang pensiun dan tundjangan), Bijvoegsel P.B. tanggal 20-5-1938 no. 11.
- g. Bataviasche Bezoldigingsverordening 1938 (Peraturan tentang gadji), Bijvoegsel P.B. tanggal 30-6-1938 no. 14.
- h. Bataviasche Maand- en Dagloonersverordening 1940 (Peraturan tentang pekerdja bulanan dan harian), Bijvoegsel P.B. tanggal 20-6-1941 no. 8.

Mengenai peraturan-peraturan jang sama sekali baru, sampai berachirnja pemerintahan Stadsgemeente Batavia telah ditetapkan peraturan-peraturan jang berikut :

1. Verordening op het exploiteeren van autobusdienst in de Stadsgemeente Batavia (Peraturan tentang mengusahakan perusahaan pengangkutan otobis), Bijvoegsel P.B. tanggal 30-1-1931 no. 1.
2. Verordening als bedoeld bij artikel 61 lid 1 van de „Bouw- en Woningverordening van Batavia” (Peraturan ini menetapkan tempat-tempat usaha tertentu jang tidak boleh didirikan pada

- djalan-djalan jang tertentu didalam wilajah kotapradja), Bijvoegsel P.B. tanggal 30-1-1931 no. 1.
3. Verordening tot regeling van het hygiënisch toezicht op den verkoop van ijs (Peraturan tentang pengawasan kebersihan atas pendjualan es batu), Bijvoegsel P.B. tanggal 29-4-1933 no. 6.
 4. Verordening op den verkoop van gereconstrueerde melk binnen de Stadsgemeente Batavia (Peraturan tentang pendjualan susu pulihan), Bijvoegsel P.B. tanggal 19-8-1933 no. 14.
 5. Verordening betreffende de armenzorg in de Stadsgemeente Batavia (Peraturan tentang pemeliharaan fakir miskin), Bijvoegsel P.B. tanggal 15-6-1935 no. 7.
 6. Verordening houdende regelen betreffende de uitoefening van het stadstramwegbedrijf (Peraturan tentang menjelenggarakan perusahaan trem kota), Bijvoegsel P.B. tanggal 30-6-1937 no. 12.
 7. Bataviasche Rij- en Voertuigenverordening 1937 (Peraturan tentang kendaraan dan alat pengangkutan), Bijvoegsel P.B. tanggal 30-6-1937 no. 12.
 8. Verordening houdende regelen omtrent stopplaatsen voor openbare personenauto's (Peraturan tentang tempat-tempat perhentian untuk mobil penumpang umum), Bijvoegsel P.B. tanggal 28-2-1938 no. 5.
 9. Bataviasche Varkensfokkerijenverordening 1940 (Peraturan tentang tempat-tempat peternakan babi), Bijvoegsel P.B. tanggal 31-5-1940 no. 10.
 10. Verordening op de zwembaden (Peraturan tentang tempat-tempat perenangan), Bijvoegsel P.B. tanggal 1-5-1941 no. 6.
 11. Verordening op de toelating van publiek tot openbare zweminrichtingen (Peraturan tentang mengusahakan tempat-tempat renang untuk umum), Bijvoegsel P.B. tanggal 20-6-1941 no. 8.
 12. Verordening regelende de gevolgen der door middel van een plan aangegeven bestemming van gebieden in de Stadsgemeente Batavia (Bataviasche Bestemmingskringen- en Bouwtypenverordening 1941/Peraturan tentang lingkungan peruntukan dan matjam bangunan), Bijvoegsel P.B. tanggal 30-8-1941 no. 14.
 13. Verordening regelende de gevolgen van voorloopige bestemmingsplannen der Stadsgemeente Batavia (Bataviasche Plannen verordening 1941/Peraturan tentang perentjanaan), Bijvoegsel P.B. tanggal 30-8-1941 no. 14.

Demikianlah usaha-usaha Stadsgemeenteraad van Batavia didalam bidang kekuasaan legislatipnja.

Dalam lapangan mengurus maka stadsgemeenteraad itu memegang kekuasaan atas semua keuangan dan hartabenda daerah. Dewan itulah yang memutuskan tentang pembelian atau pemindahtanganan barang-barang tak bergerak, surat sero atau surat hutang; menerima/menolak warisan; mengadakan perbuatan damai untuk menyelesaikan sesuatu perselisihannya tanpa perantaraan pengadilan serta membebaskan piutang atau menghapuskan sesuatu perhitungan. Demikian pula anggaran keuangan setiap tahun dari stadsgemeente ditetapkan oleh dewan, termasuk perhitungan atas pengeluaran dan penerimaannya kemudian. Pengeluaran uang yang dibebankan kepada mata anggaran tak terduga juga hanya boleh diputuskan oleh stadsgemeenteraad.

Pengawasan terhadap College van Burgemeester en Wethouders dalam menjalankan tugas pekerdjaannya dilakukan pula oleh dewan. Dalam hal ini dewan itu berwenang meminta segala keterangan yang dikehendakinya. Seterusnya dewan berwenang memperhentikan seseorang wethouder yang tidak memberikan keterangan-keterangan yang dimintanya atau yang selalu terhalang menjalankan tugas pekerdjaannya ataupun yang sangat melalaikan kewadjabannya sebagai wethouder itu (S.G.O. pasal 21 dan 98).

Dewan mengesahkan pula peraturan tatatertib rapat College van Burgemeester en Wethouders yang dibuat oleh badan itu sendiri (S.G.O. pasal 69).

Selandjutnya dewan dapat mengemukakan dan membela kepentingan kotapradja serta penduduknya kehadapan gubernur djenderal, Volksraad, Dewan Pemerintah Daerah propinsi, gubernur dan residen (hak petisi).

Dalam pelbagai peraturan stadsgemeente ditetapkan pula bahwa dewan merupakan instansi tempat mengajukan bandingan/keberatan terhadap keputusan-keputusan dari College van Burgemeester en Wethouders mengenai sesuatu hal, misalnja penolakan atas permohonan izin, dan sebagainya.

Achirnja sebagai tugas wewenang pula dari stadsgemeenteraad ialah hak para anggotanya masing-masing untuk memilih anggota Volksraad⁷⁵⁾ dan anggota Provinciale Raad van West Java.⁷⁶⁾

⁷⁵⁾ Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië (peraturan yang merupakan pembaharuan seluruhnya dari Regeringsreglement 1854), Staatsblad 1925 no. 415, pasal 55 ayat 4—6.

⁷⁶⁾ Java Provincie-Kiesordonnantie, Staatsblad 1927 no. 528, pasal 1.

Mengenai tugas dan wewenang College van Burgemeester en Wethouders, pada pokoknja badan ini merupakan aparatur stads-gemeente jang mendjalankan pimpinan atas pemerintahan daerah sehari-hari. Menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O., tugas dan wewenang College van Burgemeester en Wethouders ialah dalam hal-hal jang berikut :

- a. menetapkan gadji para pegawai kotapradja menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan tentang gadji pegawai jang ditetapkan oleh stadsgemeenteraad (S.G.O. pasal 39);
- b. mengangkat/memperhentikan pegawai kotapradja sesuai dengan peraturan tentang hal itu jang ditetapkan oleh dewan (pasal 40 ayat 1 — 2);
- c. melaksanakan segala keputusan dewan sepanjang tidak diserahkan kepada pihak lain (pasal 86);
- d. memberikan bantuannja dalam melaksanakan peraturan pusat atau peraturan propinsi sepanjang tidak diserahkan kepada pihak lain (pasal 88);
- e. menjiapkan segala sesuatu jang harus diadjukan kepada dewan untuk dipertimbangkan dan diputuskan (pasal 89);
- f. melakukan sesuatu tindakan jang berakibat pengeluaran uang dalam batas-batas anggaran belandja, dalam hal ini dewan menetapkan besarnja djumlah jang tidak boleh dilampaui (pasal 109);
- g. memeriksa, memperhitungkan dan memerintahkan untuk dibayar segala penagihan jang mendjadi beban anggaran belandja (pasal 111);
- h. menetapkan rantjangan dan sjarat-sjarat sesuatu pemborongan sepanjang tidak dilakukan oleh dewan sendiri (pasal 119);
- i. mendjaga agar semua peraturan dan ketentuan mengenai penghasilan kotapradja didjalankan dan semua piutang kotapradja ditagih dan dipertanggungjawabkan pada waktu jang selajaknja (pasal 122);
- j. menjelesaikan perhitungan anggaran keuangan selambat-lambatnja pada tanggal 1 September tahun berikutnya dari tahun dinas jang bersangkutan (pasal 128);
- k. memerintahkan agar pegawai wadjib-hitung membayar ganti-rugi sementara (pasal 134);
- l. menundjuk seseorang lain untuk menjelesaikan sesuatu perhitungan dari pegawai wadjib-hitung jang lalai, melarikan diri,

- meninggal dunia atau dalam pengampunan (pasal 135 — 136);
- m. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pegawai wadhib-hitung dan setiap waktu berwenang memeriksa kas dan administrasinja (pasal 138);
 - n. menjelidiki perhitungan-perhitungan yang diterima dari pegawai wadhib-hitung dan kemudian menjampaikan laporan kepada dewan; dalam hal terdapat pemalsuan atau perbuatan-perbuatan djahat lainnja warkat-warkat perhitungan itu diserahkan kepada kedjaksaan (pasal 140);
 - o. memberikan segala keterangan dan pertimbangan yang diminta oleh gubernur djenderal dan Dewan Pemerintah Daerah provinsi mengenai segala hal yang bersangkutan dengan kotapradja (pasal 151 bis).

Dalam mendjalankan pimpinan harian dan pelaksanaan segala urusan yang mengenai rumah tangga kotapradja itu, College van Burgemeester en Wethouders baik seluruhnja maupun ketua dan anggotanja masing-masing bertanggungjawab kepada stadsgemeenteraad (pasal 98).

Achirnja menurut suatu ketentuan dalam peraturan perundangan lalu lintas djalan dari pusat ⁷⁷⁾, College van Burgemeester en Wethouders merupakan pula wegbeheerder dari djalan-djalan yang dikuasai oleh stadsgemeente. Dalam fungsinja ini college tersebut berwenang menetapkan peraturan walaupun hanja mengenai hal-hal yang terbatas sadja jaitu mengatur urusan lalu lintas sebagai pelaksanaan lebih landjut dari „*Wegverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1936 no. 201) dan „*Wegverkeersverordening*” (Staatsblad 1936 no. 451) seperti menentukan rambu-rambu lalu lintas untuk kepentingan keselamatan dan keamanan para pemakai djalan, tempat-tempat perhentian dan menunggu bagi sesuatu kendaraan, kelas-kelas djalan termasuk djembatan-djembatan didalam wilayah kotapradja, dan sebagainya (Hal-hal ini dahulu dalam zaman Gemeente Batavia diatur oleh gemeenteraad dalam peraturan daerahnja).

Mengenai fungsi walikota, pedjabat ini selain menjadi ketua stadsgemeenteraad, merupakan pula ketua merangkap anggota dari College van Burgemeester en Wethouders. Dalam kedudukannja itu burgemeesterlah yang mengundang para anggota dewan dan wet-

⁷⁷⁾ Wegverkeersverordening (S. 1936 no. 451) pasal 1 ayat 2.

houders untuk berapat dan memimpin rapat dari masing-masing badan itu. Selandjutnja tugas dan wewenang walikota ialah :

- a. mewakili stadsgemeente dimuka dan diluar pengadilan (pasal 32 S.G.O.);
- b. menerima dan membuka segala surat jang ditudjukan kepada dewan dan College van Burgemeester en Wethouders dan selandjutnja menjelenggarakan penjelesaiannja (pasal 33);
- c. menandatangani segala warkat jang ditetapkan oleh dewan dan college, termasuk peraturan daerah kotapradja (pasal 34);
- d. melaksanakan segala keputusan College van Burgemeester en Wethouders sepanjang tidak dibebankan kepada seseorang wethouder lainnja (pasal 36 ayat 1);
- e. memperingatkan kepada publik djangka waktu kedaluwarsa dari sesuatu tagihan (pasal 37);
- f. memberitahukan segala keputusan College van Burgemeester en Wethouders kepada dewan tentang penetapan gadji, pengangkatan, perhentian sementara dan perhentian seseorang pegawai kotapradja (pasal 39 ayat 2 dan pasal 40 ayat 3);
- g. memegang pimpinan atas pegawai-pegawai jang diperbantukan kepada stadsgemeente (pasal 41 ayat 2);
- h. menjelenggarakan pengundangan peraturan-peraturan daerah dan mengumumkannja kepada publik (pasal 80 ayat 2 dan pasal 82 ayat 2);
- i. memberikan bantuan melaksanakan peraturan pusat/propinsi apabila College van Burgemeester en Wethouders melalaikannja (pasal 88 ayat 5);
- j. menjelenggarakan agar segala rantjangan peraturan dan anggaran keuangan kotapradja disediakan dikantor untuk dapat dibatja atau dibeli oleh publik, disampaikan kepada para anggota dewan dan dikirimkan kepada surat-surat kabar, selambat-lambatnja 4 minggu sebelum rapat jang akan membahas rantjangan-rantjangan itu (pasal 90 ayat 1);
- k. menandatangani surat-surat perintah bajar dan mengeluarkan surat perintah bajar jang baru berhubung terdjadinja kedaluwarsa (pasal 112 ayat 1 dan pasal 121 ayat 2).

Achirnja berdasarkan peraturan tentang penagihan padjak ⁷⁸⁾,

⁷⁸⁾ Regelen voor de invordering van belastingen van provinciën en van als zelfstandige gemeenschappen aangewezen gedeelten daarvan, begrepen in kohieren, registers en staten (Staatsblad 1926 no. 372, kemudian diperbaharui dengan S. 1939 no. 248), pasal 3.

walikota pulalah jang bertugas mengeluarkan surat paksa untuk menagih padjak-padjak stadsgemeente jang tidak dibayar.

Dimuka telah diterangkan bahwa selain mendjadi organ daerah, walikota merupakan pula pegawai pusat; dalam kedudukannja ini walikota mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap keputusan-keputusan dewan dan college, jaitu walikota berwenang tidak melaksanakan sesuatu keputusan apabila keputusan itu menurut pendapatnja bertentangan dengan peraturan pusat/propinsi atau kepentingan umum dan karenanja dapat ditunda atau dibatalkan oleh gubernur djenderal. Pendapatnja itu dalam djangka waktu 3 hari diberitahukan kepada organ daerah jang bersangkutan dan kepada propinsi. Apabila telah lampau djangka waktu 3 bulan sedjak pemberitahuannja itu dari pihak gubernur djenderal tiada penundaan/pembatalan, maka walikota wadjib melaksanakan keputusan jang bersangkutan (pasal 36 ayat 2 — 4 S.G.O.).

Demikianlah hal ichwal mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah Stadsgemeente Batavia.

Dibawah S.G.O. otonomi Stadsgemeente Batavia telah mengalami pertumbuhan jang meluas. Dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran ternjata bahwa kalau dahulu Gemeente Batavia hanja mempunyai beberapa matjam sekolah, maka Stadsgemeente Batavia hingga tahun 1942 telah menjelenggarakan dan mengurus tidak kurang dari pada selosin matjam lembaga-lembaga pengadjaran/pendidikan, jaitu :

- a. Europeesche scholen;
- b. Hollandsch Inlandsche scholen;
- c. Hollandsch Chinesche scholen;
- d. Schakelscholen;
- e. Vervolgscholen;
- f. Volksscholen;
- g. Standaardscholen (onderbouw maupun bovenbouw);
- h. Leergang tot opleiding van volksonderwijzers (sedjenis pendidikan guru);
- i. Middenstandshandelscholen (sekolah dagang kaum menengah);
- j. Klein handelsschool;
- k. Ambachtsleergang (sedjenis pendidikan pertukangan);
- l. Inheemsche huishoudschool (sedjenis sekolah kepandaian puteri);

- m. Avondcursussen in boekhouden, steno en typen;
- n. Avondcursussen voor klerken.

Dalam lapangan perburuhan, masalah pengangguran dan urusan sosial lainnja, Stadsgemeente Batavia mengusahakan kantor ker-djantara untuk menghubungkan mereka jang membutuhkan pe-kerdja-pekerdja dan jang menawarkan tenaganya; memberikan subsidi dan bantuan kepada pelbagai badan-badan amal, menje-lenggarakan pemeliharaan fakir miskin, dan lain-lain.

Demikianlah sedjalan dengan pertumbuhan otonomi, tugas pekerdjaan pelbagai djawatan/dinas stadsgemeente djuga selalu bertambah luas.

§ 5. PERLUASAN WILAJAH

Disebelah Timur Stadsgemeente Batavia berbatasan dengan *Stadsgemeente Meester Cornelis* (sekarang Djatine-gara). Mengenai stadsgemeente tetangga ini, sebelum tahun 1905 djuga merupakan sebuah afdeeling dari Residentie Batavia. Kemu-dian dengan ordonansi pembentukan termuat dalam Staatsblad 1905 no. 206 berbarengan dengan Gemeente Batavia, Meester Cor-nelis djuga dibentuk sebagai suatu gemeente. Selandjutnja dalam tahun 1926 dengan Staatsblad 1926 no. 367 Gemeente Meester Cornelis didjadikan pula sebagai stadsgemeente jang menjelengga-rakan pemerintahan daerah menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O., djumlah anggota dewannja ialah 15 orang.

Perkembangan keadaan menghendaki adanja perubahan ter-hadap wilajah Stadsgemeente Batavia. Maka kemudian dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1934 no. 687 jang mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1935, oleh Pemerintah Hindia Belanda Stadsgemeente Meester Cornelis dibubarkan dan wilajahnja digab-ungkan kepada Stadsgemeente Batavia. Dengan adanja penam-bahan itu maka wilajah Stadsgemeente Batavia mendjadi seluas 182 km persegi.⁷⁹⁾

Menurut pasal 3 ordonansi penggabungan itu, maka djumlah anggota Stadsgemeenteraad van Batavia diubah dari 27 mendjadi 42 orang jang susunannja terdiri dari 24 orang Belanda, 12 orang Indonesia dan 6 orang kaulanegara tak asli jang bukan orang Be-

⁷⁹⁾ Winkler Prins Encyclopaedie, djilid III katja 360.
Penerbit: Elsevier, Amsterdam/Brussel.
Tjetakan ke-6, 1948.

landa. Seterusnja pasal 4 menetapkan bahwa mereka jang pada permulaan tahun 1935 itu merupakan anggota dewan dari Stads-gemeente Meester Cornelis, sedjak saat itu menjadi anggota Stads-gemeenteraad van Batavia. Demikian pula para pegawai stadsge-meente jang dihapuskan itu dijadikan pegawai Stads-gemeente Batavia sampai kelak diatur lebih lanjut oleh Stads-gemeenteraad van Batavia didalam suatu peraturan jang harus pula disahkan oleh propinsi.

Perluasan wilayah Stads-gemeente Batavia itu membawa pula konsekwensi didalam bidang perundang-undangan. Peraturan-peraturan daerah Stads-gemeente Batavia jang dibuat sebelum penggabungan itu tidak dengan sendirinja berlaku untuk wilayahnja jang baru. Untuk bekas wilayah Stads-gemeente Meester Cornelis itu masih tetap berlaku peraturan-peraturan daerah dari stads-gemeente jang dihapuskan. ⁸⁰⁾ Dalam hal ini oleh ordonansi penggabungan pasal 6 ditentukan bahwa semua peraturan Stads-gemeente Meester Cornelis dahulu masih tetap berlaku terus sampai tanggal 1 Dja-nuari 1938 ⁸¹⁾ ketjuali apabila selama djangka waktu 3 tahun itu diganti oleh Stads-gemeenteraad van Batavia.

Dalam usaha-usaha selandjutnja maka dalam djangka waktu tersebut diatas, oleh Stads-gemeenteraad van Batavia telah ditetapkan pelbagai peraturan tentang pokok-pokok jang telah diatur oleh Stads-gemeente Batavia maupun Stads-gemeente Meester Cornelis sebelumnja terdjadi penggabungan itu sambil mentjabut peraturan-peraturan dari kedua pihak jang mengatur hal jang sama itu. Dengan demikian maka keberatan-keberatan dalam melaksanakan peraturan-peraturan jang tidak seragam dalam suatu daerah itu dapatlah diachiri.

Mengenai sesuatu hal jang belum pernah diatur oleh Stads-gemeenteraad van Meester Cornelis dahulu, sedangkan Stads-gemeente Batavia mempunjai peraturannja, maka oleh dewan peraturan dari Stads-gemeente Batavia itu dinjatakan berlaku untuk seluruh wilayah Stads-gemeente Batavia jang baru, sehingga dengan demikian kekosongan hukum didalam bekas wilayah Stads-gemeente Meester Cornelis itu djuga telah diselesaikan.

⁸⁰⁾ Algemeene voorzieningen tot regeling van enkele gevolgen verbonden aan de opheffing van locale ressorten en de daarvoor ingestelde raden, S. 1927 no. 557, pasal 4.

⁸¹⁾ Menurut perubahan dengan S. 1936 no. 668 (sebelum itu djangka waktunja 2 tahun).

Demikianlah dengan adanya perluasan wilayah itu, pemerintahan daerah jang diselenggarakan oleh Stadsgemeente Batavia berkembang pula dengan sebaik-baiknya.

Djumlah 42 orang anggota dewan dari Stadsgemeente Batavia itu kemudian dianggap terlampau banyak oleh pusat, oleh karena itu kemudian dengan Staatsblad 1938 no. 420 ordonansi pembentukan Stadsgemeente Batavia dari tahun 1926 diubah lagi sehingga memuat ketentuan bahwa djumlah anggota dewan kotapradja itu ialah 33 orang, terdiri dari 17 onderdanen Nederlanders, 11 inheemsche onderdanen niet-Nederlanders dan 5 uitheemsche onderdanen niet-Nederlanders.

§ 6. KEUANGAN

Mengenai keuangan Stadsgemeente Batavia, sumber-sumber penghasilannya jang terutama masihlah seperti pada waktu Gemeente Batavia dahulu, jaitu pajak, opsen, retribusi dan pendapatan perusahaan daerah.

Opsen dan retribusi jang dipungut oleh Stadsgemeente Batavia pada umumnya masih sama seperti dahulu. Sedang mengenai pajak daerah terdapat beberapa tambahan, sampai akhirnya Stadsgemeente Batavia matjam-matjam pajak jang dipungut ialah :

- a. pajak tontonan;
- b. pajak kendaraan dan alat pengangkutan tak bermotor;
- c. pajak andjing;
- d. pajak reklame;
- e. pajak minuman keras;
- f. pajak forensen;
- g. pajak sepeda;
- h. pajak djalan;
- i. pajak kembangapi/petasan;
- j. pajak hiasan kuburan.

Dinas-dinas dalam bentuk perusahaan jang diselenggarakan oleh Stadsgemeente Batavia adalah landjutan jang dari Gemeente Batavia dahulu dengan ditambah perusahaan gudang dan bengkel.

Bagaimanakah dengan hubungan keuangan antara Stadsgemeente Batavia dengan pemerintah pusat?

Sampai tahun 1938 ternyata masih dijalankan sistem yang lama yaitu Pemerintah Hindia Belanda setiap tahun memberikan sumbangan uang sejumlah yang tertentu menurut kehendak pusat itu. Besarnya sumbangan tahunan yang pada masa Gemeente Batavia dimulai dengan f 290.000,—, sedjak tahun 1929 dengan Staatsblad 1929 no. 314 dinaikkan lagi sehingga berjumlah f. 387.506,—.

Baru kemudian dalam tahun 1938 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan „*Regeling omtrent de financieele verhouding tusschen het Land, en provinciën, stadsgemeenten en regentschappen op Java en Madoera*” (Ordonnantie financieele verhouding Java en Madoera/Ordonansi tentang perimbangan keuangan untuk Djawa dan Madura), Staatsblad 1938 no. 170 juncto tahun 1938 no. 624, yang mengubah sistem hubungan keuangan yang lama. Dengan peraturan ini maka kepada Stadsgemeente Batavia setiap tahun diberikan sebagian dari penghasilan pusat yang diperolehnya dalam wilayah stadsgemeente itu.

Menurut pasal 4 dari ordonansi perimbangan keuangan itu, maka kepada Stadsgemeente Batavia diserahkan 55,42% dari pendapatan pajak-pajak pusat yang berikut :

- a. pajak rumah tangga;
- b. pajak pemotongan hewan;
- c. pajak verponding Indonesia.

Selanjutnya pasal 5 ordonansi tersebut diatas menetapkan bahwa kepada Stadsgemeente Batavia diberikan pula bagian dari dari tjukai bensin dan pajak kendaraan bermotor.

Besarnya bagian dari tjukai bensin itu ialah 3 sen setiap liter (tidak termasuk tjukai bensin untuk pesawat terbang), sedang bagian dari pajak kendaraan bermotor ditetapkan menurut dasar penerimaan kas dari tahun yang lalu dan jumlah kendaraan bermotor yang ada diwilayah stadsgemeente pada tanggal 1 Djanuari dari tahun yang berdjalan.

Achirnya kepada Stadsgemeente Batavia diberikan pula sumbangan uang untuk biaya perbaikan kampung, besarnya tidak tertentu. Hanya oleh pusat setiap tahun disediakan uang sebanyak f 500.000,— yang akan dibagi-bagikan kepada semua stadsgemeente di Djawa-Madura untuk keperluan perbaikan kampung itu. Segala sesuatu mengenai pembagian sumbangan diantara kotapradja-kotapradja itu

ditetapkan oleh gubernur djenderal (ordonansi perimbangan keuangan pasal 7).

Demikianlah dengan adanya pembagian sumber-sumber penghasilan tersebut diatas antara pusat dan kotapradja, maka sokongan tetap setiap tahun jang diberikan menurut sistim jang lama dihapuskan (ordonansi perimbangan keuangan pasal 11).

Walaupun sokongan tetap termaksud diatas sudah tidak lagi diberikan, namun oleh Stadsgemeente Batavia masih diterima beberapa subsidi dan penggantian dari pusat jang tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dari ordonansi perimbangan keuangan, jaitu antara lain :

- a. subsidi biaja kantor;
- b. penggantian dari negara untuk lapangan udara Kemajoran;
- c. penggantian untuk penagihan tjukai pemotongan hewan;
- d. subsidi untuk biaja sekolah rendah, sekolah dagang kaum menengah dan sekolah dagang ketjil;
- e. subsidi untuk biaja pemberantasan penjakit kelamin;
- f. sokongan untuk biaja pemeliharaan fakir miskin.

Dengan adanya penerimaan-penerimaan tersebut diatas, sedjalan pula dengan meluasnja pelbagai tugas pekerdjaan stadsgemeente, maka djumlah pengeluaran kotapradja setiap tahunnja djuga selalu meningkat. Besarnja anggaran belandja itu untuk dinas biasa pada tahun 1941 telah mentjapai angka jang tidak kurang dari 7½ djuta, jang berarti 25 kali lebih besar dari pada pengeluaran tahun pertama dari Gemeente Batavia dahulu.

Demikianlah pemerintahan daerah Stadsgemeente Batavia jang berlangsung hingga saat menaluknja Pemerintah Hindia Belanda kepada Balatentera pendudukan Djepang dalam bulan Maret tahun 1942.

DJAKARTA TOKUBETU SI

§ 1. PERUNDANG-UNDANGAN DESENTRALISASI DJEPANG

Dengan petjahnja perang Pasifik sedjak achir tahun 1941, maka balatentera Djepang dengan gerak tjepat menjerbu ke Asia Tenggara. Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan-pasukan Djepang sudah mulai mendarat di beberapa tempat dipulau Djawa, dan pada tanggal 5 Maret kota Batavia djatuh ketangannja, kemudian pada tanggal 9 Maret 1942 menjerahlah Pemerintah Belanda di Indonesia kepada pihak Djepang. ⁸²⁾

Dengan berachirnja Pemerintah Hindia Belanda dan dimulainja pemerintahan pendudukan balatentera Djepang di Indonesia sedjak bulan Maret itu, maka sedjarah pemerintahan Kota Djakarta menempuh suatu fase baru lagi.

Pada tanggal 7 Maret 1942 oleh Pembesar Balatentera Djepang di Djakarta dikeluarkan Undang-undang no. 1 tentang mendjalankan pemerintahan balatentera. ⁸³⁾ Menurut pasal 3 undang-undang tersebut ditentukan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannja, demikian pula semua hukum dan undang-undang dari Pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal sadja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Djepang.

Kemudian dalam bulan Agustus tahun itu djuga, Panglima Besar Balatentera Djepang mengeluarkan *Undang-undang 1942 no. 27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah*. ⁸⁴⁾ Peraturan ini merupakan peraturan per-

⁸²⁾ Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo: „Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942”; (Tjeramah diutjapkan pada waktu peresmian tjahang Bagian Hukum di Surabaja dari Fakultas Hukum, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada pada tanggal 19 Djuli 1952), katja 5—6.

Penerbit: Jajasan Fonds Universitit Negeri Gadjah Mada, Jogjakarta.
Tjataan tambahan : untuk studi lebih landjut, lihat djuga sumber² jang ditjantumkan sebagai daftar literatur dari uraian tjermah tsb. diatas (katja 34-35).

⁸³⁾ Dimuat dalam Kan Po (lihat tjataan no. 21 dimuka), Nomor Istimewa (bulan 3 - 2603), katja 6-7.

⁸⁴⁾ Kan Po no. 1 (tahun ke I, bulan 8 - 2602) katja 7-8, pendjelasan U.U. ini terdapat dalam Kan Po no. 2 (bulan 9 - 2602), katja 5-6. Kemudian diubah dengan Osamu Seirei 1945 no. 3 (Kan Po no. 61).

undangan desentralisasi Djepang jang mengadakan perubahan besar terhadap sistim desentralisasi dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu.

Menurut undang-undang tersebut pulau Djawa dibagi dalam satuan-satuan daerah jang disebut *Syuu*, daerah Syuu ini sama dengan daerah residentie (keresidenan) pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Syuu dibagi dalam *Si* dan *Ken*. Daerah *Si* adalah sama dengan daerah stadsgemeente, sedang *Ken* sama dengan daerah regentschap dahulu (pasal 2-3).

Untuk masing-masing *Si* dan *Ken* diangkat seorang kepala jang disebut *Sityoo* dan *Kentyoo*. Aturan jang dahulu ditetapkan untuk stadsgemeente dan regentschap, jaitu Stadsgemeente-ordonnantie dan Regentschapsordonnantie tetap berlaku ketjuali apabila diadakan perubahan oleh Pemerintah balatentera Djepang (Undang-undang 1942/27 pasal 4).

Suatu perubahan penting jang dilakukan oleh pihak Djepang mengenai pemerintahan *Si* (stadsgemeente) ialah kalau dahulu stadsgemeente hanja merupakan badan jang mengurus rumah tangga sadja tanpa mengurus urusan pangreh pradja (istilah sekarang: pamong pradja), maka menurut undang-undang perubahan tata pemerintahan daerah tersebut diatas ditetapkan bahwa kini *Si* mengerdjakan segala pemerintahan didalam lingkungan daerahnja. Urusan pemerintahan (pangreh pradja) didalam wilajah stadsgemeente jang dahulu diurus oleh regent (bupati), wedana, assistent wedana, lurah, kepala kampung atau wijkmeester, kini termasuk dalam kekuasaan *Sityoo* (kepala *Si*). Para wedana, assistent wedana, lurah dan sebagainya jang pada masa Hindia Belanda diwadjabkan mendjalankan pekerdjaan pangreh pradja didalam lingkungan stadsgemeente sebagai pembantu dari pada regent, kini mendjadi pegawai *Si* atau mendjalankan urusan pemerintahan *Si* dibawah perintah dan pimpinan *Sityoo*.

Mengenai Syuu (residentie), perubahan pokok jang dilakukan terhadap daerah ini ialah kalau dahulu residentie hanja merupakan daerah administratip dibawah pimpinan residen jang bertugas membantu gubernur (ini sesudah dibentuknja propinsi-propinsi berdasarkan Bestuurs hervormingswet 1922 dan Provincie-ordonnantie), maka kini Syuu merupakan daerah swatantra jang tingkatnja tertinggi, daerah-daerah swatantra tingkat dibawahnja ialah *Si* (stadsgemeente) dan *Ken* (regentschap), sedang propinsi-propinsi

Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur dari masa Hindia Belanda dahulu dihapuskan. Mengenai hal ichwal pemerintahan daerah Syuu itu akan diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.

Selandjutnja pasal 5 Undang-undang no. 27 tersebut diatas membuka kemungkinan adanja suatu daerah swatantra lain, jaitu jang dinamakannja *Tokubetu Si* (stadsgemeente luar biasa), ini adalah suatu Si jang khusus ditundjuk oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentera Djepang). Perbedaan antara Tokubetu Si dengan Si ialah bahwa stadsgemeente luar biasa itu tidak merupakan daerah swatantra dibawah Syuu (residentie), melainkan langsung dibawah Gunseikan jang membentuknja itu. Djadi Tokubetu Si mempunyai status jang kurang lebih sama seperti suatu Syuu.⁸⁵⁾ Jang dapat dibentuk sebagai suatu Tokubetu Si ialah kota jang sangat penting dalam lapangan politik, ekonomi, masjarakat dan kebudajaan. Segala sesuatu jang berkenaan dengan pemerintahan daerah ini djuga akan diatur didalam suatu peraturan perundangan tersendiri.

Mengenai desa-desa jang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, pada masa pemerintahan Djepang ini tetap pula berlangsung sebagai daerah swatantra dengan nama daerah *Ku*.

Demikianlah dalam garis besarnya pembagian daerah-daerah swatantra menurut sistim desentralisasi dari balatentera pendudukan Djepang.

§ 2. OTONOMI TOKUBETU SI

Tidak lama kemudian setelah keluarnja Undang-undang 1942 no. 27 tentang perubahan tata pemerintahan daerah itu, oleh Panglima Besar Balatentera Djepang ditetapkanlah *Undang-undang no. 28 tentang aturan pemerintahan Syuu dan aturan pemerintahan Tokubetu Si*.⁸⁶⁾

Menurut Undang-undang no. 28 jang antara lain mengatur hal ichwal pemerintahan daerah Tokubetu Si itu, ditentukan bahwa nama dan daerah Tokubetu Si ditetapkan oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentera Djepang). Aparatur pemerintahan

⁸⁵⁾ Prof. Dr. J.H.A. Logemann : „Het Staatsrecht van Indonesië”, het formele systeem. Katja 31.
Penerbit : N.V. Uitgeverij W. Van Hoeve, 's-Gravenhage/Bandung, 1954.

⁸⁶⁾ Kan Po no. 1 katja 8—10, kemudian ber-ulang² diubah, terachir dengan Osamu Seirei tahun 1945 no. 30 (Kan Po no. 72).

Tokubetu Si terdiri atas seorang Tokubetu Sityoo (kepala Tokubetu Si) dan beberapa Zyoyaku (wakil kepala Tokubetu Si) jang masing-masing diangkat pula oleh Gunseikan. Djumlah Zyoyaku untuk tiap-tiap Tokubetu Si ditetapkan oleh Gunseikan (Undang-undang 1942 no. 28, bagian B pasal 1—2).

Tokubetu Sityoo mendjalankan undang-undang serta mengurus pemerintahan didalam lingkungan daerahnja dibawah perintah dan pengawasan Gunseikan. Kepala stadsgemeente luar biasa itu memimpin dan mengawasi pula Keisatusyotyoo (Kepala kantor besar polisi) didalam Tokubetu Si dan berhak mentjabut atau membatalkan sesuatu jang ditetapkan oleh pembesar kepolisian itu apabila Tokubetu Sityoo menganggap bahwa apa jang ditetapkanja itu tidak patut (pasal 3).

Apabila Tokubetu Sityoo berpendapat perlu untuk memudahkan dan merapihkan pekerdjaan, maka dengan seizin Gunseikan ia boleh membagi daerah Tokubetu Si dalam beberapa bagian dan mengangkat pegawai-pegawai dibawahnja mendjadi kepala dari pada bagian-bagian itu. Nama dan daerah bagian-bagian tersebut ditetapkan djuga oleh Tokubetu Sityoo dengan seizin Gunseikan. Kepala-kepala bagian jang diangkatja itu mendjalankan kewadajiban Tokubetu Sityoo didalam bagiannja masing-masing dibawah perintah Tokubetu Sityoo (pasal 6).

Selandjutnja menurut Osamu Seirei 1943 no. 11 tentang Syoobootai di Djawa⁸⁷⁾ ditentukan bahwa anggota-anggota Syoobootai (Barisan pentjegah kebakaran) jang diadakan didalam Tokubetu Si diangkat dan dipetjat oleh Tokubetu Sityoo setelah mendengar pertimbangan Kepala kantor besar polisi (pasal 2).

Mengenai tugas wewenang Zyoyaku, pedjabat ini membantu Tokubetu Sityoo dan apabila Tokubetu Sityoo berhalangan mendjalankan tugas kewadjabannja, maka Zyoyaku mendjadi wakil untuk mendjalankan kewadajiban djabatan Tokubetu Sityoo itu.

Demikianlah berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang no. 27 dan no. 28 tersebut diatas, maka dengan keputusan Pembesar Pemerintah Balatentera Djepang tanggal 8 Agustus 1942, Stadsgemeente Batavia warisan Pemerintah Hindia Belanda ditundjuk sebagai sebuah Tokubetu Si, djumlah Zyoyakunja ditetapkan sebanjak 3 orang.⁸⁸⁾ Luas wilajah Tokubetu Si ini adalah sama

⁸⁷⁾ Kan Po no. 17 (tahun ke II, bulan 4—2603), katja 3.

⁸⁸⁾ Kan Po no. 3 (tahun ke I, bulan 9—2602), katja 10.

seperti wilajah Stadsgemeente Batavia dahulu. Sampai berachirnja masa pendudukan Djepang dalam tahun 1945, Djakarta adalah satu-satunja Tokubetu Si dipulau Djawa.

Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1942 diumumkanlah bahwa sebagai Djakarta Tokubetu Sityoo telah diangkat seorang Djepang bernama **SAKAE TUKAMOTO**.⁸⁹⁾ Sebelum adanja Tokubetu Sityoo Djepang itu, maka djabatan acting kepala pemerintahan daerah kota Djakarta dipegang oleh seorang Indonesia, jaitu **BAGINDO DAHLAN ABDULLAH**.

Tukamoto hanja mendjabat sebagai kepala Tokubetu Si selama 10 bulan; mulai tanggal 21 Djuni 1943 ia digantikan oleh **K. YOSIE**,⁹⁰⁾ jang kemudian djuga diganti lagi dengan seorang Djepang lain jaitu **HASEGAWA** sampai berachirnja masa pemerintahan balatentera Djepang di Indonesia.

Dalam bulan April 1943 keluarlah Osamu Seirei 1943 no. 12 (*Undang-undang untuk sementara waktu tentang Ken dan Si*).⁹¹⁾ Peraturan ini mengatur lebih landjut susunan dan kekuasaan pemerintahan daerah Ken (regentschap) dan Si (dalam pengertian Si ini dimaksudkan pula Tokubetu Si). Pasal 3 Undang-undang 1943/12 itu menetapkan bahwa mengenai susunan dan hak-hak Si/Tokubetu Si serta tjara mendjalankan pemerintahan Si dalam mengurus rumah tangganja sendiri tetaplah berlaku aturan tentang stadsgemeente dahulu (S.G.O.), ketjuali penjimpangan-penjimpangan jang dibuat oleh Undang-undang no. 12 ini atau peraturan perundangan lainnja dari Pemerintah Balatentera Djepang. Selandjutnja pasal 4 menentukan bahwa Sityoo memegang kekuasaan atas daerahnja dan mendjadi pula wakil dari pada daerah tersebut; hak-hak jang dahulu dipegang oleh stadsgemeenteraad dan College van Burgemeester en Wethouders kini semuanja didjalankan oleh Sityoo.

Djadi dalam sistim pemerintahan daerah dari Pemerintah Balatentera Djepang itu tidak ada lagi dewan-dewan, semua kekuasaan pemerintahan daerah berada didalam tangan 1 orang (pemerintahan tunggal) dengan hanja dibantu oleh beberapa Zyoyaku.

Menarik sekali adalah pendjelasan resmi⁹²⁾ dari pihak Peme-

⁸⁹⁾ Kan Po no. 2, (tahun ke I, bulan 9 — 2602), katja 8.

⁹⁰⁾ Kan Po no. 21 (tahun ke II, bulan 6 — 2603), katja 28.

⁹¹⁾ Kan Po no. 18 (tahun ke II, bulan 5 — 2603), katja 4.

⁹²⁾ Kan Po no. 18, katja 6.

rintah Balatentera itu mengenai alasan ditjiptakannya pemerintahan tunggal tersebut, jaitu antara lain berbunji kira-kira sebagai berikut:

„Undang-undang untuk sementara waktu tentang Ken dan Si ini mengatur Ken (Kabupaten) dan Si (Gemeente Kota) dengan tjara yang berbeda sekali dengan aturan Pemerintah Belanda dahulu..... peraturan ini akan memberi pengaruh jang baik serta jang akan *ditjatat didalam sedjarah pemerintahan daerah untuk selama-lamanja.....* sekarang pemerintahan Si (dan djuga Ken) diubah sifatnja dengan maksud agar supaja daerah itu *dapat bekerdja dengan sebaik-baiknya*, jaitu misalnja dengan menghapuskan sifat dahulu jang *bermain demokrasi dan kemerdekaan berbitjara*. Dengan perkataan lain, angan-angan untuk mengadakan badan pemerintahan jang berdiri sendiri atas dasar liberalisme dan tjita-tjita untuk mendirikan dewan rakjat dimasing-masing daerah, kini *dienjahkan sama sekali*”.

Mengenai pengawasan terhadap Tokubetu Si, maka ditetapkan bahwa hak-hak jang dahulu dipegang oleh gubernur djenderal, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, gubernur atau residen, kini semuanya dilakukan oleh Gunseikan, ketjuali apabila diadakan aturan istimewa lainnja. Djadi pada pokoknja ketentuan-ketentuan dalam S.G.O. dan peraturan perundangan lainnja dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu mengenai penjelenggaraan otonomi stadsgemeente, sepanjang tidak khusus diubah oleh Djepang masih tetap berlaku seperti semula, hanja dalam hal ini terdapat pergantian pedjabat-pedjabat/aparatur jang melakukan tugas kekuasaan itu. Menurut sistim balatentera Djepang itu maka semua tugas kekuasaan didjalankan oleh pedjabat/aparatur tunggal! Ini memang dapat kita mengerti kalau diingat tjorak pemerintahan Djepang jang diktatorial, apalagi sedang dalam keadaan perang dengan pihak lain. Dalam keadaan perang itu untuk menghadapi segala kemungkinan, segala sesuatu perlu diatur agar dapat diambil tindakan-tindakan jang tjepat. Memang sesungguhnya segala pengaturan jang dilakukan oleh Pemerintah Balatentera Djepang dalam sesuatu hal (djuga dalam lapangan otonomi dan desentralisasi) terutama ditudjukan kepada kepentingan dan usaha perang (war effort). ⁹³⁾

⁹³⁾ Buku Prof. Pringgodigdo (tjataan no. 82 dimuka), katja 15.

Selain Undang-undang 1943 no. 12 tersebut diatas, pada waktu jang sama itu dikeluarkan pula *Osamu Seirei no. 13 tentang Ken- dan Si Zyoorei* (peraturan Ken dan Si).⁹⁴⁾ Ini mengatur hal ichwal kekuasaan dalam bidang legislatip dari pada kedua daerah itu. Menurut pasal 1-nja dinjatakan bahwa Si (termasuk djuga Tokubetu Si) boleh membuat Zyoorei (peraturan) mengenai pekerdjaan Si didalam daerahnja.

Ketjuali hal-hal jang ditetapkan dengan istimewa oleh peraturan-peraturan perundangan dari Pemerintah Balatentera Djepang, maka hal-hal jang harus ditetapkan dalam Zyoorei ialah :

1. Tjara mengenakan dan memungut padjak daerah, sewa, upah dan uang wadjib lainnja;
2. Tjara mengawasi harta benda daerah dan bangunan-bangunan-nja;
3. Banjaknja pegawai daerah serta tjara membajar gadjinja, ongkos djalannja, hadiah waktu berhenti bekerdja, tundjangan kematian dan sebagainya;
4. Hal-hal tentang mengadakan Siku;
5. Mengubah atau menghapuskan hal-hal jang ditetapkan dalam Si Zyoorei;
6. Hal-hal lainnja jang penting untuk mendjalankan pemerintahan Si dalam hal mengurus rumah tangganja sendiri (Undang-undang 1943/13 pasal 2).

Oleh karena semua kekuasaan stadsgemeenteraad dahulu kini berada didalam tangan Tokubetu Sityoo, maka dengan sendirinja kekuasaan untuk membuat peraturan daerah itu kini djuga dilakukan oleh pedjabat tunggal itu.

Sebagai pembatasan ditentukan bahwa Tokubetu Si Zyoorei tidak boleh mengubah undang-undang dan peraturan dari Pemerintah Balatentera Djepang. Hal mengadakan, mengubah dan menghapuskan Zyoorei itu harus disahkan oleh Gunseikan (hak pengawasan preventip). Peraturan jang dibuat itu harus dibubuhi tanggal oleh Tokubetu Sityoo dan ditandatangani.

Menurut *Osamu Seirei* 1942 no. 14,⁹⁵⁾ dalam peraturan daerah itu oleh Tokubetu Sityoo dapat ditjantumkan aturan pidana jaitu

⁹⁴⁾ Kan Po no. 18, katja 5—6.

⁹⁵⁾ Kan Po no. 6, (tahun ke I, bulan 11—2602), katja 3. Kemudian diubah dengan *Osamu Seirei* 1944 no. 25.

tyoo-eki (hukuman pendjara) paling lama 3 bulan atau bakkin (hukuman denda) paling banjak f 100,—.

Selandjutnja menurut pasal 3 Osamu Seirei 1943/13 sendiri ditentukan bahwa dalam Si Zyoorei itu boleh ditetapkan aturan tentang mengenakan Si-batu (hukuman Si) bagi mereka jang terluput dari pemungutan padjak Si, sewa atau upah dengan djalan melakukan tipu atau perbuatan lainnja jang terlarang, jaitu paling banjak 5 kali dari djumlah jang terluput dari pemungutan itu, dengan minimum 3 rupiah. Selain itu dalam hal memungut padjak, sewa, upah atau dalam hal memakai harta benda atau bangun-bangunan, dalam Zyoorei tersebut boleh dimuat ketentuan tentang mendjatuhkan Si-batu paling banjak f 20,—.

Hal mengenakan Si-batu dan memungut denda diurus oleh Si:tyoo. Barangsiapa menaruh keberatan terhadap keputusan itu, ia boleh mengajukan permintaan banding kepada Gunseikan dalam djangka waktu 30 hari sedjak menerima pemberitahuan keputusan itu. Apabila denda Si-batu tidak dibayar dalam djangka waktu jang telah ditentukan, maka mereka jang lalai itu dikenakan aturan bagi orang jang menunggak padjak.

Tokubetu Si Zyoorei harus diumumkan dengan djalan menempelkan peraturan aslinja jang tertulis dalam bahasa Djepang atau bahasa Indonesia pada papan pengumuman Tokubetu Si, menurut tjara jang ditetapkan oleh Gunseikan (Undang-undang 1943/13 pasal 8). Kemudian dengan Maklumat Gunseikan tanggal 12 Djuni 1943 no. 7,⁹⁶⁾ ditetapkan bahwa Tokubetu Si Zyoorei jang asli harus ditulis dalam bahasa Djepang.

Achirnja sebagai ketentuan peralihan ditetapkan bahwa verordeningen jang dibuat oleh Stadsgemeente Batavia dahulu tetap berlaku dan sama kekuatannja dengan Zyoorei jang ditetapkan oleh Djakarta Tokubetu Si berdasarkan Undang-undang 1943/13 itu, asal sadja peraturan-peraturan daerah dari zaman Hindia Belanda itu tidak merintang dijalannja pemerintahan balatentera Djepang.

§ 3. TOKUBETU SI SANGI-KAI

Sistim pemerintahan tunggal dengan tanpa dewan-dewan dalam tjorak jang bagaimanapun dilaksanakan dengan setjara konsekwen hingga bulan September 1943. Sedjak bulan tersebut maka terdjadi

⁹⁶⁾ Kan Po no. 21, katja 5.

perubahan dalam sistim pemerintahan balatentera Djepang itu, jaitu dengan dibentuknja dewan-dewan baik dipusat maupun didaerah jang mendjalankan fungsi sebagai *badan penasehat*. Pada pemerintahan pusat badan penasehat itu disebut *Tyuuoo Sangi-in*, sedang didaerah (hanja diadakan didaerah Syuu dan Tokubetu Si sadja) sebutannja ialah *Sangi-kai*.

Menarik sekali adalah alasan dan motivering jang diberikan oleh pihak Pemerintah Balatentera Djepang berkenaan dengan pembentukan badan-badan penasehat itu. Pada tanggal 1 Agustus 1943 Saikoo S.k'ikan (Panglima Besar Balatentera Djepang) memberikan keterangan jang antara lain berbunyi sebagai berikut : ⁹⁷⁾

„Sedjak Balatentera Dai Nippon mendarat di Djawa ini, 50 djuta penduduk Djawa dengan tulus ichlas bekerdja bersama-sama. Terhadap keichlasan dan usaha jang sungguh patut dihargai itu timbullah pengharapan kami kepada penduduk Djawa agar mereka bekerdja dengan g'at bukan sadja dalam lapangan jang telah diusahakan pada masa jang lampau, tetapi djuga dalam lapangan politik sesuai dengan deradjat dan hasil-hasil jang telah dibuktikan oleh mereka. Dengan berdasarkan pada keadaan dewasa ini maka kami telah berniat hendak mengadakan dengan segera tindakan jang njata tentang *hal turut mengambil bahagian dalam pemerintahan negeri* jang dipandang perlu pada dewasa ini. Pelaksanaan itu dalam garis garis besarnja ialah dengan diadakannja Badan Penasehat dalam pemerintahan balatentera, dimana ditempatkan penduduk Djawa dengan d pilih jang mempunyai budi pekerti serta pengetahuan dan pend.rian jang utama. Dengan bantuan kegiatan pekerdjaan badan itu, maka kami mengharap supaja Pemerintah Balatentera di Djawa akan memperoleh kemandjuan jang lebih pesat lagi tepat. Tindakan jang dilakukan ialah dipusat pemerintahan dibentuk Tyuuoo Sangi-in, balai tersebut memadjukan usul-usul kepada Pemerintah serta mendjawab pertanjaan Pemerintah tentang hal-hal politik dan tindakan jang akan dilakukan oleh Pemerintah Balatentera. Ditiap-tiap Syuu (*residentie*) termasuk djuga Tokubetu Si, diadakan Sangi-kai, sidang ini memadjukan usul-usul serta mendjawab pertanjaan Pemerintah Syuu/Tokubetu Si tentang urusan pemerintahan daerah”. (disingkat oleh penjusun).

⁹⁷⁾ Dimuat selengkapnja dalam Kan Po no. 24 (tahun II, bulan 8—2603), katja 10—11.

Pada hari jang sama oleh Pemerintah Balatentera Djepang diberikan pula pendjelasan jang diutjapkan oleh Soomubutyoo (Kepala Departemen Urusan Umum), antara lain dikatakannja: ⁹⁸⁾

„Untuk menjambut kegiatan dan keichlasan segenap rakjat Djawa, lagi pula karena mempertjajai kesanggupannja, dan karena berkehendak supaja kesanggupan itu dikembangkan sepenuh-penuhnja ditiap-tiap lapangan serta untuk membuka djalan, *supaja kehendak Pemerintah disampaikan kepada rakjat, dan sebaliknya keadaan dikalangan rakjat disampaikan kepada Pemerintah*, maka sebagai langkah pertama sekarang ini diambil tindakan memberi kesempatan kepada penduduk untuk turut mengambil bahagian dalam pemerintahan negeri. Tindakan itu ialah mengadakan Tyuuoo Sangi-in, sedang ditiap-tiap Syuu dan Tokubetu Si diadakan Sangi-kai, anggota-anggotanja terdiri dari penduduk disini jang mempunjai budi pekerti, pengetahuan dan pendirian jang utama. Dengan mengerahkan pikiran, pengetahuan dan kepertjajaan umum jang ada padanja, mereka diberi kesempatan memadjukan usul-usul dan mendjawab tentang pelbagai politik dan tindakan pemerintahan balatentera (bagi Sangi-kai tentang urusan pemerintahan daerah). Dengan demikian balai tersebut didjadikan suatu sajab untuk mendorong pusat Pemerintah Balatentera”. (dipersingkat dan cursief dari penjusun).

Dalam keterangan Pemerintah Balatentera itu disinggung pula semangat jang harus didjadikan pedoman bagi badan-badan penasihat tersebut dalam mendjalankan tugasnja, jaitu antara lain berbunji „..... baik dikalangan pemerintah maupun dikalangan rakjat semuanya hendaklah menanggalkan pakaian kolot jang dinamai : liberalisme, individualisme dan demokrasi..... Pemerintahan Balatentera *tidak membutuhkan perbintjangan banjak-banjak, melainkan mementingkan tindakan jang peraktis*. Maka tuan-tuan penduduk disini hendaknja djanganlah mempersoalkan *teori dan pembitjaraan jang hampa belaka*, melainkan hendaklah mendalamkan tjita-tjita Asia Timur Raja jaitu membebaskan 1000 djuta rakjat Asia Timur Raja dari belenggu musuh dan membangunkan taman surga abadi tempat kita makmur bersama-sama dengan mengetjap kesenangan bersama-sama”.

⁹⁸⁾ Idem dimuat dalam Kan Po no. 24, katja 11 — 14.

Dalam bulan September berikutnya, keluarlah Osamu Seirei 1943 no. 37 tentang Syuu- dan Tokubetu Si Sangi-kai.⁹⁹⁾ Pasal 1 Undang-undang no. 37 itu selengkapnja berbunyi sebagai berikut :

„Untuk meminta usul dan djawaban jang mengenai urusan pemerintahan daerah agar supaya usaha Pemerintah Balatentera dapat didjalankan dengan pesat dan tepat, maka di Syuu dan di Tokubetu Si diadakan Syuu Sangi-kai atau Tokubetu Si Sangi-kai (selandjutnja dibawah ini disebut Sangi-kai)”.

Selandjutnja dalam undang-undang itu ditentukan bahwa Sangi-kai menjampaikan buah pertimbangannja kepada Syuutyookan atau Tokubetu Sityoo tentang hal-hal jang mengenai urusan pemerintahan daerah untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan pedjabat itu (pasal 7) dan Sangi-kai boleh memadjukan usul tentang urusan pemerintahan daerah kepada Syuutyookan atau Tokubetu Sityoo (pasal 8).

Undang-undang 1943 no. 37 tersebut diatas diberi pula pendjelasan resmi jang isinja seirama dengan apa jang telah dinjatakan oleh Panglima Besar Balatentera dan Kepala Departemen Urusan Umum Djepang seperti telah diuraikan diatas. Hanja dalam pendjelasan undang-undang itu diadakan perbandingan dengan keadaan jang lampau. Dalam pendjelasan tersebut dinjatakan : ¹⁰⁰⁾

„..... bahwa aturan dan badan-badan jang baru ditetapkan untuk turut mengambil bahagian dalam pemerintahan itu berdasarkan atas tjita-tjita Asia Timur Raja jang murni dan sama sekali tidak boleh disamakan dengan aturan dan badan-badan jang diberikan oleh Pemerintah Belanda dahulu. Dizaman jang lampau pendjadjah Belanda itu hanja bermaksud terutama sekali memeras anak negeri, walaupun mereka memberikannja djuga aturan dan badan-badan untuk turut mengambil bahagian dalam pemerintahan, baik pada pusat maupun didaerah-daerah, jang oleh mereka dipropagandakan dan dibanggakan serta dipasangnja papan jang tertulis „politik kemakmuran” dan diberikannja warna „badan perwakilan”, tetapi sebenarnja djalan demikian itu hanja untuk menipu dan mengabui mata rakjat serta djuga untuk mentjari alasan-alasan jang pantas buat pemerasan mereka jang kedjam itu. Mereka mengangkat beberapa pegawai negeri bangsa Belanda sebagai anggota dibadan-badan perwakilan itu, baik dipusat perwakilan

⁹⁹⁾ Kan Po no. 26 (tahun II, bulan 9 - 2603), katja 9-10.

¹⁰⁰⁾ Idem dimuat dalam Kan Po no. 26, katja 28-30.

maupun didaerah-daerah, sehingga mereka dapat menetapkan peraturan apapun jang mereka kehendaki dengan semau-maunja begitu pula tentang aturan menundjuk anggota dari badan-badan tersebut, bangsa Belanda tidak pernah mengindahkan banjaknja tjatjah djiwa dan hal-hal lain jang tidak boleh diabaikan untuk menetapkan dasar pemilihan. Mereka mengambil kemampuan uang sebagai batas atau dasar pemilihan anggotanja sambil tidak memperdulikan keadaan rakjat jang sebenarnja. Lain dari pada itu, mereka mengangkat banjak sekali pegawai negeri bangsa Indonesia dengan diberikan perintah rahasia dari atas, tetapi mereka pura-pura duduk dalam badan-badan itu seakan-akan untuk kepentingan rakjat. Susunan badan-badan jang baru ditetapkan oleh Balatentera Dai Nippon ini sangat berlainan dengan susunan jang diadakan oleh Pemerintah Belanda dahulu untuk dengan tjerdik mendjalankan politik pemerasaannja, berlainan, baik tentang *bentuknja* maupun tentang *asas-asas melakukannja* jaitu. Balatentera Dai Nippon telah menetapkan bahwa kira-kira separuh dari djumlah anggota badan-badan itu, baik dipusat maupun didaerah, akan *dipilih* antara dan oleh rakjat sendiri, sedangkan jang lainnja *diangkat* setjara berikut: pada Tyuuoo Sangi-in anggotanja diangkat oleh Saikoo Sikikan, dan pada Sangi-kai didaerah-daerah oleh Syuutyookan atau Tokubetu Sityoo, dengan mempertimbangkan keadaan rakjat seadil-adilnja. Orang-orang jang tjakap serta mempunjai pengetahuan dan pendirian utama jang diangkat setjara demikian itu akan *dihimpunkan didalam suatu gedung jang disediakan istimewa bagi mereka*. Disitu mereka boleh *mendjawab pertanjaan-pertanjaan* jang dimajukan oleh Balatentera Dai Nippon dan *memajukan usul-usul* untuk mempersembahkan kebaktian dan bantuan rakjat dalam hal pemerintahan kepada Balatentera Dai Nippon”.

Dari apa jang tersurat pada pasal-pasal dalam Undang-undang 1943 no. 37 maupun jang tersirat dalam keterangan/pendjelasan pihak penguasa Djepang itu ternyata bahwa Tyuuoo Sangi-in dan Tokubetu Si/Syuu Sangi-kai sebagai dewan-dewan jang mendampingi (lebih tepat: dibawah) pedjabat Djepang jang mendjalankan pemerintahan otokratis, kedudukan dan fungsinja tidak lain dari pada suatu badan penasehat jang berkewajiban pertama-tama mendjawab pertanjaan-pertanjaan dari pedjabat Djepang itu, dan

kedua (kalau berani!) memajukan usul-usul kepada pembesar yang tetap mendjalankan pemerintahan setjara tunggal itu.

Dilihat dari sudut badan yang harus mentjerminkan dan menjalurkan kehendak rakjat, maka badan-badan yang dibentuk oleh Djepang tersebut diatas bukanlah sematjam Dewan Perwakilan Rakjat, melainkan merupakan satu alat belaka dari tentera Djepang untuk membuat andjuran-andjuran kepada rakjat yang sedang masuk dengan harapan yang bukan-bukan, andjuran mana diodongkan dengan bajonet dibelakangnja oleh pihak Djepang kepada badan itu, djadi bahkan badan-badan itu belum pula dapat dikatakan sebagai badan penasehat dalam arti yang sesungguhnya, melainkan badan pembuat andjuran kepada rakjat untuk kepentingan tentera Djepang yang berkuasa. Bahwasanja semua anggotanja berbangsa Indonesia, hal itu tidak dapat lain oleh karena golongan lainnja tidak dapat dipergunakan sebagai alat yang begitu mudjarab untuk mendapatkan sokongan yang sebesar-besarnja dari rakjat. ¹⁰¹⁾

Demikianlah hakekat dari pada suatu Tokubetu Si Sangi-kai (dan djuga Badan Penasehat yang lainnja dipusat dan didaerah Syuu).

Mengenai susunan organisasi Tokubetu Si Sangi-kai, Undang-undang no 37 itu menetapkan bahwa badan ini terdiri dari sedjumlah anggota yang sebagian diangkat menurut aturan pemilihan yang ditetapkan oleh Gunseikan dan sebagian lagi diangkat oleh Tokubetu Sityoo dari antara penduduk di Djawa yang berwatak baik serta mempunyai pengetahuan dan pendirian yang utama (pasal 2). Lamanja djabatn Giin (anggota) Sangi-kai itu ialah 1 tahun. Pada Sangi-kai itu diangkat seorang Gityoo (ketua) dan seorang Huku Gityoo (wakil ketua) oleh Tokubetu Sityoo dari antara tjalon-tjalon sebanyak 2 kali lipat yang dipilih oleh dan dari para anggota Sangi-kai itu sendiri (pasal 5). Gityoo hanja bertugas memimpin dan mengatur sidang Sangi-kai, sedang sidangnya itu sendiri diadakan dengan undangan dari Tokubetu Sityoo yang menetapkan tempat dan lamanya sidang, demikian pula pembukaan dan penutupan sidang itu dilakukan atas perintah Tokubetu Sityoo. Selandjutnja pegawai yang diperintah oleh Tokubetu Sityoo boleh menghadiri dan turut ber-

¹⁰¹⁾ Usep Ranawidjaja : „Arti dan Kedudukan Badan Perwakilan Rakjat dalam Negara kita“ (Scriptie untuk memperlengkapi udjian doktoral lengkap pada Universitit Negeri Gadjah Mada Fakulit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik di Jogjakarta), katja 50-51.
Penerbit : Jajasan B.P. „Gadjah Mada“, Jogiakarta.

suara dalam sidang Sangi-kai. Oleh Tokubetu Sityoo diangkat pula Syoki (penulis) jang bertugas membuat tjatatan perundingan dan mengurus urusan umum lainnja menurut perintah ketua Sangi-kai

Sebagai pelaksanaan lebih landjut dari pada Undang-undang no. 37 itu, keluarlah Osamu Kanrei (peraturan jang ditetapkan oleh Gunseikan) 1943 no. 7, ¹⁰²⁾ dalam peraturan ini ditentukan bahwa banjakknja Giin (anggota) Tokubetu Si Sangi-kai ialah paling banjak 12 orang dan diantaranya jang diangkat menurut pemilihan ialah untuk Djakarta Tokubetu Si 6 orang (pasal 1). Hal ichwal mengenai pemilihan Giin Tokubetu Si Sangi-kai itu diatur dalam suatu peraturan tersendiri jaitu Osamu Kanrei 1943 no. 8 ¹⁰³⁾

Giin itu dipilih dalam tiap-tiap daerah pemilihan, bagi Tokubetu Si daerah pemilihan tersebut ialah daerah Siku. Giin dipilih oleh pemilih-pemilih jang ditundjuk Kutjoo (kepala Ku) dari antara orang-orang jang berhak mendjadi pemilih. Jang berhak mendjadi pemilih ialah orang laki-laki bangsa Indonesia (orang perempuan atau bangsa lain tidak boleh) jang telah mentjapai umur 25 tahun dan bertempat tinggal dalam Ku jang bersangkutan, ketjuali mereka jang tergolong :

1. pegawai negeri;
2. orang jang telah dihukum pendjara 1 tahun atau lebih (ketjuali karena melanggar politik) atau orang jang telah dihukum karena melanggar hukum balatentera (Gunritu). (Osamu Kanrei 1943/8 pasal 2, 4 dan 5).

Sjarat-sjarat bagi orang jang berhak dipilih ialah sama seperti pemilih tersebut diatas (pasal 6).

Para pemilih jang telah mengeluarkan ongkos pada waktu melaksanakan pemilihan Giin Sangi-kai mendapat penggantian dari Pemerintah Balatentera Djepang, hal ini diatur dalam Osamu Kanrei 1943 no. 10. ¹⁰⁴⁾

Mengenai orang-orang jang mendjadi Giin sendiri, mereka menerima uang djabatan dan penggantian ongkos jang dikeluarkannja dalam memenuhi kewadjabannja, jaitu berupa uang saku, uang penginapan, ongkos kereta api dan ongkos kendaraan. Kedudukan keuangan dari pada para anggota Badan Penasehat itu diatur pula dalam Osamu Kanrei 1943 no. 7 jang diatas telah disinggung.

¹⁰²⁾ Kan Po no. 26, katja 11 — 12.

¹⁰³⁾ Kan Po no. 26, katja 12 — 15.

¹⁰⁴⁾ Kan Po no. 27, (tahun II, bulan 9 — 2603), katja 7 — 8.

Demikianlah hal ichwal suatu matjam aparaturn model baru dalam sedjarah pemerintahan daerah di Indonesia pada masa pendjadjahan Djepang.

§ 4. SUSUNAN ORGANISASI TOKUBETU SI

Mengenai susunan organisasi Djakarta Tokubetu Si, berbeda pula dengan Stadsgemeente Batavia dahulu jang mempunyai djawatan-djawatan dan bagian-bagian, maka kini Tokubetu Si mempunyai *Sityookanboo* (secretariaat) dan *Kyoku* (kantor).¹⁰⁵⁾

Sityookanboo (secretariaat) mengurus pekerdjaan jang berikut:

1. hal-hal jang termasuk urusan rahasia;
2. urusan surat-menjurat.

Mengenai Kyoku, semuanja berdjumlah 5 buah, jaitu :

- I. Soomukyoku (Kantor Urusan Umum);
- II. Keizaikyoku (Kantor Urusan Ekonomi);
- III. Kyooikukyoku (Kantor Urusan Pengadjaran);
- IV. Koosikyoku (Kantor Kemakmuran dan Kesehatan);
- V. Koomukyoku (Kantor Pekerdjaan Umum).

I. Kantor Urusan Umum mengurus pekerdjaan jang berikut :

1. urusan rantjangan;
2. urusan pegawai;
3. urusan anggaran belandja;
4. urusan padjak;
5. urusan roomu;
6. urusan perhitungan uang, alat-alat kantor serta memperbaiki alat-alat itu;
7. urusan tatauusaha;
8. hal-hal jang tidak termasuk urusan kantor lain.

II. Kantor Urusan Ekonomi mengurus :

1. urusan perdagangan, perusahaan industri dan perusahaan lain-lainnja;
2. urusan pembahagian barang-barang;
3. urusan pengendalian (controle) ekonomi;
4. urusan ekonomi jang lain-lain.

¹⁰⁵⁾ Hal ichwal susunan organisasi ini diatur dalam Undang undang 1942/28 (lihat tjatatan no. 86 dimuka).

- III. Kantor Urusan Pengadjaran bertugas menjelenggarakan :
 1. urusan pengadjaran dan pendidikan:
 2. urusan agama.
- IV. Kantor Kemakmuran dan Kesehatan bertugas dalam lapangan:
 1. urusan kesehatan:
 2. urusan memperbaiki penghidupan rakyat.
- V. Kantor Pekerdjaan Umum mengurus pekerdjaan jang berikut:
 1. urusan bangunan-bangunan:
 2. urusan djalan, pengairan dan saluran air minum.

Tiap-tiap Kyoku tersebut diatas dipimpin oleh seorang Kyo-kutyoo (kepala kantor). Para Kyo-kutyoo itu bertugas memerintah dan mengawasi pegawai-pegawai jang dibawahnja serta memimpin dan mendjalankan pekerdjaan Kyoku dibawah perintah Tokubetu Sityoo.

Selanjutnja untuk melantjarkan djalannja pemerintahan, wilayah Djakarta Tokubetu Si dibagi dalam 7 bahagian jang disebut *Siku*, jaitu : ¹⁰⁶⁾

1. Pendjaringan Siku:
2. Mangga-besar Siku:
3. Tandjoeng Prioeck Siku:
4. Tanah Abang Siku:
5. Gambir Siku:
6. Pasar Senen Siku:
7. Djatinegara Siku.

Dalam tiap-tiap Siku itu diadakan *Sikuyakusyoo* (kantor Siku) jang dikepalai oleh seorang Sikutyoo. Dan tiap-tiap minggu para Sikutyoo itu berapat dengan Soomukyokutyoo untuk memberikan laporan tentang djalannja pemerintahan daerah dan menerima instruksi-instruksi. Kemudian instruksi-instruksi itu diteruskan oleh masing-masing Sikutyoo kepada pedjabat-pedjabat dibawahnja jaitu para Kutyoo (kepala wijk). Masing-masing Kutyoo meneruskan pula perintah-perintah tersebut kepada bawahannja dan seterusnya.

Selain dari pada kantor-kantor seperti tersebut diatas, maka pada Tokubetu Si diadakan pula *Keisatusyo* (Kantor besar

¹⁰⁶⁾ Kan Po no. 43 (tahun III. bulan 5 — 2604). katja 52.

polisi), dipimpin oleh seorang kepala jang berada dibawah pimpinan dan pengawasan Tokubetu Sityoo. Selandjutnja diadakan pula *Tihookensatukyoku* (Kedjaksaan pengadilan negeri). Tempat kantor, nama dan daerah pemerintahan masing-masing instansi itu ditetapkan oleh Gunseikan.

Mengenai kedudukan para pegawai Tokubetu Si, hal ini diatur dalam Osamu Seirei 1943 no. 34.¹⁰⁷⁾ Pegawai Tokubetu Sityoo diangkat dan dipetjat oleh Tokubetu Sityoo dengan pemberitahuan kepada Gunseikan. Tokubetu Sityoo memerintah dan melakukan pengawasan terhadap para pegawai itu serta boleh mendjatuhkan hukuman djabatan kepada mereka, jaitu berupa teguran, potongan gadji dan pemetjatan. Kepada pegawai jang dalam mengurus pekerdjaan merugikan Tokubetu Si, pembesar tersebut boleh pula memutuskan agar pegawai jang bersangkutan mengganti kerugian. Kedudukan keuangan dan kedudukan hukum para pegawai itu harus ditetapkan dalam Tokubetu Si Zyoorei (peraturan daerah Tokubetu Si) ketjuali apabila ada aturan istimewa dalam undang-undang, dalam hal ini Tokubetu Sityoo boleh mengadakan aturan khusus atau aturan rumah tangga dengan istimewa menurut ketentuan-ketentuan dalam Zyoorei itu.

Mengenai keadaan keuangan Djakarta Tokubetu Si, sumber-sumber penghasilan seperti padjak daerah dan lain-lain dari Stadsgemeente Batavia dahulu masih tetap didjalankan seperti sediaan. Selain itu denda jang diperoleh dari Si-batu (hukuman Si) misalnja karena tidak membajar padjak dan sebagainja, dimasukkan pula dalam penghasilan daerah tersebut (Osamu Seirei 1943/13 pasal 4).

Untuk mengatur segala sesuatu jang berkenaan dengan tatausaha dan pengelolaan keuangan daerah, oleh Gunseikan dalam bulan Maret 1943 dikeluarkan *Peraturan Zi-Sei-Hi No. 1616* (Peraturan Keuangan Ken dan Si).¹⁰⁸⁾ Sesuai pula dengan sistim pemerintahan tunggal, maka menurut peraturan ini semua kekuasaan atas keuangan daerah berada didalam tangan Tokubetu Sityoo. Anggaran keuangan tiap-tiap tahun dibuat oleh pembesar tersebut dengan pengesahan dari Gunseikan (pasal 8). Selandjutnja dibuka kemungkinan agar aparaturn jang memegang kas ialah suatu bank tertentu. Bank itulah jang bertanggungjawab dalam segala hal

¹⁰⁷⁾ Kan Po no. 26, katja 6 — 7.

¹⁰⁸⁾ Kan Po no. 16 (tahun II, bulan 4 — 2603), katja 7 — 10.

tentang urusan mengeluarkan, memasukkan dan menjimpan uang kontan (pasal 25). Dengan Maklumat Gunseikan tanggal 1 April 1943 ditetapkanlah bahwa bank yang bertugas untuk memegang kas Djakarta Tokubetu Si ialah Kabusiki Kaisya Taiwan Ginkoo tjabang Djakarta.

Demikianlah sedjarah pemerintahan Kota Djakarta dalam zaman pendudukan balatentera Djepang yang berlangsung hingga tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut Djepang menjerah kepada tentera Sekutu.¹⁰⁹⁾ Dengan ini bujarlah impian tentang kemakmuran abadi Asia Timur Raja dibawah pimpinan Dai Nippon yang diperdjuangkan dengan segala pengorbanan dan penderitaan, dan bagi Kota Djakarta sendiri berarti bahwa babakan baru dalam lembaran sedjarah pemerintahannja akan dimulai lagi.

¹⁰⁹⁾ Tatang Sastrawiria & Haksan Wirasutisna : „Ensiklopedi Politik”, katja 241. Penerbit : Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K., Djakarta 1955.

PEMERINTAHAN NASIONAL KOTA DJAKARTA

§ 1. PEMINDAHAN KEKUASAAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 mendengunglah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai pernyataan tekad segenap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka terlepas dari segala ikatan subordinasi kepada bangsa lain.

Pada hari berikutnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ditetapkanlah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹¹⁰⁾ Menurut pasal 18 dari Undang-undang Dasar itu dinjatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya penjelasan resmi atas pasal tersebut menyatakan bahwa Daerah Indonesia akan dibagi dalam Propinsi, dan daerah Propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat autonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena di daerah-pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dari apa yang dikemukakan diatas terjatalah bahwa sistem otonomi dan desentralisasi yang akan dijalankan oleh Negara Republik Indonesia akan menjimpang dan berbeda dengan sistem pada masa pendudukan Djepang.

Tetapi Aturan Peralihan pasal II dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut diatas menetapkan pula bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar tersebut.¹¹¹⁾

¹¹⁰⁾ Buku Koesnodiprodjo : „Himpunan Undang², Peraturan², Penetapan² Pemerintah Republik Indonesia 1945” (penerbitan baru), katja 113.
Penerbit : S.K. Seno, Djakarta.

Tjataan tambahan : Naskah U.U.D.R.I. itu berikut penjelasannya terdapat pula dalam buku tersebut diatas, katja 3 — 20.

¹¹¹⁾ Ketentuan peralihan ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 1945 no. 2 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sendiri, dimana dinjatakan bahwa segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut.

Demikianlah berdasarkan ketentuan peralihan itu, maka kedudukan Djakarta Tokubetu Si masih berlangsung terus. Pada waktu itu djabat-an Tokubetu Sityoo masih dipegang oleh orang Djepang jaitu Hasegawa, hanja djabat-an Zyoyaku I dan Zyoyaku III dipegang oleh pedjabat-pedjabat bangsa Indonesia, jaitu berturut-turut oleh **SUWIRJO** dan **BAGINDO DAHLAN ABDULLAH**.

Sedjalan dengan telah adanja Pemerintah Nasional di Pusat jang berkedudukan di Kota Djakarta, maka untuk pemerintahan daerah kota tersebut dikehendaki pula adanja pemerintahan daerah jang djuga bertjorak nasional.

Dikalangan para pegawai Djakarta Tokubetu Si timbullah usaha-usaha agar kekuasaan dari tangan pedjabat-pedjabat Djepang berpindah kepada orang-orang Indonesia. Oleh para pegawai itu lalu dibentuk sebuah Panitia jang diketuai oleh **MARTAAMI-DJAJA** dengan maksud untuk mengoperkan tanggungdjawab atas Djakarta Tokubetu Si dari tangan Hasegawa kepada Suwirjo. Pada tanggal 7 September 1945 Panitia tersebut menjelenggarakan rapat besar jang dikundjungi oleh seluruh pegawai Djakarta Tokubetu Si, achirnja rapat itu mengambil keputusan bahwa tanggungdjawab atas Djakarta Tokubetu Si harus segera diserahkan kepada Suwirjo. Pada malam harinja pergilah suatu delegasi jang mewakili seluruh pegawai kerumah Hasegawa untuk meminta setjara damai agar pembesar Djepang tersebut suka menjerahkan kekuasaan dan tanggungdjawabnja atas pemerintahan kota Djakarta kepada Suwirjo. Permintaan tersebut ternjata tidak dikabulkan, tetapi pada kesokan harinja dan hari-hari berikutnja Hasegawa tidak masuk kekantor Balai Kota. Oleh karena itu beberapa hari kemudian djabat-an Tokubetu Sityoo lalu dioper oleh Suwirjo dan **SURATNO SASTROAMIDJOJO** sebagai sekretaris, sedang nama Djakarta Tokubetu Si diganti dengan *Pemerintahan Nasional Kota Djakarta*; kemudian semua kepala djawatan/bagian berkumpul diruangan Balai Kota dan mengangkat sumpah menjatakan setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan kepada Pemerintahan Nasional Kota Djakarta. Dengan adanja perubahan itu kemudian semua pegawai bangsa Djepang mengundurkan diri atau tidak masuk bekerdja lagi. ¹¹²⁾

¹¹²⁾ Keterangan² ini diperoleh dari suatu warkat dalam arsip di Balai Kota Djakarta.

Demikianlah untuk sementara sebelum ada penetapan resmi dari Pemerintah Pusat, pimpinan atas pemerintahan daerah Kota Djakarta dijalankan oleh Suwirjo sebagai pemimpin umum dan wakilnya ialah Bagindo Dahlan Abdullah, sedang sekretaris kotanja ialah Suratno Sastroamidjojo. Kemudian pada tanggal 29 September 1945 Suwirjo dengan resmi diangkat sebagai Walikota Djakarta oleh Presiden Republik Indonesia.¹¹³⁾

Di pemerintahan pusat sendiri pada tanggal 29 Agustus 1945 telah dilantik *Komite Nasional Indonesia Pusat*. Pembentukan Komite Nasional itu sesuai dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut penetapan Panitia tersebut, maka Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dengan pusatnya di Djakarta, tugas kewadajiban Komite itu ialah :

- a. menjatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka;
- b. mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia persatuan kebangsaan yang bulat dan erat;
- c. membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum;
- d. membantu pemimpin dalam menjelenggarakan tjita-tjita bangsa Indonesia, dan didaerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesedjahteraan umum.

Komite Nasional di Pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite-komite Nasional didaerah.¹¹⁴⁾

Demikianlah sedjalan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut diatas, kemudian untuk Djakarta dibentuk pula sebuah *Komite Nasional Daerah Kota Djakarta* dengan diketuai oleh MR. MOHAMMAD ROEM.

§ 2. PERTUMBUHAN OTONOMI

Kedudukan Komite Nasional Daerah ternyata beberapa waktu kemudian menimbulkan keragu-raguan, jaitu apakah badan ini

¹¹³⁾ Buku „Kotapradja Djakarta Raya“, dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia sebagai salah satu dari rangkaian 11 djilid buku yang memuat uraian sejarah perjuangan dan pertumbuhan daerah-daerah Republik Indonesia. Katja 76.

¹¹⁴⁾ Buku Koesnodiprodjo (tjataan no. 110 dimuka). katja 117.

merupakan suatu alat perlengkapan daerah atau bukan. Soal ini lalu diperbincangkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, dan akhirnya oleh badan tersebut diputuskan bahwa Komite Nasional Daerah akan dimasukkan dalam pemerintahan daerah, yaitu sebagai badan legislatif; selanjutnya diputuskan pula bahwa Komite Nasional Daerah dengan fungsinya yang baru ini hanya akan diteruskan di daerah-daerah keresidenan, kabupaten, kota dan desa auto-noom. ¹¹⁵⁾

Demikianlah pada tanggal 23 Nopember 1945 keluarlah Undang-undang 1945 no. 1 yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Undang-undang ini bermaksud mengatur dan memberi ketegasan lebih lanjut terhadap kedudukan Komite Nasional Daerah untuk sementara waktu sebelumnya diadakan pemilihan umum. Tetapi pada hakekatnya Undang-undang 1945/1 itu dapatlah dianggap sebagai suatu peraturan perundangan desentralisasi dari Pemerintah Republik Indonesia yang memuat sistim otonomi Indonesia.

Peraturan perundangan desentralisasi Republik Indonesia itu, ¹¹⁶⁾ isinya sangat singkat yaitu hanya terdiri atas 6 pasal.

Menurut pasal 1 Undang-undang 1945/1 itu dinjatakan bahwa Komite Nasional Daerah diadakan di keresidenan, kabupaten, dikota berotonomi dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2-nja menetapkan bahwa Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya. Selanjutnya pasal 3 menentukan bahwa oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang (diantara para anggotanya sendiri) sebanyak-banyaknya 5 orang untuk menjadi *Badan Executief* yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu. Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (pasal 5).

¹¹⁵⁾ Pengumuman Badan Pekerja K.N.I.P. tanggal 30-10-1945 no. 2 (terdapat pula dalam buku Koesnodiprodjo tsb, diatas katja 134-135).

¹¹⁶⁾ Idem dimuat dalam buku Koesnodiprodjo katja 21-22; pendelasannya pada katja 23-31.

Mengenai kedudukan ketua Komite Nasional Daerah jang lama ditetapkan bahwa ketua tersebut kini dalam Komite Nasional Daerah dengan fungsi baru itu mendjadi wakil ketuanja (ketuanja ialah Kepala Daerah), demikian pula ia didjadi wakil ketua dari Badan Executief (pasal 4). Achirnja ditentukan pula bahwa perubahan mengenai kedudukan dan susunan Komite Nasional didaerah-daerah itu sudah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnja 14 hari (pasal 6).

Dalam peraturan perundangan desentralisasi dari Negara Republik Indonesia itu njatalah bahwa sistim pemerintahan tunggal dari Balatentera pendudukan Djepang tidak dianut lagi. Menurut pendjelasan resmi jang dikeluarkan kemudian terhadap Undang-undang 1945/1 itu diterangkan bahwa otonomi jang dikehendaki dalam peraturan tersebut bukanlah otonomi Djepang dan bukan pula otonomi menurut sistim Belanda dahulu, melainkan *otonomi Indonesia jang berdasarkan kedaulatan rakjat*. Ini lebih luas dari pada otonomi Belanda, pembatasannja hanjalah asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas. Dalam pengertian otonomi itu termasuk djuga medebewind. Figuur jang penting dalam sistim otonomi itu ialah Kepala Daerah jang merupakan wakil Pemerintah, dan karena djabatannja lalu memimpin baik badan legislatip maupun badan executip. Selandjutnja menurut pendjelasan resmi itu, Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat telah memutuskan bahwa banjakknja anggota Komite Nasional Daerah dengan fungsi baru itu, di keresidenan sebanjak-banjakknja 100 orang, di kabupaten/kota 60 orang.

Mengenai keuangan untuk penjelenggaraan pemerintahan daerah itu, apabila sumber-sumber penghasilan sendiri tidak mentjukupi sehingga ada kekurangan, maka Pemerintah Pusat apabila perlu akan memberikan sokongan.

Demikianlah dengan adanya ketentuan-ketentuan baru dalam bidang desentralisasi itu, maka fungsi dan susunan Komite Nasional Daerah Kota Djakarta disesuaikan seperlunja menurut ketentuan-ketentuan jang baru itu.

Hingga achir tahun 1946 Badan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Djakarta barulah beranggota 39 orang, diantaranya 18 orang anggota dari kelurahan-kelurahan, 2 dari partai sosialis, 5 dari Partai Nasional Indonesia, 1 dari Barisan Buruh Indonesia, 2 dari golongan Arab, 4 orang anggota dari perkumpulan-perkumpulan

sosial. Beberapa waktu kemudian djumlah itupun bertambah dengan wakil-wakil dari organisasi lainnja seperti Masjumi, golongan Kristen, golongan keturunan Tionghoa, dan lain-lainnja. Demikianlah nama-nama jang tertjantum sebagai anggota dari pada badan legislatip itu : ¹¹⁷⁾

1. **A.A. ALAYDROES;**
2. **ABDUL MANAF;**
3. **ASSA BAFAQIH;**
4. **A.F. GULTOM;**
5. **A.J. SUPIT;**
6. **A. WAHAB;**
7. **ABD. MARTIN;**
8. **ASMAD;**
9. **A. MOEIS AS.**
10. **ASNAWI;**
11. **B.R. MOTIK;**
12. **BAHRI;**
13. **DR. A.M. SOETAMA;**
14. **DR. DIRAN;**
15. **DR. OUW ENG LIANG;**
16. **DJOKOLAKSAMONO;**
17. **G.S. PANDJAITAN;**
18. **HANAFI;**
19. **M. MOH. GOSIN;**
20. **ISKANDAR WAHONO;**
21. **IBRAHIM;**
22. **K. ST. PAMUNTJAK;**
23. **KHOU ENG TJANG;**
24. **L.A. NAIM;**
25. **M. HASMOENI;**
26. **MUHAMMAD;**
27. **M. SAMAN;**
28. **MOH. ALWI;**
29. **MOHD. AOOI;**
30. **MOEHADJIR;**
31. **MOH. MOESSAH;**

¹¹⁷⁾ Buku „Kotapradja Djakarta Raya“ (tjataan no. 113 dimuka), katja 172 — 171.

32. **M. AHMAD TJARAWARDHANA;**
33. **MOH. BASERI;**
34. **MR. ASMAUN;**
35. **M. DACHLAN;**
36. **NOERASJID;**
37. **NN. R.A. MINARSIH WIRANATAKUSUMAH;**
38. **OESMAN;**
39. **OEBEID;**
40. **R.M.S. MANGKOEDIPOERO;**
41. **R. SOEMARJONO;**
42. **R. GATOT SOETADIPRADJA;**
43. **R. MOEHARAM A. SOETISNA;**
44. **R. SOEKARDJO;**
45. **RAMELAN;**
46. **SRI JULIANI;**
47. **SOEPADI NOTOSOEPARTO;**
48. **SOEMARDJI;**
49. **SOEPRAPTO;**
50. **SJAWAL;**
51. **SOERJASOEMIRAT;**
52. **ST. SANIF;**
53. **SABIKIN;**
54. **SJAMSOEDDIN SAAT.**

Anggota-anggota jang mendjadi badan executip ialah :

1. **NOOR ST. ISKANDAR;**
2. **J. JAHJA;**
3. **SUPRANOTO;**
4. **BOERAI.**

Badan legislatip maupun executip itu diketuai oleh walikota Djakarta jang tetap didjabat oleh Suwirjo. Dalam kedudukannja sebagai Kepala Daerah itu Suwirjo memegang pula pimpinan atas korps pamongpradja dan kepolisian dikota Djakarta.

Mengenai susunan aparatur kepegawaian Pemerintahan Nasional Kota Djakarta, kini terdiri dari pelbagai djawatan, istilah Kyoku (kantor) seperti pada masa Tokubetu Si tidak dipakai lagi. Men-

djelang berachirnja Pemerintahan Nasional itu kita dapati susunan organisasi daerah jang berikut : ¹¹⁸⁾

I. Djawatan Sekretariat, ini meliputi:

1. Sekretariat;
2. Bagian Urusan Pegawai;
3. Bagian Perbaikan Gedung Balai Agung;
4. Bagian Penerangan;
5. Bagian Mobil-mobil;
6. Bagian Padjak;
7. Bagian Urusan Surat-surat;
8. Bagian Arsip;
9. Bagian Kamar Ketik;
10. Bagian Pengiriman Surat-surat;

II. Djawatan Tata Keuangan, ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

1. Bagian Perhitungan Keuangan;
2. Bagian Keuangan Negeri;
3. Bagian Alat-alat;
4. Bagian Pemeriksaan Bendahara;
5. Bagian Urusan Tanah;
6. Bagian Urusan Air;
7. Bagian Bendahari;

III. Djawatan Pamong Pradja, ini dapat dibedakan dalam:

1. Pusat Pamong Pradja;
2. Pamong Pradja Daerah-daerah;

IV. Djawatan Pengadjaran dan Pendidikan;

V. Djawatan Kesehatan Kota;

VI. Djawatan Kesehatan Kehewan;

VII. Djawatan Tehnik;

VIII. Djawatan Ekonomi;

IX. Djawatan Sosial.

Mengenai banjaknja pegawai, semuanya termasuk pamongpradja berdjumlah 1410 orang.

¹¹⁸⁾ Surat Pemerintahan Nasional Kota Djakarta kepada Gubernur Djawa Barat tanggal 3 Mei 1947 no. 1377 tentang Susunan dan Keadaan Pegawai/Pekerdja dari Djawatan P.N.K.D. (Arsip Balai Kota).

§ 3. PEMERINTAHAN RANGKAP

Penjelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintahan Nasional Kota Djakarta ternyata tidak dapat berdjalan dengan lantjar dan normal, karena dengan mendaratnja tentera pendudukan Sekutu di Djakarta pada tanggal 29 September 1945, jang kemudian menduduki beberapa bagian dari wilajah Kota Djakarta, maka dikota tersebut lalu terdapat 2 buah pemerintahan, jaitu Pemerintahan Nasional dan *Pemerintahan Militer Sekutu*.

Pada tanggal 31 Oktober 1945 Djenderal **D.C. HAWTHORN D.S.O.** sebagai panglima tentera Sekutu di Djawa, Madura dan Bali-Lombok mengeluarkan sebuah maklumat jang antara lain menjatakan bahwa sedjak tanggal tersebut Kota Djakarta berada dibawah penilikan Pemerintah Militer Sekutu, dengan batas-batas wilajahnja:

- a. disebelah Barat dengan Bandjirkanal;
- b. disebelah Selatan dengan Bandjirkanal — djalan kereta api dari Barat ke Timur, termasuk pula Bagian Djatinegara sebelah Selatan;
- c. disebelah Timur dengan Kali Buaran dan Kali Tjakung terus kearah Utara;
- d. disebelah Utara dengan daerah Tandjung Priok dan Kampung Kodja. ¹¹⁹⁾

Tudjuan kedatangan tentera Sekutu itu ialah untuk melutjuti sendjata balatentera Djepang, menjelenggarakan pemindahan tentera Djepang itu dan mengurus pembebasan/pengembalian A.P.W.I. (Allier Prisoners of War and Internees/tawanan perang sekutu). Tentera pendudukan Sekutu jang harus melakukan tugasnja di Indonesia itu diwakili oleh tentera Inggeris. Akan tetapi pada tanggal 24 Agustus 1945 antara Keradjaan Inggeris dan Belanda telah dibuat suatu perdjandjian dalam mana antara lain disetudjui bahwa diwilajah bekas Hindia Belanda jang dibebaskan dari tangan Djepang itu, untuk sementara sebagai suatu fase pertama akan dilangsungkan Pemerintahan Militer Sekutu dengan dibantu oleh Netherlands Indies Civil Affairs Officers (pedjabat-pedjabat pemerintahan sipil Hindia Belanda) jang sedapat mungkin akan mengurus pemerintahan sipilnja. ¹²⁰⁾

¹¹⁹⁾ Buku „Kotapradja Djakarta Raya”, katja 77.

¹²⁰⁾ Perdjandjian antara Inggeris dengan Belanda itu kemudian diumumkan dalam Staatsblad van Ned. Indië tahun 1946 no. 111.

Demikianlah maka dibelakang tentera pendudukan Sekutu jang mendarat di Indonesia, mengikut pula alat-alat perlengkapan pemerintahan *Netherlands Indies Civil Administration* (lebih terkenal dengan singkatannja: *Nica*) jang berusaha keras untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda diatas bumi Indonesia jang kini telah mendjadi suatu negara jang merdeka dan berdaulat. Sedjak achir September 1945 pemerintahan Nica terdiri dari CConica (Chief Commanding Officer Nica) jang merangkap djabatan gubernur dan pedjabat-pedjabat CONica (Commanding Officer Nica) jang melakukan tugas kekuasaan residen, serta Sub CONica (Sub Commanding Officer Nica) jang mendjalankan fungsi assistent-resident. ¹²¹⁾

Pada permulaan bulan Nopember 1945 Nica diganti dengan *Allied Military Administration Civil Affairs Branch* (disingkat *Amacab*). ¹²²⁾ Pedjabat-pedjabat organisasi pemerintahan ini terdiri dari CCOamacab (Chief Commanding Officer Amacab) jang merangkap djabatan gubernur dan beberapa COamacab (Commanding Officer Amacab) jang mendjalankan tugas kekuasaan residen.

Demikianlah untuk Kota Djakarta djuga lalu diadakan suatu C.O. Amacab Batavia. Pemerintahan Amacab ini mengurus pula soal keamanan, pembagian bahan makanan (distribusi), mengadakan peraturan-peraturan tersendiri dalam lapangan keamanan dan lain-lain, demikian pula oleh pihak Amacab dilakukan pengangkatan-pengangkatan pedjabat pamongpradja.

Pemerintahan Nasional Kota Djakarta masih tetap berdiri dan mendjalankan tugas kekuasaannja mengatur rumah tangga daerah-nja, akan tetapi penjelenggaraan pemerintahan itu tidak dapat berlangsung dengan lantjar karena adanja pemerintahan rangkap dalam kota itu, jang masing-masing seolah-olah bersaing dalam mendjalankan kekuasaannja.

Oleh karena itu agar terdapat koordinasi jang baik sehingga penjelenggaraan pemerintahan di Kota Djakarta dapat berdjalan

¹²¹⁾ Lihat Staatsblad 1946 no. 5.

¹²²⁾ Mr. R. Sastranegara: „Hukum Tatanegara Indonesia sedjak Perang Dunia ke-II”, katja 25.

Penerbit: Neijenhuis & Co. N.V., Djakarta.

Atau Dictaat Mr. F.R. Böhlingk (nama asli dari Mr. R. Sastranegara): „Staatsrecht in Indonesië” (samengesteld uit materiaal van het Documentatie-bureau voor Overzees Recht te Leiden), katja 5.

Penerbit: F.J. Dubbeldeman, Leiden.

dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintahan Nasional Kota Djakarta mengadakan hubungan dan kerdjasama dengan Pemerintahan Militer Sekutu itu untuk merundingkan dan memetjahkan beberapa persoalan seperti masalah keamanan dan kepentingan penduduk didalam kota. Demikianlah pada tanggal 21 Nopember 1945 dibentuklah sebuah *Panitia Penghubung* (Contact Committee) jang anggota-anggotanja terdiri dari wakil-wakil Pemerintahan Nasional dan Pemerintahan Militer Sekutu. Dari pihak Pemerintahan Nasional antara lain duduk Suwirjo, dan beberapa pedjabat lainnya seperti Ketua Komite Nasional Daerah, Ketua Persiapan Tentera Keamanan Rakjat Kota Djakarta, dan lain-lain. Dengan adanya Panitia itu maka sedikit banjak dapatlah ditjiptakan saling pengertian jang baik antara kedua belah pihak dan usaha-usaha kearah kerdjasama jang baik seperti dalam masalah pembentukan civil police dan rural police. ¹²³⁾ Antara pihak Allied Military Police dan Kantor Besar Polisi dilangsungkan pula permusjawaratan dimana disetudjui bahwa Military Police dan Polisi Republik Indonesia akan kerdja bersama-sama dengan satu sama lain tidak saling membawahkan. ¹²⁴⁾

Setelah selesai menunaikan tugasnja jang telah ditentukan semula, maka tentera Inggeris itu berangsur-angsur pulang kenegerinja, dan pada tanggal 30 Nopember 1946 berangkatlah tentera Inggeris jang terachir meninggalkan Indonesia. Selama waktu ini ternjata Pemerintah Hindia Belanda telah dapat memperkokoh kedudukannja dibeberapa bagian dari Indonesia, sehingga pada waktu tentera Sekutu ditarik pulang itu, maka pihak Belandalah jang menggantikan Pemerintahan Militer Sekutu itu. Amacab digantikan oleh Pemerintahan *Tijdelijke Bestuursdienst* Hindia Belanda. ¹²⁵⁾ Demikian pula pedjabat COamacab di Djakarta digantikan oleh suatu *Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst*. Dengan demikian maka pemerintahan rangkap di Kota Djakarta tetap berlangsung, jaitu oleh Pemerintahan Nasional dan pihak Belanda (Pemerintah Hindia Belanda).

Beberapa waktu sebelum tentera Inggeris jang terachir mengundurkan diri dari Indonesia, jaitu pada tanggal 15 Nopember 1946

¹²³⁾ Buku „Kotapradja Djakarta Raya”, katja 78-79.

¹²⁴⁾ Buku Koesnod:prodjo (tjatanan no. 110 dimuka), katja 194.

¹²⁵⁾ Staatsblad 1946 no. 130: Besluit houdende bepaling en aanteekening van de vervanging van de A.M.A.-C.A.B. voor Java en Madoera en Sumatra en tijdelijke voorziening van een burgerlijke organisatie onder den naam van „Tijdelijke bestuursdienst” (afgekort T.B.).

diparaplah naskah *Perdjandjian Linggadjadi* oleh wakil-wakil pihak Indonesia dan pihak Belanda. ¹²⁶⁾ Menurut pasal 1 naskah perdjandjian itu dinjatakan bahwa Pemerintah Belanda mengakui kenjataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Djawa, Madura dan Sumatera. Daerah-daerah jang diduduki oleh tentera Sekutu atau tentera Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerdja-sama antara kedua belah pihak (Indonesia-Belanda) akan dimasukkan pula kedalam daerah Republik. Untuk menjelenggarakan jang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan-tindakan jang perlu agar sebelum tanggal 1 Djanuari 1949 pemasukan daerah-daerah itu telah selesai.

Dengan adanja persetudjuan tersebut diatas dan 2 minggu kemudian semua tentera Sekutu sudah meninggalkan Indonesia, maka untuk meninjau dan merundingkan lebih landjut persoalan-persoalan jang perlu dibereskan, oleh pihak Republik Indonesia dan Belanda telah dibentuk sebuah *Joint Committee* jang terdiri dari beberapa bagian, antaranja sebuah Sub Komisi Urusan Pemerintahan Sipil Pusat.

Dalam pertemuannja pada tanggal 2 Desember 1946, oleh Komisi tersebut diputuskan bahwa untuk Kota Djakarta perlulah dibentuk sebuah *Komisi Daerah Urusan Pemerintahan Sipil*, dengan tugas untuk merundingkan dan mentjari djalan guna memetjahkan soal-soal jang menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam praktek pemerintahan Kota Djakarta berhubungan dengan adanja pemerintahan rangkap tersebut diatas. Demikianlah Komisi jang dimaksud lalu diadakan, dalam Komisi Daerah itu pihak Indonesia diwakili oleh Suwirjo sebagai ketua, dengan anggota-anggotanja MR. SOEPANGKAT, JUSUF JAHJA dan sekretaris M. BUSTAMI. Sedang dari pihak Belanda diwakili oleh MR. YSEBAERT sebagai ketua, dengan anggota-anggota DRS. BOGAARDT dan MR. VAN DER VEEN serta sekretarisnja A.M. VENSELAAR. ¹²⁷⁾

¹²⁶⁾ Buku „Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1950”, katja VI. Diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia, tjetakan ke-2, 1954.

Atau terdjemahannja dalam bahasa Inggeris: „Illustration of the Revolution Indonesia 1945-1950”.

Tjataan tamb.: Naskah selengkapnja dari *Perdjandjian Linggadjadi* itu terdapat pula dalam buku tersebut diatas, katja XXXVII-XXXIX.

¹²⁷⁾ Buku „Kotapradja Djakarta Raya”, katja 80-81.

Perundingan-perundingan jang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan Belanda itu ternyata tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan. Walaupun pada tanggal 25 Maret 1947 kemudian, perdjandjian Linggadjadi itu ditandatangani, namun di Kota Djakarta berlangsung terus pemerintahan rangkap, bahkan pihak Belanda setindak demi setindak selalu meluaskan kekuasaannya dengan djalan membentuk badan-badan resmi dan pelbagai usaha lainnja jang bermaksud melenjapkan pengaruh dan kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dari kota tersebut. Tetapi Pemerintahan Nasional itu dapat terus berdiri hingga tanggal 21 *Djuli* 1947.

Pada tanggal tersebut Belanda mulai melantjarkan serangan agresinja jang pertama untuk merebut wilayah-wilayah jang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Demikian pula tidak terke-tjuali, kekuasaan-kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia jang masih ada di Kota Djakarta ditumpes. Walikota Djakarta Suwirjo dan beberapa pedjabat lainnja ditangkap, (mereka ditahan digang Chasse selama hampir 4 bulan, lalu dipindahkan ke Tangerang dan kemudian pada tanggal 21 Nopember 1947 dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta); Gedung Balai Kota diduduki dengan kekerasan. Seluruh kekuasaan di Kota Djakarta kini berada ditangan Belanda.¹²⁸⁾

Dengan didudukinja Balai Kota dan ditawannya Walikota itu, maka berachirlah sedjarah Pemerintahan Nasional Kota Djakarta jang lahir dan menunaikan tugas penjelenggaraan otonomi ditengah-tengah kantjah revolusi kemerdekaan Indonesia, dengan ini berachir pulalah pemerintahan rangkap di Kota Djakarta. Sedjarah pemerintahan Kota Djakarta akan menempuh suatu fase baru lainnja.

¹²⁸⁾ Idem diatas katja 45 dan 82.

STADSGEMEENTE BATAVIA DALAM MASA PEMERINTAHAN PRE-FEDERAL

Agresi militer jang mulai dilantjarkan pada tanggal 21 Djuli 1947 oleh tentera Belanda diachiri pada tanggal 4 Agustus 1947. Sebagai hasil penjerbuan dengan kekuatan sendjata itu, sebagian besar dari wilayah Republik Indonesia di Djawa dan Sumatera diduduki kembali oleh Belanda. Demikian pula seluruh wilayah Djawa Barat terketjuali Banten, kini berada dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. ¹²⁹⁾

Sedjalan dengan pendudukannya itu, maka untuk wilayah Djawa Barat tersebut diadakan djabatan „*Regeringscommissaris voor Bestuursangelegenheden*” (disingkat *Recomba*). ¹³⁰⁾ Recomba Djawa Barat itu merupakan pedjabat pemerintahan sipil jang tertinggi untuk lingkungan wilayahnya itu dan langsung bertanggungjawab kepada Letnan Gubernur Djenderal sebagai putjuk pimpinan Pemerintah Hindia Belanda sesudah Perang Dunia ke II. Selandjutnja menurut pasal 9 peraturan pembentukannya itu, Recomba berwenang menjerahkan sebagian dari tugasnja kepada pedjabat-pedjabat lain.

Pada permulaan tahun 1948 Recomba dalam suatu keputusannya menetapkan „*Verordening Zelfstandige Gebiedsdelen West Java*”. Akan tetapi peraturan itu kemudian pada tanggal 20 Pebruari 1948 diperbaharui dengan suatu peraturan lain jang disebut „*Noodverordening Zelfstandige Gemeenschappen West Java*” (Peraturan darurat tentang Daerah-daerah swatantra di Djawa Barat). ¹³¹⁾

Menurut peraturan darurat dari Recomba Djawa Barat itu ditetapkan bahwa tugas kekuasaan aparatur pemerintahan Stadsge-

¹²⁹⁾ Buku „*Naar de nieuwe Rechtsorde in Indonesië*”, bouwstoffen voor de federatie. Djilid I (Algemeen overzicht), katja 34.

Diterbitkan atas perintah dari Pemerintah Pre-federal Indonesia.

Tjataan tamb. : buku tsb. diatas diterbitkan pula dalam bahasa Indonesia dengan djudul „Kearah Ketertiban Hoekoem baroe di Indonesia”.

¹³⁰⁾ Lihat Staatsblad 1947 no. 121.

¹³¹⁾ Keputusan Recomba West Java tanggal 20 Pebruari 1948 no. Recwj. 20/J.Z., diumumkan dalam Javasche Courant tahun 1948 no. 22.

meente Batavia diserahkan kepada Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Batavia. Jang dimaksudkan ialah tugas kekuasaan jang menurut peraturan perundangan desentralisasi sebelum Perang Dunia II berada didalam tangan stadsgemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders dan walikota (termasuk wewenang jang menurut suatu peraturan lainnja diserahkan kepada masing-masing orang itu); fungsi-fungsi tersebut kini didjalankan oleh Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Batavia seorang diri, sedang tugas kekuasaan Provinciale Raad West Java dipegang sendiri oleh Recomba tersebut. Dalam hal ini maka penghapusan Provincie West Java dan perubahan-perubahan tata pemerintahan daerah jang dilakukan oleh Balatentera pendudukan Djepang tidak dihiraukan, karena Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mengakui suatu peraturan dari masa pendudukan Djepang. ¹³²⁾

Selanjutnja pasal 4 dari Noodverordening Recomba itu menentukan bahwa fungsi-fungsi aparatur pemerintahan Stadsgemeente Batavia termaksud diatas, oleh Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst itu dapat pula diserahkan kepada seorang pedjabat atau lebih jang ditundjuk oleh Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst itu sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, maka dengan keputusan Resident Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Batavia tanggal 13 Maret 1948 no. A.Z./89, wewenang burgemeester dan College van Burgemeester en Wethouders dari Stadsgemeente Batavia, oleh pedjabat tersebut diserahkan kepada Assistent-Resident Kota tevens Hoofd-ambtenaar voor Gemeentezaken. ¹³³⁾

Dengan demikian maka sedjak bulan Maret 1948 itu, penjeleenggaraan pimpinan umum pemerintahan daerah Stadsgemeente Batavia, termasuk pembuatan verordeningennja berada didalam tangan Resident Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Batavia jang pada waktu itu didjabat oleh MR. M.A.F. ZWAGER, sedang penjeleenggaraan pemerintahan daerah sehari-hari dilakukan oleh Assistent-Resident Kota jang didjabat oleh R. TH. PRAANING (nama aslinja: **PRAWIRA ADI NINGRAT**).

Pada waktu itu dipusat pemerintahan sendiri sedang sibuk dilakukan usaha-usaha persiapan kearah pembentukan suatu *Negara Federal Indonesia*. Pemerintah Hindia Belanda jang

¹³²⁾ Buku Mr. R. Sastranegara (tjataan no. 122 dimuka) katja 7, atau diktat Böhrtlingk katja 10.

¹³³⁾ Lihat Javasche Courant 1948 no. 26.

dikemudikan oleh Letnan Gubernur Djenderal bersama-sama Raad van Departementshoofden (Dewan Kepala-kepala Departemen) dengan pelbagai djalán mentjiptakan atau mengakui berdirinja bermatjam-matjam negara/satuan kenegaraan dibekas wilajah Republik Indonesia jang telah didudukinja itu; negara-negara/satuan-satuan kenegaraan itu kelak bersama-sama akan merupakan Negara Federal Indonesia menurut konsepsi pihak Belanda.¹³⁴⁾

Untuk menjatakan kepada bangsa Indonesia bahwa pihak Belanda sungguh-sungguh menginginkan adanja suatu Negara Federal Indonesia dan tidak lagi suatu pemerintahan pendjadjahan seperti Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II dahulu, maka pada tanggal 9 Maret 1948 oleh pihak Belanda dibentuklah „*Voorlopige Federale Regering van Indonesië*” (Pemerintah Federal Sementara; beberapa pihak lebih suka menjebutnja sebagai „*Pemerintah Pre-federal*”).¹³⁵⁾ Tetapi Pemerintah Pre-federal ini tidak lain dari pada suatu badan jang terdiri dari Letnan Gubernur Djenderal itu djuga sebagai putjuk pimpinannya bersama-sama dengan para kepala-kepala departemen dengan ditambah beberapa anggota lainnya, hanya kini kepala departemen itu disebut „Sekretaris Negara” (Secretaris van Staat).

Pada tanggal 24 April 1948 oleh pihak Belanda diakui lah berdirinja *Negara Pasundan* untuk wilajah Djawa Barat jang diduduki oleh Belanda dalam Agresi Militernja jang pertama itu.¹³⁶⁾ Dengan adanja Negara Pasundan ini, jang direntjanakan akan merupakan salah satu negara bagian dari Negara Federal jang akan dibentuk itu, maka dengan peraturan termuat dalam Staatsblad 1948 no. 115, daerah swatantra Provincie West Java dari masa pemerintahan Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II dihapuskan. Akan tetapi menurut pasal 1 dari peraturan penghapusan itu, pembubaran Propinsi Djawa Barat tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnja daerah-daerah swatantra jang terletak didalam lingkungan wilajah propinsi itu. Djadi daerah-daerah otonom (termasuk

¹³⁴⁾ Uraian singkat mengenai usaha-usaha kearah pembentukan Negara Federal itu dapat dibatja dalam buku „Naar de nieuwe Rechtsorde in Indonesië”/„Kearah Ketertiban Hoekoem baroe di Indonesia” (tjataan no. 129 dimuka). Tjataan tamb.: Uraian jang lebih mendalam dan lengkap dengan sumber² njá terdapat dalam buku Prof. A. Arthur Schiller: „The Formation of Federal Indonesia 1945-1949”. Penerbit: W. Van Hoeve, The Hague/Bandung, 1955.

¹³⁵⁾ S. 1948 no. 62.

¹³⁶⁾ S. 1948 no. 95.

Stadsgemeente Batavia) yang berada dibawah Propinsi Djawa Barat itu tidak ikut dihapuskan dan dapat terus berlangsung. Hanya selanjutnya ditetapkan bahwa semua tugas kekuasaan yang menurut sesuatu peraturan dahulu berada didalam tangan aparatur pemerintahan dari propinsi yang dihapuskan itu, kini untuk sementara beralih kedalam tangan Pemerintah Pusat (pedjabat-pedjabat Pemerintah Hindia Belanda) sampai kelak setjara berangsur-angsur diserahkan kepada Negara Pasundan.

Selain usaha-usaha pembentukan Pemerintah Pre-federal dan negara-negara bagian yang kelak akan merupakan Negara Federal Indonesia itu, pada waktu itu direntjanakan djuga adanya lingkungan wilayah yang kelak akan mendjadi *Distrik Federal*, jaitu daerah ibukota dari Negara Federal yang tidak termasuk dalam lingkungan salah satu negara bagiannja, melainkan langsung berdiri dibawah kekuasaan Pemerintah Federal.¹³⁷⁾

Pilihan ternjata djatuh kepada Kota Djakarta yang sedjak dahulu merupakan pusat politik, ekonomi dan kebudayaan diseluruh Indonesia. Akan tetapi diingat pula kemungkinan terdjadnja perkembangan yang besar pada ibukota federal itu, sehingga tidak tjukup apabila hanya wilayah Kota Djakarta sadja yang didjadikan Distrik Federal Indonesia, melainkan harus ditambah dengan wilayah-wilayah disekelilingnja. Demikianlah pada tanggal 11 Agustus 1948 dengan Staatsblad 1948 no. 178, wilayah Stadsgemeente Batavia beserta wilayah-wilayah disekitarnja yang merupakan distrik-distrik/onderdistrik-onderdistrik dari pada Regentschap Batavia, Regentschap Meester Cornelis dan Regentschap Buitenzorg (Bogor) dikeluarkan dari kekuasaan Negara Pasundan, artinja sedjak saat itu kekuasaan Negara tersebut tidak meliputi (tidak berlaku untuk) lingkungan wilayah yang telah ditundjuk itu. Lingkungan wilayah itu direntjanakan mendjadi daerah ibu-kota dari Negara Indonesia Serikat yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan suatu negara bagian tertentu (dalam hal ini Negara Pasundan). Luasnja wilayah dari pada tjalon Distrik Federal itu ialah lebih kurang 1800 km pesegi, dengan batas-batasnja:

¹³⁷⁾ Mr. H.G. Verhoeff: „De Hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Een Federaal District”. Sebuah karangan dalam Madjalah „Bestuursvraagstukken”/„Soal-soal Pemerintahan”, tahun I no. 1 (Djanuari 1949), katja 4-14 (bahasa Belandanja) atau katja 80-91 (terdjemahannja dalam bahasa Indonesia). Diterbitkan dibawah pimpinan Departement Oeroesan Dalam Negeri.

- Disebelah Barat : Kali Tjisadane (dengan daerah ketjil diseberangnja dekat Tangerang);
- Disebelah Timur : Kali Tjileungsi dan Kali Bekasi (dengan daerah ketjil diseberangnja dekat kota Bekasi);
- Disebelah Selatan : batas-batas Selatan onderdistrik-onderdistrik Paroeng, Depok, Tjibinong dan sebahagian dari Tjiteureup);
- Disebelah Utara : Pulau Seribu termasuk kedalamnja. ¹³⁸⁾

Perubahan-perubahan tersebut diatas tidaklah mempengaruhi kedudukan dan berlangsungnja Stadsgemeente Batavia. Pemerintah-an daerah Kota Djakarta masih tetap didjalankan oleh dwi pedjabat, jaitu Resident Hoofd Tijdelijke Bestuurdienst (jang menggantikan stadsgemeenteraad) dan Assistent-Resident Kota (jang menjelenggarakan tugas kekuasaan walikota dan Dewan Pemerintah Daerah) menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan desentralisasi dan peraturan lainnja dari masa sebelum Perang Dunia II. Dewan-dewan atau badan terdiri dari 1 orang lebih jang seharusnya menjelenggarakan pemerintahan daerah itu belum dapat dibentuk kembali. Tetapi pada pihak Pemerintah Belanda memang ada hasrat untuk membangunkan lagi dewan-dewan itu.

Demikianlah pada tanggal 25 Agustus 1948 ditetapkanlah „*Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java*” (Ordonansi tentang pengaturan sementara terhadap aparatur pemerintahan stadsgemeente dipulau Djawa) dalam Staatsblad 1948 no. 195. ¹³⁹⁾ Peraturan ini dengan menjimpang seperlunja dari Stadsgemeente-ordonnantie dari tahun 1926 dan ordonansi-ordonansi pembentukan dari stadsgemeente jang bersangkutan, bermaksud membuka kemungkinan dibentuknja kembali pedjabat-pedjabat (*functionarissen*) dan/atau dewan-dewan (*colleges*) jang akan mendjalankan wewenang-wewenang dan hak-hak serta kewadajiban-kewadajiban dan pekerdjaan-pekerdjaan lainnja jang menurut peraturan perundangan jang masih berlaku berada didalam tangan aparatur pemerintahan stadsgemeente. Peraturan itu hanja bersifat sementara sampai adanja pengaturan baru dikemudian

¹³⁸⁾ Karangan Verhoeff (tjataan 137 diatas) katja 10-12 (atau 87).

Tjataan tamb. : gambar peta jang melukiskan lingkungan wilajah jang akan didjadikan Distrik Federal itu terdapat pula pada katja 11 dan 88.

¹³⁹⁾ Untuk Sumatera dan Borneo dalam S. 1948 no. 196.

hari berkenaan dengan perkembangan ketatanegaraan yang sedang berlangsung. Pembentukan kembali pedjabat-pedjabat/dewan-dewan menurut peraturan yang bersifat sementara itu akan dilakukan dengan jalan pemilihan atau dengan melalui pengangkatan menurut kemungkinan-kemungkinan pada sesuatu saat.

Demikianlah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1948 no. 195 itu, oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia (Hoge Vertegenwoordiger van den Kroon in Indonesië) yang sedjak tanggal 3 Nopember 1948 menggantikan jabatan Letnan Gubernur Djenderal, ¹⁴⁰⁾ dikeluarkanlah suatu keputusan termuat dalam Staatsblad 1949 no. 56 yang membentuk kembali alat-alat perlengkapan baru yang akan menjelenggarakan tugas kekuasaan Stadsge-meente Batavia. Keputusan itu kemudian diperbaharui dengan Keputusan tanggal 28 Pebruari 1949 no. 13 yang diumumkan dalam Staatsblad 1949 no. 68.

Keputusan Wakil Tinggi Mahkota Belanda yang achir itu menetapkan bahwa untuk Stads gemeente Batavia, semua wewenang-wewenang, hak-hak, kewajiban-kewajiban dan pekerjaan-pekerjaan lainnja yang menurut peraturan perundangan yang masih berlaku berada didalam tangan aparatur pemerintahan stadsgemeente, kini didjalankan oleh :

- a. *stads bestuursraad* (Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta) ;
- b. *college van dagelijks bestuur* (Badan Pemerintahan Harian);
- c. *burgemeester*.

Dalam hal ini maka burgemeester itu mendjadi ketua dari stadsbestuursraad serta mendjabat pula sebagai ketua merangkap anggota dalam college van dagelijks bestuur.

Selandjutnja dalam keputusan Wakil Tinggi Mahkota Belanda itu ditentukan pula bahwa college van dagelijks bestuur yang pertama dari Stads gemeente Batavia akan diangkat oleh Gouverneur van Batavia en Ommelanden (jaitu pedjabat yang tertinggi untuk lingkungan wilajah yang akan didjadikan Distrik Federal) dari antara tjalon-tjalon sebanjak dua kali lipat yang diusulkan oleh stadsbestuursraad, untuk djangka waktu yang tidak lebih lama dari pada 1 tahun.

¹⁴⁰⁾ S. 1948 no. 270 juncto no. 272.

Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan dalam „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java” dan keputusan Wakil Tinggi Mahkota Belanda itu dilakukan oleh Sekretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken (Sekretaris Negara untuk Urusan Dalam Negeri dari Pemerintah Pre-federal). Demikianlah oleh pejabat Pemerintah Pre-federal ini dengan keputusan-nya tanggal 3 Maret 1949 no. AZ. 25/3/7 ditetapkan:

- a. jumlah anggota Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta (stadsbestuursraad) ialah 33 orang yang susunannya terdiri dari :
 - 20 orang dari golongan Indonesia;
 - 6 orang dari golongan Belanda;
 - 5 orang dari golongan Tionghoa;
 - 2 orang dari golongan Arab.
- b. para anggota Madjelis itu diangkat semuanya dan mendjabat hingga tanggal 1 Maret 1950; apabila sebelum tanggal tersebut telah dapat dibentuk suatu dewan yang baru dengan jalan pemilihan, maka Madjelis yang dibentuk dengan jalan pengangkatan itu harus pula meletakkan jabatannya;
- c. Badan Pemerintahan Harian dari Stadsgemeente Batavia meletakkan jabatannya bersama-sama dengan stadsbestuursraad sesuai dengan apa yang tersebut diatas;
- d. Kepada stadsbestuursraad itu dibebankan tugas kekuasaan yang dahulu dijalankan oleh stadsgemeenteraad, dan kepada college van dagelijks bestuur diserahkan tugas kekuasaan yang menurut peraturan perundangan yang masih berlaku dipegang oleh College van Burgemeester en Wethouders sedang burgemeester tetap menjalankan fungsi walikota yang dahulu, kesemuanya menjalankan tugas kekuasaan itu menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pejabat/badan dahulu.

Kemudian dengan keputusan Gouverneur van Batavia en Omlanden (Gubernur Daerah Djakarta dan Sekitarnya) tanggal 3 Maret 1949 no. Gr./5/A.Z. (J.C. 1949 no. 21) dan tanggal 17 Maret 1949 no. Gr./7/A.Z. (J.C. 1949 no. 23) diangkatlah 33 orang anggota Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta itu, yaitu:

A. Dari golongan Indonesia :

1. **ABDUL BAKI MUSIN;**
2. **R. ACHMADSJAH SASTRAWINANGOEN;**
3. **R. ACHMAD NATAKUSUMAH;**

4. **R.S. BRATA;**
5. **DR. HENDARMIN SASTROSOEPOMO;**
6. **R. JOOSTENZ;**
7. **MUNTACO;**
8. **MAMAD BIN ISAN;**
9. **MACHMOED;**
10. **MR. M. MASMOEIN SOEROHAMIPRODJO;**
11. **MOELIA PANGABEAN;**
12. **MOH. SUKRI HUSIN;**
13. **R.M. NOTOSOETARSO;**
14. **MR. R. OERIP KARTODIRDJO;**
15. **R. PANDI PRAWIRA DI NATA;**
16. **MR. R. SASTROMOELJONO;**
17. **MR. DR. R. SOEKANTO;**
18. **HADJI IMAM MOHAMAD HASAN;**
19. **MR. SOETAN MOH. SJAH;**
20. **M.L. RENKOE;**

B. Dari golongan Belanda :

21. **MR. P.A. BLAAUW;**
22. **IR. W.F.B. BANGERT;**
23. **J.L. STEGMAN;**
24. **IR. F.N. RAZOUX SCHULTZ;**
25. **IR. L. SIPPEL;**
26. **J. VERBOOM;**

C. Dari golongan Tionghoa :

27. **IR. NIO TJIEN HWA;**
28. **TAN IN HOK;**
29. **DR. THUNG SIN NIO;**
30. **THUNG LIANG HOAT;**
31. **YO HENG KAM;**

D. Dari golongan Arab :

32. **ISMAIL ALATAS;**
33. **SECH ALI BIN MOHAMAD BIN ALI BADJENED.**

Mengenai Badan Pemerintahan Harian Stadsgemeente Batavia, college ini ditetapkan terdiri dari 4 orang dengan susunan 2 anggota dari golongan Indonesia, 1 dari golongan Belanda dan 1 anggota

lagi dari golongan Tionghoa. Kemudian sebagai anggota-anggota college itu diangkatlah R.P. Prawira di Nata, R.M. Notoesoetarto, Ir. F.M. Razoux Schultz dan Tan In Hok, dan sebagai burgemeester ialah Mr. R. Sastromoeljono. Sedang yang menjadi sekretaris ialah **J.J. FANOY**.

Demikianlah sedjak bulan Maret 1949 itu Stadsgemeente Batavia mempunyai lagi aparatur pemerintahan yang lengkap seperti keadaan sebelum Perang Dunia II, yang menjelenggarakan pemerintahan daerah Kota Djakarta menurut peraturan perundangan desentralisasi dahulu jaitu Stadsgemeente-ordonnantie ditambah dengan „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java”.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam ordonansi Staatsblad 1948 no. 195 itu, maka beberapa tugas kekuasaan yang dahulu berada didalam tangan aparatur pemerintahan Provincie West Java, kini didjalankan oleh Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken, ini misalnja hak mengesahkan anggaran keuangan Stadsgemeente Batavia dan lain-lain. Selandjutnja berhubung Provincie West Java sudah tidak ada lagi, maka ditentukan pula bahwa pengundangan peraturan-peraturan daerah Stadsgemeente Batavia kini dilakukan dengan menempatkannja dalam Javase Courant (pasal 6 ayat 3). Djadi kembali lagi seperti pada zaman Gemeente Batavia dahulu. Pada waktu kekuasaan legislatip masih dipegang oleh Resident Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Batavia sendiri, verordeningen Stadsgemeente Batavia yang ditetapkan oleh pedjabat itu djuga diundangkan dalam Javase Courant.

Selain pengaturan baru mengenai aparatur pemerintahan stadsgemeente seperti telah diuraikan diatas, maka oleh Pemerintah Pusat dilakukan pula peraturan terhadap susunan pemerintahan dari lingkungan wilajah yang dengan Staatsblad 1948 no. 178 dikeluarkan dari kekuasaan Negara Pasundan dan ditjadangkan sebagai wilajah Distrik Federal. Dalam bulan Pebruari 1949 dikeluarkanlah „*Ordonnantie Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden*” (Staatsblad 1949 no. 63) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1949.

Menurut Ordonansi tentang susunan pemerintahan Batavia dan sekitarnja itu, maka wilajah yang ditjadangkan untuk menjadi Distrik Federal ditetapkan sebagai satuan wilajah dengan nama „*Gewest Batavia en Ommelanden*”. Pemerintahan

atas gewest ini dilakukan oleh seorang gubernur atas nama Pemerintah Pusat dengan berkedudukan di Kota Djakarta. Dengan dibentuknja Gewest Batavia en Ommelanden itu, maka Daerah swatantra Regentschap Batavia dan Regentschap Meester Cornelis jang telah ada sedjak tahun 1925 d.hapuskan.

Gubernur Gewest Batavia en Ommelanden itu memegang kekuasaan pemerintahan sipil, militer dan kekuasaan kepolisian untuk lingkungan wilajahnja jang sebelum itu dipegang oleh CCOamacab, Algemeen Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst, Recomba dan Resident Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst serta (berkenaan dengan wilajah Pulau Seribu) kekuasaan-kekuasaan jang dahulu dipegang oleh Assistent-Resident, bupati dan badan-badan/pegawai-pegawai dari Regentschap Batavia jang dihapuskan.

Dibawah gubernur Gewest Batavia en Ommelanden itu terdapat 3 pedjabat jang bertanggungjawab kepadanya, jaitu:

1. *Burgemeester* dari Stadsgemeente Batavia jang disertai kekuasaan pemerintahan pamong pradja jang dahulu dijalankan oleh resident, bupati dan assistent-resident untuk lingkungan wilajah Stadsgemeente Batavia. Dengan demikian maka kini walikota mempunyai tugas kewadajiban rangkap, jaitu sebagai organ daerah swatantra jang menjelenggarakan pemerintahan daerah Kota Djakarta, dan sebagai pedjabat pusat jang menjalankan pemerintahan pamongpradja untuk lingkungan wilajah Stadsgemeente Batavia itu. Dengan ini sifat dualisme dalam pemerintahan Stadsgemeente Batavia jang terdjadi karena tugas pemerintah pusat dan tugas daerah otonom dijalankan oleh aparaturnya jang berbeda (terpisah) mendjadi hapus; ¹⁴¹⁾
2. *Resident* dari Residentie Ommelanden van Batavia (Keresidenan Daerah-daerah sekitar Djakarta) jang memegang kekuasaan residen sebelum itu (ketjuali kekuasaan militer dan kepolisian) dan kekuasaan bupati, assistent-resident serta badan-badan/pegawai-pegawai dari kabupaten-kabupaten jang dihapuskan, untuk lingkungan wilajah sekitar Djakarta (tidak termasuk Pulau Seribu). Residen ini berkedudukan di Depok. ¹⁴²⁾

¹⁴¹⁾ Karangan „Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden” dalam Majalah „Bestuursvraagstukken”, tahun I no. 2 (April 1949), katja 216-217 atau 285-287.

¹⁴²⁾ Lihat Keputusan Gubernur Batavia en Ommelanden tanggal 11 April 1949 no. Pz/177/G.R. dalam Javasche Courant 1949 no. 31.

3. *Wedana* dari Distrik Pendjaringan yang ditugaskan mendjalkan pemerintahan untuk wilayah Pulau Seribu (pedjabat ini untuk wilayah Pulau Seribu itu juga langsung bertanggungjawab dan berada dibawah perintah gubernur Gewest Batavia en Ommelanden).

Selanjutnja diatur pula pembagian administratip yang baru dari lingkungan wilayah yang dibentuk mendjadi Gewest Batavia en Ommelanden tersebut. Ini dilakukan dengan „*Besluit Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden*” termuat dalam Staatsblad 1949 no. 64. Menurut Besluit itu maka Gewest Batavia en Ommelanden (sesuai dengan wilayah-wilayah djabatan dari ketiga pedjabat dibawah gubernur yang telah disebutkan diatas) dibagi dalam wilayah-wilayah bagian (gebiedsdelen) yang berikut :

- a. *Wilayah dari Stadsgemeente Batavia*;
- b. *Residentie Ommelanden van Batavia*;
- c. *Onderdistrict Duizend-Eilanden* (Pulau Seribu).

Wilayah Stadsgemeente Batavia dibagi dalam 4 district, dan masing-masing district dibagi dalam beberapa onderdistrict, jaitu sebagai berikut:

1. *District Matraman*, ini dibagi dalam onderdistrict-onderdistrict yang berikut:
 - a. Onderdistrict Senen;
 - b. Onderdistrict Salemba;
 - c. Onderdistrict Matraman;
 - d. Onderdistrict Kampung Melaju;
2. *District Gambir*, dibagi dalam:
 - a. Onderdistrict Gambir;
 - b. Onderdistrict Tanah-Abang;
 - c. Onderdistrict Petamburan;
3. *District Pendjaringan*, dibagi dalam:
 - a. Onderdistrict Mangga Duwa;
 - b. Onderdistrict Sawah Besar;
 - c. Onderdistrict Pendjaringan;
 - d. Onderdistrict Krukut;
4. *District Tandjung Priok*, dibagi dalam:
 - a. Onderdistrict Tandjung Priok;
 - b. Onderdistrict Kemajoran.

Residentie Ommelanden van Batavia dibagi setjara administratif dalam :

1. *District Tangerang Ilir*, ini djuga dibagi dalam onderdistrict jang berikut:
 - a. Onderdistrict Tjengkareng;
 - b. Onderdistrict Batutjeper;
 - c. Onderdistrict Teluknaga;
2. *District Tangerang Udik*, dibagi dalam:
 - a. Onderdistrict Tangerang;
 - b. Onderdistrict Tjipondoh;
 - c. Onderdistrict Serpong;
3. *District Kebajoran*, dibagi dalam:
 - a. Onderdistrict Kebajoran Ilir;
 - b. Onderdistrict Kebajoran Udik;
 - c. Onderdistrict Kebondjeruk;
 - d. Onderdistrict Tjiledug;
 - e. Onderdistrict Tjiputat;
4. *District Depok*, dibagi dalam:
 - a. Onderdistrict Depok;
 - b. Onderdistrict Parung;
 - c. Onderdistrict Gunung-Sindur;
 - d. Onderdistrict Sawangan;
5. *District Bekasi*, ini dibagi dalam:
 - a. Onderdistrict Bekasi;
 - b. Onderdistrict Babelan;
 - c. Onderdistrict Tjilintjing;
 - d. Onderdistrict Pulau Gadung;
6. *District Kramatdjati*, dibagi dalam:
 - a. Onderdistrict Pasarminggu;
 - b. Onderdistrict Mampang Perapatan;
 - c. Onderdistrict Pasar Rebo;
 - d. Onderdistrict Pondok Gedeh;
7. *District Tjibinong*, district ini meliputi:
 - a. Onderdistrict Tjibinong;
 - b. Onderdistrict Tjiteureup;
 - c. Onderdistrict Tjimanggis.

Dengan diadakannya pembagian wilayah yang baru itu, maka dalam „Besluit Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden” tersebut diatas dinyatakan pula bahwa Residentie Batavia, Regentschap Batavia dan Regentschap Meester Cornelis berikut pembagian-pembagiannya dalam satuan-satuan wilayah yang lebih kecil dahulu dihapuskan.

Demikianlah hal-ichwal Stadsgemeente Batavia dalam masa pemerintahan Pre-federal. Sampai pada waktu terjadinya pemulihan kedaulatan dari tangan Keradjaan Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat, keadaan masih berlangsung seperti tersebut diatas.

B A B IX

KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

A. *Zaman Republik Indonesia Serikat*

§ 1. PEMBAHARUAN APARATUR PEMERINTAHAN

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsunglah pemulihan ke-
daulatan Indonesia dari tangan Keradjaan Belanda kepada bangsa
Indonesia. Pada hari jang sama itu berdirilah Republik Indonesia
Serikat sebagai suatu negara hukum jang demokratis dan berbentuk
federasi. ¹⁴³⁾

Dengan berdirinja Negara Federal Indonesia itu jang Peme-
rintahnja menurut pasal 68 ajat (3) dari Konstitusi R.I.S.
berkedudukan di-ibukota Djakarta, maka Gewest Batavia en Om-
melanden lalu merupakan suatu Distrik Federal. Distrik Federal
Djakarta menurut pasal 2 Konstitusi itu masih tetap merupakan
sebagian dari wilajah Negara-bagian Pasundan, akan tetapi
menurut ketentuan pasal 50-nja, pemerintahan atas Distrik Federal
tersebut dilakukan oleh alat-alat perlengkapan R.I.S. menurut
aturan-aturan jang akan ditetapkan kemudian dalam undang-undang
federal.

Berhubung pasal 192 Konstitusi R.I.S. menentukan bahwa
peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-
usaha jang sudah ada tetap berlaku, selama tidak ditjabut/diubah
oleh R.I.S. atau selama tidak bertentangan dengan persetudjuan-
persetudjuan antara Indonesia dan Keradjaan Belanda maupun
dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi tersebut jang tidak memer-
lukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan pendjalan-
kan, maka dalam wilajah-wilajah jang langsung dibawah Pemerintah
R.I.S., pembentukan Republik Federal itu pada asasnja tidak
merubah aturan-aturan hukum jang berlaku. ¹⁴⁴⁾

Dengan demikian maka Stadsgemeente Djakarta sebagai suatu
daerah swatantra didalam lingkungan wilajah Distrik Federal
Djakarta tetap berlangsung menurut peraturan perundangan desen-
tralisasi jang telah ada sebelumnja R.I.S. itu, jaitu S.G.O. dan

¹⁴³⁾ Konstitusi R.I.S. (Lembaran Negara R.I.S. 1950 no. 3) pasal 197 berhubungan
dengan pasal 1.

¹⁴⁴⁾ Buku Mr. R. Sastranegara (tjatatan 122 d'muka) katja 10.

„Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java”. Demikian pula susunan dan organisasi stadsgemeente itu masih tetap seperti sediakala dengan tiada berubah. Penjelenggaraan pemerintahan daerah masih dilakukan oleh Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta, Badan Pemerintahan Harian dan Walikota yang dibentuk dalam zaman Pre-federal.

Akan tetapi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan semula, jaitu bahwa jangka waktu duduk Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta dan Badan Pemerintahan Harian hanya 1 tahun, maka pada tanggal 1 Maret 1950 kedua badan itu meletakkan jabatannya.

Selama jangka waktu 1 tahun itu belum dapat dilangsungkan pemilihan untuk membentuk madjelis yang baru, oleh karena itu untuk mentjegah matjetnja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Djakarta, oleh Presiden R.I.S. lalu dilakukan tindakan dan pengaturan yang bersifat sementara. Dengan keputusannya tanggal 28 Pebruari 1950 no. 93, ¹⁴⁵⁾ ditetapkanlah bahwa sambil menanti peraturan lebih lanjut, semua kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban serta segala urusan dan pelaksanaan yang menurut perundang-undangan yang berlaku berada dalam tangan Dewan Perwakilan Kota dan College van Burgemeester en Wethouders dari *Haminte-kota Djakarta*, untuk sementara diselenggarakan dan dipenuhi oleh walikota. Jadi pemerintahan daerah Kota Djakarta sedjak permulaan Maret itu dijalankan (lagi) oleh seorang pejabat tunggal. Pada waktu itu jabatan walikota Djakarta masih tetap dipegang oleh Mr. Sastromuljono.

Pemerintahan tunggal tersebut diatas tidak berlangsung lama, karena pada waktu itu oleh pihak Kementerian Dalam Negeri R.I.S. juga telah dilakukan usaha-usaha untuk membentuk suatu madjelis yang baru. Pada akhir bulan Pebruari Kementerian tersebut mengadakan pertemuan dengan pelbagai partai politik dan organisasi lain. Dalam pertemuan itu yang dipimpin oleh Sekretaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri **MR. WONGSONEGORO**, akhirnya disetujui pembentukan sebuah *Panitia Pembaharuan Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta* yang terdiri dari 7 orang, jaitu **SUWIRJO** sebagai ketuanya, sedang para anggota lainnya ialah **SUPRANOTO**, **MR. SUDJONO**, **MR. JUSUF WIBISONO**, **SJAMSUDIN SAAT**, **MR. ST. TAKDIR ALISJAH-BANA** dan **B.R. MOTIK**. Panitia tersebut yang juga terkenal de-

¹⁴⁵⁾ Berita Negara R.I.S. 1950 no. 12.

ngan nama „*Panitia Tudjuh*” diberi tugas untuk dalam waktu singkat membentuk sebuah madjelis baru yang didalamnya duduk wakil-wakil dari aliran-aliran politik dan aliran-aliran lainnja yang dapat mentjerminkan keadaan yang sebenarnja dari masjarakat Kota Djakarta pada dewasa itu.

Dalam pembentukan Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta yang baru itu, oleh Panitia tersebut ditetapkan prinsip-prinsip yang berikut :

- a. Jumlah anggota madjelis yang akan dibentuk itu ditetapkan sebanjak 25 orang;
- b. Madjelis itu akan dibentuk dengan djalannya pemilihan yang diikuti oleh segenap organisasi baik politik, ekonomi, sosial, buruh, tani, agama, wanita maupun organisasi pemuda yang berkedudukan di Djakarta dan didirikan sebelum tanggal 28 Pebruari 1950 (hari dibentuknja Panitia Tudjuh); dalam pemilihan itu masing-masing organisasi hanya mempunyai 1 suara;
- c. Yang boleh mendjadi anggota madjelis ialah warganegara Indonesia yang memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi anggota stads-gemeenteraad dahulu; didalam pemilihan itu tidak lagi diadakan perbedaan golongan rakjat seperti dahulu; pentjalonan untuk ikut dalam pemilihan itu dikemukakan oleh masing-masing organisasi;
- d. Dalam madjelis itu akan didjamin sekurang-kurangnya 7 kursi untuk partai-partai politik, dengan demikian maka pemilihan akan dilangsungkan dalam 2 taraf, jaitu pertama dipilih terlebih dahulu 7 orang diantara tjalon-tjalon yang diadjukan oleh partai-partai politik sadja, kemudian barulah dilakukan pemilihan 18 orang lainnja dari antara semua tjalon yang dikemukakan.

Demikianlah setelah segala persiapan selesai, dilangsungkanlah pemilihan tersebut yang diikuti oleh 177 organisasi. Tjalon-tjalon yang mendapat suara terbanjak dinjatakan terpilih. Sebagai hasil pemilihan itu, terdapatlah 25 orang yang mendapat suara terbanjak, jaitu:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. SUWIRJO | dari P.N.I.; |
| 2. DT. ZAINAL ARIFIN | dari Masjumi; |
| 3. NJ. DR. ABUHANIFAH | dari Masjumi; |
| 4. SARDJONO | dari Masjumi; |
| 5. ZAINAL ARIFIN TANAMAS | dari Masjumi; |

- | | |
|----------------------------------|--|
| 6. MR. ST. T. ALISJAHBANA | dari P.S.I.; |
| 7. P.A. DE QUELJU | dari P.I.R.; |
| 8. SUPRANOTO | dari Persatuan Pegawai R.I.; |
| 9. D.M. JANUR | dari Serikat Buruh Bank; |
| 10. MR. SOEWAHJO | dari Gabungan Serikat Buruh
Pemerintah; |
| 11. ABDULLAH SALIM | dari Serikat Dagang Islam
Indonesia; |
| 12. M.A.L. TOBING | dari Partai Murba; |
| 13. GAZALI SJAHLAN | dari Serikat Tani Islam Indo-
nesia; |
| 14. A.A. ALAYDROES | dari Panitia Politik Kalangan
Arab; |
| 15. SUPARDI | dari Serikat Buruh Sepatu In-
donesia; |
| 16. HADJI DARWIS AMINI | dari Gerakan Pemuda Islam
Indonesia; |
| 17. TABRANI NOTOSUDIRJO | dari Serikat Tani Indonesia; |
| 18. S. MUSTAMAN | dari Persatuan Bekas Tawanan; |
| 19. NAWAWI DUSKI | dari Gerakan Pemuda Islam
Indonesia; |
| 20. ASMARA HADI | dari Serikat Buruh Balai Pus-
taka; |
| 21. NJ. SETIATI SURASTO | dari Pemuda Putri Indonesia; |
| 22. JUSUF BANDJAR | dari Persatuan Pemuda Repu-
blik; |
| 23. J. HUTAGALUNG | dari Buruh Pemerintah; |
| 24. JAHJA MALIK | dari Serikat Tani Indonesia; |
| 25. E. COERDIAN | dari Serikat Buruh Perkebun-
an R.I. |

Pada tanggal 9 Maret 1950 selesailah sudah tugas pekerjaan Panitia Tudjuh, dan 25 nama tersebut diatas disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri R.I.S. untuk disahkan sebagai anggota-anggota Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta jang baru. ¹⁴⁶⁾

¹⁴⁶⁾ Ura'an mengenai Panitia Tudjuh berikut pelaksanaan tugas pekerdjaannya itu terdapat pada Surat Panitia tersebut kepada Menteri Dalam Negeri R.I.S. tanggal 9 Maret 1950, terutama lampiraannya jang memuat laporan ringkas tentang Pembaharuan Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta (Dokumentasi pada Bagian Per-undang²an dan Urusan Hukum Kotapradja Djakarta Raja).

Dengan adanya oknum-oknum yang akan merupakan Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta yang baru itu, maka oleh Presiden Republik Indonesia, keputusannya dari tanggal 28 Pebruari 1950 no. 93 yang mengadakan pemerintahan tunggal untuk Kota Djakarta ditjabut, yaitu dengan keputusan tanggal 11 Maret 1950 no. 114.¹⁴⁷⁾ Dalam keputusan yang baru ini diatur pula untuk sementara susunan aparatur pemerintahan daerah Kota Djakarta, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam *Kotapradja Djakarta*, segala tugas kekuasaan serta urusan dan pelaksanaan lainnya yang menurut perundang-undangan yang berlaku berada dalam tangan pemerintahan kota-pradja, kini dijalankan oleh :
 1. suatu Dewan Perwakilan Kota Sementara;
 2. suatu Badan Pemerintahan Harian;
 3. Walikota.
- b. Dewan Perwakilan Kota Sementara terdiri atas 25 anggota. Walikota menjadi anggota merangkap ketuanya. Anggota-anggota lainnya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri;
- c. Badan Pemerintahan Harian terdiri atas walikota sebagai anggota merangkap ketua dan 4 orang anggota lainnya. Anggota-anggota yang lainnya itu diangkat pula oleh Menteri Dalam Negeri, sedapat-dapatnya dari lingkungan anggota-anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara dan untuk hal itu Dewan tersebut mengemukakan tjalon tjalonnya;
- d. Dewan Perwakilan Kota Sementara, Badan Pemerintahan Harian dan Walikota berturut-turut dibebani tugas kekuasaan yang menurut peraturan perundangan yang masih berlaku berada dalam tangan stadsgemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders dan burgemeester, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk masing masing aparatur itu;
- e. Dewan Perwakilan Kota Sementara dan Badan Pemerintahan Harian itu harus meletakkan djabatannya pada hari Dewan Perwakilan Kota yang dibentuk dengan djalan pemilihan umum mulai memangku djabatannya, tetapi selambat-lambatnya pada tanggal 1 Djuli 1950. Djadi kedua badan itu hanya diberi masa duduk selama 3 bulan lebih.

Demikianlah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, oleh Menteri Dalam Negeri R.I.S. dengan keputusannya tanggal 16 Maret

¹⁴⁷⁾ Berita Negara R.I.S. 1950 no. 14.

1950 no. B.Z. 3/4/13 diangkatlah 25 orang yang dikemukakan oleh Panitia Tudjuh itu menjadi anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara dari Kotapradja Djakarta terhitung mulai tanggal 15 Maret 1950. Kemudian dalam bulan April berikutnya, diangkatlah pula 4 anggota Dewan itu menjadi anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian, yaitu Supranoto, Sardjono, Tabrani dan de Quefju.

Selain pembaharuan terhadap badan-badan kolektif yang menyelenggarakan pemerintahan daerah Kota Djakarta, pejabat yang memegang fungsi walikota juga diperbaharui. Pada waktu dilakukan usaha-usaha membentuk Madjelis Pemerintahan Kota Djakarta yang baru, oleh Partai Persatuan Marhaen Indonesia dengan disokong oleh 55 organisasi lainnya telah dikemukakan sebuah usul mosi yang isinya mendesak kepada Pemerintah R.I.S. agar memperbaharui juga jabatan walikota yang hingga saat itu masih dipegang oleh pejabat yang diangkat pada masa pemerintahan Prefederal (Mr. Sastromuljono). Usul mosi itu diterima oleh semua organisasi yang hadir dalam pemilihan yang diselenggarakan oleh Panitia Tudjuh dalam membentuk suatu madjelis baru seperti telah diuraikan diatas. Demikianlah berdasarkan desakan yang diajukan oleh organisasi-organisasi itu, maka oleh Presiden Republik Indonesia Serikat dengan surat keputusannya tanggal 23-3-1950 no. 479 diangkatlah Suwirjo menjadi walikota Djakarta lagi. Kemudian pada tanggal 30 Maret 1950 dilangsungkan timbang terima jabatan walikota tersebut dari tangan Mr. Sastromuljono kepada Suwirjo.

Tiga bulan telah lampau, tetapi ternyata dalam jangka waktu itu belum dapat diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan menggantikan Dewan Perwakilan Kota Sementara tersebut diatas. Oleh karena itu oleh Presiden R.I.S. dengan keputusannya tanggal 30 Djuni 1950 no. 203 masa duduk Dewan Perwakilan Kota Sementara itu diperpanjang dengan 6 bulan, yaitu hingga tanggal 1 Djanuari 1951 dengan tjatatan bahwa sebelum tanggal tersebut harus sudah terbentuk suatu Dewan Perwakilan Kota dengan jalan pemilihan umum. ¹⁴⁸⁾

§ 2. PEMBENTUKAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

Sedjalan dengan perubahan-perubahan susunan aparatur dari pemerintahan daerah Kota Djakarta, didalam lingkungan pusat

¹⁴⁸⁾ Lihat Berita Negara R.I.S. 1950 no. 47.

djuga terdjadi perkembangan-perkembangan ketatanegaraan jang baru. Dengan berdirinja Negara Federal Indonesia pada achir tahun 1949 belumlah berarti bahwa hubungan-hubungan ketatanegaraan di Indonesia telah mendjadi tetap, karena kemudian ternjata bahwa bentuk federasi bukanlah suatu bentuk negara jang dikehendaki dengan sungguh-sungguh oleh sebagian besar dari rakjat Indonesia. Demikianlah dalam bulan-bulan pertama dari tahun 1950 dibeberapa negara bagian terdjadi pergolakan-pergolakan jang menuntut dibubarkannja Republik Indonesia Serikat dan dibentuknja suatu Negara Republik Indonesia Kesatuan.

Untuk menampung keinginan-keinginan dari rakjat itu, maka oleh Pemerintah R.I.S. ditetapkanlah Undang-undang darurat 1950 no. 11 tentang tata-tjara perubahan susunan kenegaraan dari wilajah Republik Indonesia Serikat. ¹⁴⁹⁾ Kemudian berdasarkan ketentuan ketentuan dalam undang-undang darurat tersebut, negara-negara bagian jang menghendakinja lalu dibubarkan dan wilajahnja digabungkan kepada Negara (bagian) Republik Indonesia jang berpusat di Jogjakarta. Demikian pula dengan keputusan Presiden R.I.S. tanggal 11 Maret 1950 no. 113, Negara Pasundan pada tanggal tersebut dibubarkan dan wilajahnja berikut wilajah jang merupakan Distrik Federal Djakarta digabungkan pada wilajah Republik Indonesia. ¹⁵⁰⁾

Walaupun Distrik Federal Djakarta kini merupakan sebagian dari pada wilajah Negara (bagian) Republik Indonesia jang berpusat di Jogjakarta, namun sesuai dengan ketentuan dalam Staatsblad 1948 no. 178, wilajah itu tetap tidak berada dibawah kekuasaan suatu negara bagian (dahulu Negara Pasundan, kini Negara Republik Indonesia). ¹⁵¹⁾ Demikian pula sesuai dengan ketentuan pasal 50 dari Konstitusi R.I.S., pemerintahan atas wilajah tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintahan R.I.S. menurut ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang R.I.S. Tetapi undang-undang federal jang dimaksud belum ada, oleh karena itu masihlah berlaku ketentuan-ketentuan dari peraturan perundangan jang lama.

¹⁴⁹⁾ Lembaran Negara R.I.S. 1950 no. 16, pendjelasannja dalam Tambahan Lembaran Negara no. 8.

¹⁵⁰⁾ Berita Negara 1950 no. 14.

¹⁵¹⁾ S. 1948/178 berlaku djuga terhadap Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Presiden R.I.S. 1950/113 pasal 3 jang menjatakan bahwa dalam menanti tindakan² selanjutnja dari Pemerintah R.I., maka per-undang²-an jang hingga kini berlaku untuk negara bagian itu (Negara Pasundan) masih tetap berlaku.

Berhubung dengan terdjadinja perubahan terhadap status wilayah Djawa Barat sebagai akibat dari pembubaran Negara Pasundan itu, maka terhadap kedudukan wilayah yang merupakan Distrik Federal itu serta pula terhadap kedudukan Kota Djakarta sebagai suatu daerah swatantra maupun sebagai lingkungan wilayah yang langsung dikuasai oleh alat-alat perlengkapan R.I.S. diadakan penindjaunan seperlunya untuk kemudian diatur setjara baru.

Sebagai tindakan yang pertama, maka oleh Presiden R.I.S. dengan keputusannya tanggal 24 Maret 1950 no. 125, ¹⁵²⁾ ditentukanlah lingkungan wilayah yang baru dari daerah ibukota Djakarta, jaitu wilayah ibukota itu diperluas dengan wilayah-wilayah disekelilingnja yang berbatasan, sehingga lingkungannya meliputi:

- a. Kotapradja Djakarta;
- b. Pulau Seribu;
- c. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Djakarta, jaitu:
 1. sebagian dari distrik Tangerang Ilir, jaitu onderdistrict Tjengkareng;
 2. sebagian dari distrik Kebajoran, jaitu wilayah yang meliputi onderdistricten Kebondjeruk, Kebajoran Ilir dan Kebajoran Udik;
 3. sebagian dari distrik Kramatdjati, jaitu onderdistricten Mampang Prapatan, Pasar Minggu dan Pasar Rebo;
 4. sebagian dari distrik Bekasi, jaitu wilayah yang meliputi onderdistrict Pulogadung dan sebagian dari onderdistrict Tjilintjing (desa Tjilintjing dan desa Semper).

Selandjutnja dalam keputusan tahun 1950 no. 125 tersebut diatas ditetapkan pula bahwa peraturan sebagaimana termuat dalam Staatsblad 1948 no. 178 ditjabut, sedang wilayah wilayah lainnja dari Distrik Federal Djakarta yang tidak diambil untuk memperluas ibukota itu, seperti district Tangerang Udik, district Depok dan lain-lainnja, semuanya dikembalikan untuk selandjutnja diurus oleh Negara (bagian) Republik Indonesia.

Kemudian pada tanggal 31 Maret 1950 gubernur Distrik Federal (dalam zaman Pre-federal ialah gubernur Gewest Batavia en Ommelanden) meletakkan djabatannya, dan menjerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada Walikota Djakarta (Suwirjo) sepanjang mengenai lingkungan wilayah ibukota yang baru itu.

¹⁵²⁾ Berita Negara 1950 no. 18.

us wila-
sundan
Distrik
sebagai
h jang
adakan
i.
R.I.S.
tentu-
akarta,
liseke-

itu:
Tjeng-

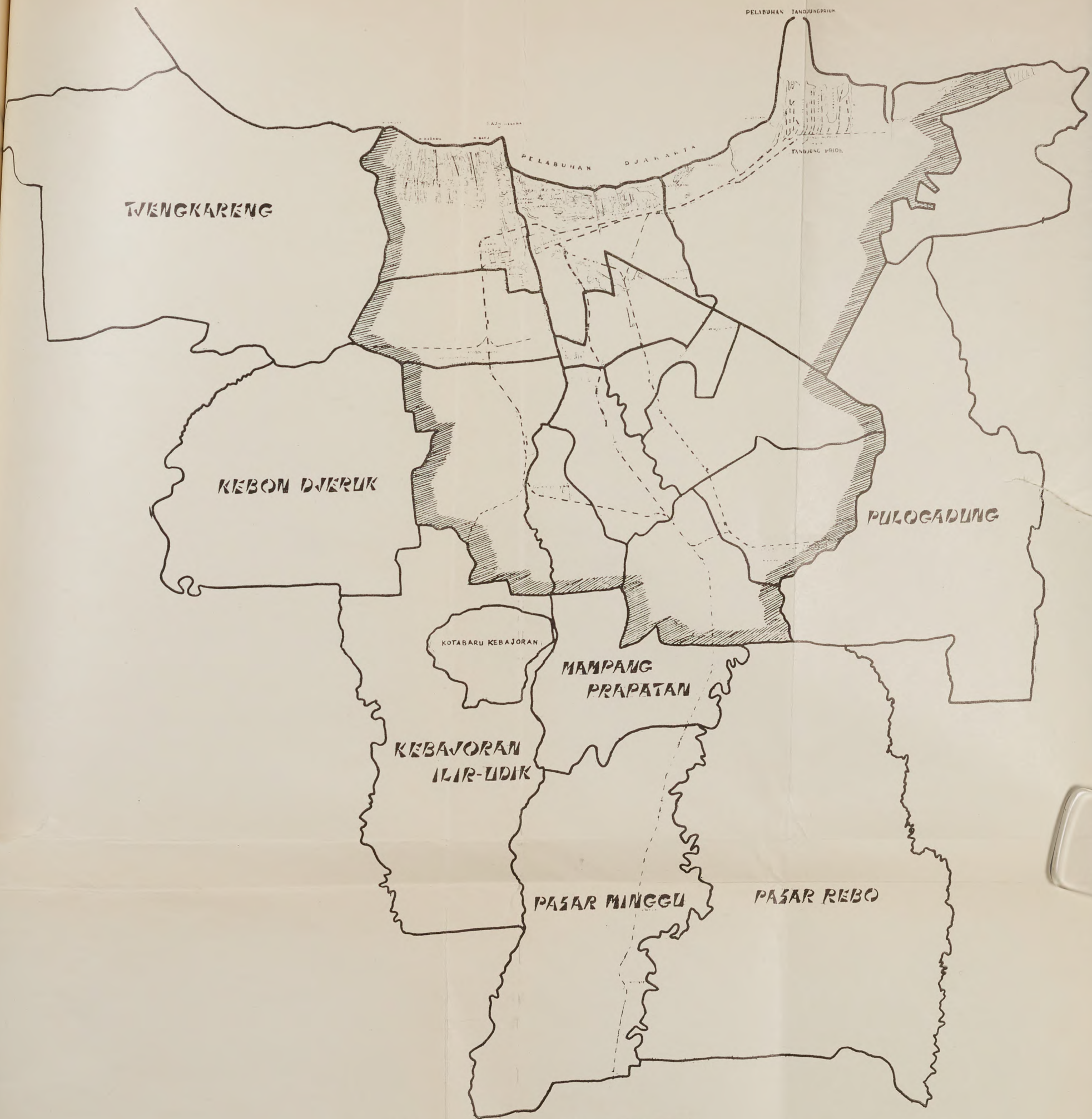
liputi
joran

Mam-

i on-
ilin-

atas
lam
nja
luas
dan
oleh

eral
m-
nan
ng



PETA WILAJAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

Garis-garis miring menundjukkan batas-batas wilayah Stadsgemeente Batavia dahulu, sedang Tjengkareng, Kebondjeruk dan sebagainya adalah onderdistrict-
onderdistrict jang ditambahkan dengan keputusan Presiden R.I.S. 1950 no. 125.

Sebagai tindakan selandjutnja dari Pemerintah R.I.S., maka pada tanggal 13 Mei 1950 ditetapkanlah undang-undang darurat no. 20 jang berlaku surut sampai tanggal 31 Maret 1950.¹⁵³⁾ Undang-undang darurat itu jang dinamakan „*Undang-undang Pemerintahan Djakarta Raya*” mengatur hal ichwal pemerintahan atas ibukota Djakarta sesuai dengan ketentuan dalam pasal 50 Konstitusi R.I.S. Dalam undang-undang federal itu sekaligus diatur pula kedudukan Kota Djakarta sebagai suatu daerah jang mengurus rumah tangganya sendiri, jang sedjak beberapa waktu jang lalu djuga berada dalam penindjauan Pemerintah R.I.S.

Menurut Undang-undang darurat 1950/20 itu, pemerintahan Kota Djakarta sebagai satuan pemerintahan (wilajah administratif jang langsung dibawah Pemerintah R.I.S.) dengan lingkungan wilajah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden R.I.S. 1950 no. 125, d'djalankan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat oleh seorang *walikota*. Kepada Walikota Djakarta itu selain kekuasaan-kekuasaan, kewadajiban-kewadajiban dan pekerdjaan-pekerdjaan jang hingga saat itu telah dipegangnja, djuga disertai tugas kekuasaan jang menurut „*Ordonnantie Bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden*” dipegang oleh gubernur Batavia en Ommelanden, dengan diketjualikan kekuasaan kepolisian dan kekuasaan militer (kedua matjam kekuasaan itu tidak ikut diserahkan kepada walikota), serta tugas kekuasaan jang dahulu dipegang oleh residen dari Residentie Ommelanden van Batavia. Selandjutnja maka walikota Djakarta itu mendjalankan tugas pemerintahan dalam daerah ibukota tersebut dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk Menteri Dalam Negeri R.I.S. (pasal 1 dan 4).

Mengenai kedudukan Kota Djakarta sebagai suatu daerah swatantra, dalam undang-undang federal tersebut diatas ditentukan bahwa pemerintahan daerah tersebut dengan wilajah jang baru (lebih luas) sebagaimana ditentukan dalam keputusan Presiden 1950/125 dinamakan „*Kotapradja Djakarta Raya*” (pasal 2). Penjelenggaraan pemerintahan daerah itu masih tetap menurut peraturan perundangan desentralisasi jang hingga saat itu berlaku jaitu S.G.O. dan „*Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java*”. Hanja selandjutnja ditentukan bahwa kekuasaan-kekuasaan, kewadajiban-kewadajiban dan pekerdjaan-peker-

¹⁵³⁾ Lembaran Negara 1950 no. 31, pendjelasan dalam Tambahan L.N. no. 15.

djaan jang menurut peraturan perundangan jang dahulu berada didalam tangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah dan gubernur dari Propinsi West Java dahulu, demikian pula jang menurut „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java” dipegang oleh Secretaris van Staat voor B'innenlandse Zaken, kini semuanya didjalankan oleh Menteri Dalam Negeri R.I.S. (pasal 3). Djadi pemerintahan daerah Kota Djakarta kini berada dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri R.I.S., pengesahan-pengesahan terhadap peraturan daerahnja dan sebagainja dilakukan oleh Menteri tersebut.

Mengenai susunan aparatur pemerintahannja dari Kotapradja Djakarta Raja itu, masih tetap sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden R.I.S. 1950 no. 114, jaitu berupa Dewan Perwakilan Kota Sementara, Badan Pemerintahan Harian dan Walikota. Dalam hal ini walikota Djakarta tersebut mempunyai fungsi rangkap, jaitu sebagai pedjabat pemerintah pusat (R.I.S.) jang didalam tangannja terkumpul tugas kekuasaan jang dahulu didjalankan oleh gubernur Distrik Federal (sepanjang tidak mengenai kekuasaan dalam bidang kepolisian dan militer), residen, assistent-resident dan bupati; sedang fungsi satunja lagi ialah sebagai organ pemerintahan daerah jang dalam dirinja kita temui kedudukan sebagai ketua merangkap anggota dari Dewan Perwakilan Kota Sementara maupun Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta Raja.

Demikianlah dengan adanja satuan daerah Kota Djakarta dalam bentuk dan susunan pemerintahannja jang baru itu, maka dengan resmi Gewest Batavia en Ommelanden berikut pembagiannja dalam wilajah-wilajah bagian dihapuskan. Demikian pula djabatan gubernur Gewest tersebut dan residen dari Residentie Ommelanden van Batavia hapus djuga sedjak tanggal 31 Maret 1950.

Selanjutnja mulai achir bulan Maret itu tetaplah dipakai nama „Kotapradja Djakarta Raja” untuk menjebut daerah swatantra jang dalam perdjalanannya sedjarahnja sebelum itu mengenal berbagai sebutan, jaitu dari *Gemeente* Batavia, kemudian mendjadi *Stadsgemeente* Batavia, lalu Djakarta *Tokubetu Si* dan selanjutnja Pemerintahan Nasional Kota Djakarta. Perkataan „kotapradja” sendiri sudah mulai dipakai dalam keputusan Presiden R.I.S. tanggal 11 Maret 1950 no. 114 untuk pengertian kota otonoom, sedang dalam keputusan tanggal 28 Pebruari 1950 no. 93 dipergunakan istilah „haminte-kota” sebagai terdjemah-

an lurus dari pada perkataan „stadsgemeente”. Dengan batas-batasnja yang baru itu maka luas wilayah Kotapradja Djakarta Raja kini mendjadi $\pm$ 530 kilometer persegi yang berarti 3 kali lebih luas dari pada wilayah Stadsgemeente Batavia dahulu.

B. Zaman Republik Indonesia Kesatuan

§ 3. S T A T U S

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan yang berlangsung, pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat berubah mendjadi Negara Republik Indonesia Kesatuan. Lahirnja Negara kesatuan itu terdjadi dengan djalan mengubah Konstitusi R.I.S. sehingga struktur Negara Republik Indonesia yang menurut Konstitusi tersebut berbentuk federal, kini berubah mendjadi bentuk unitaristis. Perubahan Konstitusi R.I.S. itu dilakukan dengan Undang-undang R.I.S. 1950 no. 7 dalam mana sekaligus dimuat pula naskah selengkapnja dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Kesatuan itu. Undang-undang tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara 1950 no. 56, pendjelasannja dalam Tambahan Lembaran Negara no. 37.¹⁵⁴⁾

Mendjelang terbentuknja Negara kesatuan itu, maka wilayah-wilayah dari bekas negara-negara bagian yang dibubarkan oleh Presiden R.I.S. dan kemudian digabungkan kepada Negara-bagian Republik Indonesia (wilayah-wilayah tersebut terkenal dengan sebutan „*daerah pulihan*”) oleh Pemerintah R.I. di Jogjakarta lalu dibentuk mendjadi daerah-daerah swatantra berdasarkan *Undang-undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah* (Undang-undang R.I. tahun 1948 no. 22).¹⁵⁵⁾ Undang-undang 1948 no. 22 itu ditetapkan oleh Pemerintah Republik

¹⁵⁴⁾ Uraian selajang pandang mengenai sedjarah perubahan Konstitusi R.I.S. itu berikut naskah Undang-undang Dasar Sementara R.I. lengkap dengan pendjelasannja terdapat dalam buku Prof. Dr. R. Supomo : „Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia”.

Penerbit : Noordhoff-Kolff N.V., Djakarta.

Tjataan tambahan : segala peraturan yang berkenaan dengan pembentukan Negara R.I. Kesatuan telah dihimpun oleh Sutomo dibawah pengawasan Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dalam buku „Himpunan Peraturan Pendjelmaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penerbit : U.P. Indonesia N.V., Jogja 1954.

¹⁵⁵⁾ Naskah U.U. 1948 no. 22 ini dihimpun oleh W'daja Soeridiradja dalam bukunja „Himpunan Peraturan² mengenai Pemerintahan Daerah Swatantra”. katja 11 — 58.

Penerbit : Noordhoff-Kolff, Djakarta.

Indonesia Proklamasi pada tanggal 10 Djuli 1948, mula-mula hanya berlaku untuk lingkungan wilajahnja menurut status quo pada *Perdjandjian Renville* tanggal 17 Djanuari 1948. Djadi undang-undang tersebut tidak berlaku bagi wilajah Djawa Barat jang pada waktu itu telah merupakan Negara Pasundan. Tetapi kemudian dengan adanya daerah-daerah pulihan jang dikembalikan kedalam lingkungan wilajah Republik Indonesia Proklamasi itu, maka Undang-undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah itu berlaku untuk semua daerah pulihan tersebut.¹⁵⁶⁾ Djadi Undang-undang 1948/22 tersebut berlaku dipulau Djawa, Sumatera ketjuali wilajah Sumatera Timur dan dipulau Kalimantan ketjuali wilajah Kalimantan Barat (dalam prakteknja kemudian Undang-undang tersebut berlaku pula untuk seluruh Sumatera dan Kalimantan).

Walaupun Negara-bagian Republik Indonesia jang berpusat di Jogjakarta berkuasa kembali atas daerah pulihan Djawa Barat, namun seperti telah diterangkan, daerah Kota Djakarta masih tetap dikuasai oleh Pemerintah R.I.S. sendiri; demikian pula sebagai suatu daerah swatantra, Kotapradja Djakarta Raja diatur pula dengan undang-undang federal (Undang-undang darurat 1950 no. 20). Oleh karena itu Undang-undang 1948/22 tidak berlaku bagi wilajah Djakarta Raja. Dengan demikian pada waktu wilajah Djawa Barat dengan Undang-undang R.I. Proklamasi tahun 1950 no. 11 dibentuk sebagai daerah swatantra propinsi,¹⁵⁷⁾ Kotapradja Djakarta Raja djuga tidak termasuk dalam Propinsi Djawa Barat itu, melainkan masih tetap berdiri sendiri langsung dibawah Pemerintah Pusat.

Mendjelang berachirnja R.I.S., oleh Negara Indonesia Timur sebagai suatu negara-bagian pada tanggal 15 Djuni 1950 ditetapkan pula suatu „*Undang-undang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur*” (diundangkan dalam Staatsblad Indonesia Timur tahun 1950 no. 44) jang berlaku untuk lingkungan wilajahnja, jaitu Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil (sekarang : Nusa Tenggara).¹⁵⁸⁾

¹⁵⁶⁾ Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (sematjam undang-undang darurat dari R.I. Proklamasi) tahun 1950 no. 1. Lihat „Himpunan Undang² dan Peraturan² Pemerintah Negara R.I. 1950” dari Koesnodiprodjo, tjetakan pertama, katja 165.

¹⁵⁷⁾ U.U. Pembentukan Propinsi Djawa Barat ini djuga dihimpun dalam buku Widaja Soeridiradja (tjetatan 155 dimuka), katja 95 — 102.

¹⁵⁸⁾ Idem terdapat dalam buku Widaja Soeridiradja, katja 59 — 75.

Demikianlah pada waktu R.I.S. berubah menjadi Negara kesatuan, maka pada pokoknya kita dapati 3 matjam perundang-undangan desentralisasi yang mengatur daerah-daerah swatantra dari Negara kesatuan itu. Di Djawa (ketjuali Kotapradja Djakarta Raja), Sumatera dan Kalimantan, daerah-daerah swatantra yang ada berdasarkan Undang-undang 1948/22. Sedang daerah-daerah swatantra di Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara diatur oleh undang-undang dalam Staatsblad Indonesia Timur 1950/44. Dan mengenai Kotapradja Djakarta Raja sendiri, diatur dalam satu rangkaian peraturan tersendiri, jaitu untuk sistim otonominja berdasarkan Stadsgemeente-ordonnantie, untuk aparatatur pemerintahannja diatur dalam Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java dan keputusan Presiden R.I.S. 1950 no. 114, lingkungan wilayahnja ditentukan dalam keputusan Presiden 1950 no. 125 dan mengenai pembentukan, nama dan statusnja ditetapkan dengan Undang-undang darurat 1950 no. 20.

Perubahan struktur negara tersebut diatas tidaklah mempengaruhi kedudukan dan organisasi Kotapradja Djakarta Raja, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah suatu negara bentuk baru, melainkan merupakan landjutan dari pada Negara R.I.S. yang diubah bentuknja dari suatu federasi menjadi berbentuk kesatuan yang meliputi seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan demikian maka penjelegaraan pemerintahan daerah Kota Djakarta dalam zaman R. I. Kesatuan ini masih tetap menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O., Undang-undang darurat R.I.S. 1950 no. 20 dan sebagainja dibawah pengawasan langsung dari Pemerintah Pusat R.I. Kesatuan (Menteri Dalam Negeri). Ini berbeda dengan daerah-daerah swatantra disekelilingnja yang berlangsung menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 1948/22. Undang-undang yang achir ini membedakan daerah swatantra dalam 3 tingkat, jaitu :

1. Propinsi;
2. Kabupaten atau Kota besar;
3. Kota ketjil, Desa dan lain-lainnja.

Propinsi merupakan daerah tingkat teratas dan langsung berada pula dibawah pengawasan pusat. Dalam prakteknja Pemerintah R.I. Kesatuan memperlakukan Kotapradja Djakarta Raja sebagai daerah swatantra yang sedjadar dengan propinsi menurut Undang-undang 1948/22 itu, Demikian pula Walikota Djakarta Raja

sebagai pedjabat pusat (pamongpradja) mempunyai kedudukan jang setingkat dengan para gubernur dari segenap propinsi diseluruh Indonesia.

Dan dalam hubungannja dengan kota-kota lainnja jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, Kotapradja Djakarta Raja selain mempunyai deradjat jang setingkat lebih atas dari pada Kota besar (dan bahkan 2 tingkat lebih atas dari pada Kota ketjil) berdasarkan Undang-undang 1948/22, djuga memiliki suatu kelainan tersendiri, jaitu kota swatantra ini merupakan satu-satunja daerah jang memakai sebutan „kotapradja”.

§ 4. PEMBAGIAN WILAJAH

Sebagai daerah djabatan dari pada Walikota Kepala Daerah Djakarta Raja, maka wilayah Kotapradja Djakarta Raja dibagi pula setjara administratif dalam satuan-satuan jang lebih ketjil, jaitu *kewedanaan* (dahulu district) jang dikepalai oleh seorang wedana, tiap-tiap kewedanaan dibagi dalam *ketjamatan* (onderdistrict) jang dipimpin oleh seorang tjamat, dan masing-masing ketjamatan dibagi lagi dalam *kelurahan-kelurahan*. Semuanya ada 6 kewedanaan, 20 ketjamatan dan 136 kelurahan.

Perintjian dari pada pembagian wilayah administratif itu ialah sebagai berikut : ¹⁵⁹⁾

Kewedanaan	Ketjamatan	Kelurahan
I. Pendjaringan.	1. Tjengkareng.	1. Kalideres.
		2. Pegadungan.
		3. Kamal.
		4. Benda.
		5. Tegal Alur.
		6. Kapuk.
		7. Kedaung Kaliangke.
		8. Tjengkareng.
	2. Pendjaringan.	9. Pendjaringan.
	3. Krukut.	10. Krukut.
		11. Angkeduri.
	4. Manggadua.	12. Manggadua.
		13. Kebondjeruk.
	5. Sawah Besar.	14. Kebon Kelapa.
		15. Pasar Baru/Gunung Sahari.

¹⁵⁹⁾ Diperoleh dari Daftar nama² Desa, Ketjamatan dan Kewedanaan dalam wilayah Kotapradja Djakarta Raja jang dikeluarkan oleh B.P.U.P. Kotapradja Djakarta Raja tg. 13-2-1956.

II. Tandjung Priuk.	6. Tandjung Priuk.	16. Tandjung Priuk.
		17. Djembatan Tinggi.
		18. Tjilintjing.
		19. Semper.
		20. Sunter.
III. Gambir.	7. Gambir.	21. Gambir.
		22. Menteng.
	8. Tanah Abang.	23. Tanah Abang.
		24. Karet.
	9. Petamburan.	25. Petodjo.
		26. Djati.
		27. Slipi.
		28. Palmerah.
IV. Matraman.	10. Matraman.	29. Solitude.
		30. Utan Kaju.
		31. Djati Rawamangun.
		32. Pisangan.
		33. Rawabangke.
	11. Senen.	34. Senen.
		35. Kemajoran.
	12. Salemba.	36. Salemba.
		37. Rawasari.
		38. Kramat.
		39. Tanah Tinggi.
	13. Pulogadung.	40. Djatinegara.
		41. Rawaterate.
		42. Petukangan.
		43. Penggilingan.
		44. Pegangsaan.
		45. Melaka.
		46. Pulogadung.
		47. Pondok Kelapa.
		48. Kalender.
		49. Durensawit.
		50. Pondokbambu.
		51. Tanah Delapanpuluh.
		52. Muara.
		53. Kampung Besar.
		54. Kampung Sumur.
V. Kebajoran.	14. Kebajoran.	55. Kebajoran.
		56. Tjipulir.
		57. Grogol Udik.
		58. Grogol Ilir.
		59. Senajan.
		60. Gandaria Ilir.

- | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | 61. Gandaria Udik. |
| | | 62. Pela Petogokan. |
| | | 63. Tjipete Ilir. |
| | | 64. Tjipete Udik. |
| | | 65. Pondok Pinang. |
| | | 66. Lebak Bulus. |
| | | 67. Tjilandak. |
| | | 68. Pondok Labuh. |
| | 15. Kebon Djeruk. | 69. Kebon Djeruk. |
| | | 70. Serengseng. |
| | | 71. Meruja Ilir. |
| | | 72. Meruja Udik. |
| | | 73. Kembangan. |
| | | 74. Kedoja. |
| | | 75. Duri. |
| | | 76. Djoglo. |
| | | 77. Kelapa Dua. |
| | | 78. Sukabumi Ilir. |
| | | 79. Sukabumi Udik. |
| VI. Kramatdjati. | 16. Kampung Melaju. | 80. Melaju Besar. |
| | | 81. Bukitdari. |
| | | 82. Bidaratjina. |
| | | 83. Balimeester. |
| | | 84. Matraman. |
| | 17. Mampang Prapatan. | 85. Mampang Prapatan. |
| | | 86. Mampang Tegal Parang. |
| | | 87. Bangka. |
| | | 88. Kuningan. |
| | | 89. Pantjoran. |
| | | 90. Kalibata Durentiga. |
| | | 91. Tjililitan Rawadjati. |
| | | 92. Pengadegan. |
| | | 93. Tjikoko. |
| | | 94. Kampung Dalem. |
| | | 95. Tjilandak. |
| | 18. Pasar Minggu. | 96. Serengseng Sawah. |
| | | 97. Ragunan. |
| | | 98. Djatipadang. |
| | | 99. Tjigandjur. |
| | | 100. Pasar Minggu. |
| | | 101. Kalibata Lenteng Agung. |
| | | 102. Lenteng Agung. |
| | | 103. Pedjaten. |
| | | 104. Djagakarsa. |
| | | 105. Tandjung Barat. |

19. Pasar Rebo

106. Makasar.
107. Kramatdjadi.
108. Tjipinang Melaju.
109. Dukuh.
110. Lobang Buaja.
111. Tjondet Balekambang.
112. Kampung Tengah.
113. Kampung Gedong.
114. Kampung Rambutan.
115. Kampung Susukan.
116. Tjidjantung.
117. Tjiratjas.
118. Gandaria Udik.
119. Kampung Tjeger.
120. Kampung Baru.
121. Bambu Apus.
122. Tjipajung.
123. Kelapa Dua.
124. Tjibubur.
125. Mundjal.
126. Kalimati.
127. Kampung Setu.
128. Tjilangkap.
129. Pondok Ranggon.
130. Tjawang.
131. Batuampar.
132. Kebonpala.

Ketjamatan jang ke-20 ialah Pulau Seribu. Ketjamatan ini meskipun namanja Pulau Seribu, tetapi djumlah pulau-pulaunja tidak sampai sebanjak itu, melainkan kira-kira hanjalah 300 buah, dengan luas seluruhnja kira-kira 10 kilometer persegi. Ketjamatan Pulau Seribu dibagi dalam 4 kelurahan, jaitu:

1. Kelurahan Pulau Panggang, pulau ini mendjadi pula tempat kedudukan tjamat;
2. Kelurahan Pulau Tidung;
3. Kelurahan Pulau Kelapa;
4. Kelurahan Pulau Ubi.

Untuk mengkoordinir tugas pekerdjaan dalam lapangan pemerintahan umum (pamongpradja) didalam wilayah Kotapradja Djakarta Raja seperti tersebut diatas, oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dibentuklah *Biro Pemerintahan Umum Pusat* (B.P.U.P.) Kotapradja Djakarta Raja. Kemudian

untuk lebih melantjarkan tugas pekerdjaan pemerintahan umum itu, maka dalam bulan Oktober 1957 diadakanlah 3 buah perwakilan Biro tersebut diatas untuk mendjalankan tugas-tugasnja diwilajah:¹⁶⁰⁾

1. *Djakarta Utara*, jang meliputi Kewedanaan-kewedanaan Pendjaringan dan Tandjung Priuk serta Ketjamatan Pulau Seribu;
2. *Djakarta Tengah*, jang meliputi Kewedanaan Gambir dan Kewedanaan Kebajoran;
3. *Djakarta Selatan*, jang meliputi Kewedanaan Matraman dan Kramatdjati.

§ 5. KOTABARU KEBAJORAN

Selain wilayah-wilayah bagian seperti telah diuraikan dalam § 4 diatas, masih ada lagi wilayah Kotabaru Kebajoran jang hingga kini statusnja belum ada kepastian.

Kotabaru Kebajoran itu mulai direntjanakan dan dibangunkan oleh Pemerintah Pre-federal dalam tahun 1948 untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan dikota Djakarta. Kalau pada masa pemerintahan Stad Batavia dalam tahun 1623 djumlah penduduk Kota Djakarta hanja 6000 djiwa,¹⁶¹⁾ maka dalam masa Gemeente Batavia pada tahun 1912 djumlah penduduk itu meningkat sampai 162.126 orang,¹⁶²⁾ kemudian menurut perhitungan tjatjah djiwa tahun 1930 tertjatat djumlah penduduk sebanjak 533.000 djiwa.¹⁶³⁾ Dalam tahun 1940 menurut taksiran djumlah penduduk Kota Djakarta telah mentjapai 700.000 djiwa dan pada tahun 1948 djumlah tersebut meningkat pula mendjadi 1.174.252 djiwa.¹⁶⁴⁾

Pada tahun 1948 itu, berdasarkan perhitungan bahwa untuk setiap rumah rata-rata mempunjai djumlah maksimum penghuni 6,5 djiwa, maka Kota Djakarta ditaksir mengalami kekurangan

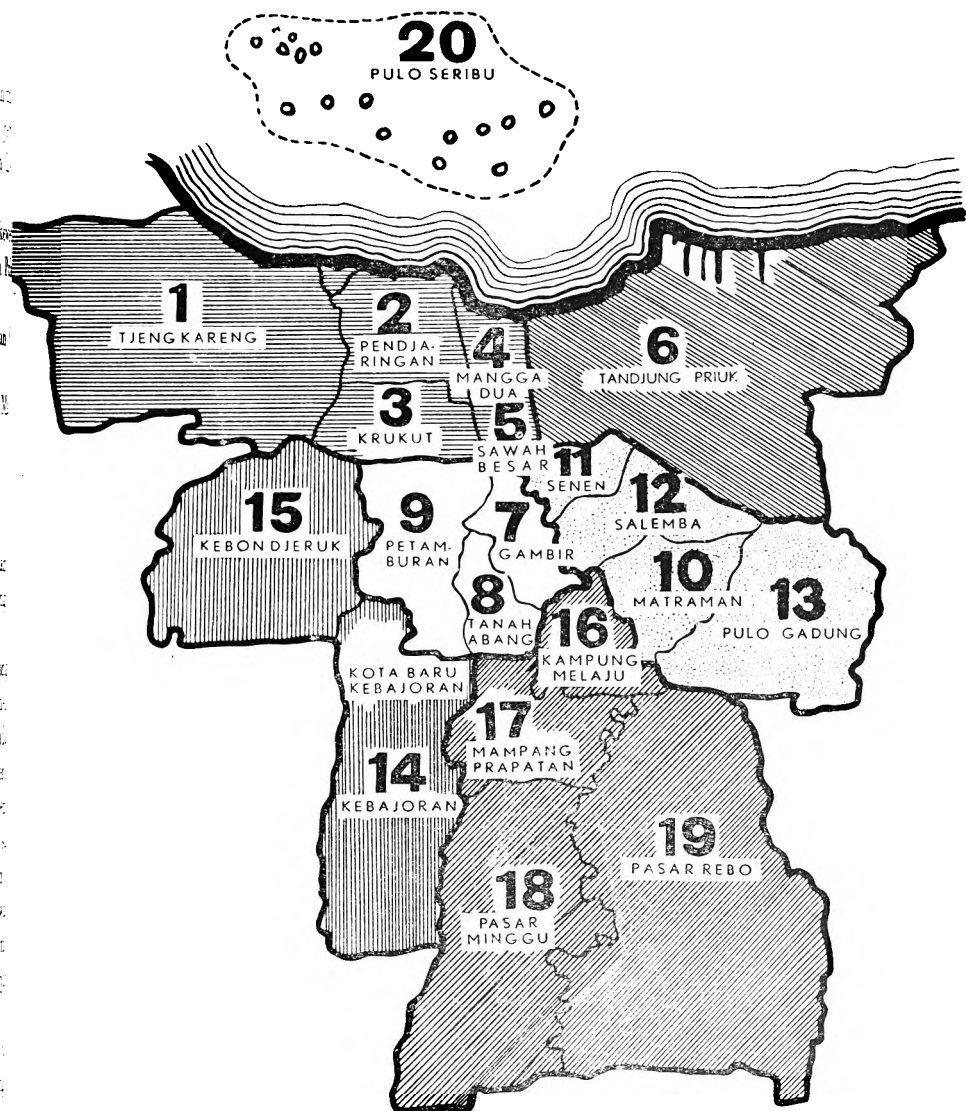
¹⁶⁰⁾ Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1957 no. U.P. 34/31/30.

¹⁶¹⁾ „Oud Batavia” katja 99.

¹⁶²⁾ Verslag van den toestand der Gemeente Batavia over 1912, katja 8.

¹⁶³⁾ „Urbanisasi Djakarta” (sebuah laporan berdasarkan suatu projek penjelidikan jang disarankan oleh Unesco dan dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masjarakat dari Fakultas Ekonomi di Djakarta, Universitas Indonesia; disusun d'bawah redaksi H.J. Heeren). Dimuat dalam Madjalah „Ekonomi dan Keuangan Indonesia”, tahun ke-8 no. 3 (Maret 1955), katja 112.

¹⁶⁴⁾ Buku „Djakarta Raja, keadaan dan pertumbuhannja”, katja 11. Diterbitkan oleh Kotapradja Djakarta Raja, 1 Djanuari 1953.



PEMBAGIAN ADMINISTRATIP DALAM WILAJAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA.

Garis tebal menundukkan batas² wilajah kewedanaan, sedang jang lebih tipis adalah batas² ketjamatan :

- I. Wilajah Kewedanaan Pendjaringan, meliputi 5 ketjamatan (no. 1 — 5).
dinjatakan dengan garis² mendatar;
- II. Wilajah Kewedanaan Tandjung Priuk dinjatakan dengan garis² menurun
kearah kanan;
- III. Wilajah Kewedanaan Gambir, meliputi 3 ketjamatan (no. 7 — 9);
- IV. Wilajah Kewedanaan Matraman, meliputi 4 ketjamatan (no. 10 — 13).
dinjatakan dengan tanda titik²;
- V. Wilajah Kewedanaan Kebajoran, meliputi 2 ketjamatan (no. 14 — 15).
dinjatakan dengan garis² tegak;
- VI. Wilajah Kewedanaan Kramatdjati, meliputi 4 ketjamatan (no. 16 — 19).
dinjatakan dengan garis² menurun kearah kiri.

perumahan sebanyak $\pm$ 80.000 (delapanpuluh ribu) buah. Untuk memetjahkan masalah itu timbullah idee untuk membangunkan sebuah kota satelit (satellietstad) di daerah onderdistrict Kebajoran Ilir jang terletak 4,5 kilometer disebelah Barat-daja dari Kota Djakarta. Setelah rentjana pembangunan Kota satelit Kebajoran itu disetudjui oleh pusat, maka dimulailah pelaksanaannja jang dilakukan oleh *Centrale Stichting Wederopbouw*, sebuah jajaan jang didirikan oleh Pemerintah dalam tahun 1948 itu djuga. Untuk mengurus pekerdjaan-pekerdjaan jang terletak di lapangan pemerintahan, sosial dan lain-lainnja jang tidak bersifat teknis, dibentuklah „*Kebajoran Commissie*” serta diangkat seorang „*Stedelijk Bestuursambtenaar*” (pegawai pamong-pradja). Kemudian pada permulaan Desember 1949 dirantjangkan sebuah ordonansi jang akan membentuk kota satelit itu sebagai suatu zelfstandige gemeenschap (daerah jang berdiri sendiri) dengan nama „*Stadsgemeenschap Kebajoran*”. Stadsgemeenschap ini hanja dimaksudkan sebagai fase peralihan sampai selesainya pembangunan kota tersebut seluruhnja, untuk kemudian dengan melihat perkembangannja ditentukan lebih landjut apakah Kota Kebajoran itu akan didjadikan suatu stadsgemeente tersendiri ataukah akan dimasukkan sadja kedalam lingkungan Stadsgemeente Batavia. Dengan terdjadinja pemulihan kedaulatan, rentjana pembentukan stadsgemeenschap itu tidak diteruskan oleh Pemerintah R.I.S. Dan kemudian waktu wilayah Kota Djakarta diperluas sehingga meliputi onderdistrict Kebajoran Ilir, maka wilayah Kotabaru Kebajoran lalu merupakan sebagian dari wilayah Kotapradja Djakarta Raja.¹⁶⁵⁾

Setelah pemulihan kedaulatan, Centrale Stichting Wederopbouw berganti nama mendjadi „*Jajasan Pemugaran Pusat*”. Tetapi kemudian dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1951 no. 65 Jajasan ini dilikwidir; semua hak milik dan hutang piutangnja diambil-alih oleh Pemerintah. Untuk melandjutkan pembangunan Kotabaru Kebajoran itu, oleh Kementerian Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga dibentuk suatu djawatan khusus jang dinamakan „*Djawatan Pekerdjaan Umum Kotabaru*

¹⁶⁵⁾ Hal ichwal pembentukan Kota satelit Kebajoran itu, terutama penjusunan organisasi pemerintahannja antara tahun 1948-1950 terdapat dalam karangan Drs. Jac. Zwier: „*De Opzet van het Bestuur van de satellietstad Kebajoran nabij Djakarta (1948-1950)*”, dimuat dalam Madjalah „*Indonesië*”, twee-maandelijks tijdschrift gewijd aan het Indonesisch cultuurgebied, vierde jaargang (1950-1951), katja 419-441.

Kebajoran", kemudian sedjak tanggal 1 Djanuari 1952 djawatan tersebut berganti nama mendjadi „*Pembangunan Chusus Kotabaru Kebajoran*” dan merupakan suatu organisasi dalam lingkungan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, jang berdiri sendiri dan mendjalankan suatu rangkaian pekerdjaan jang bulat serta mempunyai anggaran tersendiri. ¹⁶⁶⁾

Hingga dewasa ini Kotabaru Kebajoran itu masih dikuasai langsung oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan statusnja masih belum berketentuan, hanja untuk tugas pekerdjaan pemerintahan umum wilayah tersebut diperintah oleh seorang wedana. Dikandung maksud oleh Pemerintah Pusat bahwa dikedu- mudian hari setelah pembangunan kotabaru itu selesai seluruhnja dan diperlengkapi seperlunja, maka seluruh urusan dalam wilayah tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raja. ¹⁶⁷⁾

Walaupun pembangunan Kotabaru Kebajoran itu sedikit banjak mengurangi kekurangan perumahan jang diderita oleh Kotapradja Djakarta Raja, namun pembangunan itu semata-mata belum dapat memetjahkan masalah seluruhnja, karena djumlah penduduk Kota- pradja Djakarta Raja selalu bertambah, baik karena kelahiran mau- pun karena pemasukan penduduk baru. Menurut pendaftaran pen- duduk warganegara Indonesia jang dilakukan untuk keperluan pe- milihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, pada permulaan tahun 1957 tertjatat djumlah 1.832.716 djiwa. ¹⁶⁸⁾ Ini tidak termasuk bangsa asing dan penduduk jang tidak terdaftar atau jang tidak mempunyai kediaman tetap ataupun jang tinggal digubuk-gubuk liar-darurat, digerbong-gerbong kereta api, dikolong-kolong djem- batan, didalam pipa-pipa saluran air, dan lain-lainnja. Menurut penjelidikan bersama jang dilakukan oleh Bagian Statistik dari Kementerian Kesehatan dan Djawatan Kesehatan Kota serta ahli statistik dari World Health Organisation, maka menurut perhitun- gan dalam bulan Djanuari 1957 djumlah penduduk sipil diwilajah Kotapradja Djakarta Raja ialah 2,16 djuta. Dengan angka pertum- buhan jang sekarang ini baik karena kelahiran maupun migrasi,

¹⁶⁶⁾ Buku „Pembangunan Kotabaru Kebajoran”, katja 17-18. Diterbitkan oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga Republik Indonesia, Djakarta Djuni 1953.

¹⁶⁷⁾ Idem tjatatan 166 diatas, katja 58.

¹⁶⁸⁾ Surat Panitia Pemilihan Daerah Kotapradja Djakarta Raja kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Djanuari 1957 no. 72/XII/PPD/57.

maka 10 tahun kemudian (1967) djumlah penduduk itu ditaksir akan mendjadi 3,1 sampai 3,3 djuta, dan pada tahun 1977 djumlah penduduk Kotapradja Djakarta Raja akan mentjapai 4,1 sampai 4,8 djuta. ¹⁶⁹⁾ Dengan demikian maka dengan pembangunan perumahan jang seperti sekarang ini, kekurangan perumahan telah dan akan mendjadi semakin besar.

§ 6. DEWAN PERWAKILAN KOTA SEMENTARA

Dalam zaman Republik Indonesia Kesatuan, aparatatur pemerintahan jang tertinggi dari Kotapradja Djakarta Raja masih tetap Dewan Perwakilan Kota Sementara. Mendekati achir tahun 1950 masih djuga belum dapat diadakan pemilihan untuk membentuk suatu Dewan Perwakilan Kota jang baru. Untuk menghindarkan adanja lowongan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Djakarta, maka dengan keputusan Presiden R.I. tanggal 27 Desember 1950 no. 69, ¹⁷⁰⁾ djangka waktu duduk jang telah ditetapkan hingga achir tahun 1950 diperpanjang lagi, tetapi sekarang untuk waktu jang tidak ditentukan, jaitu diperpanjang dengan suatu djangka waktu jang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan atas persiapan-persiapan penjelenggaraan pemilihan umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Kota tersebut. Dewan Perwakilan Kota Sementara jang dibentuk pada zaman R.I.S. itu ternyata sifatnja tidak sementara sebagaimana disebutkan dalam namanja, karena dapat mentjapai umur selama 6½ tahun, jaitu sampai tanggal 31 Agustus 1956.

Selama djangka waktu itu terdjadi perubahan dalam susunannja. Pada tahun 1954 Pemerintah berpendapat bahwa djumlah anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara sebanjak 25 orang itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik jang terdjadi diibu-kota itu, sehingga djumlah anggota itu perlu ditambah agar dengan demikian Dewan tersebut dapat lebih mentjerminkan keadaan dan

¹⁶⁹⁾ „Rentjana Pendahuluan untuk Kota Djakarta/Outline Plan for the City of Djakarta” (sebuah laporan sebagai pendahuluan dari pada Master Plan jang dimaksudkan untuk mengatur perkembangan dan perbaikan Kota Djakarta, disusun oleh ahli perentjana kota Kenneth Watts dari United Nations Technical Assistance Administration dengan bekerdja sama dengan Ir. R.S. Danunagoro dan Ir. L. O'Brien dari Djawatan Pekerdjaan Umum Kotapradja Djakarta Raja), katja 5 dan 10. Diterbitkan oleh Djawatan Pekerdjaan Umum Kotapradja Djakarta Raja, Nopember 1957.

¹⁷⁰⁾ Berita Negara 1951 no. 1.

aliran-aliran dalam masyarakat di Kotapradja Djakarta Raja. Demikianlah dengan keputusan Presiden tanggal 18 Djuni 1954 no. 124, djumlah anggota Dewan tersebut ditambah dengan 35 anggota baru sehingga semuanya berdjumlah 60 orang. Penambahan itu dilakukan dengan pengangkatan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Dewan Menteri menetapkan pembagian djumlah tambahan anggota untuk tiap-tiap partai politik dan organisasi massa yang mempunyai tjabang diwilayah Kotapradja Djakarta Raja menurut perimbangan yang lajak. ¹⁷¹⁾)

Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Djuli 1954 no. Des. 2/8/39 diangkatlah 35 orang anggota baru, yaitu : ¹⁷²⁾)

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. MR. HARDI | dari P.N.I.; |
| 2. HUSIN KARTASASMITA | dari P.N.I.; |
| 3. DR. MURSITO | dari P.N.I.; |
| 4. MOH. HUSIN | dari P.N.I.; |
| 5. NJ. SUPENI PUDJOBUN-
TORO | dari P.N.I.; |
| 6. R.A. HASBULLAH | dari N.U.; |
| 7. K.H. RADJIPUN | dari N.U.; |
| 8. H. HUSIN SALEH | dari N.U.; |
| 9. R. RUDJITO | dari Parindra; |
| 10. GANDASUPENA | dari Parindra; |
| 11. R. KAPRAWI | dari Parindra; |
| 12. SUMARDI | dari P.K.I.; |
| 13. NJ. SUKONI | dari P.K.I.; |
| 14. HASAN RAID | dari P.K.I.; |
| 15. M. MOH. TOHIR SURJO-
ATMODJO | dari P.I.R.; |
| 16. NGADIKUN | dari P.I.R.; |
| 17. R. MOH. ICKSAN | dari P.I.R.; |
| 18. SURWENDA KARTADI-
SASTRA | dari P.R.N.; |
| 19. SUPADI WIROSASMITO | dari P.R.N.; |
| 20. MOH. SAAT | dari P.R.N.; |
| 21. OTTO NATAMIHARDJA | dari P.S.I.I.; |
| 22. NJ. ARUDJI KARTAWI-
NATA | dari P.S.I.I.; |

¹⁷¹⁾ Lihat Berita Negara 1954 no. 53.

¹⁷²⁾ Berita Negara 1954 no. 57.

- | | |
|--|---|
| 23. SAIRAN | dari P.S.I.I.: |
| 24. BAHERAMSJAH SUTAN
INDRA | dari Partai Buruh: |
| 25. J.H. JACOB | dari Partai Buruh: |
| 26. H. ZAINUDDIN | dari Barisan Tani: |
| 27. ATMO SUPENO | dari Barisan Tani: |
| 28. NJ. SH. SAID SURJODI-
NOTO | dari Partai Wanita Rakjat; |
| 29. S. WIDJAJA | dari Partai Rakjat Indonesia; |
| 30. DR. W. HUTAGALUNG | dari Serikat Kerakjatan Indone-
sia: |
| 31. TJIA DJI SIONG | dari Partai Katholik: |
| 32. MR. J. POELOENGAN | dari Parkindo: |
| 33. SUPARTO | dari Persatuan Rakjat Marhaen
Indonesia: |
| 34. TUBAGUS ILJAS ANGKA-
WIDJAJA alias ILJAS SAS-
MITA | dari Partai Kebangsaan Indone-
sia: |
| 35. MOH. DJUNED ARIFIN | dari Pergerakan Tarbijah Isla-
mijah. |

Penambahan djumlah anggota Dewan tersebut diatas mendapat sanggahan dari beberapa pihak dalam Dewan Perwakilan Kota Sementara, terutama dari fraksi Masjumi jang berpendapat bahwa tjara jang dipakai oleh Pemerintah untuk menambah djumlah anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara itu merupakan suatu demonstrasi machtpolitik dan mengindjak-indjak asas-asas demokrasi, oleh karena itu fraksi tersebut tidak dapat menjetudjui penambahan 35 anggota baru itu. Sebagai kelandjutan dari pendirian tersebut, fraksi Masjumi dalam Dewan Perwakilan Kota Sementara dengan suratnja tertanggal 8 Djuli 1954 no. 150/P.M./54 menjatakan bahwa anggota-anggota fraksi tersebut berada dalam keadaan non-aktif sampai kepada suatu masa dimana Masjumi jakin adanja langkah-langkah Pemerintah kearah pemulihan demokratisering pada Dewan Kota itu. Kemudian dengan terdjadinja perkembangan-perkembangan politik jang baru, tindakan non-aktif itu dihentikan dan mulai tanggal 13 Agustus 1955 para anggota fraksi Masjumi

dalam Dewan Perwakilan Kota Sementara kembali aktif menjalankan tugas kewadjabannja seperti sediakala.¹⁷³⁾

Dalam perkembangan selandjutnja susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Kota Sementara itu mengalami pula beberapa perubahan karena adanya mutasi-mutasi. Pada tanggal 1 Oktober 1955 diangkat anggota-anggota baru **MR. USEP RANAWIDJAJA** dan **DR. SUPARMO** dari P.N.I. untuk menggantikan 2 anggota fraksi tersebut yang mengundurkan diri. Kemudian mulai tanggal 30 Oktober 1955 duduk 2 anggota baru lainnja dari N.U., jaitu **MOH. MAS-SERIE** dan **SAPI-IE**.¹⁷⁴⁾

Dalam menjalankan tugas kewadjabannja itu, Dewan Perwakilan Kota Sementara djuga membentuk komisi-komisi seperti halnja stadsgemeenteraad dahulu. Tetapi kemudian selain itu dibentuk pula *seksi-seksi Dewan* yang sifatnja seperti sematjam komisi yang permanen terdiri dari pada para anggotanja sendiri. Tugas seksi-seksi tersebut ialah :

- a. mengumpulkan bahan-bahan untuk didjadikan usul yang diadjukan kepada Dewan dengan perantaraan Badan Pemerintahan Harian guna kepentingan masjarakat Kota Djakarta pada umumnja dan rumah tangga Kotapradja pada chususnja;
- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai soal-soal yang diadjukan kepada Dewan oleh Badan Pemerintahan Harian.¹⁷⁵⁾

Seksi-seksi Dewan itu dibedakan dalam beberapa matjam menurut urusan-urusan yang termasuk dalam lingkungan tugas pekerdjaannja masing-masing. Pada permulaannja dibentuk 4 matjam seksi, jaitu :¹⁷⁶⁾

1. Seksi Ekonomi dan Keuangan;
2. Seksi Planologi, Tehnik dan Agraria;
3. Seksi Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan Agama;
4. Seksi Sosial dan Perburuhan.

¹⁷³⁾ Surat Dewan Pimpinan Wilayah Masjumi Djakarta Raja tanggal 13-8-1955 no. 252/Sek-WI-XIII/55 kepada Ketua Dewan Perwakilan Sementara Kota-pradja Djakarta Raja tentang hal mengaktifkan anggota Masjumi dalam DPKS.

¹⁷⁴⁾ Madjalah Kotapradja, nomor istimewa — Agustus 1957. Katja 9. Diterbitkan oleh Djawatan Penerangan Kotapradja Djakarta Raja.

¹⁷⁵⁾ Idem Madjalah Kotapradja diatas, katja 8.

¹⁷⁶⁾ Surat pemberitahuan Walikota Djakarta Raja tanggal 13 Nopember 1951 no. 32330/1.

Kemudian setelah ada penambahan 35 anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara yang baru, dalam rapat Dewan tersebut tanggal 29 Djuli 1954 ditetapkan pembentukan 7 seksi, jaitu : ¹⁷⁷⁾

1. Seksi Perundang-undangan;
2. Seksi Pekerdjaan Umum;
3. Seksi Kesehatan;
4. Seksi Kehewan, Peternakan dan Pertanian;
5. Seksi Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan dan Agama;
6. Seksi Perekonomian dan Keuangan;
7. Seksi Sosial dan Perburuhan.

§ 7. BADAN PEMERINTAHAN HARIAN

Seperti djuga halnya dengan Dewan Perwakilan Kota Sementara, maka Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta Raja yang dibentuk dalam zaman R.I.S. masih tetap berlangsung dan masa duduknya djuga diperpanjang sesuai dengan masa duduk Dewan itu. Selama itu terdjadi pula pergantian susunan keanggotaannya.

Mulai tanggal 2 April 1951 para anggota Badan Pemerintahan Harian yang diangkat pada zaman R.I.S. (tidak termasuk anggota Walikota) diganti dengan yang baru, sehingga susunan Badan itu menjadi sebagai berikut :

1. Walikota (Suwirjo);
2. Mr. R. Suwahjo;
3. M.A.L. Tobing;
4. J. Hutagalung;
5. Z. Arifin Tanamas.

Dalam bulan September tahun 1951 itu djuga, terdjadi lagi pergantian terhadap susunannya, sehingga lalu terdiri dari :

1. Walikota;
2. Mr. R. Suwahjo (kemudian dalam bulan Maret digantikan oleh Supranoto);
3. Z. Arifin Tanamas;
4. D.M. Janur;
5. Sardjono.

Setelah anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara ditambah menjadi 60 orang, maka diadakan perubahan lagi terhadap

¹⁷⁷⁾ Surat Walikota Djakarta Raja tanggal 3 Agustus 1954 no. 13240/U.U.

susunan Badan Pemerintahan Harian, kini mendjadi sebagai berikut :

1. Walikota;
2. Supranoto;
3. Abdul Rasjid;
4. D.M. Janur;
5. Rudjito.

Perubahan susunan keanggotaan Badan Pemerintahan Harian jang terachir terdjadi pada tanggal 14 Nopember 1955, sesudah tanggal tersebut jang merupakan Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta Raja ialah : ¹⁷⁸⁾

1. Walikota;
2. Supranoto (Wakil ketua I);
3. Moh. Masserie (Wakil ketua II);
4. Abdul Rasjid;
5. Z. Arifin Datuk.

Badan Pemerintahan Harian mendjalankan tugas pemerintahan daerah sehari-hari jang menurut S.G.O. dan peraturan-peraturan lainnja dahulu pada masa pemerintahan Stadsgemeente Batavia dilakukan oleh College van Burgemeester en Wethouders. Didaerah-daerah lain jang berdasarkan Undang-undang 1948 no. 22 dan Staatsblad Indonesia Timur 1950 no. 44 tugas pemerintahan harian itu didjalankan oleh badan jang dinamakan „Dewan Pemerintah Daerah”. Kotapradja Djakarta Raja tidak mempergunakan istilah jang seragam itu karena dalam keputusan Presiden 1950 no. 114 ditjantumkan istilah „Badan Pemerintahan Harian” itu, jang sebetulnja tidak lain dari pada terdjemahan perkataan „College van dagelijks bestuur” jang dipergunakan pada masa pemerintahan Pre-federal.

§ 8. W A L I K O T A

Pada zaman Republik Indonesia Kesatuan sampai bulan April 1951 fungsi Walikota Djakarta Raja masih tetap didjabat oleh Suwirjo. Kemudian dengan terbentuknja Kabinet Sukiman-Suwirjo dalam mana Suwirjo mendjadi wakil perdana menteri, maka pada tanggal 2 Mei 1951 Suwirjo meletakkan djabatannja. Djabatan Wali-

¹⁷⁸⁾ „Perselah Tahunan Kotapradja Djakarta Raja 1955”, katja 39.
Diterbitkan oleh Kotapradja Djakarta Raja.

kota Djakarta Raja untuk sementara lalu dipegang oleh seorang pemangku djabatan, jaitu Mr. Suwahjo Sumodilogo (anggota Badan Pemerintahan Harian). Kemudian oleh Dewan Perwakilan Kota Sementara setelah diadakan pemilihan, lalu diadjudkan 4 orang tjalon walikota kepada Menteri Dalam Negeri, jaitu Mr. Moh. Roem, Sjamsuridzal, Jahja Malik dan Dr. Buntaran. Dari antara keempat tjalon itu, **SJAMSURIDZAL**-lah yang diangkat sebagai Walikota Djakarta Raja. Pada tanggal 29 Djuni 1951 dilangsungkan upatjara timbang terima djabatan itu dari tangan acting walikota kepada walikota yang baru. Sjamsuridzal memegang djabatan walikota tersebut sampai tanggal 8 Desember 1953. Pada tanggal tersebut Sjam-suridzal digantikan oleh **SUDIRO** yang dalam bulan Nopember 1953 oleh Pemerintah diangkat sebagai Walikota Djakarta Raja.

Mengenai fungsi Walikota Djakarta Raja, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang darurat 1950 no. 20 dan keputusan Presiden 1950 no. 114 masih tetap merupakan djabatan yang dualistis, jaitu pedjabat tersebut disatu pihak merupakan organ daerah dengan kedudukan sebagai ketua merangkap anggota dalam Dewan Perwakilan Kota Sementara maupun Badan Pemerintahan Harian, dipihak lain merupakan pedjabat Pemerintah Pusat dengan kedudukan sebagai Kepala Daerah setingkat dengan gubernur atas wilayah Kotapradja Djakarta Raja dan langsung bertanggung-djawab kepada Menteri Dalam negeri. Dalam menjalankan tugas kekuasaanja sebagai pedjabat pamongpradja yang tertinggi untuk lingkungan wilayah Kotapradja Djakarta Raja itu, Walikota Djakarta Raja dibantu oleh residen, bupati dan patih diperbantukan serta para wedana, tjamat dan lurah dibawahnja yang mengepalai wilayah-wilayah bagian.

Walaupun Walikota Djakarta Raja berkedudukan setingkat dengan gubernur didaerah-daerah propinsi, tetapi Walikota tersebut tidak mempunyai kekuasaan dalam lapangan kepolisian, karena seperti telah diura'kan, dalam Undang-undang darurat 1950 no. 20 kekuasaan kepolisian (dan militer) yang dipegang oleh gubernur Gewest Batavia en Ommelanden tidak diserahkan kepada Walikota Djakarta Raja, padahal dalam pertumbuhan Kotapradja Djakarta Raja diwaktu-waktu kemudian ternyata bahwa banyak dilakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerahnja, dan dalam hal itu Kotapradja Djakarta Raja tidak dapat mengambil tindakan-tindakan yang semestinja karena tidak adanya tjukup aparat ke-

pegawain jang mempunjai wewenang kepolisian, djadi pembela-peliharaan peraturan-peraturan daerah Kotapradja Djakarta Raja semata-mata digantungkan kepada polisi negara jang djuga sudah sangat repot dengan tugasnja membela-pelihara peraturan perundangan pusat sendiri. Oleh karena itu dalam masa djabatan Walikota Sudiro, oleh Dewan Perwakilan Kota Sementara diadakan desakan kepada Pemerintah Pusat agar kekuasaan kepolisian dari gubernur Gewest dahulu diserahkan kepada Walikota Djakarta Raja agar dengan demikian penjelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pelaksanaan semua keputusan dan peraturannja dapat mendjadi lebih sempurna.

Desakan Dewan Perwakilan Kota Sementara tersebut diatas dipenuhi. Dalam bulan Pebruari 1956 Undang-undang darurat 1950 no. 20 dari R.I.S. dahulu diubah seperlunja. Pada kesempatan itu sekaligus undang-undang darurat tersebut ditetapkan mendjadi suatu undang-undang biasa, jaitu sebagai *undang-undang tahun 1956 no. 1* (dimuat dalam Lembaran Negara 1956 no. 2, dengan memori pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 941).

Mengenai segi otonominja, jaitu ketentuan jang mengatur kedudukan Kotapradja Djakarta Raja sebagai daerah swatantra jang langsung dibawah Pemerintah Pusat, Undang-undang 1956 no. 1 itu tidak berbeda dengan Undang-undang darurat 1950/20, hanya mengenai pasalnja jang mengatur tugas kekuasaan Walikota Djakarta Raja, maka disebutkan bahwa kepada pedjabat itu diserahkan semua kekuasaan gubernur Gewest Batavia en Ommelanden dahulu ketjuali kekuasaan militernja, djadi kekuasaan kepolisian kini diberikan djuga kepada Walikota Djakarta Raja. Dengan adanja kekuasaan jang baru itu, maka Walikota Djakarta Raja berwenang membentuk sebuah aparat kepolisian jang disebut „*Onbezoldigde Politie-ambtenaren*” sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1940 no. 208, 395 dan 511.

Demikianlah dengan keputusannja tanggal 2 Maret 1956 no. U.P. 6/3/Pem., Walikota Sudiro mengangkat 212 pegawai kepolisian itu dari antara para pegawai Kotapradja Djakarta Raja sendiri. Dalam surat keputusan itu ditentukan bahwa daerah kekuasaan kepolisian dari para pegawai itu meliputi wilajah Kotapradja Djakarta Raja. Kekuasaan kepolisian para pegawai jang ditundjuk itu hanya terbatas kepada *pengusutan pelanggaran* dari peraturan-peraturan jang ditentukan bagi masing-masing pegawai

itu (onbezoldigd politieambtenaar met beperkte politiebevoegdheid). Dalam menjalankan tugasnya itu mereka berada dibawah pengawasan dan pimpinan Walikota dan Kepala Polisi Djakarta dan Daerah Sekitarnya (pembesar polisi pusat). Para pegawai Kotapradja jang diangkat sebagai pegawai dengan wewenang kepolisian itu tidak menerima gadji tambahan untuk tugasnya jang baru itu, melainkan tetap menerima gadji seperti sediakala waktu masih merupakan pegawai daerah biasa, oleh karena itu menurut peraturan dasar pembentukannya mereka disebut „onbezoldigde politieambtenaren” (pegawai polisi tak bergadji), tetapi kemudian mereka diberi nama jang lebih baik jaitu „*Pegawai Petugas Kepolisian Kotapradja Djakarta Raja*”. Selandjutnja dengan keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara tanggal 24 Djuli 1956 no. 11/D.K. ditentukan pula bentuk dan warnanya pakaian seragam bagi para pegawai petugas kepolisian Kotapradja itu. ¹⁷⁹⁾

Selain penjerahan kekuasaan kepolisian tersebut diatas, kepada Walikota Djakarta Raja dengan keputusan Menteri Sosial tanggal 4 Mei 1953 no. Kab. 10-6-42/1236 telah diserahkan pula kekuasaan pengawasan dan pertanggungungan djawab atas Urusan Perumahan Djakarta Raja. ¹⁸⁰⁾

Selandjutnja Walikota Djakarta Raja mempunyai pula tugas dalam lapangan keamanan untuk wilajah Djakarta Raja jaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1955 no. 14 tentang Dewan Keamanan. Menurut Peraturan Pemerintah itu maka untuk wilajah Djakarta Raja diadakan sebuah badan jang disebut „*Koordinasi Keamanan Daerah*” dengan tugas memberi pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam hal menetapkan kebidjaksanaan mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta menjelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara dalam lapangan itu. Koordinasi Keamanan Daerah Djakarta Raja itu terdiri atas Walikota Djakarta Raja, Komandan Militer Kota Besar Djakarta Raja, Kepala Polisi Djakarta Raja dan Sekitarnya dan Pengawas Kedjaksanaan Daerah Djakarta Raja. Dalam keadaan normal Walikota Kepala Daerah mendjadi ketua merangkap anggota badan tersebut, sedang dalam keadaan perang atau darurat perang jang mendjadi ketuanja ialah Komandan Militer, sedang Walikota

¹⁷⁹⁾ Berita Negara 1957 no. 73, tambahan no. 51.

¹⁸⁰⁾ Tambahan Lembaran Negara no. 400.

Djakarta Raja hanya menjadi anggota Koordinasi Keamanan Daerah itu. ¹⁸¹⁾

§ 9. PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

Dalam tahun 1955 sendi pokok demokrasi telah dapat dilaksanakan di Indonesia, jaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen) pada tanggal 29 September 1955. Ditingkatkan pusat telah dapat dibentuk Dewan yang mewakili rakjat Indonesia dengan jalan pemilihan yang demokratis, tetapi di daerah-daerah swatantra (termasuk Kotapradja Djakarta Raja) belum dapat dilaksanakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, karena peraturan-peraturan pemilihannya belum selesai disiapkan, padahal mulai tanggal 1 Djuli 1956 dibanjak daerah swatantra terdapat kekosongan demokrasi dan berlangsung pemerintahan tunggal yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Pemerintah berpendapat bahwa hasil pemilihan umum dalam bulan September 1955 itu telah dapat menggambarkan dan mentjerminkan aliran-aliran yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu oleh pusat lalu dikeluarkan Undang-undang 1956 no. 14 ¹⁸²⁾ yang mengatur pembentukan *Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan* di daerah-daerah berdasarkan perimbangan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen) yang baru lalu di daerah itu masing-masing. Djadi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan (D.P.R.D.P.) akan terdiri atas wakil-wakil dari partai/organisasi yang telah ikut dalam pemilihan umum untuk Parlemen dan jumlah wakil dari masing-masing partai/organisasi itu ditentukan berdasarkan perimbangan suara yang telah diperolehnya di daerah yang bersangkutan.

Djumlah anggota D.P.R.D.P. di tiap-tiap daerah ditentukan oleh Menteri Dalam Negara dengan mengingat jumlah penduduk dan luas daerah yang bersangkutan serta dengan pembatasan sebagai berikut:

- a. bagi daerah propinsi atau daerah yang setingkat sebanyak-banyaknya 60 dan sekurang-kurangnya 30 anggota;

¹⁸¹⁾ Lihat pasal 3 P.P. tersebut (Lembaran Negara 1955 no. 23, Tambahan L.N. no. 788).

¹⁸²⁾ Lembaran Negara 1956 no. 30: memori penjelasan dalam Tambahan L.N. no. 1017. Undang-undang 1956/14 itu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 4 Djuli 1956 dan mulai berlaku (surut) pada tanggal 1 Djuli 1956.

- b. bagi daerah kabupaten atau daerah jang setingkat sebanjak-banjaknja 30 dan sekurang-kurangnja 15 anggota;
- c. bagi daerah kota ketjil sebanjak-banjaknja 15 dan sekurang-kurangnja 10 anggota (Undang-undang 1956/14 tersebut pasal 4).

D.P.R.D.P. bubar sesudah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar pemilihan umum dilantik, akan tetapi selambat-lambatnja 1 tahun sesudah Undang-undang 1956/14 itu diundangkan. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 17 Djuli 1956, djadi masa duduk sesuatu D.P.R.D.P. selambat-lambatnja hanja sampai tanggal 17 Djuli 1957. Akan tetapi kemudian djangka waktu 1 tahun itu dihapuskan karena tidak ada daerah jang dapat membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan djalan pemilihan sebelum tanggal 17 Djuli 1957, selandjutnja hanja ditetapkan bahwa masa duduk D.P.R.D.P. ialah sampai dilantiknja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar pemilihan umum. ¹⁸³⁾

Demikianlah berdasarkan undang undang tersebut diatas, oleh Menteri Dalam Negeri dikeluarkanlah Peraturan Menteri tanggal 19 Djuli 1956 no. 5 jang menetapkan djumlah anggota D.P.R.D.P. dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan bagi Kotapradja Djakarta Raja. Menurut peraturan itu, djumlah anggota D.P.R.D.P. Kotapradja Djakarta Raja (termasuk Walikota jang mendjadi ketua merangkap salah seorang anggotanja) ialah 45 orang, sedang Dewan Pemerintah Daerah Peralihannja terdiri dari 6 orang termasuk Walikota. Dengan ini maka terdjadi perubahan terhadap aparatur pemerintahan Kotapradja Djakarta Raja, disatu pihak djumlah anggota dewannja mendjadi lebih ketjil (dari 60 anggota diperketjil mendjadi 45 anggota) dan dipihak lain djumlah anggota dari aparatur jang mendjalankan pemerintahan daerah sehari-hari mendjadi lebih besar (dari 5 bertambah mendjadi 6 orang). Demikian pula sedjak saat itu Kotapradja Djakarta Raja memakai istilah jang seragam dengan daerah-daerah lainnja untuk menjebut aparatur pemerintahannja, istilah „Dewan Perwakilan Kota Sementara” dan „Badan Pemerintahan Harian” tidak lagi dipergunakan.

Setelah segala persiapan jang dilakukan oleh sebuah Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Kotapradja Djakarta Raja selesai, maka dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Agustus 1956 no. Des. 2/9/13 diangkat-

¹⁸³⁾ Perpendjangan masa duduk itu ditetapkan dalam Undang-undang darurat 1957 no. 9 (L.N. 1957 no. 51, pendjelasan dalam T.L.N. no. 1275).

lah 44 anggota D.P.R.D.P. Kotapradja Djakarta Raja, sebagai pengganti dari Dewan Perwak'lan Kota Sementara, jaitu:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. ABDULLAH SALIM | dari Masjumi; |
| 2. EMAN SAR'AN | dari Masjumi; |
| 3. GAZALI SJAHLAN | dari Masjumi; |
| 4. JUNUS RACHMAN | dari Masjumi; |
| 5. K. HADJI MIAN | dari Masjumi; |
| 6. HADJI MAHMOED | dari Masjumi; |
| 7. MOH. DJAELANI | dari Masjumi; |
| 8. MOH. JUNUS | dari Masjumi; |
| 9. NURDIN HARUN | dari Masjumi; |
| 10. HADJI RACHMATULLAH | dari Masjumi; |
| 11. NJ. SJAMSINAR ACHMAD | dari Masjumi; |
| 12. SUPRANOTO | dari P.N.I.; |
| 13. DR. SUPARMO | dari P.N.I.; |
| 14. M. HUSIN | dari P.N.I.; |
| 15. SUTEDJO DIRDJOSUBROTO | dari P.N.I.; |
| 16. SAPRIE | dari P.N.I.; |
| 17. NUR SUTAN ISKANDAR | dari P.N.I.; |
| 18. NJ. RATJIH NATAWIDJAJA | dari P.N.I.; |
| 19. H. SITORUS | dari P.N.I.; |
| 20. RENDUSARA | dari P.N.I.; |
| 21. K.A. BAIDHAWI TAFSIR | dari N.U.; |
| 22. HASAN BASRI | dari N.U.; |
| 23. SAPI-IE | dari N.U.; |
| 24. MOH. MASSERIE | dari N.U.; |
| 25. NJ. A. WAHID HASJIM | dari N.U.; |
| 26. K.H.A. SJAKUR CHAIRI | dari N.U.; |
| 27. HARUN ALRASJID FATULLAH | dari N.U.; |
| 28. NIZAR KAMIN | dari P.K.I.; |
| 29. SUMARDI | dari P.K.I.; |
| 30. HASAN RAID | dari P.K.I.; |
| 31. NJ. CHADINAR BACHTARUDDIN | dari P.K.I.; |
| 32. SUDADI | dari P.K.I.; |
| 33. SALAM | dari P.K.I.; |
| 34. TAUCHID ABDUL MURAD | dari P.S.I.; |
| 35. MR. PAUL ANWAR HAKIM | dari P.S.I.; |
| 36. DR. TAN ENG TIE | dari Baperki; |
| 37. DR. LIE TJWAN SIEN | dari Baperki; |

- | | |
|---|---|
| 38. ABDUL RASJID | dari P.S.I.I.; |
| 39. MR. JANIO PULUNGAN | dari Parkindo; |
| 40. G.M. PARERA | dari Partai Buruh; |
| 41. R. SUGIRMAN | dari Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia; |
| 42. NJ. S.M. MUHARAM WIRANATA-
KUSUMAH | dari Persatuan Pegawai
Polisi R.I.; |
| 43. A. SADJURI | dari Partai Katholik; |
| 44. L. ST. DAWANIS | dari Murba Pembela
Proklamasi; |

Sebagai ketua merangkap salah seorang anggotanja dari D.P.R.D.P. itu masih tetap Walikota Kepala Daerah Djakarta Raja jang dijabat oleh Sudiro. Hal ini menjimpang pula dengan keadaan didaerah-daerah lainnja dimana djabatatan Ketua D.P.R.D.P. itu tidak dipegang oleh Kepala Daerah, melainkan oleh seseorang lain jang diangkat/dipilih oleh dan dari para anggota Dewan itu sendiri.

Pada tanggal 31 Agustus 1956 d'lantiklah para anggota D.P.R.D.P. Kotapradja Djakarta Raja itu, dan pada tanggal 3 September kemudian lalu dibentuklah Dewan Pemerintah Daerah Peralihan atas dasar perwakilan berimbang diantara partai/organisasi jang duduk dalam D.P.R.D.P. itu. Sebagai 5 orang anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan disampingnja Walikota Kepala Daerah Sudiro jang mendjadi Ketua merangkap salah seorang anggotanja dari badan tersebut, terpilihilah :

1. Supranoto;
2. Moh. Masserie;
3. Gazali Sjahlan;
4. Sumardi;
5. Moh. Junus.

Pembentukan D.P.R.D. dan D.P.D. Peralihan tersebut diatas tidak mempengaruhi berlangsungnja peraturan perundangan jang telah mendjadi dasar hukum dari pemerintahan daerah Kota Djakarta hingga saat itu. Kotapradja Djakarta Raja menjelenggarakan hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnja tetap berdasarkan S.G.O., Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java dan Undang-undang 1956 no. 1.

Dalam menjalankan tugas kewajibannja, D.P.R.D.P. Kota-

pradja Djakarta Raja membentuk pula pelbagai seksi dewan, jaitu : ¹⁸⁴⁾

1. Seksi Pekerdjaan Umum;
2. Seksi Perekonomian dan Keuangan;
3. Seksi Sosial dan Perburuhan;
4. Seksi P.P.K. dan Agama;
5. Seksi Kesehatan, Kehewanan dan Pertanian.

Menurut peraturan tatatertib rapat Dewan jang baru ¹⁸⁵⁾ ditentukan bahwa hak dan kewadajiban seksi-seksi itu ialah :

- a. memelihara dan mempererat hubungan antara Dewan dengan D.P.D., antara lain dengan djalan mengadakan rapat bersama;
- b. memperhatikan kebidjaksanaan D.P.D. dalam melaksanakan hal-hal jang termasuk urusan seksi-seksi;
- c. memperhatikan kesulitan-kesulitan D.P.D. dalam mendjalankan peraturan-peraturan; dimana perlu memberikan bantuan kepada D.P.D.;
- d. mendengarkan suara rakjat dan memperhatikan surat-surat jang disampaikan kepada Dewan tentang masalah-masalah jang timbul dalam pemerintahan Kotapradja;
- e. melakukan penjelidikan tentang peristiwa-peristiwa penting, baik atas kehendak seksi sendiri maupun atas keputusan Dewan;
- f. memadjukan usul-usul dan laporan-laporan kepada Dewan tentang soal-soal jang termasuk urusan seksi;
- g. melakukan pemeriksaan tentang usul-usul rantjangan ataupun usul-usul lain jang diserahkan oleh D.P.D. kepada seksi untuk diperiksa;
- h. mengusulkan kepada D.P.D. tentang soal-soal jang akan dimasukkan dalam atjara sidang Dewan;
- i. menjelenggarakan segala sesuatu jang ditugaskan oleh Dewan.

Selain seksi-seksi, oleh D.P.R.D.P. dibentuk pula beberapa panitia ad hoc untuk mempelajari sesuatu soal khusus, seperti misalnja Panitia ad hoc Perubahan Harga Kartjis Bioskop, Panitia ad hoc Perundang-undangan untuk menindjau peraturan-peraturan daerah Kotapradja dari masa jang lampau, dan lain-lainnja.

¹⁸⁴⁾ Keputusan D.P.R.D.P. Kotapradja Djakarta Raja tanggal 19 September 1956 no. B. 27/D.K.

¹⁸⁵⁾ Diundangkan dalam Berita Negara 1956 no. 75, tambahan no. 66.

§ 10. APARATUR KEPEGAWAIAN

Sebagai aparatur jang membantu Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raja dalam menjelenggarakan pemerintahan daerah ialah Sekretariat (Balai Kota) dan pelbagai djawatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris Kotapradja jang sedjak permulaan terbentuknja Kotapradja Djakarta Raja hingga kini tetap didjabat oleh **MR. R. SOEPANGKAT** dengan dibantu oleh seorang Adjun Sekertaris.

Sekertariat terdiri dari beberapa bagian (afdeeling), dan tiap-tiap bagian dibagi lagi dalam suku-bagian (onderafdeeling) seperti pada masa Stadsgemeente Batavia dahulu. Sedjak permulaan terbentuknja Kotapradja Djakarta Raja telah beberapa kali diadakan reorganisasi terhadap susunan Sekertariat itu. Menurut keadaan terachir berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara tanggal 28 Agustus 1956 no. 19a/DK, maka Sekertariat Kotapradja Djakarta Raja meliputi bagian bagian jang berikut :

1. Bagian Umum;
2. Bagian Urusan Dewan;
3. Bagian Perundang-undangan (dan Urusan Hukum);
4. Bagian Keuangan;
5. Bagian Kepegawaian;
6. Bagian Pajak;
7. Bagian Pendaftaran Penduduk;
8. Bagian Izin Perusahaan;
9. Bagian Perlengkapan;
10. Bagian Arsip — Ekspedisi.

Selain Bagian-bagian tersebut diatas, termasuk pula dalam lingkungan Sekertariat dan dibawah pimpinan Sekertaris Kotapradja ialah Biro Sekertaris, Biro Walikota dan Biro Dewan Pemerintah Daerah.

Mengenai djawatan-djawatan Kotapradja, semuanya ada 7 buah jaitu :

1. *Djawatan Pekerdjaan Umum* ; ini terbagi dalam 2 buah suku-djawatan, masing-masing suku-djawatan itu dibagi pula dalam bagian-bagian sebagai berikut :
Suku-djawatan I, meliputi :
 - a. Bagian Pekerdjaan Kota;
 - b. Bagian Perusahaan Air Saluran;

- c.. Bagian Gudang dan Bengkel;
- d. Bagian Teknik Penjehtatan dan Pengairan.

Suku-djawatan II, meliputi :

- a. Bagian Perkembangan Kota;
- b. Bagian Pengawas Bangunan;
- c. Bagian Tanah;
- d. Bagian Perumahan.

Masing-masing bagian itu terbagi lagi dalam suku-suku bagian.

2. *Djawatan Kesehatan Kota*; ini dibagi dalam bagian-bagian jang berikut :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Hygiëne Umum;
 - c. Bag'an Kesedjahteraan Ibu dan Anak;
 - d. Bagian Pemberantasan Penyakit menular;
 - e. Bagian Pemberantasan Penyakit Malaria;
 - f. Bagian Rumah Sakit dan Balai Pengobatan;
 - g. Bagian Rumah Obat;
 - h. Bagian Statistik;
 - i. Bagian Pertolongan pertama pada ketjelakaan dan Dinas Ambulance.
3. *Djawatan Kehewananan Kota*; ini meliputi bagian-bagian jang berikut :
 - a. Bagian Tatausaha dan Keuangan;
 - b. Bagian Pemotongan Hewan;
 - c. Bagian Penilikan Susu;
 - d. Bagian Pemeriksaan Kuda, Kendaraan dan Kandang-kandang Hewan;
 - e. Bagian Pemeriksaan Penyakit Hewan;
 - f. Bagian Peternakan;
 - g. Bagian Pengawasan Perawatan Hewan.
4. *Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan*; terbagi dalam :
 - a. Bagian Urusan Umum;
 - b. Bagian Penjelenggara Pengadjaran;
 - c. Bagian Pendidikan Masjarakat;
 - d. Bag'an Kebudayaan.
5. *Djawatan Perekonomian Rakjat*; meliputi :
 - a. Bagian Umum;

- b. Bagian Pasar dan Pelelangan Ikan;
 - c. Bagian Perindustrian;
 - d. Bagian Perkreditan.
6. *Djawatan Sosial dan Perburuhan*; djawatan ini hanya baru terdiri dari satu bagian sadja, jaitu Bagian Peku-buran, karena sesudah perang banjak urusan-urusan sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sendiri dan belum diserahkan kembali kepada Kotapradja Djakarta Raja.
7. *Djawatan Keamanan Kota*; djawatan ini djuga sedang dalam taraf pertumbuhan. Kini jang termasuk djawatan ini barulah Barisan Pemadam Kebakaran dan korps pegawai petugas kepolisian Kotapradja jang merupakan regu pengawas bangunan. Selain itu djawatan ini bertugas pula mengkoordinir pekerdjaan-pekerdjaan semua pegawai petugas kepolisian Kotapradja Djakarta Raja itu.

Dari apa jang tersebut diatas ternjata bahwa beberapa djawatan Kotapradja memang telah menjelenggarakan urusan rumah tangga daerah sebagai suatu kebulatan jang lengkap, tetapi beberapa djawatan lainnja terutama kedua djawatan jang terachir mas'h kosong belum mempunyai isi sebagaimana lajaknja suatu djawatan, karena banjak urusan-urusan jang sebetulnja dapat termasuk dalam tugas pekerdjaan djawatan daerah swatantra mas'h dipegang sendir oleh aparatut Pemerintah Pusat.

Selandjutnja alat perlengkapan jang berhubungan dengan keuangan dan pengawasannja dari Kotapradja Djakarta Raja ialah sama seperti keadaan sebelum perang jaitu Kantor Ben lahari dan Inspeksi Keuangan.

Djumlah pegawai Kotapradja Djakarta Raja jang memutarakan roda pemerintahan daerah setiap tahun selalu bertambah. Icht'sar pertumbuhan djumlah pegawai Kotapradja itu ialah sebagai berikut : ¹⁸⁶⁾

Pada achir tahun 1950 :	± 2000 pegawai;
Pada achir tahun 1951 :	4166 pegawai;
Pada achir tahun 1952 :	4170 pegawai;
Pada achir tahun 1953 :	4181 pegawai;
Pada achir tahun 1954 :	4781 pegawai;
Pada achir tahun 1955 :	5270 pegawai.

¹⁸⁶⁾ Perselah Tahunan Kotapradja Djakarta Raja 1955, katja 45.

Kenaikan djumlah pegawai itu disebabkan karena pertumbuhan otonomi Kotapradja Djakarta Raja, ja'tu sedjalan dengan semakin meluasnja tugas pekerdjaan jang dipikul oleh Kotapradja sebagai akibat dari penjerahan urusan-urusan jang dilakukan oleh Pusat :

- a. penjerahan beberapa pasar dan tempat pelelangan ikan dari daerah sekitar Djakarta kepada Kotapradja sedjak tanggal 1 Agustus 1950;
- b. penjerahan sekolah-sekolah rakjat dari Kementerian P.P. & K. kepada Kotapradja mulai tanggal 1 Maret 1951 berikut guru-gurunya sebanjak lebih kurang 2000 orang;
- c. penjerahan urusan guru-guru dari sekolah partikelir jang bersubsidi sedjak tanggal 1 Djanuari 1953;
- d. penjerahan pendid'ikan masjarakat dari tangan instansi pusat jaitu Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah XII pada tanggal 1 Djuli 1954;
- e. penjerahan dinas perindustrian ketjil sedjak tanggal 1 Djuli 1954.

Pada achir tahun 1956 djumlah pegawai Kotapradja Djakarta Raja tertjatat sebanjak 5487 orang, dan apabila d'hitung dengan pekerdja-pekerdja harian (tenaga lepas) jang dipekerdjakan dipelbagai djawatan seperti Djawatan Pekerdjaan Umum sebagai pengangkut sampah, pembersih djalan/selokan, demikian pula pekerdja harian dipasar-pasar Kotapradja dan sebagainya, maka djumlah itu mentjapai 15.233 orang. ¹⁸⁷⁾

Dalam bidang aparatur kepegawaiannya, kekurangan jang dialami oleh Kotapradja ialah pegawai jang ahli dan berpengalaman. Untuk mengatasi ini oleh D.P.K.S. dalam tahun 1952 ditetapkan „Peraturan Pemberian Beasiswa kepada Pegawai Kotapradja Djakarta Raja” (Berita Negara 1952 no. 67, tambahan no. 22). Berdasarkan peraturan ini telah ada beberapa pegawai jang diberi kesempatan untuk beladjar pada Universitas Indonesia di Djakarta.

§ II. PENJELENGGARAAN OTONOMI

Mengenai penjelenggaraan otonomi, didalam lapangan mengatur (perundang undangan) Kotapradja Djakarta Raja masih memperlakukan verordeningen jang dibuat pada masa pemerintahan Stadsgemeente Batavia sebelum perang, dengan perubahan sekedarnja disana-sini agar sesuai dengan perubahan dan pertumbuhan

¹⁸⁷⁾ Buku „Perselah Tahunan Kotapradja Djakarta Raja 1956”, katja 32.

keadaan. Peraturan-peraturan jang dibuat pada masa Djakarta Tokubetu Si tidak diperlakukan lagi.

Untuk kelantjaran pemerintahan daerah dan mengatur perkembangan-perkembangan jang terdjadi selama ini, maka oleh Dewan Perwakilan Kota Sementara telah ditetapkan peraturan-peraturan daerah jang baru, jaitu:

1. Peraturan Tata Tertib untuk persidangan-persidangan Dewan Perwakilan Kota Sementara Kotapradja Djakarta Raja (dimuat dalam Berita Negara 1951 no. 71, tambahan no. 25). Berhubung dengan perkembangan-perkembangan keadaan, peraturan ini dalam tahun 1956 diperbaharui sama sekali dengan peraturan tanggal 24 Djuli 1956 (B.N. 1956/75, tambahan no. 66);
2. Peraturan darurat tentang pasar (B.N. 1952/16, tambahan no. 6);
3. Peraturan untuk memungut retribusi untuk idzin gangguan (B.N. 1952/16, tambahan no. 6). Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan untuk memungut ganti-rugi bagi pakerdjaan pemeriksaan jang dilakukan oleh Kotapradja Djakarta Raja berhubung dengan penyelesaian permintaan izin untuk mendirikan perusahaan, disingkat „Peraturan retribusi perusahaan Djakarta Raja 1954” (B.N. 1954/13, tambahan no. 17);
4. Peraturan tentang pemakaian Gedung Pertemuan Umum Kotapradja Djakarta Raja (B.N. 1952/46, tambahan no. 12);
5. Peraturan Pendaftaran Penduduk Kotapradja Djakarta Raja (B.N. 1953/7, tambahan no. 3);
6. Peraturan daerah mengenai pertundjukan pilem-pilem jang dikeluarkan oleh perusahaan pilem Indonesia, disingkat „Peraturan mempertontonkan Pilem Indonesia Kotapradja Djakarta Raja” (B.N. 1954/70, tambahan no. 72);
7. Peraturan daerah tentang main lajangan didaerah Kotapradja Djakarta Raja (B.N. 1955/57, tambahan no. 40);
8. Peraturan daerah tentang pemakaian pelataran parkir kepunjaan Kotapradja dalam wilajah Kotapradja Djakarta Raja dan pemungutan retribusi untuk pemakaian itu, disingkat „Peraturan tentang retribusi pelataran parkir Djakarta Raja 1954” (B.N. 1956/1, tambahan no. 1);
9. Peraturan Bank Pasar Kotapradja Djakarta Raja (B.N. 1956/73, tambahan no. 62);
10. Peraturan daerah tentang penetapan sjarat-sjarat pemakaian

dan penjawaan Gedung Kesenian Kotapradja, disingkat „Peraturan Gedung Kesenian Djakarta Raja” (B.N. 1956/92, tambahan no. 73);

11. Peraturan daerah untuk menetapkan kembali keseluruhan peraturan pajak reklame dalam wilayah Kotapradja Djakarta Raja, disingkat „Peraturan Pajak Reklame Djakarta Raja 1956” (B.N. 1957/22, tambahan no. 24);
12. Peraturan daerah Kotapradja Djakarta Raja untuk mengatur pengawasan tentang hygiëne terhadap pengolahan dan pemberian kesempatan memperoleh makanan dan minuman yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan rakyat, disingkat „Peraturan Makanan dan Minuman Kotapradja Djakarta Raja” (B.N. 1957/89, tambahan no. 65).

Peraturan-peraturan dalam lapangan gadji dan kepegawaian dari Stadsgemeente Batavia dahulu tidak diperlakukan lagi, karena dalam hal ini Kotapradja Djakarta Raja menganut asas konkordansi terhadap pusat, jaitu hal tersebut diatur sama seperti apa yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat bagi pegawai negara. Untuk ini Kotapradja membuat keputusan yang menjatakan berlakunja peraturan-peraturan pusat tentang kedudukan keuangan dan kedudukan hukum bagi pegawai Kotapradja, hal ini dilakukan dengan menetapkan peraturan yang dinamakan „Peraturan Persesuaian Kepegawaian Kotapradja Djakarta Raja; terachir yang ditetapkan ialah „Peraturan Persesuaian Kepegawaian Kotapradja Djakarta Raja 1955”, nama selengkapnja ialah Peraturan daerah tentang penetapan mempergunakan mutatis mutandis bagi pegawai Kotapradja Djakarta Raja beberapa peraturan tentang kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pegawai Negeri (B.N. 1955/95, tambahan no. 69).

Sedang untuk mengatur kedudukan keuangan para anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan sesuai dengan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri,¹⁸⁸⁾ D.P.R.D.P. dalam bulan Maret 1957 telah menetapkan „Peraturan daerah tentang uang kehormatan bagi wakil ketua dan para anggota Dewan Pemerintah Daerah serta tundjangan khusus bagi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapradja Djakarta Raja” (diundangkan dalam Lembaran Kotapradja Djakarta Raja 1957 no. 9).

¹⁸⁸⁾ Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 no. Des. 18/7/40, terachir diubah dengan Instruksi tanggal 30 Djanuari 1957 no. Des. 28/2/15.

Peraturan-peraturan jang ditetapkan dalam zaman Stadsgemeente Batavia dahulu hanjalah berlaku untuk lingkungan wilayah pada waktu itu. Setelah wilayah bekas Stadsgemeente dahulu diperluas dengan keputusan Presiden 1950/125 hingga merupakan wilayah Kotapradja Djakarta Raja jang sekarang, maka agar dapat berlaku pula didaerah-daerah pinggiran jang ditambahkan itu, beberapa peraturan dari Stadsgemeente dahulu oleh Dewan Perwakilan Kota Sementara dinjatakan berlaku untuk seluruh wilayah hukum Kota-pradja Djakarta Raja, jaitu :

1. Veelslachtverordening 1936, dinjatakan berlaku untuk seluruh wilayah Kotapradja dengan peraturan tanggal 30-12-1952 (termuat dalam B.N. 1953/8, tambahan no. 5);
2. Rijwielbelastingverordening 1935, dengan keputusan D.P.K.S. tanggal 19-10-1950 no. 16/D.K. (B.N. 1953/94, tambahan no. 61);
3. Rij- en Voertuigenbelastingverordening 1936, dengan peraturan tanggal 22-10-1953 (B.N. 1953/94, tambahan no. 61); ¹⁸⁹⁾
4. Reclame verordening 1937, dengan peraturan tanggal 27-1-1954 (B.N. 1954/17, tambahan no. 23);
5. Vermakelijkheidsbelastingverordening 1940, dengan peraturan tanggal 27-1-1954 (B.N. 1954/17., tambahan no. 23);
6. Melkverordening 1934, dengan peraturan tanggal 27-1-1954 (B.N. 1954/17, tambahan no. 23);
7. Brandweerreglement, dengan peraturan tanggal 27-1-1954 (B.N. 1954/17, tambahan no. 23);
8. Pasar verordening, dengan peraturan tanggal 15-7-1954 (B.N. 1954/76, tambahan no. 84);
9. Rij- en Voertuigenverordening 1937, dengan peraturan tanggal 10-12-1954 (B.N. 1955/15, tambahan no. 13).

Terhadap daerah Kotabaru Kebajoran diadakan penjimangan, tidak hanja 9 peraturan tersebut diatas jang dinjatakan berlaku, melainkan dengan keputusan D.P.K.S. tanggal 16 April 1951 no. 2/D.K. segala peraturan jang ada dinjatakan berlaku untuk daerah tersebut terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951 (B.N. 1951/55, tambahan no. 19).

Untuk hal-hal lainnja ketjuali apa jang diatur dalam 9 peraturan jang telah dinjatakan berlaku tersebut diatas, maka didaerah-

¹⁸⁹⁾ Pernjataan berlaku untuk seluruh wilayah hukum ini kemudian diperbaharui dengan peraturan tanggal 21-5-1954 (lihat B.N. 1954/56, tambahan no. 57).

daerah pinggiran masih berlaku peraturan-peraturan dari daerah-daerah swatantra dahulu jang telah dihapuskan, misalnja untuk ketjamatan Tjengkareng dan Pulau Seribu mengenai hal mendirikan bangunan masih berlaku „Bouwverordening” dari Regentschap Batavia dahulu; untuk ketjamatan Pulogadung, Pasar Minggu dan lain-lainnja masih berlaku „Bouwverordening” dari Regentschap Meester Cornelis dahulu.

Achirnja suatu usaha lain dalam bidang perundang-undangan ialah penindjauan kembali dan pembaharuan terhadap semua peraturan dari Stadsgemeente Batavia dahulu jang mulai dilakukan setjara integral oleh D.P.R.D.P. Dengan keputusan tanggal 12 Maret 1957 no. B 8/DPRDP/57 oleh Dewan tersebut dibentuk sebuah *Panitia ad hoc Perundang-undangan* jang diberi tugas untuk menjesuaikan semua peraturan Kotapradja Djakarta Raja dengan peraturan perundangan desentralisasi jang baru. Pada kesempatan ini maka terlebih dahulu semua peraturan daerah Kotapradja jang masih didalam bahasa Belanda diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia, kemudian setjara berangsur-angsur satu per satu peraturan-peraturan itu ditindjau oleh Panitia ad hoc tersebut diatas dan disesuaikan tidak sadja dengan ketentuan-ketentuan pusat jang baru, tetapi djuga dengan keadaan pada dewasa ini. Demikianlah sebagai hasil dari pada penindjauan dan pembaharuan itu, oleh D.P.R.D.P. telah ditetapkan kembali 25 peraturan jang tidak sadja tersusun dalam bahasa Indonesia, tetapi djuga telah sesuai dengan keadaan jang telah berubah, diantara mana tidak kurang dari pada 10 peraturan telah diundangkan dalam tahun 1957, jaitu : ¹⁹⁰⁾

1. Peraturan Perusahaan-perusahaan Kotapradja Djakarta, ini merupakan pembaharuan dari *Bedrijvenverordening* dari Stadsgemeente Batavia dahulu (diundangkan dalam Lembaran Kotapradja Djakarta Raja 1957 no. 5);
2. Peraturan Saluran Air Djakarta Raja, dahulu „*Bataviasche Waterverordening 1938*” (L.K.D.R. 1957 no. 15);
3. Peraturan daerah Kotapradja Djakarta Raja tentang pendjualan minuman jang mengandung zat asam arang (L.K.D.R. 1957 no. 16);

¹⁹⁰⁾ Hasil tugas pekerdjaan Panitia ad hoc Perundang-undangan D.P.R.D.P. Kotapradja Djakarta Raja itu dapat dilihat pada laporan Panitia tersebut tanggal 14-8-1957 no. 22-a/P.a./1957, terdapat dalam risalah rapat terachir D.P.R.D.P. tanggal 14-8-1957 (notilen no. 15/1957), katja 8-14.

4. Peraturan tentang bangunan-bangunan jang melintang di jalan-jalan air (L.K.D.R. 1957 no. 18);
5. Peraturan tentang penjelenggaraan perusahaan trem kota (L.K.D.R. 1957/19);
6. Peraturan tentang penjelenggaraan pasar oleh orang-orang partikelir (L.K.D.R. 1957 no. 20);
7. Peraturan Roti Djakarta Raja (L.K.D.R. 1957 no. 21);
8. Peraturan Pemadam Kebakaran Djakarta Raja (L.K.D.R. 1957 no. 22);
9. Peraturan Tempat-renang umum Djakarta Raja (L.K.D.R. 1957 no. 23);
10. Peraturan Perenangan Djakarta Raja (L.K.D.R. 1957 no. 24).

Selain itu diperbaharui pula beberapa peraturan jang dibuat oleh D.P.K.S. jang lampau, jaitu Peraturan tentang pemakaian dan penjawaan Gedung Kesenian (lihat L.K.D.R. 1957 no. 2), tentang Gedung Pertemuan Umum (L.K.D.R. 1957/3), Peraturan tentang Tata Tertib untuk rapat Dewan (L.K.D.R. 1957/6) dan Peraturan tentang pendaftaran penduduk (L.K.D.R. 1957/17).

Usaha kearah mentjiptakan perundang-perundangan daerah jang bertjorak nasional seperti tersebut diatas hingga kini masih berlangsung.

Didalam lapangan medebewind, Kotapradja Djakarta Raja masih tetap menjalankan tugas seperti Stadsgemeente Batavia dahulu, jaitu melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam „Hinderordonnantie” dan pelbagai peraturan pusat lainnja.

Didalam lapangan mengurus, ternjata beberapa urusan jang sebelum perang diselenggarakan oleh Stadsgemeente Batavia, sesudah perang urusan-urusan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Pusat sendiri, misalnja urusan pengadjaran, pendidikan, penjelenggaraan kerdjantara, pemeliharaan fakir miskin dan urusan-urusan sosial lainnja. Tetapi kemudian setjara berangsur-angsur beberapa urusan diserahkan kembali dari tangan pusat kepada Kotapradja Djakarta, jaitu:

- a. urusan pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan, diserahkan dengan keputusan Menteri P.P. & K. tanggal 5-2-1951 no. 2790/Kab. jang kemudian diresmikan dengan Peraturan Pemerintah 1953 no. 38, ¹⁹¹⁾ antara lain jang diserahkan ialah tugas penje-

¹⁹¹⁾ L.N. 1953 no. 68, pendjelasan dalam T.L.N. no. 469.

- lenggaraan sekolah rakjat, kursus pengetahuan umum, perpustakaan rakjat, memajukan kesenian daerah dan lain-lainnja;
- b. urusan perindustrian, dengan Peraturan Pemerintah 1954 no. 13; ¹⁹²⁾ yang diserahkan terutama urusan memperkembangkan perindustrian ketjil dan keradjinan rumah tangga.

Pada achir-achir ini diserahkan pula sebagian dari urusan dalam lapangan kehewanan dan pertanian, seperti pentegahan dan pemberantasan penyakit hewan, usaha memajukan peternakan dan lain-lainnja. Walaupun demikian masih banjak urusan-urusan yang bersifat kedaerahan didalam wilajah Kotapradja Djakarta Raja diurus dan diselenggarakan oleh pusat sendiri.

Dalam usaha sosial pada tahun 1952 Kotapradja Djakarta Raja mendirikan sebuah jajasan dengan nama „*Jajasan Kas Pembangunan*” yang bertujuan membantu memajukan pendirian rumah-rumah untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan di kota Djakarta. ¹⁹³⁾ Selandjutnja dengan bekerdja sama dengan beberapa organisasi sosial, Kotapradja dalam bulan September 1954 telah membentuk Jajasan „*Lembaga Sosial Kotapradja Djakarta Raja*” yang bertujuan memperbaiki keadaan sosial dalam arti yang seluas-luasnja dengan djalan memberi bantuan moril/materiil guna meninggikan deradjat tingkatan hidup dan kehidupan mereka yang sengsara dan membutuhkan bantuan. Organisasi-organisasi yang wakilnja turut duduk dalam Jajasan tersebut ialah Perwari, Jajasan Putra Bahagia, Sin Ming Hui dan Muhammadiyah. ¹⁹⁴⁾

Sebuah jajasan lain yang djuga dapat dianggap bertjorak sosial ialah „*Jajasan Beasiswa Djakarta*” yang dibentuk oleh D.P.R.D.P. pada tanggal 8 Maret 1957. ¹⁹⁵⁾ Dengan jajasan ini

¹⁹²⁾ L.N. 1954 no. 25, pendjelasan dalam T.L.N. no. 528.

¹⁹³⁾ Keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara tanggal 29 April 1952 no. 5/D.K., dimuat dalam B.N. 1952 no. 48, tambahan no. 13.

¹⁹⁴⁾ Keputusan D.P.K.S. tanggal 22 September 1954 no. B. 28/D.K. Lihat djuga Akte Notaris Soewandi tanggal 25 Pebruari 1955 no. 83.

¹⁹⁵⁾ Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Kotapradja Djakarta Raja tanggal 8 Maret 1957 no. 5/D.P.R.D.P., dimuat dalam B.N. 1957 no. 50, tambahan no. 42.

Tjataan tambahan : pembentukan jajasan ini merupakan realisasi dari djan-dji Kotapradja Djakarta Raja sewaktu mengadakan perajaan yang pertama untuk memperingati hari lahirnja Kota Djakarta pada tanggal 22 Djuni 1956, dalam mana Kotapradja menyatakan akan memberikan beasiswa kepada murid S.M.A. yang mempunyai banjak pengharapan (lihat Lembaran Kota tahun 1956 no. 10).

Kotapradja bermaksud membina dan memupuk tenaga jang kreatif didalam masjarakat dengan djalan memberikan beasiswa kepada warga kota jang berbakat baik untuk beladjar di Universitas/Perguruan Tinggi.

Untuk mempertinggi ketjakapan aparatur kepegawaiannya sendiri, oleh Kotapradja telah diselenggarakan *Kursus Pengetahuan Administrasi* sedjak bulan Agustus 1951 ¹⁹⁶⁾ dan *Kursus Montir* dalam tahun 1956. ¹⁹⁷⁾ Pegawai-pegawai jang lulus dari Kursus Pengetahuan Administrasi itu oleh Kotapradja dihargai sebagai beridjazah Sekolah Menengah Pertama; sedang lulusan Kursus Montir bagi penetapan pangkat dan gadjinja diper-samakan dengan mereka jang memiliki idjazah Sekolah Teknik Pertama Negeri.

Achirnja sebagai suatu usaha Kotapradja Djakarta Raja untuk lebih menjempurnakan penjelenggaraan otonomi dari kota-kota swatantra, oleh Walikota Djakarta Raja dalam bulan Nopember 1954 telah diselenggarakan *Konperensi para walikota dari ibukota propinsi-propinsi diseluruh Indonesia*. Konperensi jang dilangsungkan di Balai Kota Djakarta pada tanggal 1 sampai dengan 3 Nopember 1954 itu dihadiri oleh walikota-walikota Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Medan, Bukittinggi, Palembang, Bandjarmasin, Makassar, Ambon dan Surakarta. Didalam Konperensi itu diperbintjangkan pelbagai masalah jang berkenaan dengan penjelenggaraan pemerintahan kota seperti perumahan rakjat, tempat kerdja, lalu lintas, hiburan umum, polisi kota dan lain-lainnja; dalam Konperensi tersebut beberapa oknum memberikan prae-advies sebagai bahan-bahan pertimbangan. Dari pihak Kotapradja Djakarta Raja telah diberikan prae-advies oleh Walikota Sudiro tentang sumber-sumber penghasilan kota swatantra dan oleh Sekertaris Kotapradja Mr. Soepangkat mengenai soal politik tanah dalam hubungan perkembangan kota. ¹⁹⁸⁾

Pada achir konperensi selain diambil keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan mengenai masalah-masalah jang diperbintjangkan diatas, djuga antara lain dibentuk pula sebuah *Sekretariat Permanen Konperensi Walikota I* jang

¹⁹⁶⁾ Lihat Lembaran Kota 1952 no. 2.

¹⁹⁷⁾ Keputusan D.P.R.D.P. tanggal 7 Maret 1957 no. 2/D.P.R.D.P. (B.N. 1957 no. 50, tambahan no. 44).

¹⁹⁸⁾ Buku „Konperensi Walikota Ke I di Djakarta Raya”. Dibukukan dan disusun oleh Redaksi Madjalah „Otonomi”, Malang.

ditugaskan untuk memperjuangkan terlaksananya keputusan-keputusan konperensi dan mempersiapkan penyelenggaraan kongres Walikota II. Untuk sementara waktu Kotapradja Djakarta Raja disertai kewadjan mendjalankan tugas sekretariat permanen itu. Hingga kini djabatatan sekretaris permanen Konperensi Walikota ke-I dipegang oleh Sekretaris Kotapradja Djakarta Raja Mr. Soepangkat.

Beberapa waktu kemudian oleh Sekretariat Permanen telah disiapkan rantjangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari „Perserikatan Kota Swatantra Indonesia” yang ditjita-tjitakan terbentuknja pada waktu-waktu yang akan datang. Sebagai usaha selandjutnja untuk memberikan bahan-bahan yang berguna kepada kota-kota diseluruh Indonesia dalam menjelenggarakan otonominja, maka sedjak bulan Desember 1956 hingga Djuli 1957 oleh Sekretariat Permanen telah dikeluarkan madjalah berkala dengan nama „Berita”. Usaha lainnja ialah penerbitan rangkaian Publikasi Kota Swatantra mengenai soal-soal yang hangat pada suatu ketika, djuga yang berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi. Rangkaian publikasi itu hingga kini telah terbit 4 seri (nomor).

§ 12. KEUANGAN

Dalam lapangan keuangan Kotapradja, mengenai sumber-sumber penghasilannja Kotapradja Djakarta Raja masih memungut pajak-pajak daerah seperti Stadsgemeente Batavia dahulu dengan diadakan kenaikan tarip seperlunja. Mengenai sumber-sumber berupa retribusi djuga masih sama seperti dahulu, ditambah dengan retribusi izin perusahaan dan retribusi pelataran parkir. Perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan oleh Kotapradja sampai dewasa ini merupakan pula landjutan dari keadaan sebelum perang, tetapi ditambah dengan perusahaan bank pasar yang memberikan kredit kepada para pedagang ketjil dipasar-pasar Kotapradja sampai sejumlah 500 rupiah yang harus dikembalikan dalam waktu 40 hari dengan dipungut bunga 8 persen.

Sesuai dengan tugas pekerdjaannja yang semakin meluas dan djumlah pegawainja yang selalu bertambah, maka anggaran belandja Kotapradja Djakarta Raja dari tahun ketahun pada umumnja djuga selalu menunjukkan garis yang menandjak. Ichisar anggaran belandja itu untuk dinas biasa sedjak permulaannja adalah sebagai berikut : ¹⁹⁹⁾

¹⁹⁹⁾ Lihat buku-buku Anggaran Belandja Kotapradja Djakarta Raja.

Tahun 1950	—	Rp. 35.583.545,—
Tahun 1951	—	Rp. 63.717.100,—
Tahun 1952	—	Rp. 99.063.880,—
Tahun 1953	—	Rp. 70.905.430,—
Tahun 1954	—	Rp. 89.731.030,—
Tahun 1955	—	Rp. 114.544.140,—
Tahun 1956	—	Rp. 106.059.240,—
Tahun 1957	—	Rp. 114.927.320,—

Sumber-sumber penghasilan Kotapradja sendiri seperti disebutkan diatas (padjak, retribusi dan hasil perusahaan daerah) belum dapat menutup anggaran pengeluaran itu, oleh karena itu setiap tahun Kotapradja Djakarta Raja menerima subsidi dari Pemerintah Pusat dengan sistim sluitpost, jaitu semua defisit pada tiap-tiap tahun ditutup (dibayar) oleh pusat. Ordonansi Perimbangan Keuangan sebagaimana terdapat dalam Staatsblad 1938 no. 170 jang dahulu sedjak tahun 1938 didjalankan bagi Stadsgemeente Batavia ternyata tidak dipergunakan lagi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Walaupun pada prinsipnja semua kekurangan Kotapradja akan ditutup oleh pusat, akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnja Kotapradja selalu terikat kepada besarnya subsidi jang diperoleh dari pusat. Djadi Kotapradja Djakarta Raja tidaklah bebas untuk membuat pengeluaran menurut kehendaknja sendiri. Djumlah subsidi jang diterima oleh Kotapradja dari tahun ketahun adalah sebagai berikut:

Tahun 1950	---	Rp. 11.010.000,—
Tahun 1951	—	Rp. 29.111.550,—
Tahun 1952	—	Rp. 37.519.900,—
Tahun 1953	—	Rp. 33.090.656,—
Tahun 1954	—	Rp. 46.628.794,—
Tahun 1955	—	Rp. 39.898.265,—
Tahun 1956	---	Rp. 46.336.540,—
Tahun 1957	---	Rp. 56.748.400,—

Demikianlah keadaan keuangan Kotapradja Djakarta Raja.

§ 13. PENETAPAN LAMBANG DAN HARI LAHIR KOTA DJAKARTA

Dengan berdirinja Kotapradja Djakarta Raja didalam alam kemerdekaan jang berbeda dengan Stadsgemeente Batavia dahulu, maka bagi Kotapradja tersebut diperlukan suatu lambang jang

tjotjok dan sesuai dengan kedudukannya serta keadaan dalam negara jang merdeka dan berdaulat ini. Oleh karena itu oleh Kotapradja lalu diadakan sajembara untuk mentjiptakan lambang jang baru. Sajembara itu diikuti oleh 111 orang pelukis dari seluruh Indonesia, dan achirnya tjiptaan pelukis **DJAJAMARTA** dengan perubahan sedikit disana-sini terpilih untuk dijadikan lambang Kotapradja Djakarta Raja. Demikianlah oleh D.P.K.S. pada tanggal 16 April 1951 ditetapkanlah sebuah peraturan jang menentukan bentuk dan warna lambang tersebut,²⁰⁰⁾ jaitu sebuah lukisan prisai dengan mahkota benteng diatasnja sebagai lambang suatu kota, dasar perisai itu berwarna hidjau tua sebagai warna jang mengandung arti pergaulan internasional. Ditengah-tengah perisai berdiri sebuah tugu berwarna putih sebagai lambang proklamasi kemerdekaan Indonesia (tugu proklamasi sebagaimana terdapat pada halaman gedung proklamasi di Pegangsaan Timur 56). Pada kaki tugu sebelah muka digambar peta kepulauan Indonesia berwarna hidjau sebagai pernjataan sedjarah. Melingkari tugu tersebut ialah karangan padi dan kapas berwarna emas muda sebagai lambang kemakmuran, dan tangkai karangan padi dan kapas itu diikat dengan pita merah putih jang melambai-lambai melingkupi peta kepulauan Indonesia. Mengenai *bendera* Kotapradja Djakarta Raja, ini terdiri dari 6 ladjur warna merah putih tersusun dari atas kebawah dan ditengah-tengah bendera itu dilukiskan lambang Kotapradja, lukisan lambang tersebut diatas berbatas pada djalur merah jang teratas dan dibawah pada djalur putih jang terbawah.

Kemudian pada tanggal 30 Desember 1952 oleh D.P.K.S. ditetapkan Peraturan tentang pemakaian lambang dan bendera Kotapradja (B.N. 1953/6, tambahan no. 2). Peraturan ini kemudian oleh D.P.R.D.P. diperbaharui dengan peraturan tanggal 6 Agustus 1957 (Lembaran Kotapradja Djakarta Raja 1957 no. 4).

Selain penetapan lambang tersebut diatas, oleh D.P.K.S. dengan keputusannya tanggal 23 Pebruari 1956 no. 6/D.K. diterima bahwa tanggal 22 *D j u n i* 1527 sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto dianggap sebagai hari lahirnja Kota Djakarta. Pada tanggal 22 Djuni 1956 dimulailah upatjara perajaan jang pertama untuk memperingati hari lahir itu. Dengan ini maka tanggal pembentukan Kota Djakarta (Batavia) menurut pendapat Belanda (30 Mei 1619) dijenjahkan djauh-djauh.

200) B.N. 1952 no. 66, tambahan no. 21.

C. *Masa sesudah mulai berlakunya „Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” hingga akhir tahun 1957.*

§ 14. SISTIM OTONOMI JANG BARU

Setelah melalui proses pembentukan jang lama djuga, achirnja pada tanggal 14 Desember 1956 Parlemen R.I. menetapkan suatu peraturan perundangan desentralisasi jang baru, jaitu „*Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956*”. Pada tanggal 18 Djanuari 1957 diundangkanlah peraturan tersebut sebagai *Undang-undang 1957 no. 1* dalam Lembaran Negara tahun 1957 no. 6, dengan pendjelasan dalam Tambahan L.N. no. 1143.²⁰¹⁾ Sedjak hari itu berlakulah Undang-undang 1957 no. 1 sebagai peraturan perundangan desentralisasi jang tunggal diseluruh Indonesia dengan mentjabut Undang-undang 1948 no. 22, Undang-undang Staatsblad Indonesia Timur 1950 no. 44, Stadsgemeente-ordonnantie dan semua peraturan lainnja mengenai pemerintahan daerah. Dengan ini sedjarah pemerintahan Kota Djakarta mengindjak lagi suatu fase jang baru.

Menurut ketentuan peralihan Undang-undang 1957/1, Kotapradja Djakarta Raja tidak perlu dibentuk baru lagi, melainkan sedjak tanggal 18 Djanuari 1957 itu mendjadi suatu daerah swatantra menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut (pasal 73 ayat 3).

Undang-undang desentralisasi Indonesia jang baru itu membawa perubahan jang besar dan prinsipiil terhadap kedudukan, susunan dan sistim pemerintahan daerah Kota Djakarta. Dalam Undang-undang 1957/1 itu dengan resmi Kotapradja Djakarta Raja ditetapkan sebagai daerah swatantra tingkat ke-I jang langsung berada dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri (pasal 2 ayat 1), sedang kotapradja-kotapradja lainnja diseluruh Indonesia semuanya merupakan daerah tingkat ke-II jang berada dibawah daerah tingkat ke-I (propinsi).

Selandjutnja banjak ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 1957/1 berbeda dengan S.G.O. jang sebelum itu mendjadi dasar pokok dari Kotapradja Djakarta Raja. Kalau menurut S.G.O. alat-alat pemerintahan Kotapradja terdiri dari Raad (D.P.K.S./D.P.R.

²⁰¹⁾ Hingga akhir tahun 1957 telah diubah 3 kali, jaitu dengan U.U. darurat 1957 no. 6 (L.N. 1957 no. 9), U.U. darurat 1957 no. 8 (L.N. 1957 no. 50. T.L.N. no. 1274) dan U.U. 1957 no. 73 (L.N. 1957 no. 159).

D.P.), College van Burgemeester en Wethouders (B.P.H./D.P.D.P.) dan Burgemeester (Walikota), maka menurut Undang-undang jang baru itu Pemerintah Daerah Kotapradja hanja terdiri atas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. Djabatan Kepala Daerah djuga ada, tetapi kalau dahulu Walikota Kepala Daerah Djakarta Raja merupakan organ daerah jang berdiri sendiri dan merangkap sebagai pedjabat pusat, maka kini Kepala Daerah adalah semata-mata organ daerah jang dipilih oleh D.P.R.D.²⁰²⁾ dan menjalankan tugas kewadjabannja bersama-sama dengan D.P.D. sebagai suatu kebulatan. Demikian pula kalau dahulu menurut S.G.O. dan keputusan Presiden 1950 no. 114, Walikota berfungsi sebagai ketua merangkap anggota dari pada baik D.P.K.S./D.P.R. D.P. maupun B.P.H./D.P.D.P., maka kini menurut Undang-undang 1957/1 Kepala Daerah hanja berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota dari pada D.P.D. sadja, sedang djabatan ketua D.P.R.D. harus dipegang oleh seorang lain jang dipilih oleh dan dari para anggota Dewan itu sendiri. Sebagai kelandjutannja maka kalau dahulu jang mewakili Kotapradja dimuka dan diluar pengadilan adalah Walikota, maka kini D.P.D.-lah jang mewakili Kotapradja. Selanjutnja kalau menurut S.G.O. dahulu, B.P.H./D.P.D.P. dalam menjalankan tugas kewadjabannja bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan baik sebagai keseluruhan ataupun ketua dan anggotanja masing-masing seorang diri, maka dalam hal itu kini segenap anggota D.P.D. harus bertanggungjawab setjara kolektip, djadi tidak ada pertanggungjdjawaban perseorangan.

Sebagai kelandjutan dari kedudukan Kotapradja Djakarta Raja sebagai daerah tingkat teratas, maka dalam Undang-undang 1957/1 ditentukan bahwa peraturan-peraturan daerah Kotapradja diundangkan dengan djalan menempatkanja dalam warta resmi dengan nama „*Lembaran Kotapradja Djakarta Raja*” jang diterbitkan oleh Kotapradja Djakarta Raja sendiri (pasal 37). Dahulu pada masa Stadsgemeente Batavia sebelum perang, peraturan daerahnja diundangkan dalam Provinciaal Blad van West Java; dan sesudah perang (zaman Pre-federal) berhubung dengan dihapuskanja Provincie West Java, peraturan daerah Stadsgemeente Batavia diundangkan dalam warta resmi dari Pusat jaitu Javase Courant, kemudian sebagai kelandjutannja maka dalam zaman R.I.S. dan R.I.

202) Pemilihan Kepala Daerah oleh D.P.R.D. hanja untuk fase pertama. Dimaksudkan pada waktu kemudian akan dipilih langsung oleh penduduk menurut aturan jang ditetapkan dengan undang² (lihat pasal 23 U.U. 1957/1).

Kesatuan peraturan daerah Kotapradja Djakarta Raja diundangkan dalam Berita Negara (dimuat dalam tambahan-nja, rubrik „Peraturan-peraturan daerah dan lain-lain Penetapan Dewan Daerah”).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang 1957/1 itu, maka pada tanggal 4 September 1957 terbitlah Lembaran Kotapradja Djakarta Raja jang pertama. Sedjak tanggal tersebut semua peraturan daerah Kotapradja dimuat dalam Lembaran Kotapradja Djakarta Raja jang penerbitannja diurus oleh Bagian Perundang-undangan dan Urusan Hukum Kotapradja. Sedang „Lembaran Kota” (Gemeenteblad) jang dahulu dipergunakan untuk memuat usul-usul dari B.P.H./D.P.D.P. kepada Dewan Perwakilan diganti namanja mendjadi „*Berita Dewan*”.²⁰³⁾

Demikianlah pokok-pokok terpenting dalam Undang-undang 1957/1 jang membawa perubahan asasi terhadap Kotapradja Djakarta Raja.

Selain itu dalam Undang-undang 1957/1 ditetapkan pula beberapa pokok-pokok lainnja jang djuga mengakibatkan perubahan penting terhadap hal ichwal pemerintahan daerah Kota Djakarta sedjak permulaan tahun 1957 itu, seperti tentang pemilihan anggota D.P.R.D., hubungan keuangan antara pusat dengan daerah, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kesemuanja itu harus diatur selengkapnja dalam undang-undang jang tersendiri.

Oleh pusat telah pula ditetapkan beberapa undang-undang mengenai pokok-pokok tersebut diatas sebagai kelengkapan dari pada Undang-undang 1957/1, jaitu :

- a. *Undang-undang 1956 no. 19* tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah; disingkat „*Undang-undang Pemilihan Daerah*”;²⁰⁴⁾
- b. *Undang-undang 1956 no. 32* tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah jang berhak

203) Segala sesuatu mengenai Lembaran Kotapradja Djakarta Raja itu diatur dalam „Peraturan daerah Kotapradja Djakarta Raja untuk menetapkan dan mengatur penerbitan Lembaran Kotapradja dan Berita Dewan sebagai tempat untuk mengundang atau mengumumkan peraturan-peraturan daerah, keputusan-keputusan, pengumuman-pengumuman Kotapradja dan pemberitahuan-pemberitahuan Dewan” (disingkat „Peraturan daerah Lembaran Kotapradja dan Berita Dewan Djakarta Raja”), diundangkan dalam L.K.D.R. jang pertama (tahun 1957 no. 1).

204) L.N. 1956 no. 44, T.L.N. no. 1072. Undang² ini menggantikan sebagai Kiesordonnantie dari zaman Hindia Belanda dahulu dan segala peraturan pemilihan daerah lainnja. U.U. 1956/19 ditetapkan beberapa waktu sebelumnya U.U. 1957/1.

mengurus rumah tangganya sendiri; disingkat „*Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957*”. Peraturan ini pada pokoknya mengatur sumber-sumber Keuangan dari daerah-daerah swatantra diseluruh Indonesia serta kemungkinan pemberian bantuan keuangan dari pusat kepada daerah;²⁰⁵⁾

- c. *Undang-undang darurat 1957 no. 11* tentang Peraturan umum Pajak Daerah; peraturan ini mengatur hal ihwal tentang pajak yang boleh diadakan dan dipungut oleh sesuatu daerah;²⁰⁶⁾
- d. *Undang-undang darurat 1957 no. 12* tentang Peraturan umum Retribusi Daerah; mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pemungutan retribusi oleh sesuatu daerah.²⁰⁷⁾

Kemudian oleh Pemerintah dikeluarkan pula pelbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang 1957/1 maupun beberapa undang-undang tersebut diatas, yaitu:

1. *Peraturan Pemerintah 1956 no. 29* tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Daerah;²⁰⁸⁾
2. *Peraturan Pemerintah 1957 no. 3* tentang Penjerahan Pajak Negara kepada Daerah;²⁰⁹⁾
3. *Peraturan Pemerintah 1957 no. 4* tentang Pemberian Gandjaran, Subsidi dan Sumbangan kepada Daerah;²¹⁰⁾
4. *Peraturan Pemerintah 1957 no. 5* tentang Panitia Negara Perimbangan Keuangan;²¹¹⁾
5. *Peraturan Pemerintah 1957 no. 32* tentang Da-

²⁰⁵⁾ L.N. 1956 no. 77, T.L.N. no. 1442. Undang² ini membatalkan pula pelbagai ordonnantie financieele verhouding dahulu. U.U. 1956/32 juga dikeluarkan dengan mendahului U.U. 1957/1.

²⁰⁶⁾ L.N. 1957 no. 56, T.L.N. no. 1287. Dengan adanya undang-undang darurat ini, maka semua peraturan perundangan tentang pajak daerah dari Pemerintah Hindia Belanda dahulu tidak berlaku lagi.

²⁰⁷⁾ L.N. 1957 no. 57, T.L.N. no. 1288.

²⁰⁸⁾ L.N. 1956 no. 52, T.L.N. no. 1075.

²⁰⁹⁾ L.N. 1957 no. 10, T.L.N. no. 1155; melaksanakan pasal 3 ayat (2) dari „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957”.

²¹⁰⁾ L.N. 1957 no. 11, T.L.N. no. 1156; melaksanakan pasal 7, 8 dan 9 dari „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957”.

²¹¹⁾ L.N. 1957 no. 12, T.L.N. no. 1157; melaksanakan pasal 10 dari „Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957”.

sar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah; ²¹²⁾

6. *Peraturan Pemerintah 1957 no. 44* tentang penetapan Peraturan umum mengenai Sjarat-sjarat ketjakapan, pengetahuan dan tjara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah; ²¹³⁾
7. *Peraturan Pemerintah 1957 no. 46* tentang Peraturan umum mengenai Gadji, Uang djalan dan Uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi Kepala Daerah. ²¹⁴⁾

Demikianlah serangkaian peraturan perundangan baru yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia sampai akhir tahun 1957.

§ 15. PEMBENTUKAN PEMERINTAH DAERAH JANG BARU

Dengan keluarnya Undang-undang Pemilihan Daerah, maka sedjak akhir tahun 1956 oleh pihak Kotapradja Djakarta Raja mulai dilakukan persiapan-persiapan kearah pembentukan D.P.R.D. dengan djalan pemilihan.

Menurut U.U. 1957/1 pasal 7 ayat (1), djumlah anggota D.P. R.D. Kotapradja Djakarta Raja diperhitungkan menurut patokan bahwa tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil, dengan minimum 30 dan maksimum 75 anggota. Dengan dasar perhitungan itu maka D.P.R.D. Kotapradja Djakarta Raja mempunyai djumlah anggota yang minimum jaitu 30 orang. ²¹⁵⁾ Oleh D.P.R.D.P. djumlah 30 anggota itu dipandang tidak tjukup bagi Dewan yang akan datang untuk menunaikan tugas kewadjabannya dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu dengan keputusannya tanggal 12 Maret 1957 no. B 7/D.P.R.D.P./57 dikemukakan permohonan kepada Pusat agar djumlah anggota D.P.R.D. Kotapradja Djakarta Raja ditambah. Berdasarkan permohonan itu, maka Undang-undang 1957/1 diubah dengan Undang-undang darurat 1957 no. 8 (L.N. 1957 no. 50, T.L.N. no. 1274), dengan mana dasar perhitungan untuk menentukan djumlah anggota D.P.R.D. Kotapradja Djakarta Raja

²¹²⁾ L.N. 1957 no. 85, T.L.N. no. 1403, kemudian diubah dengan P.P. 1957 no. 36 (L.N. 1957 no. 90); melaksanakan pasal 19 ayat (4) dari U.U. 1957/1.

²¹³⁾ L.N. 1957 no. 98; melaksanakan pasal 24 ayat (4) dari U.U. 1957/1.

²¹⁴⁾ L.N. 1957 no. 103; melaksanakan pasal 28 ayat (3) dari U.U. 1957/1.

²¹⁵⁾ Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Djanuari 1957 no. BPU 1/2/7, dimuat dalam T.L.N. no. 1141.

lalu mendjadi tiap-tiap 45.000 penduduk mempunjai seorang wakil, dengan minimum 30 dan maksimum 50 anggota. ²¹⁶⁾

Berdasarkan ketentuan jang baru itu, maka djumlah anggota D.P.R.D. Kotapradja Djakarta Raja oleh Pusat ditetapkan sebanjak 41 orang. ²¹⁷⁾

Setelah segala persiapan selesai, pada tanggal 22 Djuni 1957 dilangsungkanlah pemilihan anggota D.P.R.D. Kotapradja Djakarta Raja dalam mana terdapat 42 partai/organisasi jang turut mengemukakan tjalonnja. Sebagai hasilnja maka oknum-oknum jang akan duduk dalam D.P.R.D. pilihan rakjat jang pertama itu ialah:

- | | |
|--|---------------|
| 1. ABDULLAH SALIM | dari Masjumi; |
| 2. GAZALI SJAHLAN | dari Masjumi; |
| 3. MOH. JUNUS | dari Masjumi; |
| 4. NURDIN HARUN | dari Masjumi; |
| 5. H. RACHMATULLAH | dari Masjumi; |
| 6. MURTHADO AHMAD | dari Masjumi; |
| 7. NJ. H. BARINA | dari Masjumi; |
| 8. SJARBAINI TAJIB | dari Masjumi; |
| 9. H. HAMIDULLAH | dari Masjumi; |
| 10. SUDIRO | dari P.N.I.; |
| 11. SUPRANOTO | dari P.N.I.; |
| 12. SUTEDJO DIRDJOSUB-
ROTO | dari P.N.I.; |
| 13. MR. SUKARDJO | dari P.N.I.; |
| 14. AGUS SUNTARA | dari P.N.I.; |
| 15. NJ. AJU DJOKO ASMO | dari P.N.I.; |
| 16. NJ. SAMIDJAH SUGIARTO | dari P.N.I.; |
| 17. M. HUSIN | dari P.N.I.; |
| 18. S. UTARJO | dari P.K.I.; |
| 19. HASAN RAID | dari P.K.I.; |
| 20. SUMARDI | dari P.K.I.; |
| 21. SUDADI | dari P.K.I.; |

²¹⁶⁾ Dengan U.U. 1957/73 (L.N. 1957 no. 159), pasal 7 ayat (1) dari U.U. 1957/1 diubah lagi sehingga memuat ketentuan bahwa djumlah minimum anggota D.P.R.D. tingkat I adalah sama dengan djumlah tertinggi anggota D.P.R.D. dari daerah² tingkat II didalam wilajahnja, dan djumlah maksimum anggota D.P.R.D. dari daerah tingkat II ditetapkan 35 orang. Menurut analogi maka djumlah minimum anggota D.P.R.D. Kotapradja Djakarta Raja lalu mendjadi 35 orang.

²¹⁷⁾ Keputusan M.D.N. tanggal 20-5-1957 no. BPU. 15/11/10 (T.L.N. no. 1322).

- | | |
|--|-----------------------------|
| 22. NJ. CHADINAR BACHTA-
RUDDIN | dari P.K.I.; |
| 23. SALAM | dari P.K.I.; |
| 24. RIVAI APIN | dari P.K.I.; |
| 25. EDDIE ABDURACHMAN | dari P.K.I.; |
| 26. SAPI-IE | dari N.U.; |
| 27. MOH. ZAJADI AMIN | dari N.U.; |
| 28. HASAN BASRI | dari N.U.; |
| 29. NJ. DJUHRIANAH | dari N.U.; |
| 30. H. MOH. JASIN | dari N.U.; |
| 31. H. AJATULLAH SALEH | dari N.U.; |
| 32. BUJUNG SALEH | dari Baperki; |
| 33. DR. TAN ENG TIE | dari Baperki; |
| 34. ABDUL RASJID | dari P.S.I.I.; |
| 35. MR. J. PULUNGAN | dari Parkindo; |
| 36. T.A. MURAD | dari P.S.I.; |
| 37. G.M. PARERA | dari Partai Buruh; |
| 38. A. SADJURI | dari Partai Katholik; |
| 39. TB. MANSUR MA'MUN | dari Gerakan Pilihan Sunda; |
| 40. SEMPU MULJONO | dari P.P.P.R.I.; |
| 41. NJ. M. ANDREAS SASTRO-
HUSODO | dari Perwari. |

Pada tanggal 16 Agustus 1957 D.P.R.D. hasil pilihan rakjat tersebut diatas dilantik oleh Menteri Dalam Negeri **SANUSI HAR-DJADINATA**. Hanja Rivai Apin karena berhalangan pada hari tersebut, baru dilantik pada tanggal 23 September 1957 oleh Wali-kota Sudiro atas kuasa dari Menteri Dalam Negeri. ²¹⁸⁾

Pada tanggal 7 Oktober 1957 dilangsungkanlah rapat D.P.R.D. jang akan memilih Ketua dan Wakil ketua Dewan tersebut, para anggota D.P.D. dan Kepala Daerah. Sebagai hasilnja terpilihilah untuk pertama kali dalam sedjarah pemerintahan Kota Djakarta, Abdullah Salim sebagai Ketua dan Mr. J. Pulungan sebagai Wakil ketua Dewan. Kemudian sebagai anggota-anggota D.P.D. terpilihilah:

1. Sumardi;
2. Supranoto;

²¹⁸⁾ Kuasa diberikan dengan Kawat surat M.D.N. tanggal 30-8-1957 no. Des. 2/21/26.

3. Sapi-ie;
4. Gazali Sjahlan.

Dan achirnja sebagai Kepala Daerah jang pertama terbentuk dengan djalan pemilihan, terpilihilah Sudiro jang hingga saat itu masih mendjadi Walikota Kepala Daerah Djakarta Raja menurut tjorak lama. Dengan terpilihnja sebagai Kepala Daerah itu, kemudian atas permintaan sendiri Sudiro mengundurkan diri dari keanggotaannja dalam D.P.R.D. dan tempatnja lalu digantikan oleh kawan separtainja **MH. DAHRAM** sedjak tanggal 21 Nopember 1957. ²¹⁹⁾

Sesuai dengan prosedur jang diharuskan dalam Undang-undang 1957/juncto Peraturan Pemerintah 1957 no. 44, maka setelah dianggap memenuhi segala sjarat-sjaratnja, oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusannja tanggal 23 Desember 1957 no. 615/M pemilihan Kepala Daerah Kotapradja Djakarta Raja jang baru itu disahkan. ²²⁰⁾

Demikianlah hingga achir tahun 1957 dapat dikatakan selesai-lah sudah penjusunan aparatur pemerintahan Kotapradja Djakarta Raja menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan perundangan desentralisasi Indonesia jang baru.

Hingga achir tahun 1957 djumlah anggota D.P.D. (tidak termasuk Kepala Daerah) jang telah dipilh oleh D.P.R.D., sebagaimana ternjata dari uraian diatas ialah 4 orang, djumlah ini masih berdasarkan ketentuan jang lama (S.G.O.). Oleh D.P.R.D. djumlah itu dipandang tidak sesuai lagi dengan kedudukan Kotapradja Djakarta Raja sebagai daerah tingkat ke-I, oleh karena itu D.P.R.D. dengan resolusinja tanggal 14 Oktober 1957 no. B. 6/DPRD/57 lalu mendesak kepada Pemerintah Pusat agar djumlah anggota D.P.D. Kotapradja Djakarta Raja ditambah. ²²¹⁾

Mengenai seksi-seksi jang akan melantjarkan D.P.R.D. dalam mendjalankan tugas kewadjibannja, oleh Dewan tersebut pada tanggal 15 Oktober 1957 ditetapkan 4 buah, jaitu: ²²²⁾

Seksi A, bertugas dalam lapangan kesehatan, kepegawaian, perburuhan dan umum:

²¹⁹⁾ Keputusan D.P.R.D. Kotapradja Djakarta Raja tg. 21-11-1957 no. B. 10/DPRD 57.

²²⁰⁾ Pelantikan Sudiro sebagai Kepala Daerah Kotapradja Djakarta Raja baru terdjadi sesudahnja lampau tahun 1957, jaitu pada tanggal 27-1-1958.

²²¹⁾ Desakan itu kemudian d'kabulkan: dengan P.P. 1958 no. 17 (L.N. 1958 no 30, T.L.N. no. 1559) djumlah itu ditambah sehingga mendjadi 5 orang.

²²²⁾ Keputusan D.P.R.D. tanggal 15-10-1957 no. B 7/DPRD/57.

Seksi B tugasnja mengenai bidang perekonomian, keuangan, pertanian dan kehewanian;

Seksi C, tugasnja meliputi urusan pendidikan, agama dan sosial;

Seksi D, bertugas dalam lapangan pekerjaan umum.

Selain itu oleh D.P.R.D. dibentuk pula beberapa Panitia Khusus yang masing-masing diketuai oleh seorang anggota D.P.D. dengan tugas untuk meninjau lebih mendalam soal-soal yang pada dewasa ini merupakan masalah yang hangat dalam masyarakat Kotapradja Djakarta Raya. Djumlah panitia itu semuanya ada 4, jaitu: ²²³⁾

Panitia Khusus I, bertugas untuk mempelajari:

1. penjempurnaan aparatur pemerintahan Kotapradja, termasuk soal peremadjaan kepegawaian (pada waktu itu didalam lingkungan Kotapradja Djakarta Raya masalah peremadjaan kepegawaian sedang menjadi hangat-hangatnja);
2. soal kebersihan kota.

Panitia Khusus II, untuk meninjau masalah pemakaian tanah dan pembangunan rumah-rumah tanpa izin.

Panitia Khusus III, bertugas untuk menelaah:

1. sumber-sumber keuangan;
2. pedagang ketjil.

Panitia Khusus IV, untuk mempelajari masalah pendidikan dan kesosialan.

Mengenai hal-hal lainnja seperti perundang-undangan Kotapradja, aparatur kepegawaian Kotapradja, penjelenggaraan tugas pekerjaan dan lain-lainnja masih tetap berlangsung seperti sedia-kala.

Mendjelang akhir tahun 1957 jaitu pada tanggal 17 Desember 1957 keluarlah „*Undang-undang Keadaan Bahaja 1957*” yang sedikit banjak mempengaruhi djuga pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Djakarta. ²²⁴⁾ Sedjalan dengan keluarnja undang-undang tersebut, maka dengan keputusan Presiden tanggal 17 Desember 1957 no. 225 seluruh wilajah Negara R.I. dinjatakan dalam keadaan perang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-

²²³⁾ Keputusan D.P.R.D. tanggal 15 10-1957 no. B. 8/DPRD/57.

²²⁴⁾ U.U. 1957 no. 74: L.N. 1957 no. 160.T.L.N. no. 1485.

undang Keadaan Bahaja 1957 itu. Dalam keadaan perang itu maka Kepala Daerah dan para anggota D.P.D. Kotapradja Djakarta Raja berturut-turut mendjadi Wakil ketua dan anggota-anggota dari *Penguasa Perang Daerah Djakarta Raja*. Selanjutnja menurut pasal 43 ayat (1) dari „Undang-undang Keadaan Bahaja 1957”, peraturan-peraturan Kotapradja sebelumnya dapat d'undangkan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Penguasa Perang Daerah tersebut.

Demikianlah sedjarah pemerintahan Kota Djakarta sampai akhir tahun 1957.

P E N U T U P

Kota Djakarta sebagai daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri mempunyai riwayat pembentukan dan pertumbuhan jang tersendiri. Sebagai daerah swatantra itu, Kota Djakarta menempuh perdjalanannya sedjarah jang berbeda dengan jang ditempuh oleh daerah-daerah lain seumumnja.

Dalam perdjalanannya sedjarahnja, hingga kini daerah swatantra Djakarta telah mengalami dua kali perluasan wilayah. Dengan wilayahnja jang sekarang ini, maka Kotapradja Djakarta Raja mempunyai tjorak-tjorak spesifik jang tidak terdapat pada daerah-daerah swatantra lain. Pada satu pihak wilayah Kotapradja Djakarta Raja dicentrum merupakan daerah kekotaan (*stadsareaal*), tetapi dipihak lain mempunyai pula daerah-daerah pinggiran jang merupakan daerah pedusunan (*landelijk areaal*). Demikian pula disatu pihak wilayah Kotapradja Djakarta Raja merupakan satu kebulatan diatas daratan, dipihak lain mempunyai bagian-bagian berupa pulau-pulau jang terserak disana-sini ditengah lautan. Tjorak-tjorak wilayah jang demikian itu mempengaruhi pula penyelenggaraan pemerintahan jang harus didjalkan.

Menurut kedudukannya dalam peraturan perundangan desentralisasi jang terakhir, Kotapradja Djakarta Raja merupakan daerah tingkat ke-I jang langsung berada dibawah pengawasan pusat dan sedjajar dengan daerah-daerah tingkat-I lainnya (*propinsi*). Tetapi kalau daerah-daerah swatantra rekannya itu betul-betul berfungsi sebagai daerah tingkat teratas, jang penyelenggaraan pemerintahan didalam lingkungannya jang lebih ketjil dilakukan oleh kotapradja sepanjang mengenai daerah kekotaan dan oleh daerah tingkat II (*kabupaten*) sepanjang mengenai daerah jang bertjorak pedusunan, dan bahkan kelak oleh daerah tingkat ke-III (*desa* dan sebagainya) jang lebih ketjil lingkungannya, maka pada diri Kotapradja Djakarta Raja kita dapati perwujudan dari pada semua tjorak pemerintahan daerah itu. Pertama-tama sesuai dengan namanya, Kotapradja Djakarta Raja merupakan suatu pemerintahan kota, tetapi pemerintahan ini mendjalkan pula tugas kekuasaannya didaerah-daerah pinggiran jang (masih) merupakan pedusunan, djadi mempunyai pula fungsi sebagai sematjam kabupaten, dan bahkan dalam hubungannya

dengan penjelenggaraan pemerintahan dipulau-pulau jang terpenting, maka Kotapradja Djakarta Raja djuga dapat dianggap seolah-olah berfungsi sebagai daerah tingkat III jang berupa desa-desa.

Sebagai daerah swatantra jang sangat dekat dengan pusat sehingga segala pertumbuhan dan persoalan jang dihadapinja dapat diikuti dari dekat dengan seksama, maka Kotapradja Djakarta Raja dapat memberikan bahan-bahan jang sangat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan politik desentralisasi dan membina daerah-daerah swatantra diseluruh Indonesia, lebih-lebih djustru karena dalam diri Kotapradja itu sampai dewasa ini terdapat pertumpukan dari segala matjam tjorak dan fungsi seperti tersebut diatas.

Dalam segi otonomi, bagi Kotapradja Djakarta Raja sendiri persoalannja jang terpenting pada dewasa ini ialah bagaimana mengusahakan agar penjelenggaraan pemerintahan itu berlangsung dengan sebaik-baiknya diseluruh wilajahnja. Sampai kini terasa sekali bahwa pemerintahan daerah itu hanya berlangsung didaerah kekotaan sadja, sedang didaerah-daerah pinggiran dan pulau-pulau (termasuk wilayah Kotabaru Kebajoran) belum terasa pengaruh Pemerintah Daerah Kotapradja. Apabila penjelenggaraan pemerintahan daerah itu hendak (dan harus!) diintensipkan kesegnap peloksoek wilajahnja, maka perlu pula mendapat perhatian adanja perbedaan tjorak-tjorak wilayah seperti tersebut diatas, sehingga penjelenggaraan pemerintahan daerah itu tidak mendjadi kaku karenanja, misalnja padjak jang baik dipungut didaerah kekotaan, belum tentu tjotjok untuk daerah pinggiran, demikian pula peraturan tentang bangunan jang dapat mengatur perkembangan dalam daerah kekotaan dengan tepat, belum tentu pula dapat dilaksanakan disuatu pulau, dan sebagainya.

Dalam segi kehidupan masjarakatnja, kita dapati tjorak-tjorak jang lebih beranekawarna lagi. Dalam bidang perekonomian, disatu pihak Kota Djakarta merupakan daerah perdagangan, tetapi sekaligus merupakan pula daerah industri, kota bandar, daerah pertanian dan lain-lain; dalam lapangan politik, karena kedudukannya sebagai ibukota dari negara jang merdeka dan berdaulat, maka mendjadi pusat kegiatan politik baik nasional maupun internasional; dan masih banyak tjorak-tjorak lainnja sesuai dengan segi-segi dari suatu kehidupan kemasjarakatan jang kompleks itu. Dan sebagai manifestasi dari kekuatan-kekuatan jang terdapat dalam kehidupan masjarakat tersebut, maka terdapatlah seribu satu matjam masalah jang

dihadapkan kepada Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raja sebagai penguasa jang memegang pimpinan atas masjarakat itu, jaitu dari masalah urbanisasi, kesulitan perumahan, kongesti lalu-lintas sampai kepada masalah-masalah dalam bidang kesosialan jang pada umumnja dihadapi oleh kota-kota besar dimana-mana sesudah perang, disampingnja masalah-masalah jang khusus ditantangkan kepada Kotapradja Djakarta Raja seperti mengamuknja sidjago merah dimusim kemarau, timbulnja bandjir dimasa hujjan, selandjutnja dimana-mana kita lewat, mata kita menampak pemandangan-pemandangan jang mesum, misalnja bertimbunnja sampah lengkap dengan barisan alat jang selalu siap sedia menjebarkan penjakit, hidung kita mentjium bau busuk dari selokan-selokan jang tidak mengalir dengan lantjar karena tidak dipelihara dengan sepatutnja, kaki kita merasai djalan-djalan jang tidak terawat dengan sebaik-baiknya dan tanah-tanah betjek dilingkungan perkampungan jang belum dapat diatasi kalau hujjan turun. Belum lagi masalah-masalah lainnja seperti kurangnja pasar-pasar jang dapat menampung semua kegiatan dalam lalu-lintas barang sehingga orang tidak akan berdagang dipinggir-pinggir djalan jang menambah matjetnja lalu-lintas kendaraan; masalah kekurangan tanah untuk pekuburan; sedikitnja tempat-tempat rekreasi untuk memupuk rohani jang sehat dan memelihara djasmani jang kuat; kekurangan rumah-rumah sekolah untuk menampung generasi muda jang semakin haus akan pendidikan, dan lain-lainnja.

Terhadap kesemua masalah itu, soalnja bukan lagi dapat diatasi atau tidak, melainkan harus dapat dipetjahkan oleh aparatur Kotapradja Djakarta Raja jang merupakan instansi jang langsung bertanggungjawab atas urusan daerahnja itu. Dan pemetjahan itu tidak dapat hanja disandarkan kepada modal berupa „otonomi jang seluas-luasnja” jang pada achir-achir ini selalu dituntut oleh daerah-daerah.

Sampai dewasa ini tjita-tjita „Otonomi jang seluas-luasnja” agaknya merupakan mythos bagi setiap daerah, hingga seolah-olah hanja dengan hak, wewenang dan kekuasaan jang seluas-luasnja itu, semua persoalan dapat mendjadi beres. Padahal untuk kemandjuan sesuatu daerah dibutuhkan lebih dari pada itu, disampingnja hak otonomi lengkap dengan sumber-sumber keuangannja, terutama sekali dibutuhkan adanja aparatur pemerintahan jang sungguh-sungguh bekerdja dan lebih mementingkan kepentingan daerahnja

dari pada kepentingan golongannja, serta aparatur kepegawaian jang sehat, djudjur dan sungguh-sungguh mentjurahkan perhatian kepada tugas pekerdjaannja, sehingga dengan modal (kekuasaan maupun keuangan) jang minimal dapat diwujudkan hasil jang maksimal untuk kepentingan daerah. Apalah artinja hak, wewenang dan kekuasaan jang sebesar-besarnja serta sumber-sumber keuangan jang sebanjak-banjaknja kalau kesemua itu tidak dapat dipergunakan dengan setjara efisien dan sungguh-sungguh untuk kepentingan daerah berikut segenap warganja.

Kotapradja Djakarta Raja telah menempuh perdjalan sedjarahnja untuk masa jang lama; kalau dihitng dari mulai adanja penjelenggaraan otonomi jang berentjana dan berdasarkan peraturan perundangan desentralisasi jang teratur (tahun 1903), maka sekurang-kurangnya telah ditempuh perdjalan selama setengah abad. Setelah Negara kita merdeka, maka kewadajiban untuk merintis perdjalan sedjarah selandjutnja berada diatas bahu kita sendiri. Disinilah terletak tugas kewadajiban jang besar baik dari aparatur pemerintahan maupun aparatur kepegawaian Kotapradja Djakarta Raja untuk membina dan memajukan daerah Djakarta Raja. Dengan pelbagai kompleks masalahnja jang ditantangkan oleh sedjarah itu, maka sungguhlah berat tugas jang dipikul oleh D.P.R.D. dan D.P.D. Kotapradja apabila masalah-masalah tersebut hendak dihadapi dengan sungguh-sungguh. Sebagai wakil rakjat jang harus mewujudkan keinginan dalam masjarakat, maka aparatur pemerintahan Kotapradja berkewadajiban untuk dengan kesungguhan hati memperhatikan kepentingan-kepentingan umum sehingga segala tindakannja dalam menjelenggarakan pemerintahan daerah Kota Djakarta akan mendapat dukungan dari masjarakat. Dan bagi aparatur kepegawaian Kotapradja terletak kewadajiban untuk dengan sungguh-sungguh menunaikan tugasnja melaksanakan garis-garis jang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintahan itu.

Hanja dengan kesungguhan dan kemauan jang baik untuk membina daerah ini, baik pada pihak aparatur pemerintahan maupun aparatur kepegawaian itu, dapatlah Kotapradja Djakarta Raja mendekatkan rakjat kepada tjita-tjita kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masjarakat dan Negara hukum Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Mukaddimah U. U. D. S. Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

Katja :

KATA PENGANTAR DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA	III
PENDAHULUAN DARI PENJUSUN	V
BAB I : PEMBUKAAN	1
BAB II : SEDJARAH PEMBENTUKAN KOTA DJA- KARTA	4
BAB III : PEMERINTAHAN STAD BATAVIA	17
BAB IV : GEMEENTE BATAVIA	29
§ 1. Pendahuluan	29
§ 2. Pembentukan	32
§ 3. Pembagian-pembagian dalam wilajahnja	33
§ 4. Aparatur pemerintahan	36
§ 5. Aparatur kepegawaian	43
§ 6. Tugas dan wewenang	45
§ 7. Perundang-undangan	46
§ 8. K e u a n g a n	59
§ 9. L a m b a n g	61
BAB V : STADSGEMEENTE BATAVIA	62
§ 1. Riwayat pembentukan	62
§ 2. Status	63
§ 3. Susunan dan organisasi aparatur	65
§ 4. Tugas dan wewenang	72
§ 5. Perluasan wilajah	82
§ 6. Keuangan	84
BAB VI : DJAKARTA TOKUBETU SI	87
§ 1. Perundang-undangan desentralisasi Dje- pang	87
§ 2. Otonomi tokubetu si	89
§ 3. Tokubetu si sangikai	94
§ 4. Susunan organisasi tokubetu si	101
BAB VII : PEMERINTAHAN NASIONAL KOTA DJA- KARTA	105
§ 1. Pemindahan kekuasaan	105
§ 2. Pertumbuhan otonomi	107
§ 3. Pemerintahan rangkap	113

BAB VIII :	STADSGEMEENTE BATAVIA DALAM MASA PEMERINTAHAN PRE-FEDERAL	118
BAB IX :	KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA	131
<i>A. Zaman Republik Indonesia Serikat</i>		
§ 1.	Pembaharuan aparatur pemerintahan ...	131
§ 2.	Pembentukan Kotapradja Djakarta Raja.	136
<i>B. Zaman Republik Indonesia Kesatuan</i>		
§ 3.	Status	141
§ 4.	Pembagian wilajah	144
§ 5.	Kotabaru Kebajoran	148
§ 6.	Dewan Perwakilan Kota Sementara	151
§ 7.	Badan Pemerintahan Harian	155
§ 8.	Walikota	156
§ 9.	Pemerintah daerah Peralihan	160
§ 10.	Aparatur kepegawaian	165
§ 11.	Penjclenggaraan otonomi	168
§ 12.	Kuangan	176
§ 13.	Penetapan lambang dan hari lahir Kota Djakarta	177
<i>C. Masa sesudah mulai berlakunja „Un- dang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956” hingga achir tahun 1957</i>		
§ 14.	Sistim otonomi jang baru	179
§ 15.	Pembentukan pemerintah daerah jang baru	183
BAB X :	P E N U T U P	189

DAFTAR ISI.

— oOo —

Omslag, gambar-gambar dan lay-out dari
buku ini direntjanakan oleh Penjusun.



ENDANG - DJAKARTA

2044

2

3

HOME USE

4

5

6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

DUE AS STAMPED BELOW

REC. CIR DEC 4 '85

OCT 06 1992

OCT 08 1992

CIRCULATION

JAN 29 1964

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

FORM NO. DD6, 60m, 1/83

BERKELEY, CA 94720

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



8000790370

